

2025



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

(Sesuai dengan LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat
Nomor 23.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026
Tanggal 28 Mei 2026)

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang,
Telepon (022) 6654274, Faximile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id Cimahi, Jawa Barat 40153.



WALI KOTA CIMAHI

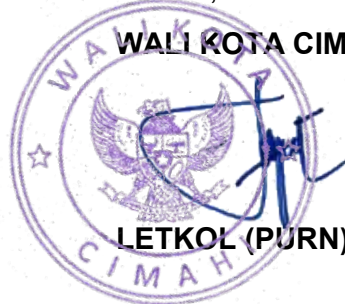
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Cimahi,

WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PU RN) NGATIYANA, S.A.P.



WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, 28 Mei 2026

Nomor : KU/191/BPKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Representasi
Manajemen**

Yth. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jalan Muhamad Toha No.164 Bandung.

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAP. Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada Informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami disajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Cimahi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Cimahi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a) Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b) Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.



WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PUK) NGATIYANA, S.A.P.

DAFTAR ISI

	Hal
Pernyataan Tanggung Jawab	
Surat Representasi Manajemen	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Arus Kas	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI	6
2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi	9
2.3 Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025	34
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
3.1 Kebijakan Akuntansi	54
3.2 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi	56
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	83
4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	83
4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	100
4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca	101
4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	141
4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	161
4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	166
BAB V PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	170
5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (<i>Subsequent Event</i>)	170
5.2 Profil Entitas	170
5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2025	172
5.4 Hubungan dengan DPRD, BPK serta Forkopimda	175
5.5 Pengaruh <i>Stakeholder</i> (pemegang kepentingan): DPRD	176

5.6	Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan	176
5.7	Alamat Kantor	177
BAB VI	PENUTUP	178

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2025	10
2.2 Indeks Gini Ratio	14
2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2025	15
2.4 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025	16
2.5 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025	17
2.6 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2025	18
2.7 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pengawasan dalam APBD Tahun Anggaran 2025	19
2.8 Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025	20
2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025	22
2.10 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD 2025 Ditetapkan 27 Desember 2024	24
2.11 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD Parsial 1 Ditetapkan 24 Maret 2025	24
2.12 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD Parsial 2 Ditetapkan 16 April 2025	26
2.13 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD Parsial 3 Ditetapkan 23 April 2025	28
2.14 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD Parsial 4 Ditetapkan 19 Mei 2025	29
2.15 Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025	31

Tabel		Hal
	APBD Perubahan Ditetapkan 24 Oktober 2025	
2.16	Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD Parsial 5 Ditetapkan 19 Desember 2025	33
2.17	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025	35
2.18	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	36
2.19	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025	42
2.20	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2025	43
2.21	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2025	43
2.22	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025	44
2.23	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025	45
2.24	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025	45
2.25	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025	46
2.26	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025	47
2.27	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025	48
2.28	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025	49
2.29	Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025	52
4.1	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025	85
4.2	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025	87
4.3	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025	87

Tabel		Hal
4.4	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025	88
4.5	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025	88
4.6	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025	89
4.7	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025	90
4.8	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025	90
4.9	Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025	90
4.10	Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025	91
4.11	Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025	92
4.12	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025	92
4.13	Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2025	92
4.14	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025	93
4.15	Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025	93
4.16	Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025	94
4.17	Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025	94
4.18	Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025	96
4.19	Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025	96
4.20	Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025	97
4.21	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025	97
4.22	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	98
4.23	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	98
4.24	Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	99
4.25	Surplus Tahun Anggaran 2025	99
4.26	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	99
4.27	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	100
4.28	Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025	100
4.29	Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025	101
4.30	Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025	101
4.31	Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025	101
4.32	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025	102

Tabel		Hal
4.33	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025	102
4.34	Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2025	103
4.35	Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2025	103
4.36	Rincian Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2025	103
4.37	Saldo Kas di BLUD Air Minum Tahun Anggaran 2025	103
4.38	Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2025	104
4.39	Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2025	104
4.40	Saldo Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2025	105
4.41.a.	Rincian Saldo Kas Dana BOK Tahun Anggaran 2025	105
4.41.b.	Rincian Selisih Jasa Giro	105
4.42	Saldo Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025	105
4.43	Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025	106
4.44	Rincian Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025	106
4.45	Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025	107
4.46	Rincian Potensi Denda Pajak Tahun Anggaran 2025	107
4.47	Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025	107
4.48	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025	108
4.49	Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025	108
4.50	Rincian Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025	108
4.51	Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025	108
4.52	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025	109
4.53	Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025	110
4.54	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025	111
4.55	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025	111
4.56	Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Belum Disalurkan Tahun Anggaran 2025	111
4.57	Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2025	112
4.58	Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025	112
4.59	Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025	112
4.60	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025	113
4.61	Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025	113
4.62	Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025	113

Tabel		Hal
4.63	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru Tahun Anggaran 2025	113
4.64	Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025	114
4.65	Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2025	114
4.66	Rincian Saldo Persediaan OPD Tahun Anggaran 2025	114
4.67	Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2025	115
4.68	Saldo Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025	116
4.69	Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025	117
4.70	Penyetoran Pokok Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025	117
4.71	Rincian Sisa Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025	117
4.72	Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025	118
4.73	Rincian Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025	118
4.74	Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk	118
4.75	Rincian Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	119
4.76	Rincian Sisa Modal yang Disertakan pada PD. Jati Mandiri	119
4.77	Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri	122
4.78	Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2025	123
4.79	Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025	123
4.80	Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025	125
4.81	Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025	126
4.82	Rincian Lahan Pinjam Pakai ke TNI	127
4.83	Rincian Lahan di Jalan Kapten Iskak	130
4.84	Data Lahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Yang Telah Proses BAST dan Pelepasan Hak melalui DPKP	133
4.85	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025	134
4.86	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025	134
4.87	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun Anggaran 2025	136
4.88	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025	136
4.89	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025	137
4.90	Rincian Saldo Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025	137
4.91	Rincian Aset Tidak Berwujud Berupa <i>Software</i> Tahun Anggaran 2025	138
4.92	Rincian Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025	139
4.93	Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025	139

Tabel		Hal
4.94	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2025	140
4.95	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2025	141
4.96	Saldo Ekuitas Tahun Anggaran 2025	141
4.97	Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2025	143
4.97.1.	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Tahun Anggaran 2025	144
4.98	Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2025	144
4.99	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2025	145
4.100	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2025	146
4.101	Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2025	146
4.102	Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2025	147
4.103	Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2025	147
4.104	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun Anggaran 2025	148
4.105	Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2025	148
4.106	Dana Alokasi Khusus – LO Tahun Anggaran 2025	148
4.107	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO Tahun Anggaran 2025	149
4.108	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2025	149
4.109	Bantuan Keuangan Provinsi - LO Tahun Anggaran 2025	149
4.110	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun Anggaran 2025	150
4.111	Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025	150
4.112	Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025	151
4.113	Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2025	153
4.114	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025	154
4.115	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025	155
4.116	Rincian Beban Bunga Tahun Anggaran 2025	155
4.117	Beban Subsidi Tahun Anggaran 2025	155
4.118	Beban Hibah Tahun Anggaran 2025	156
4.119	Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025	156
4.120	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025	156
4.121	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025	157
4.122	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025	159

Tabel		Hal
4.123	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025	159
4.124	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025	159
4.125	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025	160
4.126	Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2025	161
4.127	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025	162
4.128	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025	162
4.129	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025	163
4.130	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025	163
4.131	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025	163
4.132	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025	164
4.133	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025	164
4.134	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025	165
4.135	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggarna 2025	165
4.136	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025	165
4.137	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025	166
4.138	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025	166
5.1	Daftar SKPD Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2023	172
5.2	Alamat Kantor SKPD Kota Cimahi	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Indeks Pembangunan Manusia	11
2.2 PDRB Per Kapita	12
2.3 Angka Kemiskinan	12
2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	13
2.5 Angka Inflasi	15
5.1 Peta Administrasi Kota Cimahi	171

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025
Lampiran 2	Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Biaya Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Piutang Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025
Lampiran 8a	Rekapitulasi Laporan Aset Tetap BOS Tahun 2025
Lampiran 9	Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2025
Lampiran 11	Rekapitulasi Aset Lain Lain Tahun 2025
Lampiran 12	Utang Belanja Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan Dan Pembangunan (Retensi) Per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan Per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Rincian Utang KJP Dan KDN Per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Penjelasan Mutasi Penyesuaian Pendapatan LRA - Pendapatan LO Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025
Lampiran 17	Penjelasan Mutasi Penyesuaian Belanja – Beban Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025
Lampiran 18	Rincian Beban Jasa Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025
Lampiran 19	Rincian Perhitungan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



WALI KOTA CIMAHI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA CIMAHI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

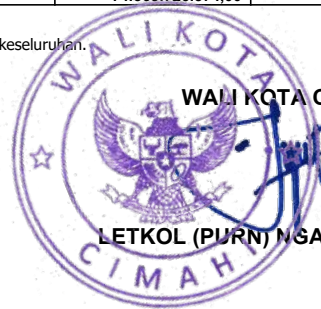
(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	328.135.093.659,00	330.345.321.948,00	100,67	243.250.803.117,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	214.084.090.285,00	231.412.239.830,00	108,09	236.662.096.668,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00	10.571.076.808,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26.691.656.600,00	8.221.418.603,00	30,80	10.262.921.274,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	578.392.000.964,00	579.460.140.801,00	100,18	500.746.897.867,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	69.209.701.900,00	63.861.538.300,00	92,27	61.573.212.000,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.966.305.000,00	31.966.305.000,00	100,00	42.714.540.000,00
	Dana Alokasi Umum	602.154.996.358,00	593.119.320.956,00	98,50	582.607.386.486,00
	Dana Alokasi Khusus	224.333.797.000,00	212.616.341.828,00	94,78	172.165.830.680,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	927.664.800.258,00	901.563.506.084,00	97,19	859.060.969.166,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.410.726.300,00	78.374.055.994,00	97,47	147.301.279.686,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14	22.545.807.714,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	89.149.486.300,00	87.037.815.994,00	97,63	169.847.087.400,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.031.920.138.558,00	1.003.707.174.078,00	97,27	1.067.353.649.566,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.610.312.139.522,00	1.583.167.314.879,00	98,31	1.568.100.547.433,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	718.830.100.267,78	684.943.855.376,00	95,29	701.183.655.297,00
	Belanja Barang	774.202.550.869,16	744.190.532.681,00	96,12	703.650.171.962,00
	Belanja Bunga	99.249.400,00	46.224.179,00	46,57	108.364.375,00
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	49.728.361.116,00	48.589.784.677,00	97,71	50.548.508.959,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.727.312.000,00	4.567.372.000,00	96,62	4.676.085.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.547.587.573.652,94	1.482.337.768.913,00	95,78	1.460.166.785.593,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	26.853.994.750,00	14.008.020.163,00	52,16	11.775.284.331,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	48.134.962.460,00	42.430.742.024,00	88,15	32.108.170.914,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	85.133.022.560,00	78.392.468.465,00	92,08	27.366.011.235,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.791.375.526,00	33.239.481.455,00	90,35	23.668.853.422,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.692.193.190,00	6.508.674.780,00	97,26	3.855.621.190,00
	Belanja Aset Lainnya	527.950.000,00	422.742.283,00	80,07	606.953.290,00
	Jumlah Belanja Modal	204.133.498.486,00	175.002.129.170,00	85,73	99.380.894.382,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78	310.089.709,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78	310.089.709,00
	JUMLAH BELANJA	1.762.365.524.440,94	1.662.426.274.003,00	94,33	1.559.857.769.684,00

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.762.365.524.440,94	1.662.426.274.003,00	94,33	1.559.857.769.684,00
	SURPLUS / DEFISIT	(152.053.384.918,94)	(79.258.959.124,00)	52,13	8.242.777.749,00
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	154.483.193.918,94	154.483.193.918,00	100,00	117.095.924.389,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.000.000.000,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	154.483.193.918,94	154.483.193.918,00	100,00	147.095.924.389,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	PEMBIAYAAN NETO	152.053.384.918,94	153.627.685.698,00	101,04	146.240.416.169,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	74.368.726.574,00		154.483.193.918,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


WALI KOTA CIMAHI,
LETKOL (PU RN) NGATIYANA, S.A.P.

**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN
LEBIH (LPSAL)**



WALI KOTA CIMAHI

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	154.483.193.918,00	117.095.924.389,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	154.483.193.918,00	117.095.924.389,00
3	Subtotal (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLpa/SiKPA)	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00
5	Subtotal (3+4)	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

NERACA



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	63.007.292.843,00	121.485.380.419,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	15.184.254.064,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas BLUD	9.809.367.044,00	16.443.339.930,00
	Kas Dana Bos	92.964.552,00	195.793.162,00
	Kas Dana BOK	1.058.848.612,00	1.174.426.343,00
	Kas Lainnya	63.280,00	33.600,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	155.174.496.858,00	147.009.168.358,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(92.873.399.548,08)	(85.182.151.801,79)
	Piutang Pajak Netto	62.301.097.309,93	61.827.016.556,21
	Piutang Retribusi	6.549.785.863,00	9.117.456.264,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.663.924.589,61)	(4.954.409.320,38)
	Piutang Retribusi Netto	1.885.861.273,39	4.163.046.943,63
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	60.102.000.000,00	22.759.049.000,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	727.599.116,00	5.985.683.110,00
	Belanja Dibayar Dimuka	6.484.071.795,14	3.671.482.424,39
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	571.420.491,80	193.105.807,80
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(170.919.168,80)	(193.105.807,80)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	400.501.323,00	-
	Piutang Lainnya	224.137.525,00	573.350.325,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(224.137.525,00)	(225.883.589,00)
	Piutang Lainnya Netto	-	347.466.736,00
	Persediaan	34.861.016.016,58	31.884.978.888,97
	Jumlah Aset Lancar	240.730.683.165,04	285.121.951.177,19
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	59.766.043,00	56.487.221,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	59.766.043,00	56.487.221,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.777.623.090,00	70.302.688.408,00
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	35.777.623.090,00	70.302.688.408,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	35.837.389.133,00	70.359.175.629,00
3	ASET TETAP		
	Tanah	1.377.879.384.841,60	1.122.587.821.649,60
	Peralatan dan Mesin	809.467.223.059,53	771.969.017.487,51
	Gedung dan Bangunan	1.037.035.877.473,12	972.875.826.375,88
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	992.403.378.356,41	954.743.997.013,49
	Aset Tetap Lainnya	77.686.922.764,32	76.761.220.852,47
	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.541.455.757,00	5.266.647.658,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.570.765.325.530,23)	(1.478.543.952.959,13)
	Jumlah Aset Tetap	2.730.248.916.721,75	2.425.660.578.077,82

No.	Uraian	2025	2024
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	726.821.218,84	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	14.443.830.909,90	13.468.087.309,90
	Akumulasi Amortisasi	(12.954.692.289,56)	(11.874.118.178,18)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.489.138.620,34	1.593.969.131,73
	Aset Lain-Lain	102.510.205.697,09	112.352.449.989,37
	Jumlah Aset Lainnya	108.074.510.536,28	117.294.764.121,09
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	3.114.891.499.556,06	2.898.436.469.005,10
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	63.280,00	33.600,00
	Utang Bunga	-	30.646.799,67
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.317.652.743,93	1.654.264.926,33
	Utang Belanja	30.934.014.130,96	1.761.954.671,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.113.815.688,00	24.722.226.707,50
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	34.365.545.842,89	29.024.634.924,50
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	(0,00)
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	(0,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN	34.365.545.842,89	29.024.634.924,50
III	EKUITAS		
	EKUITAS	3.080.525.953.713,17	2.869.411.834.080,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.114.891.499.556,06	2.898.436.469.005,10

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PURN) NGATYANA, S.A.P.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 338.510.650.448,00	Rp 252.095.533.110,00	Rp 86.415.117.338,00	34,28
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 228.674.474.019,00	Rp 223.576.786.882,00	Rp 5.097.687.137,00	2,28
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.481.160.420,00	Rp 10.571.076.808,00	Rp (1.089.916.388,00)	-10,31
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 8.705.939.556,39	Rp 11.425.547.886,10	Rp (2.719.608.329,71)	-23,80
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 585.372.224.443,39	Rp 497.668.944.686,10	Rp 87.703.279.757,29	17,62
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 89.454.840.300,00	Rp 62.531.095.000,00	Rp 26.923.745.300,00	43,06
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp 39.704.735.000,00	Rp 41.892.765.000,00	Rp (2.188.030.000,00)	-5,22
	Dana Alokasi Umum	Rp 593.119.320.956,00	Rp 582.607.386.486,00	Rp 10.511.934.470,00	1,80
	Dana Alokasi Khusus	Rp 212.616.341.828,00	Rp 172.165.830.680,00	Rp 40.450.511.148,00	23,50
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 934.895.238.084,00	Rp 859.197.077.166,00	Rp 75.698.160.918,00	8,81
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp 15.105.852.000,00	Rp 38.445.593.000,00	Rp (23.339.741.000,00)	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp 15.105.852.000,00	Rp 38.445.593.000,00	Rp (23.339.741.000,00)	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 73.115.972.000,00	Rp 147.671.320.248,00	Rp (74.555.348.248,00)	-50,49
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 8.663.760.000,00	Rp 22.545.807.714,00	Rp (13.882.047.714,00)	-61,57
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 81.779.732.000,00	Rp 170.217.127.962,00	Rp (88.437.395.962,00)	-51,96
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 1.031.780.822.084,00	Rp 1.067.859.798.128,00	Rp (36.078.976.044,00)	-3,38
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 71.833.563.669,30	Rp 21.520.894.889,24	Rp 50.312.668.780,06	233,79
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 71.833.563.669,30	Rp 21.520.894.889,24	Rp 50.312.668.780,06	233,79
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.688.986.610.196,69	Rp 1.587.049.637.703,34	Rp 101.936.972.493,35	6,42
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 684.946.606.296,00	Rp 701.183.764.197,00	Rp (16.237.157.901,00)	-2,32
	Beban Persediaan	Rp 264.452.702.134,14	Rp 234.284.115.699,72	Rp 30.168.586.434,42	12,88
	Beban Jasa	Rp 420.668.574.510,33	Rp 386.016.177.674,90	Rp 34.652.396.835,43	8,98
	Beban Pemeliharaan	Rp 25.889.198.559,00	Rp 26.280.862.152,00	Rp (391.663.593,00)	-1,49
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 40.201.981.129,00	Rp 57.930.588.005,00	Rp (17.728.606.876,00)	-30,60
	Beban Bunga	Rp 15.577.379,33	Rp 77.378.936,66	Rp (61.801.557,33)	-79,87
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
	Beban Hibah	Rp 49.320.566.347,00	Rp 50.548.508.959,00	Rp (1.227.942.612,00)	-2,43
	Beban Bantuan Sosial	Rp 4.714.517.000,00	Rp 4.676.085.000,00	Rp 38.432.000,00	0,82
	Beban Penyusutan	Rp 99.544.243.757,44	Rp 103.070.663.877,97	Rp (3.526.420.120,53)	-3,42
	Beban Amortisasi	Rp 1.080.574.111,38	Rp 1.100.030.158,28	Rp (19.456.046,90)	-1,77
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 7.870.028.320,11	Rp 14.478.070.635,79	Rp (6.608.042.315,68)	-45,64
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 1.598.704.569.543,73	Rp 1.579.646.245.296,32	Rp 19.058.324.247,41	1,21
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 90.282.040.652,96	Rp 7.403.392.407,02		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (33.220.999.334,41)	Rp 28.224.679.546,89	Rp (4.996.319.787,52)	17,70
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (33.220.999.334,41)	Rp (28.224.679.546,89)	Rp (4.996.319.787,52)	17,70
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 57.061.041.318,55	Rp (20.821.287.139,87)	Rp 77.882.328.458,42	-374,05
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp 418.718.650,00	Rp 137.050.642,00	Rp 281.668.008,00	205,52
	POS LUAR BIASA	Rp (418.718.650,00)	Rp (137.050.642,00)	Rp (281.668.008,00)	205,52
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 56.642.322.668,55	Rp (20.953.337.781,87)	Rp 77.600.660.450,42	-370,26

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



LAPORAN ARUS KAS

(LAK)



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	330.345.321.948,00	243.250.803.117,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	231.412.239.830,00	236.662.096.668,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.160.420,00	10.571.076.808,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.699.811.503,00	9.495.561.574,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	63.861.538.300,00	61.573.212.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.966.305.000,00	42.714.540.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	593.119.320.956,00	582.607.386.486,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	212.616.341.828,00	172.165.830.680,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	15.105.852.000,00	38.445.593.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78.374.055.994,00	147.301.279.686,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	8.663.760.000,00	22.545.807.714,00
16	Penerimaan Hibah	-	-
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Dana BOS	-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	1.582.645.707.779,00	1.567.333.187.733,00
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	684.943.855.376,00	701.183.655.297,00
23	Pembayaran Barang	744.190.532.681,00	703.650.171.962,00
24	Pembayaran Bunga	46.224.179,00	108.364.375,00
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Hibah	48.589.784.677,00	50.548.508.959,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	4.567.372.000,00	4.676.085.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
29	Pembayaran Tak Terduga	5.086.375.920,00	310.089.709,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
34	Jumlah Arus Keluar Kas	1.487.424.144.833,00	1.460.476.875.302,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	95.221.562.946,00	106.856.312.431,00
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	30.000.000.000,00
39	Penjualan atas Tanah		
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	461.349.100,00	767.359.700,00
41	Penjualan atas Gedung dan bangunan	60.258.000,00	
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
44	Penjualan atas Aset Lainnya		
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
47	Jumlah Arus Masuk Kas	521.607.100,00	30.767.359.700,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	14.008.020.163,00	11.775.284.331,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.430.742.024,00	32.108.170.914,00
52	Perolehan Gedung dan bangunan	78.392.468.465,00	27.366.011.235,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.239.481.455,00	23.668.853.422,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.508.674.780,00	3.855.621.190,00
55	Perolehan Aset Lainnya	422.742.283,00	606.953.290,00

No.	Uraian	2025	2024
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
58	Jumlah Arus Keluar Kas	175.002.129.170,00	99.380.894.382,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(174.480.522.070,00)	(68.613.534.682,00)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
71	Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir		
72	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
73	Arus Keluar Kas		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
84	Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	80.703.502.047,18	101.634.381.878,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	80.703.502.047,18	101.634.381.878,00
90	Arus Keluar kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	80.703.472.367,18	101.634.931.678,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	80.703.472.367,18	101.634.931.678,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	29.680,00	(549.800,00)
94	Kenaikan/Penurunan Kas	(80.114.437.664,00)	37.386.719.729,00
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	154.483.227.518,00	117.096.507.789,00
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	74.368.789.854,00	154.483.227.518,00
97	Saldo Akhir Kas	74.368.789.854,00	154.483.227.518,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
(LPE)**



WALI KOTA CIMAHI

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	2.869.411.834.080,60	2.879.666.554.396,81
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	56.642.322.668,55	(20.958.337.781,87)
3	RK PPKD	-	-
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(1.250.000,00)	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(367.712.012,92)	(15.532.585,63)
6	KOREKSI NILAI UTANG	125.798.950,00	(1,30)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(50,40)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(2.398.622.671,00)	2.932.000.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	0,01	(180.503.600,00)
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	- Penyisihan Piutang	493.198.007,59	(24.706.483,82)
	- Akumulasi Penyusutan	7.322.871.186,34	7.955.219.317,17
	- Akumulasi Amortisasi	-	36.552.240,63
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	149.297.513.504,00	588.629,00
14	EKUITAS AKHIR	3.080.525.953.713,17	2.869.411.834.080,60

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi selama 1 (satu) periode pelaporan dan bertujuan untuk :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 310);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 Nomor 315).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

- 2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 2.3. Kebijakan Keuangan dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Kebijakan Akuntansi
- 3.2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*subsequent event*)
 - 5.2 Profil Entitas
 - 5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2023
 - 5.4 Hubungan dengan DPRD, BPK serta Forkopimda
 - 5.5 Pengaruh *Stakeholder* (pemegang kepentingan): DPRD
 - 5.6 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan
 - 5.7 Alamat Kantor
- Bab VI Penutup

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAH

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah “Tahap Pencapaian”. Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.**

Pada tahap ini pemerintah daerah berupaya untuk memelihara kondisi masyarakat Cimahi yang sejahtera dengan mempertahankan keunggulan dan potensi daerah yang telah dimiliki masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023–2026 berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005- 2025 yaitu :

“ CIMAH KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari **Creative**

yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “**CIMAH KOTA CERDAS**” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD ditandai dengan :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023–2026 mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Aspek Ekonomi

Ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Aspek Pemerintahan

Ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Aspek Sosial Budaya

Ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5. Aspek lingkungan hidup

Ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

(*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya

saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima :Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : pertama, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; kedua, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta ketiga, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4(empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (impact). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun

nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi. Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana.

Penetapan ketujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023–2026 yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

2.2.1 Kebijakan Keuangan Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025

2.2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi dan Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2025

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyesuaian arah pembangunan antara pusat dan daerah. Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Perubahan, dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Ekonomi untuk tahun 2025, yaitu sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2025

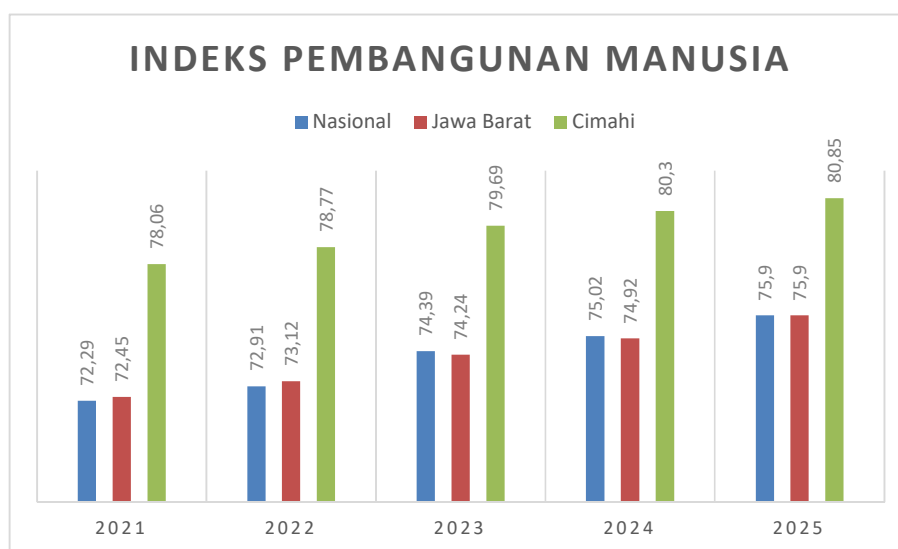
No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,37
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	59,6
3	Angka Kemiskinan	%	3,87-4,28
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,97
5	Indeks Gini	Poin	0,379-0,386

No	Indikator Makro	Satuan	Target
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2025, IPM Kota Cimahi telah mencapai angka 80,85, yang sudah mencapai kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2021-2025 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2025 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2025 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 80,85 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional berada di besaran yang sama yaitu 75,90. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada

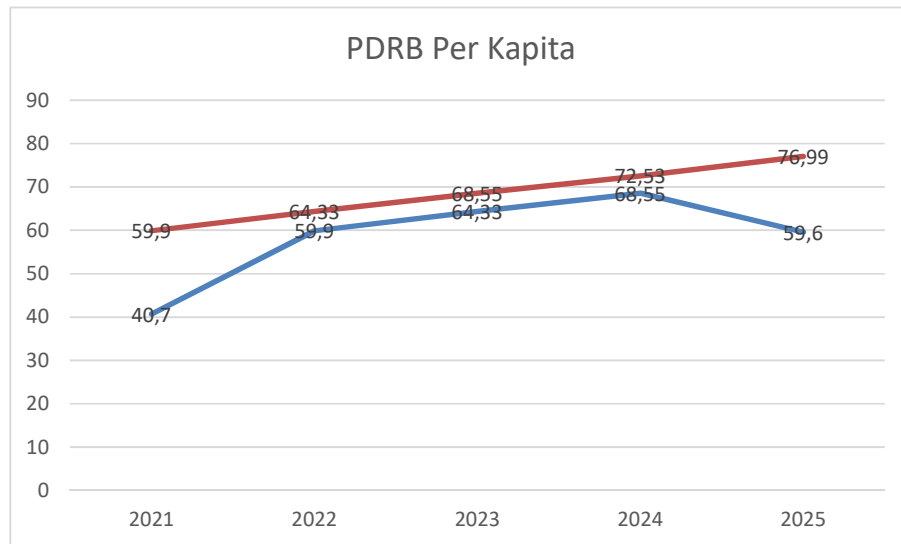


2.1 berikut ini :

Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka 2026, diolah.

b. PDRB Per Kapita

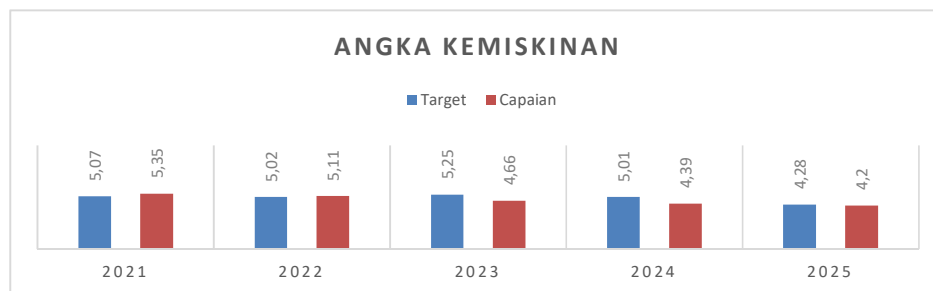
Pertumbuhan Ekonomi Cimahi tumbuh sebesar 5,33 persen pada tahun 2025. Menurut Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,77 persen. Diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,44 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 10,26 persen. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB di Kota Cimahi yaitu sebesar 43,58 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,36 persen. Sedangkan menurut Pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi ada pada Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 3,49 persen. Diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,59 persen. Lalu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,36 persen. Jika dilihat berdasarkan distribusinya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yakni 69,43 persen.



Gambar 2.2 PDRB Per Kapita
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

c. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren naik turun selama periode Tahun 2020-2025, sebagaimana tertera dalam Gambar 2.3 berikut :



Gambar 2.3 Angka Kemiskinan
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dimana baik jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena pandemi COVID 19 yang mengakibatkan dampak ekonomi dan dampak sosial dan kembali menguat pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.

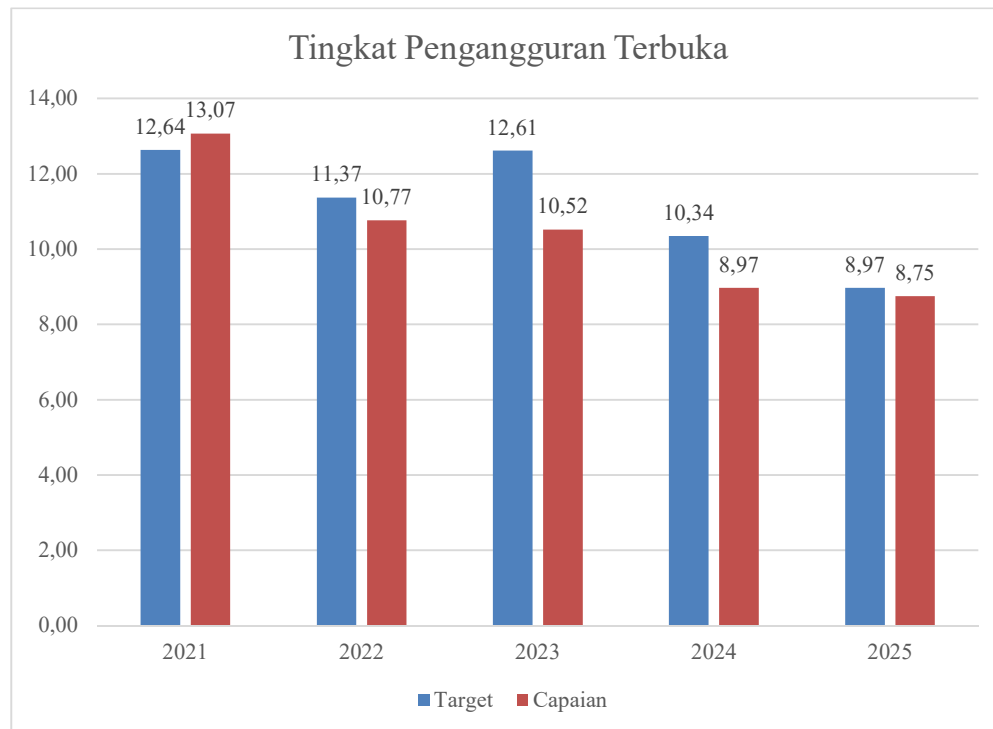
Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Tahun 2025 adalah:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran masyarakat seperti:
 - a. Bantuan SPP untuk Siswa PAUD, SD, dan SMP;
 - b. Bantuan Peralatan Sekolah untuk Siswa PAUD, SD, dan SMP;
 - c. Jaminan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - d. Operasi Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah;
 - e. Pelaksanaan Program RASTRADA;

- f. Optimalisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat,
 - a. Melaksanakan Pelatihan dan Penempatan Berbasis Kompetensi;
 - b. Melaksanakan Skillset;
 - c. Optimalisasi Program OPOR (One Product One RW);
 - d. Optimalisasi Program Padat Karya.
3. Penurunan Kantong Kemiskinan;
 - a. Survey Penerima Rutilahu;
 - b. Sosialisasi Penerima Bantuan Rutilahu;
 - c. Pembangunan Infrastruktur Penerima Rutilahu + Banprov;
4. Peningkatan Tata Kelola Kemiskinan.
 - a. Verval Data Kemiskinan;
 - b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
 - c. Monev Rencana Aksi Daerah.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka pengangguran di Kota Cimahi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Lonjakan pengangguran di tahun 2021 (13,07%) adalah dampak langsung dari pandemi COVID-19. Namun, seiring berjalannya waktu, TPT berhasil ditekan hingga menyentuh angka single digit yaitu 8,97% pada tahun 2024 dan berhasil diturunkan kembali di Tahun 2025 menjadi 8,75% seperti terdapat dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan TPT selama Tahun 2025 adalah dengan :

1. Melakukan Kegiatan Skill Set (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Terbaik);

2. Penempatan pencari kerja melalui SIDAKEP TRI, Pelatihan Non Skill Set, LPK, BKK, CPMI;
3. Melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
4. Melakukan Pelayanan AK/1 (Angkatan Kerja 1/ Kartu Kuning) kepada Pencari Kerja;
5. Melakukan Sosialisasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia);
6. Melakukan Kegiatan Job Canvassing (Pendataan Kesempatan Kerja);
7. Melakukan Pembinaan BKK (Bursa Kerja Khusus).

e. *Gini Ratio* dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan, kinerja makroekonomi Kota Cimahi selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang **tangguh dan berkualitas**. Walaupun Kota Cimahi sempat bergelut dengan tantangan fluktuasi ketimpangan sosial dan perlambatan target pertumbuhan di pertengahan periode (2023-2024), tahun 2025 ditutup dengan pencapaian yang luar biasa. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi berhasil melampaui target, sementara pada saat yang bersamaan tingkat ketimpangan (Indeks Gini) berhasil ditekan ke titik terendahnya. Hal ini membuktikan bahwa di akhir periode, pertumbuhan ekonomi di Cimahi tidak hanya bertambah besar, tetapi juga semakin inklusif dan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakatnya.

Tabel 2.2 Indeks *Gini Ratio*

Tahun	Indeks <i>Gini</i>		LPE	
	Target	Capaian	Target (%)	Capaian (%)
2021	0,39	0,42	3,69	4,19
2022	0,38	0,41	5,11	5,92
2023	0,409	0,39	5,45	5,19
2024	0,406	0,421	5,95	5,26
2025	0,406	0,365	5,26	5,33

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE):

- Perekonomian Kota Cimahi menunjukkan performa yang sangat kuat pada awal periode. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian LPE (4,19% dan 5,92%) berhasil melampaui target yang ditetapkan (3,69% dan 5,11%).
- Tahun 2022 menjadi puncak laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun tersebut.
- Sempat terjadi sedikit perlambatan pada tahun 2023 (5,19%) dan 2024 (5,26%), di mana capaian meleset dari target pemerintah yang dipatok cukup ambisius.
- Namun, pada tahun 2025, pertumbuhan kembali menunjukkan resiliensi di angka 5,33% dan kembali berhasil melampaui target yang disesuaikan menjadi 5,26%.

Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan):

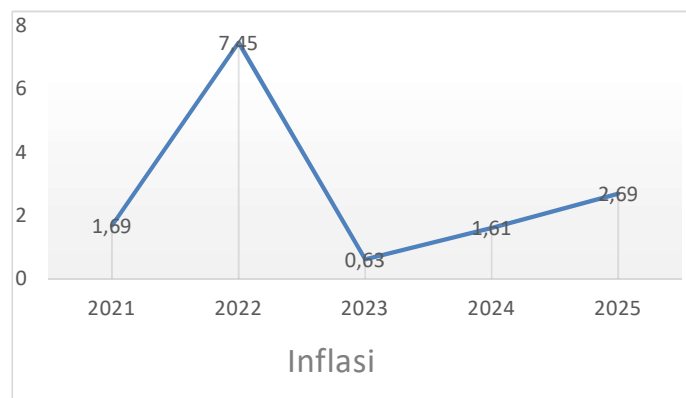
- Pada tahun 2021, 2022, dan 2024, capaian Indeks Gini meleset dari target, di mana angka capaian lebih tinggi dari batas target yang diharapkan. Ketimpangan tertinggi terjadi di tahun 2024 dengan capaian 0,421.
- Meski demikian, terdapat perbaikan di tahun 2023 (capaian 0,39 dari target 0,409), dan performa paling optimal berhasil diraih pada tahun 2025. Capaian Indeks Gini tahun 2025 turun drastis ke angka 0,365, jauh melampaui target 0,406 yang berarti distribusi pendapatan masyarakat menjadi jauh lebih merata.

f. Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Terjadinya inflasi diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan arus masuk dan keluar uang maupun barang sehingga inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat dan investasi menurun sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Cimahi **tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung**, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Berdasarkan data BPS dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025, pada Tahun 2025 angka inflasi Kota Bandung yang menjadi acuan nilai inflasi Kota Cimahi adalah sebesar 1,61%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di Tahun 2022 merupakan nilai tertinggi sebagaimana terdapat dalam Gambar 2.5. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi *Covid-19* di tahun 2020 dilanjutkan dengan pengaruh perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan inflasi untuk perekonomian Dunia dan Nasional mendorong laju inflasi di Jawa Barat, Kota Bandung dan juga di Kota Cimahi.



Gambar 2.5 Angka Inflasi
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan dampak inflasi selama Tahun 2025 adalah dengan :

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
2. Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah;
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
4. Pencanangan gerakan menanam;
5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor;
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
8. Memberikan Bantuan transportasi dari APBD.

g. Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur indikator makro ekonomi, maka realisasi/pencapaian Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,37	80,85
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	59,6	76,99
3	Angka Kemiskinan	%	3,87-4,28	4,2
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,97	8,75
5	Indeks Gini	Poin	0,379-0,386	0,365
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,33
7	Inflasi	%	1,61	2,69

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

2.2.2 Kebijakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 (*Mandatory Spending*)

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan menganggarkan fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Anggaran fungsi pendidikan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	2025	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	Rp413.282.820.826,00	Rp377.909.784.746,00
	1 Belanja Operasi	Rp383.605.662.212,00	Rp350.486.156.138,00
	a) belanja pegawai	Rp281.597.849.606,00	Rp246.765.125.440,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp73.011.428.990,00	Rp75.987.325.164,00
	c) belanja hibah	Rp24.269.071.616,00	Rp23.313.900.000,00
	d) belanja bantuan sosial	Rp4.727.312.000,00	Rp4.419.805.534,00
	2 Belanja Modal	Rp29.677.158.614,00	Rp27.423.628.608,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	Rp2.985.669.850,00	Rp1.928.595.764,00
	1 Belanja Operasi	Rp2.767.449.850,00	Rp1.771.103.764,00
	a) belanja pegawai	-	-
	b) belanja barang dan jasa	Rp2.567.449.850,00	Rp1.571.103.764,00
	c) belanja hibah	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	-	-
	2 Belanja Modal	Rp218.220.000,00	Rp157.492.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	Rp1.272.494.600,00	Rp835.378.600,00

No	Komponen Perhitungan	2025	2024
	1) Belanja Operasi	Rp951.744.600,00	Rp524.931.400,00
	a) belanja pegawai		-
	b) belanja barang dan jasa	Rp951.744.600,00	Rp524.931.400,00
	c) belanja hibah		-
	d) belanja bantuan sosial		-
	2) Belanja Modal	Rp320.750.000,00	Rp310.447.200,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp20.717.032.400,00	Rp28.118.405.955,00
	1) Belanja Operasi	Rp17.199.692.400,00	Rp21.133.483.185,00
	a) belanja pegawai		Rp4.483.994.121,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp5.849.692.400,00	Rp11.049.489.064,00
	c) belanja hibah	Rp11.350.000.000,00	Rp5.600.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial		-
	2) Belanja Modal	Rp3.517.340.000,00	Rp6.984.922.770,00
	e. Belanja Bidang Kearsipan dan Statistik	Rp25.229.700,00	-
	1) Belanja Operasi	Rp25.229.700,00	-
	a) belanja pegawai	-	-
	b) belanja barang dan jasa	Rp25.229.700,00	-
	c) belanja hibah	-	-
	d) belanja bantuan sosial	-	-
	f. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Antara Lain	Rp18.559.352.122,00	-
	1) Belanja Operasi	Rp18.292.508.122,00	-
	a) belanja pegawai	-	-
	b) belanja barang dan jasa	Rp18.292.508.122,00	-
	c) belanja hibah	-	-
	d) belanja bantuan sosial	-	-
	2) Belanja Modal	Rp266.844.000,00	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp456.842.599.498,00	Rp408.792.165.065,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp1.762.365.524.440,94	Rp1.615.121.561.613,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,92	25,31%

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10,00 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Fungsi Kesehatan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2025 adalah seperti terdapat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	2025	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	Rp430.444.629.934,00	Rp357.582.079.981,00
	Belanja Operasi	Rp378.689.533.336,00	Rp343.328.231.868,00
	a) belanja pegawai	Rp127.117.446.219,00	Rp158.731.694.891,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp251.222.087.117,00	Rp184.096.536.977,00
	c) belanja hibah	Rp350.000.000,00	Rp500.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	Rp0,00	Rp0,00
	2) Belanja Modal	Rp51.755.096.598,00	Rp14.253.848.113,00

No	Komponen Perhitungan	2025	2024
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp430.444.629.934,00	Rp357.582.079.981,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp1.762.365.524.440,94	Rp1.624.155.367.727,00
4.	Gaji ASN	Rp364.777.745.878,86	Rp319.643.672.499,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp1.397.587.778.562,08	Rp1.304.511.695.228,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	30,80%	27,41%

3. Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum dapat mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur dalam APBD
Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	2025	2024
1	Total Belanja Daerah	Rp1.762.365.524.440,94	Rp1.647.294.131.024,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	-	
	a. belanja bagi hasil.	-	Rp.153.164.274.548,00
	b.bantuan keuangan.	-	Rp.36.893.142.135,00
	Jumlah (a+b)	-	Rp.190.057.416.683,00
3	Selisih (1-2)	Rp1.762.365.524.440,94	Rp.1.457.236.714.341,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% X Selisih)	Rp704.946.209.776,38	Rp.582.894.685.736,40
No	Komponen Perhitungan	2025	2024
1	a) Belanja Operasi	Rp467.806.896.980,16	-
	1) belanja pegawai	Rp21.611.739.866,00	-
	2) belanja barang dan jasa	Rp446.195.157.114,16	-
	b) Belanja Modal	Rp190.233.665.943,00	Rp.115.394.810.160,00
	1) Tanah	Rp26.853.994.750,00	Rp.13.641.159.800,00
	2) Peralatan dan Mesin	Rp43.608.611.841,00	Rp.40.734.719.240,00
	3) Bangunan dan Gedung	Rp82.374.776.471,00	Rp.26.517.424.646,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	Rp36.710.865.526,00	Rp.29.845.829.526,00
	5) Aset tetap lainnya	Rp352.417.355,00	Rp.3.880.356.750,00
	6) Aset lainnya	Rp333.000.000,00	Rp.775.320.198,00
	c) Belanja pemeliharaan	-	Rp.71.057.888.400,00
2	a) Belanja Hibah	Rp10.099.902.000,00	Rp.14.085.860.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan	-	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp668.140.464.923,16	Rp.200.538.558.560,00
4	% Belanja Infrastruktur Daerah	94.78%	34,40%

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program,kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima

persen) dari total belanja daerah. Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2005 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan dalam APBD Tahun Anggaran 2025

No.	Komponen perhitungan	2025	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja pada Inspektorat	Rp16.094.342.201,00	Rp12.921.784.648,00
	1) Belanja Operasi	Rp15.632.463.201,00	Rp13.220.068.089,00
	a) Belanja Pegawai	Rp10.551.139.801,00	Rp6.647.502.024,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp5.081.323.400,00	Rp6.068.128.624,00
	c) Belanja Hibah	-	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	Rp461.879.000,00	Rp206.154.000,00
2.	Alokasi APIP	Rp16.094.342.201,00	Rp12.921.784.648,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp1.762.365.524.440,94	Rp1.647.294.131.024,00
4.	Rasio APIP	0,91%	0,78%

2.2.3 Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025

Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kemudian mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Di samping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, Gubernur, Bupati/Wali Kota memiliki tanggung jawab serta otoritas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terhadap perubahan anggaran APBD.

Di Tahun 2025 Pemerintah Kota Cimahi mengalami realokasi APBD sehingga harus melakukan perubahan perda/perwal dengan rincian seperti terdapat dalam Tabel 2.8 dengan rincian perubahan mata anggaran sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.9.

**Tabel 2.8 Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD
Tahun Anggaran 2025**

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
		NOMOR		
1	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 7 Tahun 2024	27 Desember 2024	
2	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 28 Tahun 2024	27 Desember 2024	
3	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 6 Tahun 2025	24 Maret 2025	1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025
4	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 11 Tahun 2025	16 April 2025	adanya kondisi penumpukan sampah di Kota Cimahi serta terbatasnya kouta pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sarimukti yang menyebabkan keadaan darurat sampah, diperlukan anggaran penanganan sampah.
5	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 12 Tahun 2025	23 April 2025	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp8.663.760.000,00 untuk Jaminan Kesehatan bagi PBPu dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah)

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
		NOMOR		
6	Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Nomor 18 Tahun 2025	19 Mei 2025	terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kota Cimahi akan memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta adanya koreksi atas alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
7	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 5 Tahun 2025	24 Oktober 2025	
8	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 45 Tahun 2025	24 Oktober 2025	
9	Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Nomor 52 Tahun 2025	19 Desember 2025	Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis BOP Pertanian Tahun 2025. Adanya kemendesakan dari Dinas Kesehatan untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta JKN BPBU dan BP yang terdaftar oleh Pemerintah Daerah, serta dari Dinas Pendidikan untuk pembayarana honorarium PPPK Paruh Waktu.

**Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi
terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		APBD 2025	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	PARSIAL 4	P-APBD 2025	PARSIAL 5
		(27 Desember 2024)	(24 Maret 2025)	(16 APRIL 2025)	(23 April 2025)	(19 Mei 2025)	(24 Oktober 2025)	(19 Desember 2025)
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	578.392.000.964,00	578.392.000.964,00
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	328.135.093.659,00	328.135.093.659,00
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	214.084.090.285,00	214.084.090.285,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	26.691.656.600,00	26.691.656.600,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00	989.401.783.926,00	989.401.783.926,00	998.065.543.926,00	998.065.543.926,00	1.023.853.015.102,00	1.031.920.138.558,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00	921.924.037.900,00	921.924.037.900,00	921.924.037.900,00	921.924.037.900,00	934.703.528.802,00	942.770.652.258,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00	67.477.746.026,00	67.477.746.026,00	76.141.506.026,00	76.141.506.026,00	89.149.486.300,00	89.149.486.300,00
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00	1.554.823.586.757,00	1.554.823.586.757,00	1.563.487.346.757,00	1.563.487.346.757,00	1.602.245.016.066,00	1.610.312.139.522,00
5	BELANJA							
5.1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00	1.472.784.081.769,00	1.473.021.759.769,00	1.481.685.519.769,00	1.481.917.914.769,00	1.539.079.182.196,94	1.547.587.573.652,94
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84	738.153.046.101,84	738.153.046.101,84	738.153.046.101,84	738.153.046.101,84	710.762.976.811,78	718.830.100.267,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16	684.355.066.167,16	684.592.744.167,16	693.256.504.167,16	693.488.899.167,16	773.761.282.869,16	774.202.550.869,16
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	99.249.400,00	99.249.400,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	49.728.361.116,00	49.728.361.116,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	4.727.312.000,00	4.727.312.000,00
5.2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00	190.425.793.956,00	190.425.793.956,00	190.425.793.956,00	190.425.793.956,00	204.133.498.486,00	204.133.498.486,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00	20.434.293.410,00	20.434.293.410,00	20.434.293.410,00	20.434.293.410,00	26.853.994.750,00	26.853.994.750,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00	45.008.424.796,00	45.008.424.796,00	45.008.424.796,00	45.008.424.796,00	48.134.962.460,00	48.134.962.460,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00	89.339.129.065,00	89.339.129.065,00	89.339.129.065,00	89.339.129.065,00	85.133.022.560,00	85.133.022.560,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00	31.276.739.935,00	31.276.739.935,00	31.276.739.935,00	31.276.739.935,00	36.791.375.526,00	36.791.375.526,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00	3.804.206.750,00	3.804.206.750,00	3.804.206.750,00	3.804.206.750,00	6.692.193.190,00	6.692.193.190,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00	563.000.000,00	563.000.000,00	563.000.000,00	563.000.000,00	527.950.000,00	527.950.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00	11.983.807.302,00	11.746.129.302,00	11.746.129.302,00	11.513.734.302,00	11.085.720.302,00	10.644.452.302,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		APBD 2025	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	PARSIAL 4	P-APBD 2025	PARSIAL 5
		(27 Desember 2024)	(24 Maret 2025)	(16 APRIL 2025)	(23 April 2025)	(19 Mei 2025)	(24 Oktober 2025)	(19 Desember 2025)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00	11.983.807.302,00	11.746.129.302,00	11.746.129.302,00	11.513.734.302,00	11.085.720.302,00	10.644.452.302,00
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00	1.675.193.683.027,00	1.675.193.683.027,00	1.683.857.443.027,00	1.683.857.443.027,00	1.754.298.400.984,94	1.762.365.524.440,94
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	(152.053.384.918,94)	(152.053.384.918,94)
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	154.483.193.918,94	154.483.193.918,94
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	154.483.193.918,94	154.483.193.918,94
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	154.483.193.918,94	154.483.193.918,94
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	152.053.384.918,94	152.053.384.918,94
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkemauan	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.10 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 (APBD 2025 Ditetapkan 27 Desember 2024)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
		APBD 2025
		(27 Desember 2024)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Tabel 2.11 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025 APBD Parsial 1 Ditetapkan 24 Maret 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 1	
		(27 Desember 2024)	(24 Maret 2025)	
4	PENDAPATAN DAERAH			

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 1	
		(27 Desember 2024)	(24 Maret 2025)	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00	989.401.783.926,00	(1.569.849.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00	921.924.037.900,00	(1.569.849.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00	67.477.746.026,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00	1.554.823.586.757,00	(1.569.849.000,00)
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00	1.472.784.081.769,00	(23.132.441.513,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84	738.153.046.101,84	6.729.936.932,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16	684.355.066.167,16	(29.862.378.445,00)
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00	175.000.000,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5,2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00	190.425.793.956,00	21.938.551.144,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00	20.434.293.410,00	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00	45.008.424.796,00	(757.345.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00	89.339.129.065,00	14.786.541.964,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00	31.276.739.935,00	8.047.354.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00	3.804.206.750,00	(228.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00	563.000.000,00	(10.000.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00	11.983.807.302,00	(375.958.631,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00	11.983.807.302,00	(375.958.631,00)
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00	1.675.193.683.027,00	(1.569.849.000,00)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 1	
		(27 Desember 2024)	(24 Maret 2025)	
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	-
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Tabel 2.12 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025
APBD Parsial 2 Ditetapkan 16 April 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 2	
		(27 Desember 2024)	(16 APRIL 2025)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00	989.401.783.926,00	(1.569.849.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00	921.924.037.900,00	(1.569.849.000,00)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 2	
		(27 Desember 2024)	(16 APRIL 2025)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00	67.477.746.026,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00	1.554.823.586.757,00	(1.569.849.000,00)
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00	1.473.021.759.769,00	(22.894.763.513,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84	738.153.046.101,84	6.729.936.932,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16	684.592.744.167,16	(29.624.700.445,00)
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00	175.000.000,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5,2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00	190.425.793.956,00	21.938.551.144,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00	20.434.293.410,00	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00	45.008.424.796,00	(757.345.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00	89.339.129.065,00	14.786.541.964,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00	31.276.739.935,00	8.047.354.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00	3.804.206.750,00	(228.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00	563.000.000,00	(10.000.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00	11.746.129.302,00	(613.636.631,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00	11.746.129.302,00	(613.636.631,00)
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00	1.675.193.683.027,00	(1.569.849.000,00)
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	-
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Tabel 2.13 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada
Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025
APBD Parsial 3 Ditetapkan 23 April 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 3	
		(27 Desember 2024)	(23 April 2025)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00	998.065.543.926,00	7.093.911.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00	921.924.037.900,00	(1.569.849.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00	76.141.506.026,00	8.663.760.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00	1.563.487.346.757,00	7.093.911.000,00
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00	1.481.685.519.769,00	(14.231.003.513,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84	738.153.046.101,84	6.729.936.932,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16	693.256.504.167,16	(20.960.940.445,00)
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00	175.000.000,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5,2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00	190.425.793.956,00	21.938.551.144,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00	20.434.293.410,00	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00	45.008.424.796,00	(757.345.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00	89.339.129.065,00	14.786.541.964,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00	31.276.739.935,00	8.047.354.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00	3.804.206.750,00	(228.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00	563.000.000,00	(10.000.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00	11.746.129.302,00	(613.636.631,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00	11.746.129.302,00	(613.636.631,00)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 3	
		(27 Desember 2024)	(23 April 2025)	
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00	1.683.857.443.027,00	7.093.911.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	-
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Tabel 2.14 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025
APBD Parsial 4 Ditetapkan 19 Mei 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 4	
		(27 Desember 2024)	(19 Mei 2025)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00	565.421.802.831,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00	322.135.093.659,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00	189.481.122.785,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00	42.177.957.978,00	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00	998.065.543.926,00	7.093.911.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00	921.924.037.900,00	(1.569.849.000,00)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 4	
		(27 Desember 2024)	(19 Mei 2025)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00	76.141.506.026,00	8.663.760.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00	1.563.487.346.757,00	7.093.911.000,00
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00	1.481.917.914.769,00	(13.998.608.513,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84	738.153.046.101,84	6.729.936.932,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16	693.488.899.167,16	(20.728.545.445,00)
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00	175.000.000,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00	49.500.969.500,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5,2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00	190.425.793.956,00	21.938.551.144,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00	20.434.293.410,00	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00	45.008.424.796,00	(757.345.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00	89.339.129.065,00	14.786.541.964,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00	31.276.739.935,00	8.047.354.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00	3.804.206.750,00	(228.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00	563.000.000,00	(10.000.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00	11.513.734.302,00	(846.031.631,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00	11.513.734.302,00	(846.031.631,00)
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00	1.683.857.443.027,00	7.093.911.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)	(120.370.096.270,00)	-
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00	122.799.905.270,00	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 4	
		(27 Desember 2024)	(19 Mei 2025)	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00	120.370.096.270,00	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Tabel 2.15 Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025
APBD Perubahan Ditetapkan 24 Oktober 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	P-APBD 2025	
		(27 Desember 2024)	(24 Oktober 2025)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.421.802.831,00	578.392.000.964,00	12.970.198.133,00
4.1.01	Pajak Daerah	322.135.093.659,00	328.135.093.659,00	6.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	189.481.122.785,00	214.084.090.285,00	24.602.967.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	9.481.160.420,00	(2.146.467.989,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.177.957.978,00	26.691.656.600,00	(15.486.301.378,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	990.971.632.926,00	1.023.853.015.102,00	32.881.382.176,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.493.886.900,00	934.703.528.802,00	11.209.641.902,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.477.746.026,00	89.149.486.300,00	21.671.740.274,00
	Jumlah Pendapatan	1.556.393.435.757,00	1.602.245.016.066,00	45.851.580.309,00
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.495.916.523.282,00	1.539.079.182.196,94	43.162.658.914,94
5.1.01	Belanja Pegawai	731.423.109.169,84	710.762.976.811,78	(20.660.132.358,06)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.217.444.612,16	773.761.282.869,16	59.543.838.257,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	P-APBD 2025	
		(27 Desember 2024)	(24 Oktober 2025)	
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00	99.249.400,00	(75.750.600,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.500.969.500,00	49.728.361.116,00	227.391.616,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	4.727.312.000,00	4.127.312.000,00
5,2	BELANJA MODAL	168.487.242.812,00	204.133.498.486,00	35.646.255.674,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.334.293.410,00	26.853.994.750,00	6.519.701.340,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.765.769.796,00	48.134.962.460,00	2.369.192.664,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.552.587.101,00	85.133.022.560,00	10.580.435.459,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.229.385.755,00	36.791.375.526,00	13.561.989.771,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.032.206.750,00	6.692.193.190,00	2.659.986.440,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00	527.950.000,00	(45.050.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.359.765.933,00	11.085.720.302,00	(1.274.045.631,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.359.765.933,00	11.085.720.302,00	(1.274.045.631,00)
	Jumlah Belanja	1.676.763.532.027,00	1.754.298.400.984,94	77.534.868.957,94
	Total Surplus/(Defisit)	(120.370.096.270,00)	(152.053.384.918,94)	(31.683.288.648,94)
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.799.905.270,00	154.483.193.918,94	31.683.288.648,94
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.799.905.270,00	154.483.193.918,94	31.683.288.648,94
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.799.905.270,00	154.483.193.918,94	31.683.288.648,94
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Pembiayaan Netto	120.370.096.270,00	152.053.384.918,94	31.683.288.648,94
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	(0,00)

Tabel 2.16 Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2025
APBD Parsial 5 Ditetapkan 19 Desember 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 5 2025	
		(24 Oktober 2025)	(19 Desember 2025)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	578.392.000.964,00	578.392.000.964,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	328.135.093.659,00	328.135.093.659,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	214.084.090.285,00	214.084.090.285,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.691.656.600,00	26.691.656.600,00	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.023.853.015.102,00	1.031.920.138.558,00	8.067.123.456,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	934.703.528.802,00	942.770.652.258,00	8.067.123.456,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.149.486.300,00	89.149.486.300,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.602.245.016.066,00	1.610.312.139.522,00	8.067.123.456,00
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.539.079.182.196,94	1.547.587.573.652,94	8.508.391.456,00
5.1.01	Belanja Pegawai	710.762.976.811,78	718.830.100.267,78	8.067.123.456,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.761.282.869,16	774.202.550.869,16	441.268.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	99.249.400,00	99.249.400,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	49.728.361.116,00	49.728.361.116,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.727.312.000,00	4.727.312.000,00	-
5,2	BELANJA MODAL	204.133.498.486,00	204.133.498.486,00	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.853.994.750,00	26.853.994.750,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.134.962.460,00	48.134.962.460,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.133.022.560,00	85.133.022.560,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.791.375.526,00	36.791.375.526,00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.692.193.190,00	6.692.193.190,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	527.950.000,00	527.950.000,00	-

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
		APBD 2025	PARSIAL 5 2025	
		(24 Oktober 2025)	(19 Desember 2025)	
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.085.720.302,00	10.644.452.302,00	(441.268.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.085.720.302,00	10.644.452.302,00	(441.268.000,00)
	Jumlah Belanja	1.754.298.400.984,94	1.762.365.524.440,94	8.067.123.456,00
	Total Surplus/(Defisit)	(152.053.384.918,94)	(152.053.384.918,94)	-
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.483.193.918,94	154.483.193.918,94	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.483.193.918,94	154.483.193.918,94	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	154.483.193.918,94	154.483.193.918,94	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
	Pembiayaan Netto	152.053.384.918,94	152.053.384.918,94	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

2.3 Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025

2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa ini selalu menarik untuk terus dikaji demi suksesnya pelaksanaan sistem perpajakan dalam mengamankan penerimaan daerah pada khususnya dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada masa kini merupakan pilar utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta negara sebagaimana telah disepakati bersama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan perpajakan selalu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi psikologis, misalnya diketahui bahwa pada umumnya tidak mudah mendapatkan seseorang yang dengan sukarela membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti karena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakannya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk keberlangsungan pembangunan daerah, pajak rela tidak rela harus dibayar oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan melampaui batasan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Semua itu dimaksudkan agar pundi-pundi APBD tetap terisi untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan demi kepentingan bersama. Di negara kita ini kegiatan pembangunan akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mendukung tujuan tersebut.

2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.610.312.139.522,00 dengan realisasi sebesar Rp1.583.167.314.879,00 atau 98,31% dari target, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	545.894.643.879,00	522.149.800.996,00	95,65
2	Dinas Kesehatan	24.100.000.000,00	24.430.875.966,00	101,37
4	RSUD Cibabat	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.781.960.000,00	10.673.791.365,00	109,12
6	Dinas Tenaga Kerja	600.000.000,00	527.818.440,00	87,97
7	Dinas Pangan dan Pertanian	387.215.000,00	442.186.093,00	114,20
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.050.090.000,00	3.816.214.069,00	94,23
9	Dinas Perhubungan	750.000.000,00	658.896.920,00	87,85
10	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian	1.914.825.285,00	1.935.438.247,00	101,08
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.500.000.000,00	3.082.682.255,00	123,31
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	850.333.405.358,00	829.505.274.784,00	97,55
	JUMLAH	1.610.312.139.522,00	1.583.167.314.879,00	98,31

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing dinas/instansi penghasil sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp545.894.643.879,00 dengan realisasi sebesar Rp522.149.800.996,00 atau 95,65%

dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2025 berada di bawah *cash budget* sebesar 4,35% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	545.894.643.879,00	522.067.688.918,00	95,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.307.910.679,00	347.865.789.624,00	95,49
Pajak Daerah	328.135.093.659,00	330.345.321.948,00	100,67
Pajak Hotel	0,00	0,00	-
Pajak Hotel	0,00	0,00	-
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	-
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	-
Pajak Reklame	2.671.741.403,00	3.093.664.000,00	115,79
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.382.492.200,00	1.410.714.700,00	102,04
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.382.492.200,00	1.410.714.700,00	102,04
Pajak Reklame Kain	133.196.038,00	147.233.400,00	110,54
Pajak Reklame Kain	133.196.038,00	147.233.400,00	110,54
Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.104.428.065,00	1.484.090.800,00	134,38
Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.104.428.065,00	1.484.090.800,00	134,38
Pajak Reklame Berjalan	51.625.100,00	51.625.100,00	100,00
Pajak Reklame Berjalan	51.625.100,00	51.625.100,00	100,00
Pajak Air Tanah	35.448.006.327,00	36.324.630.040,00	102,47
Pajak Air Tanah	35.448.006.327,00	36.324.630.040,00	102,47
Pajak Air Tanah	35.448.006.327,00	36.324.630.040,00	102,47
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	58.900.000.000,00	67.737.087.188,00	115,00
PBBP2	58.900.000.000,00	67.737.087.188,00	115,00
PBBP2	58.900.000.000,00	67.737.087.188,00	115,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.680.000.000,00	32.724.106.988,00	118,22
BPHTB-Pemindahan Hak	27.680.000.000,00	32.724.106.988,00	118,22

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BPHTB-Pemindahan Hak	27.680.000.000,00	32.724.106.988,00	118,22
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	91.402.088.851,00	95.234.977.528,00	104,19
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	30.025.000.000,00	31.754.284.713,00	105,76
PBJT-Restoran	28.765.000.000,00	29.251.726.551,00	101,69
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.260.000.000,00	2.502.558.162,00	198,62
PBJT-Tenaga Listrik	59.446.277.235,00	61.448.207.144,00	103,37
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.425.288,00	13.275.288,00	116,19
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	59.434.851.947,00	61.434.931.856,00	103,37
PBJT-Jasa Perhotelan	300.703.216,00	334.560.288,00	111,26
PBJT- Hotel	180.703.216,00	183.425.960,00	101,51
PBJT-Glamping	90.000.000,00	120.222.273,00	133,58
PBJT-Losmen	30.000.000,00	30.912.055,00	103,04
PBJT-Jasa Parkir	880.250.000,00	904.273.079,00	102,73
Pajak Parkir	880.250.000,00	904.273.079,00	102,73
PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	780.000.000,00	842.952.358,00	108,07
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	37.500.000,00	9.125.000,00	24,33
PBJT-Permainan Ketangkasan	581.614.780,00	589.294.174,00	101,32
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	120.530.280,00	177.828.960,00	147,54
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	10.213.340,00	17.404.170,00	170,41
PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	30.141.600,00	49.300.054,00	163,56
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	73.739.622.462,00	68.172.205.850,00	92,45
Opsen PKB	73.739.622.462,00	68.172.205.850,00	92,45
Opsen PKB	73.739.622.462,00	68.172.205.850,00	92,45
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.263.493.016,00	27.009.350.300,00	70,59
Opsen BBNKB	38.263.493.016,00	27.009.350.300,00	70,59
Opsen BBNKB	38.263.493.016,00	27.009.350.300,00	70,59

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	26.691.656.600,00	8.039.307.256,00	30,12
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	391.656.600,00	521.607.100,00	133,18
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	391.656.600,00	461.349.100,00	117,79
Hasil Penjualan Alat Besar	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	193.900.000,00	234.707.500,00	121,05
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	30.900.000,00	-
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.900.000,00	0,00	-
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	166.856.600,00	195.741.600,00	117,31
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	60.258.000,00	-
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	60.258.000,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	382.167.269,00	906.122.834,00	237,10
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	382.167.269,00	906.122.834,00	237,10
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	382.167.269,00	906.122.834,00	237,10
Jasa Giro	3.620.000.000,00	3.941.188.299,00	108,87
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.200.000.000,00	3.710.833.103,00	115,96
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.200.000.000,00	3.710.833.103,00	115,96
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	350.000.000,00	181.773.292,00	51,94
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	350.000.000,00	181.773.292,00	51,94

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	70.000.000,00	48.581.904,00	69,40
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	70.000.000,00	48.581.904,00	69,40
Pendapatan Bunga	0,00	51.693.316,00	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	51.693.316,00	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	51.693.316,00	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.217.551.668,00	984.383.188,00	23,34
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.217.551.668,00	984.383.188,00	23,34
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.217.551.668,00	984.383.188,00	23,34
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	6.633.021,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	6.633.021,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	6.633.021,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.649.030.355,00	501.481.409,00	7,54
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.649.030.355,00	501.481.409,00	7,54
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.649.030.355,00	501.481.409,00	7,54
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.060.520.267,00	656.833.351,00	6,53
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	-
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.179.912,00	3.856.676,00	53,71
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	7.179.912,00	1.492.386,00	20,79

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	2.287.640,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	0,00	76.650,00	-
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	21.204.740,00	7.345.261,00	34,64
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	21.204.740,00	7.345.261,00	34,64
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.964.547.214,00	624.811.546,00	6,27
Pendapatan Denda PBBP2	9.964.547.214,00	624.811.546,00	6,27
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	67.588.401,00	20.819.868,00	30,80
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	63.043.112,00	19.296.655,00	30,61
Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	9.230,00	6.510,00	70,53
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	901.890,00	64.740,00	7,18
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.174.379,00	549.103,00	17,30
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	459.790,00	0,00	-
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	0,00	902.860,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	1.245.298.441,00	438.380.158,00	35,20
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.245.298.441,00	438.380.158,00	35,20
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	996.238.753,00	0,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	249.059.688,00	0,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	438.380.158,00	-
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	734.580,00	-
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	734.580,00	-
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	734.580,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	125.432.000,00	30.250.000,00	24,12
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	125.432.000,00	30.250.000,00	24,12
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	125.432.000,00	30.250.000,00	24,12
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	364.307.910.679,00	347.865.789.624,00	95,49
Pendapatan Transfer	181.586.733.200,00	174.201.899.294,00	95,93
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	101.176.006.900,00	95.827.843.300,00	94,71
Dana Perimbangan	101.176.006.900,00	95.827.843.300,00	94,71
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	101.176.006.900,00	95.827.843.300,00	94,71
Dana Bagi Hasil Pajak	69.209.701.900,00	63.861.538.300,00	92,27
DBH PBB	4.976.156.000,00	4.588.793.400,00	92,22
DBH PPh Pasal 21	56.029.121.000,00	44.215.740.500,00	78,92
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	246.914.000,00	6.878.368.400,00	2.785,73
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.957.510.900,00	8.178.636.000,00	102,78
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	31.966.305.000,00	31.966.305.000,00	100,00
DBH SDA Minyak Bumi	3.426.651.415,00	3.565.217.000,00	104,04
DBH SDA Gas Bumi	1.391.347.585,00	1.252.782.000,00	90,04
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	25.238.223.000,00	25.238.223.000,00	100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.047.124.000,00	1.047.124.000,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	46.524.000,00	46.524.000,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DBH SDA Perikanan	816.435.000,00	816.435.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	101.176.006.900,00	95.827.843.300,00	94,71
Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.410.726.300,00	78.374.055.994,00	97,47
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.410.726.300,00	78.374.055.994,00	97,47
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.680.613.490,00	2.680.613.490,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.474.810.100,00	2.474.810.100,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.178.602.940,00	40.242.320.985,00	97,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	239.950.181,00	239.950.181,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.836.749.589,00	32.736.361.238,00	96,75

2. Dinas Kesehatan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp24.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.430.875.966,00 atau 101,37 % dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2025 berada di atas *cash budget* sebesar 1,37% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	24.100.000.000,00	24.430.875.966,00	101,37
Pendapatan Asli Daerah	24.100.000.000,00	24.430.875.966,00	101,37
Retribusi Daerah	24.100.000.000,00	24.366.397.776,00	101,11
Retribusi Jasa Umum	24.100.000.000,00	24.366.397.776,00	101,11
Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.100.000.000,00	24.366.397.776,00	101,11
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	24.100.000.000,00	24.366.397.776,00	101,11
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	64.478.190,00	-
Pendapatan BLUD	0,00	64.478.190,00	-
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	64.478.190,00	-
Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	-	64.478.190,00	-

3. RSUD Cibabat

Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Cibabat) sebesar Rp170.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp185.944.335.744,00 atau 109,38 % dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2025 berada di atas *cash budget* sebesar 9,38% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38
Pendapatan Asli Daerah	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38
Retribusi Daerah	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38
Retribusi Jasa Umum	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38
Retribusi Pelayanan Kesehatan	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp9.781.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.673.791.365,00 atau 109,12 % dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2025 berada di atas *cash budget* sebesar 9,12% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	9.781.960.000,00	10.673.791.365,00	109,12
Pendapatan Asli Daerah	9.781.960.000,00	10.673.791.365,00	109,12
Retribusi Daerah	254.000.000,00	304.773.000,00	119,99
Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	304.773.000,00	152,39
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	200.000.000,00	235.230.000,00	117,62
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	200.000.000,00	235.230.000,00	117,62
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	54.000.000,00	69.543.000,00	
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	54.000.000,00	69.543.000,00	128,78

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha	9.527.960.000,00	10.338.961.560,00	108,51
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.201.960.000,00	3.543.152.250,00	110,66
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.201.960.000,00	3.543.152.250,00	110,66
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.326.000.000,00	6.795.809.310,00	107,43
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.326.000.000,00	6.795.809.310,00	107,43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	30.056.805,00	-
Pendapatan Denda Retribusi.	0,00	30.056.805,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	30.056.805,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	30.056.805,00	

5. Dinas Tenaga Kerja

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp527.818.440,00 atau 87,97 % dari target Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2025 berada di bawah *cash budget* sebesar 12,03% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	600.000.000,00	527.818.440,00	87,97
Pendapatan Asli Daerah	600.000.000,00	527.818.440,00	87,97
Retribusi Daerah	600.000.000,00	527.618.000,00	87,94
Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	527.618.000,00	87,94
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00	527.618.000,00	87,94
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00	527.618.000,00	87,94
Lain-lain PAD yang Sah	-	200.440,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	200.440,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	200.440,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	200.440,00	-

6. Dinas Pangan dan Pertanian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp387.215.000,00 dengan realisasi sebesar Rp442.186.093,00 atau 114,20 % dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2025 berada di atas *cash budget* sebesar 14,20% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	387.215.000,00	442.186.093,00	114,20
Pendapatan Asli Daerah	387.215.000,00	442.186.093,00	114,20
Retribusi Daerah	387.215.000,00	442.185.193,00	114,20
Retribusi Jasa Usaha	387.215.000,00	442.185.193,00	114,20
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	54.000.000	58.375.193	108,10
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	333.215.000	383.810.000	115,18
Lain-lain PAD yang Sah	-	900	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	900	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	900,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	-	900,00	-

7. Dinas Lingkungan Hidup

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.050.090.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.816.214.069,00 atau 94,23% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2025 berada di bawah *cash budget* sebesar 5,77% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	4.050.090.000,00	3.816.214.069,00	94,23
Pendapatan Asli Daerah	4.050.090.000,00	3.816.214.069,00	94,23
Retribusi Daerah	4.050.090.000,00	3.816.001.854,00	94,22
Retribusi Jasa Umum	3.200.000.000,00	2.812.087.854,00	87,88

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.200.000.000,00	2.812.087.854,00	87,88
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.200.000.000	2.812.087.854	87,88
Retribusi Jasa Usaha	850.090.000,00	1.003.914.000,00	118,10
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.090.000,00	1.003.914.000,00	118,10
Retribusi Pemakaian Laboratorium	850.090.000,00	1.003.914.000,00	118,10
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.090.000,00	1.003.914.000,00	118,10
Lain-lain PAD yang Sah	0	212.215	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	212.215	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0	212.215	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium	-	212.215,00	-

8. Dinas Perhubungan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp658.896.920,00 atau 87,85% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2025 di bawah *cash budget* sebesar 12,15% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	750.000.000,00	658.896.920,00	87,85
Pendapatan Asli Daerah	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85
Retribusi Daerah	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85
Retribusi Jasa Umum	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	0,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah	-	1.920,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	1.920,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	1.920,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	1.920,00	-

9. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian. Perdagangan dan Pertanian sebesar Rp1.914.825.285,00 dengan realisasi sebesar Rp1.935.438.247,00 atau 101,08% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2025 berada di atas *cash budget* sebesar 1,08% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.914.825.285,00	1.935.438.247,00	101,08
Pendapatan Asli Daerah	1.914.825.285,00	1.935.438.247,00	101,08
Retribusi Daerah	1.914.825.285,00	1.931.712.807,00	100,88
Retribusi Jasa Umum	1.094.825.285,00	843.553.769,00	77,05
Retribusi Pelayanan Pasar	1.094.825.285,00	1.054.076.507,00	96,28
Retribusi Los	222.125.000,00	210.522.738,00	94,78
Retribusi Kios	872.700.285,00	843.553.769,00	96,66
Retribusi Jasa Usaha	820.000.000,00	877.636.300,00	107,03
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	820.000.000,00	832.876.300,00	101,57
Retribusi Pemakaian Ruangan	820.000.000,00	832.876.300,00	101,57
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	44.760.000,00	-
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	44.760.000,00	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	3.725.440,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	3.725.440,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	3.725.440,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	-	3.725.440,00	-

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.082.682.255,00 atau 123,31% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2025 berada di atas *cash budget* sebesar 23,31% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	2.500.000.000,00	3.082.682.255,00	123,31
Pendapatan Asli Daerah	2.500.000.000,00	3.082.682.255,00	123,31
Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	3.081.358.896,00	123,25
Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	3.081.358.896,00	123,25
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	3.081.358.896,00	123,25
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	3.081.358.896,00	123,25
Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.323.359,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.323.359,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	1.323.359,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	1.323.359,00	-

11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp850.333.405.358,00,00 dengan realisasi sebesar Rp829.505.274.784,00,00 atau 97,55 % dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2025 berada di bawah *cash budget* sebesar 2,45% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	850.333.405.358,00	829.505.274.784,00	97,55
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER	850.333.405.358,00	829.505.274.784,00	97,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841.594.645.358,00	820.841.514.784,00	97,53
Dana Alokasi Umum (DAU)	602.154.996.358,00	593.119.320.956,00	98,50
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	514.275.093.358,00	514.518.114.468,00	100,05
DAU	514.275.093.358,00	514.518.114.468,00	100,05
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	87.879.903.000,00	78.601.206.488,00	89,44
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	31.817.693.000,00	22.538.996.488,00	70,84
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	23.419.523.000,00	23.419.523.000,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	29.642.687.000,00	29.642.687.000,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.439.649.000,00	227.722.193.828,00	95,11
DAK Fisik	224.333.797.000,00	212.616.341.828,00	94,78
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	299.974.000,00	286.479.900,00	95,50
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	0,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	228.000.000,00	225.492.362,00	98,90
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.115.000.000,00	2.095.118.615,00	99,06
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.130.636.000,00	7.072.928.360,00	99,19
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	30.273.296.000,00	29.169.063.690,00	96,35
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	184.000.000,00	179.820.000,00	97,73

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK Non Fisik	183.894.963.000,00	173.587.438.901,00	94,39
DAK Non Fisik-BOS Reguler	71.517.710.000,00	71.280.271.894,00	99,67
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.373.000.000,00	1.373.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	83.176.151.000,00	76.647.814.952,00	92,15
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	869.750.000,00	412.007.500,00	47,37
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.298.823.000,00	4.677.660.166,00	74,26
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.328.935.000,00	4.137.227.724,00	95,57
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	-
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.480.000,00	36.480.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.020.520.000,00	6.006.953.500,00	99,77
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.284.940.000,00	4.201.795.510,00	98,06
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.778.654.000,00	4.604.227.655,00	79,68
Insentif Fiskal	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	-
Insentif Fiskal	0,00	0,00	-
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14
Bantuan Keuangan	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14

Mekanisme Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS, Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Kesetaraan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) dari Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Bendahara Sekolah/ Lembaga sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi.

2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 310), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 Nomor 315).

2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2025 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.762.365.524.440,94 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.662.426.274.003,00 atau 94,33%. Belanja daerah dimaksud dipergunakan untuk:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.547.587.573.652,94 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.482.337.768.913,00 atau 95,78% terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp718.830.100.267,78 dan telah direalisasikan sebesar Rp684.943.855.376,00 atau 95,29%;

b. Belanja Barang

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp774.202.550.869,16 dan telah direalisasikan sebesar Rp744.190.532.681,00 atau 96,12%;

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp99.249.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp46.224.179,00 atau 46,57%;

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp49.728.361.116,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp48.589.784.677,00 atau 97,71%

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.727.312.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.567.372.000,00 atau 96,62,%;

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp204.133.498.486,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp175.002.129.170,00 atau 85,73%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.644.452.302,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.086.375.920,00 atau 47,78%.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp0,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%

2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu. Pinjaman daerah dan/atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp152.053.384.918,94 sedangkan realisasinya sebesar Rp153.627.685.698,00 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp154.483.193.918,94 dan telah direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp154.483.193.918,00 atau 100,00% terdiri dari penggunaan SILPA Rp154.483.193.918,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.429.809.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21 %. Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21%.

2.3.4 Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja anggaran. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut ini:

Tabel 2.29 Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	578.392.000.964,00	579.460.140.801,00	100,18
2	Pendapatan Transfer	1.031.920.138.558,00	1.003.707.174.078,00	97,27

3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.610.312.139.522,00	1.583.167.314.879,00	98,31
B	Belanja			
1	Belanja Operasi	1.547.587.573.652,94	1.482.337.768.913,00	95,78
2	Belanja Modal	204.133.498.486,00	175.002.129.170,00	85,73
3	Belanja Tak Terduga	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78
	Jumlah Belanja	1.762.365.524.440,94	1.662.426.274.003,00	94,33
C	Transfer			
1	Bantuan Keuangan	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-
D	Surplus/defisit	(152.053.384.918,94)	(79.258.959.124,00)	52,13

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

Basis akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Kota Cimahi adalah Basis AkruaI untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, Transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

Menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ruang lingkupnya meliputi terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual;

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2. Penyajian Laporan Keuangan;

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- b. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

- a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus atau defisit-LRA;
 - 5) Penerimaan pembiayaan;
 - 6) Pengeluaran pembiayaan;
 - 7) Pembiayaan neto; dan
 - 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

4. Neraca;

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. Biaya dibayar di muka;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. aset lainnya;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang;
- k. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

5. Laporan Arus Kas;

- a. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan;

- a. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- b. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
3. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
5. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
8. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
9. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
10. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.
11. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
12. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
 - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment*.
 - b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

14. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;

1. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
2. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Pendapatan perizinan;

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
3. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

Pendapatan Pemberian Layanan

1. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
3. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
 - b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.

Pendapatan Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
3. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

1. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
2. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
3. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
4. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

1. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.
2. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari

bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.

3. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Pendapatan perizinan;

1. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
2. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

Pendapatan Pemberian Layanan

1. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
3. Dalam hal penyetoran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
2. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (*cash dividend*) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

1. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

1. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan.
2. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
3. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
4. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.
5. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

10. Akuntansi Pendapatan Operasional Transfer;

1. Pendapatan Operasional Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Operasional Transfer LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
4. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
5. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
6. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
7. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.
8. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.
9. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
10. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
11. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
12. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
13. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
14. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
15. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah

melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

11. Akuntansi Hibah;

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
 - c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
 - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
3. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:
 - a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diaku sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diaku sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
8. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

9. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.
10. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
14. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
15. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
16. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.
17. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
18. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
19. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
20. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
21. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
22. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

12. Akuntansi Bantuan Sosial;

1. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
 - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.
 - b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.

- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.
 - d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
 - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
2. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 3. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
 4. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
 5. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
 6. Beban diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 7. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
 8. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
 9. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.
 10. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.

11. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
12. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
13. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
14. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
15. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

13. Akuntansi Piutang;

- 1) Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 4) Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).

- 5) STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 6) Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
- 8) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 9) Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
- 10) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas. Pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 11) Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
- 12) Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- 13) Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Transfer Lainnya;

Selain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK, pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

- 14) Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :
- a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan, maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sudah diterbitkan.
 - b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengadilan.

14. Akuntansi Persediaan;

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Pendapatan pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar. apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Periodik. Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

15. Akuntansi Investasi;

Pengeluaran kas dan/atau aset. penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

16. Akuntansi Aset Tetap;

Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dipenuhi:

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional dan dihitung setiap akhir periode.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran dimaksud dalam paragraf 120 harus memenuhi batas minimum kapitalisasi biaya (*capitalization threshold*).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan ditentukan dengan pedoman kapitalisasi barang daerah yang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Perbaikan aset tetap meliputi:

- a) Renovasi;
- b) Restorasi; atau
- c) Overhaul.

17. Akuntansi Kerugian Daerah;

- 1) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
 - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
- 4) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
- 5) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
 - a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang TGR Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat

- berwenang.
- c. Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 6) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
- a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
 - 1) Pengakuan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - b. Entitas yang berhak menerima
 - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Pengakuan Pendapatan LRA
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
 - 3) Pengakuan Pendapatan LO
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
- 7) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
- a. Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - b. kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - c. kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 8) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
- a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
 - b. Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus

dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

- 9) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a. Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - b. Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
 - c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

18. Akuntansi Aset Tidak Berwujud

1. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
2. Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

a. Dapat Diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset satu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan.

Aset tak berwujud diakui pada saat:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengeluaran Setelah Perolehan

1. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
2. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*;
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
4. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
5. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
 - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
 - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh

pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	<i>Software</i> Komputer	4 (empat) Tahun

6. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$
--

- Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 - Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

- Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
- Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

19. Akuntansi Kewajiban;

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

20. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa- Pemberi Konsesi;

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi Konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- (a) disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana sebagai hasil reklasifikasi.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

21. Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

22. Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 - 6) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 - 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
 - 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset dan akun ekuitas dana.
 - 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.
 - 12) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

23. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

24. Laporan Keuangan Konsolidasian.

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 310), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 Nomor 315).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Kode Rekening dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan pada LRA diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.583.167.314.879,00 atau mencapai 98,31% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp1.610.312.139.522,00. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer lebih kecil dibandingkan anggarannya.

2. Belanja

Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.662.426.274.003,00 atau mencapai 94,33 % dari anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp1.762.365.524.440,94.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan pengembalian belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp0,00.

4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran kas yaitu Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan;
- c. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp153.627.685.698,00 atau 101,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.053.384.918,94. Penerimaan pembiayaan

Rp154.483.193.918,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp154.483.193.918,94 terdiri dari dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp154.483.193.918,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.429.809.000,00 adalah pembayaran pokok pinjaman ke Bank Dunia.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp579.460.140.801,00 atau mencapai 100,18% dari target anggaran sebesar Rp578.392.000.964,00.

4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp330.345.321.948,00 atau mencapai 100,67% dari target anggaran sebesar Rp328.135.093.659,00. terdiri dari:

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Reklame	2.671.741.403,00	3.093.664.000,00	115,79	2.209.600.500,00
Pajak Air Tanah	35.448.006.327,00	36.324.630.040,00	102,47	33.936.410.361,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	58.900.000.000,00	67.737.087.188,00	115,00	66.088.017.814,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.680.000.000,00	32.724.106.988,00	118,22	53.035.564.941,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	91.432.230.451,00	95.284.277.582,00	104,21	87.981.209.501,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	73.739.622.462,00	68.172.205.850,00	92,45	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.263.493.016,00	27.009.350.300,00	70,59	0,00
Jumlah	328.135.093.659,00	330.345.321.948,00	100,67	243.250.803.117,00

Tabel 4.1.1 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	-	-	27.589.443,00
PBJT-Restoran	28.765.000.000,00	29.251.726.551,00	101,69	24.921.305.774,00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.260.000.000,00	2.502.558.162,00	198,62	981.968.462,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.425.288,00	13.275.288,00	116,19	13.350.288,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	59.434.851.947,00	61.434.931.856,00	103,37	60.585.864.788,00
PBJT-Hotel	180.703.216,00	183.425.960,00	101,51	170.844.596,00
PBJT-Losmen	90.000.000,00	120.222.273,00	133,58	114.864.068,00
PBJT-Glamping	30.000.000,00	30.912.055,00	103,04	35.971.018,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	880.250.000,00	904.273.079,00	102,73	836.604.044,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	37.500.000,00	9.125.000,00	24,33	30.870.000,00
PBJT-Permainan Ketangkasan	581.614.780,00	589.294.174,00	101,32	251.243.270,00
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	120.530.280,00	177.828.960,00	147,54	10.213.700,00
PBJT- Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan	10.213.340,00	17.404.170,00	170,41	0,00
PBJT-Panti Pijat dan Panti Refleksi	30.141.600,00	49.300.054,00	163,56	520.050,00
Jumlah	91.432.230.451,00	95.284.277.582,00	104,21	87.981.209.501,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp95.284.277.582,00. atau 104,21 % dari yang dianggarkan sebesar Rp91.432.230.451,00. Hal ini dikarenakan pengaruh kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi pun mulai menggeliat kembali. Pencapaian realisasi pendapatan yang sangat signifikan yaitu dari Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan atau pemungutan pajak daerah serta melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah.

4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp231.412.239.830,00 atau mencapai 108,09 % dari target anggaran sebesar Rp214.084.090.285,00 terdiri dari:

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	199.398.825.285,00	215.140.565.881,00	107,89	221.973.462.627,00
Retribusi Jasa Usaha	11.585.265.000,00	12.662.697.053,00	109,30	11.791.266.450,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.100.000.000,00	3.608.976.896,00	116,42	2.897.367.591,00
Jumlah	214.084.090.285,00	231.412.239.830,00	108,09	236.662.096.668,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Daerah	214.084.090.285,00	231.412.239.830,00	108,09	236.662.096.668,00
Retribusi Jasa Umum	199.398.825.285,00	215.140.565.881,00	107,89	221.973.462.627,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	194.100.000.000,00	210.310.733.520,00	108,35	216.815.321.027,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.200.000.000,00	2.812.087.854,00	87,88	3.101.219.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85	761.736.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.094.825.285,00	1.054.076.507,00	96,28	1.056.140.100,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	200.000.000,00	235.230.000,00	117,62	185.220.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	54.000.000,00	69.543.000,00	128,78	53.826.000,00
Retribusi Jasa Usaha	11.585.265.000,00	12.662.697.053,00	109,30	11.791.266.450,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.872.050.000,00	5.379.942.550,00	110,42	5.566.536.050,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	44.760.000,00	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	387.215.000,00	442.185.193,00	114,20	60.472.500,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.326.000.000,00	6.795.809.310,00	107,43	6.164.257.900,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.100.000.000,00	3.608.976.896,00	116,42	2.897.367.591,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	0,00	900.000,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	3.081.358.896,00	123,25	2.510.273.591,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00	527.618.000,00	87,94	386.194.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp231.412.239.830,00 atau 108,09% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp214.084.090.285,00.

4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.481.160.420,00 atau mencapai 100,00% dari target anggaran sebesar Rp9.481.160.420,00

Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00	10.571.076.808,00
Jumlah	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00	10.571.076.808,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.481.160.420,00 tersebut merupakan bagian dividen atas laba Tahun 2025 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 111.215.958 lembar saham pada PT Bank BJB dikalikan besaran dividen per lembar saham Rp85,25,-.

4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.221.418.603,00 atau mencapai 30,80% dari target anggaran sebesar Rp26.691.656.600,00 terdiri dari:

Tabel 4.5 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	391.656.600,00	521.607.100,00	133,18	767.359.700,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	382.167.269,00	988.234.912,00	258,59	983.853.151,00
Jasa Giro	3.620.000.000,00	3.941.188.299,00	108,87	3.771.987.125,00
Pendapatan Bunga	-	51.693.316,00	0,00	889.890.110,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.217.551.668,00	984.383.188,00	23,34	707.098.034,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	-	6.633.021,00	0,00	6.503.022,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Lain				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.649.030.355,00	501.481.409,00	7,54	60.029.452,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.060.520.267,00	656.833.351,00	6,53	2.430.593.098,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	35.521.079,00	0,00	30.406.247,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.245.298.441,00	438.380.158,00	35,20	349.166.335,00
Pendapatan BLUD	-	64.478.190,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	734.580,00	0,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	0,00	131.703.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	125.432.000,00	30.250.000,00	24,12	134.332.000,00
Jumlah	26.691.656.600,00	8.221.418.603,00	30,80	10.262.921.274,00

4.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.003.707.174.078,00 atau 97,27% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp1.031.920.138.558,00.

Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	927.664.800.258,00	901.563.506.084,00	97,19	859.060.969.166,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.149.486.300,00	87.037.815.994,00	97,63	169.847.087.400,00
Jumlah	1.031.920.138.558,00	1.003.707.174.078,00	97,27	1.067.353.649.566,00

4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp901.563.506.084,00 atau 97,19% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp927.664.800.258,00.

4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp63.861.538.300,00 atau 92,27% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp69.209.701.900,00 terdiri dari:

Tabel 4.7 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.976.156.000,00	4.588.793.400,00	92,22	3.384.235.000,00
DBH PPh Pasal 21	56.029.121.000,00	44.215.740.500,00	78,92	44.575.691.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	246.914.000,00	6.878.368.400,00	2.785,73	5.661.425.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.957.510.900,00	8.178.636.000,00	102,78	7.951.861.000,00
Jumlah	69.209.701.900,00	63.861.538.300,00	92,27	61.573.212.000,00

4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.966.305.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp31.966.305.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.426.651.415,00	3.565.217.000,00	104,04	6.007.277.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.391.347.585,00	1.252.782.000,00	90,04	1.420.943.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	25.238.223.000,00	25.238.223.000,00	100,00	32.628.609.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.047.124.000,00	1.047.124.000,00	100,00	550.713.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	46.524.000,00	46.524.000,00	100,00	33.187.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	816.435.000,00	816.435.000,00	100,00	1.073.811.000,00
DBH Sawit	-	-	-	1.000.000.000,00
Jumlah	31.966.305.000,00	31.966.305.000,00	100,00	42.714.540.000,00

Realisasi Pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan PMK nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp593.119.320.956,00 atau 98,50% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp602.154.996.358,00 terdiri dari:

Tabel 4.9 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	602.154.996.358,00	593.119.320.956,00	98,50	582.607.386.486,00
Jumlah	602.154.996.358,00	593.119.320.956,00	98,50	582.607.386.486,00

Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapatkan penetapan Dana Alokasi Umum sebesar Rp602.555.620.000,00. Realisasi yang diterima Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2025 sebesar Rp593.119.320.956,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum *Block Grant* sebesar Rp514.518.114.468,00 Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000,00 Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp22.538.996.488,00 Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan sebesar Rp23.419.523.000,00 Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan sebesar Rp29.642.687.000,00.

4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp212.616.341.828,00 atau 94,78% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp224.333.797.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.10 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.438.834.000,00	39.028.902.927,00	96,51	15.755.493.734,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	183.894.963.000,00	173.587.438.901,00	94,39	156.410.336.946,00
Jumlah	224.333.797.000,00	212.616.341.828,00	94,78	172.165.830.680,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima sebesar Rp39.028.902.927,00,00 dialokasikan untuk kepentingan sebagai berikut:

a	Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	286.479.900,00
b	Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-
c	Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	225.492.362,00
d	Bidang Air Minum-Reguler	2.095.118.615,00
e	Bidang Sanitasi-Reguler	7.072.928.360,00
f	Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	29.169.063.690,00
g	Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	179.820.000,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima sebesar Rp173.587.438.901,00 dialokasikan untuk kepentingan sebagai berikut:

a.	BOS Reguler	71.280.271.894,00
b.	BOS Kinerja	1.373.000.000,00
c.	TPG PNSD	76.647.814.952,00
d.	Tamsil Guru PNSD	412.007.500,00
e.	BOKKB-BOK	4.677.660.166,00
f.	BOKKB-BOKB	4.137.227.724,00
g.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.480.000
h.	Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.006.953.500,00
i.	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000
j.	Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.201.795.510
k.	Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000
l.	Dana BOK-BOK Puskesmas	4.604.227.655,00

4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

4.1.2.2.1. Dana Penyesuaian - Dana Insentif Fiskal

Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Fiskal periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.105.852.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp15.105.852.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.11 Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00
Jumlah	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00

4.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp87.037.815.994,00 atau 97,63% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp89.149.486.300,00 terdiri dari:

4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp78.374.055.994,00 atau 97,47% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp80.410.726.300,00 terdiri dari:

Tabel 4.12 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.680.613.490,00	2.680.613.490,00	100,00	53.489.084.040,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.474.810.100,00	2.474.810.100,00	100,00	27.037.804.050,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.178.602.940,00	40.242.320.985,00	97,73	36.366.131.075,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	239.950.181,00	239.950.181,00	100,00	141.214.151,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.836.749.589,00	32.736.361.238,00	96,75	30.267.046.370,00
Jumlah	80.410.726.300,00	78.374.055.994,00	97,47	147.301.279.686,00

4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.663.760.000,00 atau 99,14% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp8.738.760.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.13 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14	22.545.807.714,00
Jumlah	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14	22.545.807.714,00

4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 4.14 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat :	-	-	-	-
<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>		-	-	-
Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

4.1.4. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.482.337.768.913,00 atau mencapai 95,78% dari anggarannya sebesar Rp1.547.587.573.652,94 terdiri dari:

Tabel 4.15 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	718.830.100.267,78	684.943.855.376,00	95,29	701.183.655.297,00
Belanja Barang	774.202.550.869,16	744.190.532.681,00	96,12	703.650.171.962,00
Belanja Bunga	99.249.400,00	46.224.179,00	46,57	108.364.375,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	49.728.361.116,00	48.589.784.677,00	97,71	50.548.508.959,00
Belanja Bantuan Sosial	4.727.312.000,00	4.567.372.000,00	96,62	4.676.085.000,00
Jumlah	1.547.587.573.652,94	1.482.337.768.913,00	95,78	1.460.166.785.593,00

4.1.4.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp684.943.855.376,00 atau mencapai 95,29% dari anggarannya sebesar Rp718.830.100.267,78 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 46,21% terdiri dari:

Tabel 4.16 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	364.777.745.878,86	347.644.090.673,00	95,30	322.875.220.807,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	286.317.176.833,92	274.660.326.982,00	95,93	191.427.921.786,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				84.181.807.882,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	43.863.591.244,00	40.560.288.878,00	92,47	40.717.255.797,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.092.767.000,00	970.184.163,00	88,78	827.584.400,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.167.079.445,00	1.034.570.000,00	88,65	723.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	21.611.739.866,00	20.074.394.680,00	92,89	60.430.264.625,00
JUMLAH	718.830.100.267,78	684.943.855.376,00	95,29	701.183.655.297,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 secara nominal menurun sebesar Rp16.239.799.921,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024. Secara presentase penyerapan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 turun sebesar 1,97% menjadi 95,29% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Turunnya penyerapan anggaran tersebut terlihat signifikan pada realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dipindah pada Belanja Jasa atau turun 100,00% dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp20.074.394.680,00 atau turun 66,78%.

4.1.4.2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Belanja Barang adalah untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp744.190.532.681,00 atau 96,12% dari anggarannya sebesar Rp774.671.580.869,16 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 50,20%, terdiri dari:

Tabel 4.17 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Bahan Pakai Habis	157.621.767.002,20	144.577.303.121,00	91,72	136.302.279.995,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	472.760.000,00	457.546.540,00	96,78	19.348.600,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	38.000.000,00	36.172.325,00	95,19	175.104.340,00
Belanja Jasa				

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Jasa Kantor	181.638.149.731,16	165.663.385.481,00	91,21	186.088.654.530,00
Belanja Premi Asuransi	51.308.724.324,00	49.765.430.347,00	96,99	43.942.446.758,00
Belanja Sewa Tanah	111.918.250,00	91.897.250,00	82,11	105.114.250,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.575.337.000,00	13.019.376.265,00	83,59	7.917.188.904,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.446.995.000,00	11.501.617.250,00	85,53	7.030.537.720,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	467.600.000,00	421.040.000,00	90,04	427.984.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.887.154.375,00	6.333.794.325,00	91,97	9.218.288.369,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.191.266.340,00	4.814.208.085,00	92,74	2.099.212.252,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	195.337.500,00	135.537.500,00	69,39	69.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.948.860.984,00	20.507.560.648,00	93,43	12.698.064.580,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.037.830.796,00	2.941.693.729,00	96,84	1.681.306.200,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.986.323.496,00	13.293.226.158,00	83,15	14.262.853.603,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.431.613.193,00	4.291.979.958,00	96,85	8.059.726.485,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	256.653.842,80	251.068.355,00	97,82	814.410.708,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	13.949.250,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	-	56.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.041.266.300,00	35.343.805.203,00	92,91	52.637.946.540,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak				
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.621.970.383,00	23.242.654.497,00	98,39	20.014.202.426,00
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	864.561.390,00	558.860.356,00	64,64	3.044.298.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS				
Belanja Barang Dana BOS	49.287.340.092,00	49.189.473.776,00	99,80	50.121.291.010,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas				
Belanja Barang dan Jasa BOK	469.030.000,00	330.662.219,00	70,50	146.850.413.242,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Puskesmas				
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	183.771.120.870,00	197.422.239.293,00	107,43	146.850.413.242,00
	774.671.580.869,16	744.190.532.681,00	96,12	703.650.171.962,00

4.1.4.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.224.179,00 atau 46,57% dari anggarannya sebesar Rp99.249.400,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,03% terdiri dari:

Tabel 4.18 Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	99.249.400,00	46.224.179,00	46,57	108.364.375,00
- JT s.d Maret		30.646.800		61.632.238,00
- JT s.d Agustus		15.577.379		46.732.137,00
Bunga Utang Pinjaman	99.249.400,00	46.224.179,00	46,57	108.364.375,00

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp46.224.179,00 terdiri dari jatuh tempo bulan Maret 2025 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp30.646.800,00 jatuh tempo bulan September 2025 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp15.577.379,00

Melihat masih banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga karena dengan utang yang sudah diketahui, baik secara nominal pokok maupun persentase bunga tahunan, seharusnya perhitungan proyeksi Belanja Bunga dapat lebih tepat. Dengan perhitungan yang lebih baik, maka kelebihan anggaran dapat diminimalisasi dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.4.4. Belanja Subsidi

Tidak ada Realisasi Belanja Subsidi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025:

Tabel 4.19 Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

4.1.4.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi, dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp48.589.784.677,00 atau 97,71% dari anggarannya sebesar Rp49.728.361.116,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 3,28 % terdiri dari:

Tabel 4.20 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	10.939.052.000,00	10.081.915.549,00	92,16	16.964.163.336,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	12.180.080.000,00	12.091.743.120,00	99,27	6.769.576.119,00
Belanja Hibah Dana BOS	13.753.611.616,00	13.657.219.498,00	99,30	13.892.822.704,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.340.157.500,00	2.340.157.500,00	100,00	2.279.302.500,00
Belanja Hibah Dana BOSP	10.515.460.000,00	10.418.749.010,00	99,08	10.642.644.300,00
Jumlah	49.728.361.116,00	48.589.784.677,00	97,71	50.548.508.959,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada BNN Kota Cimahi dan Polres Cimahi dalam bentuk Hibah Uang. Hibah barang kepada Pemerintah Pusat melalui sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Gedung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi diberikan untuk penyelesaian halaman Polsek Cimahi Tengah Kota Cimahi dan Renovasi Gedung Satuan Reskrim, Satuan Resnarkoba, dan Satuan Intelkam Polres Kota Cimahi. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi diberikan kepada tujuh Badan/Lembaga/Organisasi yang ada di Kota Cimahi. Selanjutnya, dalam belanja hibah juga terdapat sub rincian objek belanja hibah Dana BOS yang diterima oleh sekolah Swasta secara langsung dari KPPN. Selain itu, terdapat pula Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada sembilan Partai Politik yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diberikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Rincian Penerima Hibah dapat dilihat di *lampiran 1*.

4.1.4.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.567.372.000,00 atau 96,62% dari anggarannya sebesar Rp4.727.312.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,00% terdiri dari:

Tabel 4.21 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.727.312.000,00	4.567.372.000,00	96,62	4.676.085.000,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Jumlah	4.727.312.000,00	4.567.372.000,00	96,62	4.676.085.000,00

Belanja Bantuan Sosial digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jenjang SD dan SMP tahun anggaran 2025 dan Dinas Sosial untuk stimulan masyarakat terdampak pergeseran tanah.

Rincian Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat di *Lampiran 1*.

4.1.5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp175.002.129.170,00 atau mencapai 85,73% dari anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp204.133.498.486,00 terdiri dari:

Tabel 4.22 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Tanah	26.853.994.750,00	14.008.020.163,00	52,16	11.775.284.331,00
Belanja Peralatan dan Mesin	48.134.962.460,00	42.430.742.024,00	88,15	32.108.170.914,00
Belanja Gedung dan Bangunan	85.133.022.560,00	78.392.468.465,00	92,08	27.366.011.235,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.791.375.526,00	33.239.481.455,00	90,35	23.668.853.422,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.692.193.190,00	6.508.674.780,00	97,26	3.855.621.190,00
Belanja Aset Lainnya	527.950.000,00	422.742.283,00	80,07	606.953.290,00
Jumlah	204.133.498.486,00	175.002.129.170,00	85,73	99.380.894.382,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 secara nominal naik sebesar Rp75.621.234.788,00 dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. Dari rincian belanja modal di atas dapat dilihat realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Cimahi masih rendah dan terlihat signifikan pada Belanja Tanah yang penyerapannya hanya 52,16% dari nilai belanja yang dianggarkan sebesar Rp26.853.994.750,00. Dari Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp175.002.129.170,00 realisasi tertinggi per rincian objek belanja modal adalah untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp6.508.674.780,00 atau 97,26% dari anggarannya.

4.1.6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 sebesar Rp5.086.375.920,00 atau mencapai 47,78% dari anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp10.644.452.302,00.

Tabel 4.23 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Tak Terduga	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78	310.089.709,00
Jumlah	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78	310.089.709,00

Rincian Penggunaan BTT untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Total (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	128.042.210,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.408.320.985,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	402.867.725,00
4	Dinas Sosial	147.145.000,00
	Total	5.086.375.920,00

4.1.7. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

4.1.8. Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2025 dianggarkan terjadi defisit sebesar (Rp152.053.384.918,94) dan realisasinya mengalami defisit sebesar (Rp79.258.959.124,00).

Tabel 4.25 Surplus Tahun Anggaran 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit)	(152.053.384.918,94)	(79.258.959.124,00)	52,13	8.242.777.749,00

4.1.9. Pembiayaan

4.1.9.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp154.483.193.918,00 yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2024 Rp154.483.193.918,94.

Tabel 4.26 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Penggunaan SiLPA	Rp154.483.193.918,94	Rp154.483.193.918,00	100,00	117.095.924.389,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.000.000.000,00
Jumlah	Rp154.483.193.918,94	Rp154.483.193.918,00	100,00	147.095.924.389,00

4.1.9.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.429.809.000,00.

Tabel 4.27 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
Jumlah	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35.21	855.508.220,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp855.508.220,00 yang merupakan pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007.

4.1.10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA TA 2025 yaitu sebesar Rp74.368.726.574,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.28 Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Realisasi Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	579.460.140.801,00	500.746.897.867,00
Pendapatan Transfer	1.003.707.174.078,00	1.067.353.649.566,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-
Jumlah Pendapatan (a)	1.583.167.314.879,00	1.568.100.547.433,00
Realisasi Belanja		
Belanja Operasi	1.482.337.768.913,00	1.460.166.785.593,00
Belanja Modal	175.002.129.170,00	99.380.894.382,00
Belanja Tak Terduga	5.086.375.920,00	310.089.709,00
Jumlah Belanja (b)	1.662.426.274.003,00	1.559.857.769.684,00
Transfer		
Bantuan Keuangan	-	-
Jumlah Transfer (c)	-	-
Surplus / (Defisit) (I)	(79.258.959.124,00)	8.242.777.749,00
Realisasi Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	154.483.193.918,00	147.095.924.389,00
Pengeluaran Pembiayaan	855.508.220,00	855.508.220,00
Pembiayaan Netto (II)	153.627.685.698,00	146.240.416.169,00
SiLPA Tahun 2025 (I) + (II)	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025

	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	154.483.193.918,00	117.095.924.389,00
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	154.483.193.918,00	117.095.924.389,00
Subtotal	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00
Subtotal	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00
Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	74.368.726.574,00	154.483.193.918,00

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	63.007.292.843,00	121.485.380.419,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 4.31 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025

No	No. Rek.	Bank	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	0230270000025	BJB	63.007.292.843,00	121.485.380.419,00
Jumlah			63.007.292.843,00	121.485.380.419,00

Dari Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Kas di Kas Daerah pada Bank BJB merupakan rekening yang dikelola oleh BUD yang digunakan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Saldo Kas Daerah pada Bank BJB adalah sebesar Rp63.007.292.843,00.

b. Pemerintah Kota Cimahi tidak mengeluarkan bilyet giro untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah kepada rekening pihak yang menerima, tetapi menggunakan SP2D sebagai alat pembayaran;

c. Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB terdapat juga sisa Dana Transfer (*Earmark*) Per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.046.358.958,00 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan	Rp745.941.004,00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp613.650.365,00
3. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp3.961.047.772,00
4. Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	Rp2.395.137.322,00
5. Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	Rp3.047.928.107,00
6. Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	Rp10.829.046,00
7. Dana Insentif Fiskal (DIF)	Rp8.748.793.737,00
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp1.523.031.605,00
JUMLAH	Rp21.046.358.958,00

d. Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB Per 31 Desember 2025 terdapat juga Opsen Pajak atas kesalahan transfer sebesar Rp247.800,00 yang telah dikembalikan pada tanggal 10 Februari 2026.

4.3.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo seluruh kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	0,00	15.184.254.064,00
Jumlah	0,00	15.184.254.064,00

4.3.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo seluruh kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.3.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang berada di Bendahara BLUD Kota Cimahi yang terdiri dari RSUD Cibabat, 13 (tiga belas) UPT Puskesmas, dan UPT Air Minum.

Tabel 4.34 Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
BLUD RSUD Cibabat	4.477.715.264,00	12.312.759.826,00
BLUD Air Minum	1.360.602.378,00	1.232.904.009,00
BLUD Persampahan	1.211.048.933,00	-
BLUD Puskesmas	2.760.000.469,00	2.897.676.095,00
Jumlah	9.809.367.044,00	16.443.339.930,00

- 1) Kas di RSUD Cibabat merupakan saldo kas di rekening RSUD Cibabat yang merupakan hasil dari kegiatan operasional RSUD dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional RSUD Cibabat, dan Saldo Giro Rupiah IDR-Gov. Saldo Kas di RSUD Cibabat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar:

Tabel 4.35 Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di RSUD Cibabat	4.477.715.264,00	12.312.759.826,00

Saldo Kas di RSUD Cibabat yang berada pada rekening nomor 00230030000609 a.n. RSUD Cibabat pada Bank Jabar Banten berasal dari pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp4.477.715.264,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.36 Rincian Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2025

Saldo Tahun Lalu (a)		Rp12.312.759.826,00
Penerimaan		
Pendapatan Operasional TA 2025	Rp185.944.335.744 ,00	
Jumlah (b)	Rp185.944.335.744 ,00	
Belanja:		
TA 2025	Rp193.779.380.306,00	
Ambang Batas TA 2025	-	-
Jumlah (c)		RP193.779.380.306,00
Sisa Kas (d=a+b-c)		Rp4.477.715.264,00
Pembulatan (e)		-
Total Kas di RSUD Cibabat TA 2025 (f=d+e)		Rp4.477.715.264,00

- 2) Kas di BLUD Air Minum merupakan saldo kas di rekening BLUD Air Minum yang merupakan hasil dari kegiatan operasional BLUD Air Minum dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD Air Minum. Saldo Kas di BLUD Air Minum per 31 Desember 2025 adalah sebesar:

Tabel 4.37 Saldo Kas di BLUD Air Minum Tahun Anggaran 2025

Saldo Tahun Lalu (a)		Rp1.232.904.009,00
Penerimaan:		
Pendapatan Operasional TA 2025	Rp6.390.282.088,00	
Jumlah (b)	Rp6.390.282.088,00	
Belanja:		
TA 2025	Rp5.857.056.497,00	

Jumlah (c)	Rp5.857.056.497,00
Sisa Kas (d=a+b-c)	Rp1.766.129.600,00
Setoran SILPA ke Kas Daerah Tanggal 30 Oktober 2025 (e)	(Rp405.527.222,00)
Total Kas di BLUD Air Minum TA 2025 (f=d-e)	Rp1.360.602.378,00

- 3) Kas di Bendahara BLUD Puskesmas merupakan saldo kas di rekening FKTP (Puskesmas) Kota Cimahi pada Bank BJB yang berasal dari Saldo kas di Bendahara FKTP per 30 Desember 2025 dan 2024 sebagai:

Tabel 4.38 Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	3.818.849.081,00	4.072.102.438,00

Tabel 4.39 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2025

Saldo Kas Bank BJB

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	0059469843001	Bend Dana Kapitasi Cibeureum	162.211.946,00	391.934.391,00
2	0059470388001	Bend Dana Kapitasi Leuwigajah	206.419.603,00	195.037.421,00
3	0059474278001	Bend Dana Kapitasi Cigugur	156.131.892,00	118.773.914,00
4	0059475851001	Bend Dana Kapitasi Pasirkaliki	29.246.176,00	34.679.769,00
5	0059478494001	Bend Dana Kapitasi Cipageran	272.331.096,00	349.817.191,00
6	0059478117001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Tengah	182.007.514,00	208.323.069,00
7	0059478249001	Bend Dana Kapitasi Padasuka	232.199.880,00	267.030.979,00
8	0059479938001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Utara	490.453.504,00	551.845.345,00
9	0059490974001	Bend Dana Kapitasi Cibeber	144.387.640,00	122.122.153,00
10	0059535862001	Bend Dana Kapitasi Melong Tengah	164.446.943,00	35.998.896,00
11	0059547607001	Bend Dana Kapitasi Citeureup	232.388.346,00	236.543.326,00
12	0059547879001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Selatan	309.811.773,00	117.110.021,00
13	0059574868001	Bend Dana Kapitasi Melong Asih	177.964.156,00	268.459.620,00
Jumlah			2.760.000.469,00	2.897.676.095,00

4.3.5. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Sisa dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 4.40 Saldo Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas Dana BOS	92.964.552,00	195.793.162,00

Rincian sebagai berikut :

Saldo Tahun Lalu (a)	195.793.162,00	308.862.200,00
Pendapatan (b)		
Penerimaan Dana Bos TA 2025	72.653.271.894,00	58.619.611.494,00
Lain-lain PAD	-	13.074,00

Belanja (c)

Pengeluaran Dana Bos TA 2025	72.756.100.504,00	58.732.693.606,00
Pengembalian Dana BOS		
Total Kas Dana BOS TA 2025 (d=a+b-c)	92.964.552,00	195.793.162,00

4.3.6. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kas Dana BOK merupakan bantuan operasional kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada satuan kesehatan yang ada di wilayah Kota Cimahi. Kas dana BOK tersebut ialah saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan kesehatan. Adapun jumlah institusi negeri yang menerima dana tersebut ialah 13 BLUD Puskesmas. Saldo kas dana BOK per 31 Desember 2025 adalah sebesar

Tabel 4.41.a. Rincian Saldo Kas Dana BOK Tahun Anggaran 2025

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	30 Desember 2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	1590029675	Bend BOK Cibeureum	68.606.000,00	60.630.525,00
2	1590029631	Bend BOK Leuwigajah	11.430.000,00	162.126.284,00
3	1590029619	Bend BOK Cigugur Tengah	71.137.888,00	77.187.252,00
4	1590029552	Bend BOK Pasirkaliki	121.504.621,00	63.059.154,00
5	1590029642	Bend BOK Cipageran	105.980.000,00	177.671.670,00
6	1590029596	Bend BOK Cimahi Tengah	93.435.789,00	38.362.925,00
7	1590029585	Bend BOK Padasuka	52.084.992,00	82.807.839,00
8	1590029686	Bend BOK Cimahi Utara	82.567.715,00	141.485.747,00
9	1590029563	Bend BOK Cibeber	140.602.388,00	82.017.160,00
10	1590029574	Bend BOK Melong Tengah	67.046.962,00	64.616.250,00
11	1590029653	Bend BOK Citeureup	35.347.846,00	45.477.600,00
12	1590029608	Bend BOK Cimahi Selatan	150.677.980,00	67.054.413,00
13	1590029620	Bend BOK Melong Asih	58.426.431,00	111.929.524,00
JUMLAH			1.058.848.612,00	1.174.426.343,00

Saldo kas BOK pada Puskesmas per 30 Desember 2025 di tanggal 31 Desember 2025 terdapat Jasa Giro yang tidak diakui sebagai penerimaan Jasa Giro dan akan di koreksi di tanggal 2 Januari 2026 sesuai surat dari Bank BNI No. INS1/6/3 tanggal 2 Januari 2026 sebesar Rp857.640,00.

Tabel 4.41.b Rincian Selisih Jasa Giro

No.	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	30 Desember 2025 (Rp)	Selisih Jasa Giro (Rp)
1	Bend BOK Cibeureum	68.665.260,00	68.606.000,00	59.260,00
2	Bend BOK Leuwigajah	11.434.607,00	11.430.000,00	4.607,00
3	Bend BOK Cigugur Tengah	71.203.368,00	71.137.888,00	65.480,00
4	Bend BOK Pasirkaliki	121.599.166,00	121.504.621,00	94.545,00
5	Bend BOK Cipageran	106.061.479,00	105.980.000,00	81.479,00
6	Bend BOK Cimahi Tengah	93.525.928,00	93.435.789,00	90.139,00
7	Bend BOK Padasuka	52.124.725,00	52.084.992,00	39.733,00
8	Bend BOK Cimahi Utara	82.630.007,00	82.567.715,00	62.292,00
9	Bend BOK Cibeber	140.716.751,00	140.602.388,00	114.363,00
10	Bend BOK Melong Tengah	67.101.175,00	67.046.962,00	54.213,00

No.	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	30 Desember 2025 (Rp)	Selisih Jasa Giro (Rp)
11	Bend BOK Citeureup	35.373.357,00	35.347.846,00	25.511,00
12	Bend BOK Cimahi Selatan	150.797.508,00	150.677.980,00	119.528,00
13	Bend BOK Melong Asih	58.472.921,00	58.426.431,00	46.490,00
JUMLAH		1.059.706.252,00	1.058.848.612,00	857.640,00

4.3.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2025 dari Sekolah Dasar Negeri Cibeber 2 yang baru dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2026 dan Sekolah Dasar Negeri Melong Mandiri 6 yang baru dibayarkan tanggal 13 Januari 2026.

Tabel 4.42 Saldo Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025

No.	OPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Setoran PFK - Dana Bos	63.280,00	33.600,00
Jumlah		63.280,00	33.600,00

4.3.8. Piutang Pajak

Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas pajak daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Saldo piutang pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar:

Tabel 4.43 Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Pajak	155.174.496.858,00	147.009.168.358,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp155.174.496.858,00 tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2025, terdiri dari:

Tabel 4.44 Rincian Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Pajak	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	1.010.405.335,00	736.867.635,00
2	Pajak Air Tanah	1.321.586.102,00	1.875.223.242,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan	152.824.675.980,00	144.379.248.040,00
4	Pajak Restoran	2.922.561,00	2.922.561,00
5	Pajak Hotel	14.906.880,00	14.906.880,00
Jumlah		155.174.496.858,00	147.009.168.358,00

Saldo piutang pajak sebesar Rp155.174.496.858,00 tersebut berasal dari mutasi piutang pajak selama tahun 2025 yang meliputi:

Tabel 4.45 Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	147.009.168.358,00
2	Penambahan:	
3	Penetapan SKPD tahun 2025	338.510.650.448,00
4	Jumlah Penambahan	<u>338.510.650.448,00</u>
5	Pengurangan:	
6	Pembayaran tahun 2025	330.345.321.948,00
7	Jumlah Pengurangan	<u>330.345.321.948,00</u>
8	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (8=1+ 4-7)	155.174.496.858,00

Rincian mutasi dapat dilihat pada *lampiran 2*.

Dalam Penambahan Piutang Pajak merupakan ketetapan Tahun 2025 ditambah dengan hasil pelayanan di tahun berjalan (penambahan luas bumi dan atau bangunan) dengan jumlah seluruh penambahan ketetapan sebesar Rp338.510.650.448,00.

Saldo piutang pajak tersebut belum termasuk potensi denda pajak yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu sebesar Rp1.279.178.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.46 Rincian Potensi Denda Pajak Tahun Anggaran 2025

Piutang	Potensi Denda Pajak per 31 Desember 2025 (Rp)
Pajak Reklame	298.546.474,00
Pajak Air Tanah	222.931.894,00
Pajak Bumi dan Bangunan	60.130.780.934,00
Pajak PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.402.829,00
Pajak PBJT-Jasa Perhotelan	7.110.902,00
Jumlah	60.660.773.033,00

4.3.9. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 adalah:

Tabel 4.47 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	92.873.399.548,08	85.182.151.801.79

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp92.873.399.548,08 dengan rincian:

Tabel 4.48 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2024 (Rp)
Pajak Reklame	391.320.942,00	387.197.981,50
Pajak Air Tanah	397.192.538,70	412.187.356,40
Pajak Bumi dan Bangunan	92.076.060.146,88	84.374.396.510,99
Pajak Restoran	1.461.280,50	1.005.312,90
Pajak Hotel	7.364.640,00	7.364.640,00
Jumlah	92.873.399.548,08	85.182.151.801,79

Rincian penyisihan dapat dilihat pada *lampiran 3*.

4.3.10. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas retribusi daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi (WR). Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar:

Tabel 4.49 Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Retribusi	6.549.785.863,00	9.117.456.264,00

Piutang retribusi tersebut terdiri dari:

Tabel 4.50 Rincian Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	212.410.157,00	621.316.613,00
2	Piutang retribusi Ijin Gangguan/Keramaian (HO)	51.898.211,00	51.898.211,00
3	Piutang retribusi Ijin Trayek	3.800.000,00	3.800.000,00
4	Piutang retribusi Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Piutang Retribusi UPTD Laboratorium Lingkungan	22.364.000,00	36.675.000,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	61.862.175,00	83.167.875,00
7	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	3.323.859.732,00	3.202.101.132,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	671.733.388,00	3.090.435.433,00
9	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	2.170.918.200,00	2.026.922.000,00
10	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	29.800.000,00	-
	Jumlah	6.549.785.863,00	9.117.456.264,00

Rincian dapat dilihat pada *lampiran 4*.

Saldo piutang retribusi sebesar Rp6.549.785.863,00 tersebut berasal dari mutasi piutang retribusi selama Tahun 2025 yang meliputi:

Tabel 4.51 Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	9.117.456.264,00

2	Penambahan:	
3	Penetapan SKRD tahun 2025	187.784.087.495,00
4	Jumlah Penambahan	187.784.087.495,00
5	Pengurangan:	
6	Pembayaran tahun 2025	190.351.757.896,00
7	Jumlah Pengurangan	190.351.757.896,00
8	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (9 = 1+5-8)	6.549.785.863,00

Rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 4.52 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Retribusi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	621.316.613,00	2.672.452.440,00	3.081.358.896,00	212.410.157,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00
5	Laboratorium (DLH)	36.675.000,00	989.603.000,00	1.003.914.000,00	22.364.000,00
6	Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	83.167.875,00	811.570.600,00	832.876.300,00	61.862.175,00
7	Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	3.202.101.132,00	3.664.910.850,00	3.543.152.250,00	3.323.859.732,00
8	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.090.435.433,00	171.110.129.159,00	173.528.831.204,00	671.733.388,00
9	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	2.026.922.000,00	6.769.710.100,00	6.625.713.900,00	2.170.918.200,00
10	Retribusi Pelayanan Persampahan	-	1.765.711.346,00	1.735.911.346,00	29.800.000,00
	Jumlah	9.117.456.264,00	187.784.087.495,00	190.351.757.896,00	6.549.782.863,00

- a. Piutang Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.733.388,00 merupakan hak penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD Cibabat terkait dengan penyediaan jasa kesehatan atas pelayanan kesehatan dari RSUD Cibabat. Pada penambahan piutang tahun 2025 terdapat saldo awal Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp3.090.435.433,00 yang pada tahun

2024 merupakan saldo akhir dari Piutang Lainnya dan pada tahun 2025 menjadi Piutang Retribusi.

- b. Piutang Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum) - BLUD Air Minum sebesar Rp2.170.918.200,00 merupakan Piutang Dari BLUD Air Minum yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pada penambahan piutang tahun 2025 terdapat saldo awal Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum) - BLUD Air Minum sebesar Rp2.026.922.000,00 yang pada tahun 2024 merupakan saldo akhir dari Piutang Lainnya dan pada tahun 2025 menjadi Piutang Retribusi.

4.3.11. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan taksiran nilai Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Retribusi Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.663.924.589,61 dengan rincian:

Tabel 4.53 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2024 (Rp)
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	80.631.664,61	343.680.515,00
Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	51.898.211,00
Izin Trayek (IT)	3.800.000,00	3.800.000,00
Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
Laboratorium (DLH)	17.349.762,50	17.055.092,50
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	46.700.250,00	43.365.993,38
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.913.056.394,50	2.862.858.169,50
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	128.656.738,00	319.878.374,50
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	1.419.744.094,00	1.310.732.964,50
Retribusi Pelayanan Persampahan	947.475,00	-
Jumlah	4.663.924.589,61	4.954.409.320,38

Rincian dapat dilihat pada *lampiran 4*.

4.3.12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.102.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.54 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	60.102.000.000,00	22.759.049.000,00
Rincian Piutang :		
1. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.	32.906.057.000,00	9.846.644.000,00
2. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.	2.756.029.000,00	1.494.897.000,00
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.	2.506.143.000,00	556.682.000,00
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi.	2.304.488.000,00	148.373.000,00
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi.	604.500.000,00	1.061.469.000,00
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara.	1.039.322.000,00	588.194.000,00
7. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi.	17.957.202.000,00	9.046.731.000,00
8. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan.	28.259.000,00	16.059.000,00

4.3.13. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas bagi hasil daerah yang dicatat berdasarkan jumlah nilai definitif yang menjadi bagian Kota Cimahi dan telah ditetapkan dengan peraturan atau surat keputusan tetapi masih ada hak yang masih harus diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.55 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	727.599.116,00	5.985.683.110,00

Piutang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2025 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.56 Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Belum Disalurkan Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Bagi Hasil Pajak	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	587.353.740,00	2.680.613.490,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	128.133.150,00	2.474.810.100,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.264.208,00	2.738.740,00
4	Pajak Air Permukaan	10.848.018,00	22.772.299,00
5	Pajak Rokok	-	804.748.481,00
Jumlah		727.599.116,00	5.985.683.110,00

4.3.14. Belanja Dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi yang

dilakukan pada Tahun 2025 tetapi terdapat sisa periode/manfaat pada Tahun 2025. Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.57 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Dibayar dimuka	6.484.071.795,14	3.671.482.424,39

Belanja Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.484.071.795,14 tersebut merupakan biaya dibayar dimuka atas Asuransi Barang Milik Daerah, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Sewa Tanah untuk Jalan, Sewa Bangunan Gedung Kantor, Ganti Rugi, Sewa Rumah Dinas, Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi, Sewa Tanah Persil Lainnya, Sewa Aset tidak Berwujud, dan Sewa Bangunan Gudang.

Rincian Biaya Dibayar dimuka dapat dilihat pada *lampiran 5*.

4.3.15. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset sampai dengan Tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat kekurangan setor Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) atas Uang Persediaan Tahun 2025 yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp400.501.323,00. Bendahara Pengeluaran DPKP telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 2 Februari 2026 dan Kekurangan tersebut telah setorkan ke Kas Daerah Kota Cimahi pada tanggal 13 Februari 2026. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.58 Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	571.420.491,80	193.105.807,80

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp571.420.491,80 tersebut berasal dari mutasi selama Tahun 2025 yang meliputi:

Tabel 4.59 Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kerugian keuangan daerah	532.553.823,80	154.239.139,80
Kerugian kehilangan aset daerah	38.866.668,00	38.866.668,00
Kerugian -Kelebihan Pembayaran Ke Pihak Ketiga	-	-
Jumlah	571.420.491,80	193.105.807,80
Penerimaan pembayaran	-	-
Koreksi	-	-
Saldo Tuntutan Ganti Rugi	571.420.491,80	193.105.807,80
Saldo Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :		
Bagian lancar	571.420.491,80	193.105.807,80
Bagian jangka panjang	-	-
Jumlah	571.420.491,80	193.105.807,80

Jangka waktu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang telah terlewati menyebabkan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Disisihkan yaitu sebesar Rp170.919.168,80. Kerugian sebesar Rp400.501.323,00 tidak disisihkan karena telah dibayar sebelum tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Tabel 4.60 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	170.919.168,80	193.105.807,80

Rincian kasus tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *lampiran 6*.

4.3.16. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.61 Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Lainnya	224.137.525,00	573.350.325,00

Saldo piutang lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 4.62 Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang BPJS Kesehatan (Dinkes)	0,00	349.212.800,00
2	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
	Jumlah	224.137.525,00	573.350.325,00

Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru per 31 Desember 2025 sebesar Rp224.137.525,00 merupakan kekurangan setor atas kontribusi pengelolaan Pasar Antri Baru yang didasarkan atas perjanjian pengelolaan Pasar Antri Baru beserta fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah Nomor 180/09 Perj-/2004 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tanggal 31 Desember 2025 melalui Addendum Ke tujuh Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perdagangan Cimahi Mall Beserta Fasilitas Penunjangnya Nomor 032/PK-5292/BPKAD antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT. Bumi Kencana Indah atas :

Tabel 4.63 Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru Tahun Anggaran 2025

Jenis Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang pajak parkir	26.480.000,00	26.480.000,00
Piutang retribusi pelayanan parkir	183.509.525,00	183.509.525,00
Piutang retribusi sub terminal	14.148.000,00	14.148.000,00
Jumlah	224.137.525,00	224.137.525,00

4.3.17. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.64 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025

Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2024 (Rp)
Piutang BPJS Kesehatan (Dinkes)	-	1.746.064,00
Piutang atas pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
Jumlah	224.137.525,00	225.883.589,00

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengatur bahwa penyisihan Piutang Lainnya dihitung berdasarkan progress dari keluarnya surat tagihan .

4.3.18. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.65 Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Persediaan	34.861.016.016,58	31.884.978.888,97

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.861.016.016,58 tersebut terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan baku bangunan, alat KB, suku cadang dan bahan material. Saldo persediaan tersebut diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir, kecuali untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Cibabat telah disajikan dengan metode FIFO. Saldo persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.861.016.016,58 tersebut berada pada:

Tabel 4.66 Rincian Saldo Persediaan OPD Tahun Anggaran 2025

No	OPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	30.049.700,00	46.552.850,00
2	Dinas Kesehatan	11.003.743.173,12	7.594.504.280,22
3	RSUD Cibabat	8.754.113.898,53	8.259.028.088,74
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.907.071.762,00	12.183.078.700,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	216.845.689,00	250.685.112,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	510.049.809,00	390.185.809,00
8	Dinas Sosial	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-

No	OPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	202.229.016,06	118.714.768,06
11	Dinas Pangan Dan Pertanian	311.930.242,20	754.407.054,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	492.965.135,05	402.213.086,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	146.868.971,46	313.929.500,00
14	Dinas Perhubungan	1.909.356.450,92	1.122.227.990,95
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	45.199.200,00	59.399.000,00
19	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	20.479.500,00	-
20	Sekretariat Daerah	206.228.890,00	362.252.400,00
21	Sekretariat DPRD	53.960.975,24	-
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-	4.500.000,00
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.880.000,00	-
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	8.315.000,00	10.025.000,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.022.750,00	-
26	Inspektorat Kota	9.705.854,00	13.275.250,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	-	-
28	Kecamatan Cimahi Tengah	-	-
29	Kecamatan Cimahi Selatan	-	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	-	-
	JUMLAH	34.861.016.016,58	31.884.978.888,97

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Rincian Persediaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan jenis Persediaannya, sebagai berikut:

Tabel 4.67 Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2025

No	Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Listrik	1.867.935.395,81	1.047.852.120,12
2	Alat Tulis Kantor	137.111.526,60	120.424.554,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	695.117.273,07	566.604.492,11
4	Bahan Bakar dan Pelumas	571.500,00	560.000,00
5	Bahan Bangunan dan Konstruksi	879.367.721,24	761.742.494,00
6	Bahan Cetak	543.172.444,34	764.377.202,95
7	Bahan Kimia	4.008.101.046,37	3.525.344.534,22
8	Bahan Komputer	166.897.452,81	259.908.700,00
9	Bahan Lainnya	4.681.640.107,07	3.027.380.281,67
10	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	158.402.689,00	141.821.366,00
11	Benda Pos	9.690.000,00	11.230.000,00
12	Kertas dan Cover	142.346.808,12	98.315.620,00
13	Natura	27.958.381,00	70.544.713,00
14	Obat	10.032.211.150,70	8.429.276.638,84

No	Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
15	Obat-obatan Lainnya	90.909.391,15	85.803.518,00
16	Pakan	19.135.000,00	37.790.000,00
17	Perabot Kantor	349.461.196,24	343.127.451,00
18	Perlengkapan Dinas	4.125.645,00	-
19	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	575.181.825,06	827.973.803,06
20	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.318.408.463,00	11.538.486.000,00
21	Suku Cadang Alat Bengkel	-	33.900,00
22	Suku Cadang Alat Amgkutan	21.101.000,00	-
23	Suvenir/Cendera Mata	132.170.000,00	226.381.500,00
Jumlah		34.861.016.016,58	31.884.978.888,97

4.3.19. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok dengan jangka waktu maksimal pinjaman sebesar tiga tahun. Dana bergulir dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan membentuk sebuah Tim Dana Bergulir. Saldo dana bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.68 Saldo Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dana Bergulir	59.766.043,00	56.487.221,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 Rp59.766.043,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah pokok awal dana bergulir ditambah dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir di masyarakat yang diragukan akan tertagih. Berdasarkan Laporan Tim Pengelolaan Pengawasan dan Monitoring Dana Bergulir dan laporan dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pokok awal dana bergulir seluruhnya adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 dan telah disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp1.087.500.000,00 yang disalurkan berdasarkan dua cara:
 - 1) Penyaluran dengan nilai Rp125.000.000,00 disalurkan kepada kelompok usaha. Pada Tahap I diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok usaha dengan dengan nilai penyaluran sebesar Rp100.500.000,00 dengan nilai pengembalian (*revolving*) Tahap I sebesar Rp31.500.000,00. Sisa penyaluran dana Tahap I sebesar Rp24.500.000,00 dan pengembalian dari kelompok usaha sebesar Rp31.500.000,00 disalurkan kembali pada Tahap II kepada 4 (empat) kelompok usaha.
 - 2) Perjanjian Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor: 180/35.Perj/2009.407/CMI.PERJ/2009 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) koperasi/Baitul Mal Watamwil (BMT) sebesar Rp575.000.000,00 dan usaha mikro sebesar Rp387.500.000,00 yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan di Pemerintah Kota Cimahi.

- b. Perkembangan pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.69 Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)
Pokok dana bergulir	1.125.000.000,00
Penyaluran dana bergulir	(1.087.500.000,00)
Saldo dana bergulir	37.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman	780.910.786,00
Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(768.908.592,00)
Pokok dana bergulir yang ada dalam Tim Dana Bergulir	49.502.194,00
Pendapatan bunga dan jasa giro	156.882.500,00
Penyetoran pendapatan ke kas daerah	(142.637.019,00)
Biaya administrasi	(3.981.632,00)
Jumlah	59.766.043,00

Terdapat penyetoran pokok Dana Bergulir sebesar Rp3.400.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp60.000,00 yang dicatat sebagai penerimaan kembali investasi yang terdiri dari:

Tabel 4.70 Penyetoran Pokok Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Setoran Agus Mulyana	6-Jan-25	375.000,00
2	Setoran Tono Teguh Setyon	31-Jan-25	400.000,00
3	Setoran Yani Setianingsih	27-Feb-25	2.625.000,00
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro		3.400.000,00
	Jumlah Setoran Pokok Koperasi		-
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro dan Koperasi		3.400.000,00
1	Setoran Bunga Agus Mulyana	6-Jan-25	60.000,00
	Jumlah Setoran Bunga Pinjaman Usaha Mikro		60.000,00
	Jumlah Setoran Pokok dan Bunga Pinjaman		3.460.000,00

Saldo dana bergulir sebesar Rp59.766.043,00 seluruhnya berada pada rekening Bank BJB nomor 0008291470001 atas nama Tim Pengelola Dana Bergulir.

- c. Sisa dana bergulir yang masih ada di masyarakat adalah sebesar Rp306.589.217,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.71 Rincian Sisa Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Bergulir yang disalurkan	1.087.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman s.d 2024	(777.510.783,00)
Sisa Dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2024	309.989.217,00

Pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2025	3.400.000,00
Sisa dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2025	306.589.217,00

Seluruh sisa dana di masyarakat tersebut termasuk kategori macet sehingga keseluruhan nilai tersebut dilaporkan sebagai dana bergulir yang diragukan tertagih. Kemacetan tersebut dikarenakan:

- 1) Usaha yang dijalankan tidak dapat bersaing, pailit dan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- 2) Penerima dana bergulir meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dan alamat baru tidak dapat diketahui.

Terhadap dana yang masih berada di masyarakat tersebut, tetap dilakukan upaya penagihan dan sebagian dari penerima manfaat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman.

- d. Atas dasar kondisi tersebut, untuk nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah hanya dana yang ada pada rekening Tim Pengelola Dana Bergulir saja yaitu sebesar Rp59.766.043,00.

4.3.20. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.72 Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.777.623.090,00	70.302.688.408,00

Penyertaan modal tersebut terdiri dari:

Tabel 4.73 Rincian Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025(Rp)	2024(Rp)
1	PT Bank BJB Tbk	35.777.623.090,00	35.777.623.090,00
2	PD Jati Mandiri	-	34.525.065.318,00
Jumlah		35.777.623.090,00	70.302.688.408,00

Dari tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank BJB mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kepemilikan saham Pemerintah Kota Cimahi setelah IPO sebesar 1.07% dengan jumlah 104.000.000 lembar saham. Penyertaan modal pada PT Bank BJB sebesar Rp35.777.623.090,00 merupakan nilai berdasarkan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi kurang dari 20%. Data realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.74 Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk

Tahun	Nilai Penyertaan (Rp)	Saldo (Rp)
2002	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Tahun	Nilai Penyertaan (Rp)	Saldo (Rp)
2003	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2004	5.000.000.000,00	11.000.000.000,00
2005	5.000.000.000,00	16.000.000.000,00
2006	2.500.000.000,00	18.500.000.000,00
2007	2.500.000.000,00	21.000.000.000,00
2008	2.500.000.000,00	23.500.000.000,00
2009	2.500.000.000,00	26.000.000.000,00
2022	9.777.623.090,00	35.777.623.090,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Barat dan Banten, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 9 Maret 2022 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 7.215.958 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.355,00 senilai Rp9.777.623.090,00, dengan penyertaan modal tersebut jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah 104.000.000 Lembar Saham Seri A dan 7.215.958 Lembar Saham Seri B.

- b. Penyertaan modal pada PD Jati Mandiri per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.351.000.000,00 merupakan nilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi lebih dari 50%.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi ke PD Jati Mandiri sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD Jati Mandiri adalah sebesar Rp51.351.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.75 Rincian Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri

No	TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
1	2006	27.000.000.000,00
2	2007	15.000.000.000,00
3	2010	2.800.000.000,00
4	2011	4.000.000.000,00
5	2013	1.551.000.000,00
6	2014	1.000.000.000,00
JUMLAH		51.351.000.000,00

Sedangkan saldo rugi sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp34.525.065.318,00 dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

Tabel 4.76 Rincian Sisa Modal yang Disertakan pada PD Jati Mandiri

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	2006	PD Jati Mandiri	27.000.000.000,00	.	27.000.000.000,00
2	2007	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(83.543.057,00)	41.916.456.943,00
3	2008	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(303.940.227,75)	41.696.059.772,25
4	2009	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	5.848.661.350,15	47.848.661.350,15

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
5	2010	PD Jati Mandiri	44.800.000.000,00	4.198.313.359,98	48.998.313.359,98
6	2011	PD Jati Mandiri	48.800.000.000,00	1.825.475.045,52	50.625.475.045,52
7	2012	PD Jati Mandiri	48.800.000.000,00	(741.246.025,00)	48.058.753.975,00
8	2013	PD Jati Mandiri	50.351.000.000,00	(1.334.312.162,00)	49.016.687.838,00
9	2014	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(2.675.227.439,00)	48.675.772.561,00
10	2015	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(5.036.957.720,00)	46.314.042.280,00
11	2016	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(6.305.696.640,00)	45.045.303.360,00
12	2017	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(7.894.853.454,00)	43.456.146.546,00
13	2018	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.479.403.846,00)	42.871.596.154,00
14	2019	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.524.303.990,50)	42.826.696.009,50
15	2020	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.690.655.813,50)	42.660.344.186,50
16	2021	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(8.857.007.636,50)	42.493.992.363,50
17	2022	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(9.023.359.459,50)	42.327.640.540,50
18	2023	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(16.825.934.682,00)	34.525.065.318,00

Saldo Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri tersebut didasarkan laporan keuangan PD Jati Mandiri *audited* dan *unaudited*.

Perlu disampaikan bahwa kondisi PD Jati Mandiri Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) PD Jati Mandiri secara operasional telah berhenti disebabkan tidak memiliki modal usaha lagi akibat kerugian terus menerus.
- 2) Sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821/Kep.336.Admrek/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Periode 2013-2017 disebutkan bahwa Direksi PD Jati Mandiri selesai per tanggal 16 Agustus 2017.
- 3) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.276.Admrek/2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berakhir pada 22 Juli 2017.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat telah berupaya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah berpengalaman untuk menemukan solusi penyelesaian masalah perusahaan daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Melakukan upaya fasilitasi penyusunan kajian mengenai PD Jati Mandiri ke Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Cimahi.
- 5) Melakukan Upaya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penarikan Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri.

- 6) Mengajukan Permohonan untuk melakukan audit PD Jati Mandiri ke BPKP Perwakilan Jawa Barat namun ditolak melalui Surat BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor S.4331/PW10/5/2018 tanggal 8 Desember 2017.
- 7) Melakukan permohonan untuk melakukan audit PD Jati Mandiri ke KAP Koesbandiah Beddy Samsi dan Setiasih namun ditolak karena sampai dengan Tahun 2017 PD Jati Mandiri sampai dengan 2016 telah diaudit oleh KAP lain.
- 8) Mengeluarkan Surat Wali Kota Cimahi Nomor 539/5105/admrek tentang Penghentian Aktivitas dan Permohonan Dokumen Pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri termasuk Laporan Keuangan PD Jati Mandiri sebagai bahan audit.
- 9) Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengembalian aset PD Jati Mandiri ke Kota Cimahi.
- 10) Melakukan pembahasan permasalahan hukum terkait PD Jati Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga legal opinion tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PD Jati Mandiri.
- 11) Melakukan Kajian terhadap Aspek Operasional, Aspek Keuangan dan Aspek Ketaatan terhadap Regulasi PD Jati Mandiri oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan.
- 12) Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah PD Jati Mandiri.
- 13) Menyusun dan membahas Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah PD Jati Mandiri bersama DPRD Kota Cimahi.
- 14) Diundangkannya Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kota Cimahi pada tanggal 07 Februari 2023.
- 15) Penyusunan laporan keuangan penutup oleh mantan direksi, dan dewan pengawas dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditentukan belum berhasil menyelesaikan laporan neraca tersebut sesuai peraturan perundang-undangan laporan keuangan penutup disusun oleh pemerintah daerah dengan dibantu oleh KAP Sabar dan Rekan dengan konfirmasi dari mantan direksi dan dewan pengawas.
- 16) Pj Wali Kota menerbitkan surat perintah nomor 539/3640/Ekosda tanggal 18 September 2023 tentang penyusunan neraca penutup dan penyusunan Raperwal kepada pj Sekda, para asisten, Inspektorat, BPKAD, BAPPERIDA, Bagian Hukum dan Bagian Ekosda.
- 17) Pj Wali Kota menerbitkan surat perintah nomor 539/4366/Ekosda tanggal 09 November 2023 tentang penyusunan neraca penutup dan penyusunan Raperwal kepada pj Sekda, para asisten, Inspektorat, BPKAD, BAPPERIDA, Bagian Hukum dan Bagian Ekosda.
- 18) Pengundangan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri.
- 19) Penetapan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 500/Kep.2507-Ekosda/2025, Tanggal 10 Juni 2025 Tentang Tim Likuidasi Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri yang telah diubah dengan Nomor: 500/Kep.4099.Ekosda/2025, Tanggal 7 Agustus 2025. Tim Likuidasi dimaksud telah mengeluarkan Rekomendasi dalam Rangka Pembersihan Likuidasi Perusahaan Daerah Jati Mandiri.

Ringkasan Laporan Keuangan Penutup PD Jati Mandiri Per 7 Februari 2023 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.77 Ringkasan Laporan Keuangan Penutup PD Jati Mandiri

Laporan Rugi Laba Periode 7 Februari 2023	
Pendapatan	0.00
Belanja	7.803.897.866,00
Rugi Tahun 2021	(7.803.897.866,00)
Neraca Per 7 Februari 2023	
Aset	38.775.311.498,00
Neraca Per 7 Februari 2023	
Utang	4.250.246.180,00
Ekuitas	34.525.065.318,00

Dalam Aset senilai Rp38.775.311.498,00 terdapat Tanah senilai Rp38.773.988.854,00 yang masih dalam sengketa perdata, dengan uraian sebagai berikut :

- A. Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum antara Awong Hidjaja (Direktur Utama PT Adi Darma Bumi Indonesia) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail dkk.
 - 1) Perkara pada Tingkat Pertama No. 93/G/2011/PTUN-BDG, dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
 - 2) Perkara pada Tingkat Banding No. 134/B/2012/PT.TUN.JKT dimenangkan oleh PD Jati Mandiri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Idris Ismail dkk;
 - 3) Perkara pada Tingkat Kasasi Nomor 120 K/TUN/2013 dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
 - 4) Perkara Pada Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
 - 5) Namun berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB Jo. Nomor : 76/Pdt.G/2004 PN.BB Jo. Nomor: 372/Pdt/2006/Pt.2006/PT.Bdg Jo. Nomor: 1686 K/ Pdt/2007. Tentang “NON EKSEKUTABEL ATAU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI”. Maka Tanah tersebut kembali menjadi milik PD. Jati Mandiri di karenakan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 yang dimenangkan oleh Awong Hidjaja itu sebatas membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (sisi administrasi), bukan membatalkan kepemilikan karena hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 6) Berdasarkan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 1 Juli 2021 dan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 716/Pdt/2022/PT.BDG tanggal 24 Januari 2023 memutuskan kembali memenangkan Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail sebagai pemilik Tanah Cibeureum.
- B. Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum Nomor 121/G/2024/PTUN.BDG Tanggal 3 September 2024 antara Para Ahli Waris Enar Endang melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Berdasarkan Putusan Perkara tersebut dinyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima.
- C. Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN.Blb (Februari 2025) antara Oti Supiati dkk selaku penggugat melawan PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah selaku Tergugat I, Ahli

Waris Rd. Soma Wargadireja selaku Tergugat II, Ahli Waris Ida Rosliah selaku Tergugat III, Idris Ismail dan Juanri Bunadi selaku tergugat IV, PD. Jati Mandiri selaku Tergugat V, Wali Kota Cimahi selaku Tergugat VI, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi selaku turut tergugat.

4.3.21. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi dan pelayanan masyarakat. Saldo aset Tetap milik Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.78 Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	1.377.879.384.841,60	1.122.587.821.649,60
2	Peralatan dan Mesin	809.467.223.059,53	771.969.017.487,51
3	Gedung dan Bangunan	1.037.035.877.473,12	972.875.826.375,88
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	992.403.378.356,41	954.743.997.013,49
5	Aset Tetap Lainnya	77.686.922.764,32	76.761.220.852,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.541.455.757,00	5.266.647.658,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.570.765.325.530,23)	(1.478.543.952.959,13)
	Jumlah	2.730.248.916.721,75	2.425.660.578.077,82

Rincian aset tetap dapat dilihat pada *lampiran 8*. Atas posisi aset tetap per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Mutasi aset tetap pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.79 Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan Tahun 2025 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	1.122.587.821.649,60	265.967.042.163,00	10.675.478.971,00	1.377.879.384.841,60
Peralatan dan Mesin	771.969.017.487,51	60.135.266.509,00	22.637.060.936,98	809.467.223.059,53
Gedung dan Bangunan	972.875.826.375,88	88.908.454.331,00	24.748.403.233,76	1.037.035.877.473,12
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	954.743.997.013,49	39.249.495.606,00	1.590.114.263,08	992.403.378.356,41
Aset Tetap Lainnya	76.761.220.852,47	6.545.304.180,00	5.619.602.268,15	77.686.922.764,32
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.266.647.658,00	6.385.644.824,00	5.110.836.725,00	6.541.455.757,00
JUMLAH	3.904.204.531.036,94	467.191.207.613,00	70.381.496.397,97	4.301.014.242.251,98

Dari tabel mutasi aset tetap di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Penambahan aset tetap selama tahun 2025 sebesar Rp467.191.207.613,00 dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp174.579.386.887,00 (termasuk Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.909.407.230,00 (Lampiran 8a)
 - b) Reklas antar KIB sebesar Rp13.736.989.332,00
 - c) Reklas dari belanja pemeliharaan Rp1.566.065.926,00
 - d) Reklas dari belanja persediaan Rp169.399.400,00
 - e) Mutasi antar SKPD sebesar Rp26.021.324.058,00
 - f) Reklas dari aset lainnya Rp35.000.000,00
 - g) Hibah sebesar Rp61.700.831.250,00
 - h) BTT sebesar Rp4.315.698.770,00
 - i) Koreksi sebesar Rp185.066.511.990,00

- 2) Pengurangan aset tetap selama tahun 2025 sebesar Rp70.381.496.397,97 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Reklas Antar KIB sebesar Rp13.736.989.332,00
 - b) Reklas ke belanja Barang dan Jasa sebesar Rp185.857.600,00
 - c) Reklas ke pemeliharaan sebesar Rp55.052.925,00
 - d) Reklas ke persediaan sebesar Rp619.478.951,00
 - e) Mutasi antar SKPD sebesar Rp26.021.324.058,00
 - f) Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp665.027.000,00
 - g) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp25.454.434.642,13
 - h) Koreksi sebesar Rp3.643.331.889,84

Tabel 4.80 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

a. Penambah

Penambahan TA 2025	Belanja Modal (Rp)	Reklas Antar KIB (Rp)	Reklas dari Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pemeliharaan (Rp)	Reklas dari Belanja Persediaan (Rp)	Mutasi Antar SKPD (Rp)	Reklas dari Aset Lainnya (Rp)	Hibah (Rp)	BTT(Rp)	Koreksi (Rp)	Total Penambahan (Rp)
Tanah	14.008.020.163,00	-	-	-	-	8.319.000.000,00	-	59.302.834.000,00	-	184.337.188.000,00	265.967.042.163,00
Peralatan dan Mesin	42.430.742.024,00	1.245.406.148,00	-	145.214.217,00	10.103.400,00	13.855.658.470,00	35.000.000,00	2.397.997.250,00	15.145.000,00	-	60.135.266.509,00
Gedung dan Bangunan	78.392.468.465,00	2.220.621.940,00	-	1.420.851.709,00	34.976.000,00	2.738.765.588,00	-	-	3.371.446.639,00	729.323.990,00	88.908.454.331,00
Jalan, irigasi & Jaringan	33.239.481.455,00	3.848.687.020,00	-	-	124.320.000,00	1.107.900.000,00	-	-	929.107.131,00	-	39.249.495.606,00
Aset Tetap Lainnya	6.508.674.780,00	36.629.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.545.304.180,00
KDP	-	6.385.644.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.385.644.824,00
Total	174.579.386.887,00	13.736.989.332,00	-	1.566.065.926,00	169.399.400,00	26.021.324.058,00	35.000.000,00	61.700.831.250,00	4.315.698.770,00	185.066.511.990,00	467.191.207.613,00

b. Pengurang

Pengurangan TA 2025	Tidak Dikapitalisasi (Rp)	Reklas Antar KIB (Rp)	Reklas ke Barang dan Jasa (Rp)	Reklas ke Pemeliharaan (Rp)	Reklas ke Persediaan (Rp)	Mutasi Antar SKPD (Rp)	Reklas ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi ke Aset Lain-lain (Rp)	Rusak Berat / Penghapusan (Rp)	Koreksi (Rp)	Hibah (Rp)	Total Pengurangan (Rp)
Tanah	-	49.550.400,00	-	-	-	8.319.000.000,00	-	-	2.306.928.571,00	-	-	10.675.478.971,00
Peralatan dan Mesin	-	36.629.400,00	-	-	405.699.012,00	13.855.658.470,00	-	-	8.325.274.054,98	13.800.000,00	-	22.637.060.936,98
Gedung dan Bangunan	-	11.250.136.626,00	185.857.600,00	55.052.925,00	208.379.939,00	2.738.765.588,00	521.189.900,00	-	9.230.230.848,00	558.789.807,76	-	24.748.403.233,76
Jalan, irigasi & Jaringan	-	39.013.902,00	-	-	5.400.000,00	1.107.900.000,00	-	-	157.770.000,00	280.030.361,08	-	1.590.114.263,08
Aset Tetap Lainnya	-	41.534.000,00	-	-	-	-	143.837.100,00	-	5.434.231.168,15	-	-	5.619.602.268,15
KDP	-	2.320.125.004,00	-	-	-	-	-	-	-	2.790.711.721	-	5.110.836.725,00
Total	-	13.736.989.332,00	185.857.600,00	55.052.925,00	619.478.951,00	26.021.324.058,00	665.027.000,00	-	25.454.434.642,13	3.643.331.889,84	-	70.381.496.397,97

A. Aset Tetap Tanah

Saldo aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.81 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan Tahun 2025 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	1.122.587.821.649,60	265.967.042.163,00	10.675.478.971,00	1.377.879.384.841,60

Transaksi penambahan aset tetap tanah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp265.967.042.163,00 sebagai berikut:

- Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp14.008.020.163,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp8.319.000.000,00
- Hibah sebesar Rp59.302.834.000,00
- Koreksi Rp184.337.188.000,00

Transaksi Pengurangan aset tetap tanah selama tahun 2025 sebesar Rp10.675.478.971,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp8.319.000.000,00
- Reklas Antar KIB sebesar Rp49.550.400,00
- Rusak Berat/ Penghapusan sebesar Rp2.306.928.571,00

Selain mutasi tambah dan mutasi kurang Tahun 2025 informasi tentang Aset Tetap Tanah lainnya adalah sebagai berikut:

a. Lahan jalan kota berada di atas tanah milik TNI.

Terdapat aset tetap tanah yang telah dipindahkan ke aset lainnya dikarenakan sebanyak 19 (sembilan belas) ruas jalan di Kota Cimahi berada diatas tanah milik TNI. Hal tersebut berdasarkan Penelitian Fisik dan Administrasi Lahan pada hari Rabu, 6 September 2023, dengan menghadirkan perwakilan dari BPKAD Kota Cimahi, DPUPR Kota Cimahi, ATR BPN Kota Cimahi, Zidam III/Slw serta Denzibang I/III Bdg. Penelitian lapangan ini menghasilkan Berita Acara yang menyajikan secara rinci status jalan kota yang berada di wilayah penguasaan TNI.

Pemerintah Kota Cimahi telah melayangkan surat permohonan pinjam pakai lahan kepada Pangdam yaitu:

- Surat Nomor 032/5138/BPKAD, tanggal 19 Desember 2023, hal Permohonan Pinjam Pakai Lahan
- Surat Nomor 032/4177/BPKAD, tanggal 14 Oktober 2024, hal Permohonan Pinjam Pakai Lahan
- Surat Nomor 032/2759/BPKAD, tanggal 4 Juli 2025, hal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Pinjam Pakai Aset Tanah BMN Kodam III/Slw.

Saat ini telah berkoordinasi dengan Aslog Kodam III/Slw untuk pembuatan draft Perjanjian Sementara Pinjam Pakai antara Kodam III/Siliwangi dengan Pemerintah Kota Cimahi dan sedang dilakukan paraf dokumen di kedua belah pihak.

Adapun rincian lahan yang dimohon pinjam pakai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.82 Rincian Lahan Pinjam Pakai ke TNI

No	NMUNIT	NMASET	NILAI PEROLEHAN (Rp)	LUAS TNH	ALAMAT	KETERANGAN
1	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9,743,390,000.00	6,885	Jl. Kalidam, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0008 /Karangmekar
2	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4,878,000,000.00	9,000	Jl. Pasar Kumeli, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0009 /Karangmekar
3	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1,740,000,000.00	8,700	Jl. Poncol kec.cimahi tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00010/Karangmekar
4	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1,847,860,000.00	2,345	Jl. Simpang, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0007/Karangmekar
5	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Lain-lain	82,620,000.00	340	Jl. Munajan, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Baros
6	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1,159,250,000.00	1,840	Jl. Taman Kartini, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00030/Baros
7	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3,410,900,000.00	4,542	Jl. Sam Ratulangi, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00035/Baros
8	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1,775,700,000.00	3,600	Jl. Pasopati, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah
9	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Lain-lain	673,260,000.00	735	Jl. Pojok Selatan	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah
10	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Lain-lain	96,900,000.00	340	Jl. Unjani	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00035/Baros
11	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7,099,350,000.00	6,075	Jl. Gedung Empat, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0007/Karangmekar
12	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11,698,970,000.00	13,855	Jl. Sriwijaya, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah
13	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1,900,800,000.00	1,440	Jl. Terusan Kalidam, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0009 /Karangmekar
14	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2,892,750,000.00	5,350	Jl. Setasion, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00011/Karangmekar
15	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2,565,750,000.00	4,920	Jl. Bapa Amp, Kecamatan Cimahi Tengah	Panjang Jalan 0,820 km, terdiri dari 0,622 km masuk kedalam jalan umum dan 0,198 km masuk dalam sertifikat lahan TNI sesuai penunjukkan batas dilapangan
16	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11,264,800,000.00	18,780	Jl. Ibu Ganirah, Kecamatan Cimahi Tengah	Panjang Jalan 3,082 km, terdiri dari 2,123 km masuk kedalam jalan umum dan 0,959 km masuk dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.

No	NMUNIT	NMASET	NILAI PEROLEHAN (Rp)	LUAS TNH	ALAMAT	KETERANGAN
17	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9,205,760,000.00	9,720	Jl. Sisingamangaraja, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah. Panjang jalan 1,192 km, terdiri dari 0,625 km, masuk kedalam jalan umum dan 0,567 km masuk ke dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.
18	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Lain-lain	145,780,000.00	370	Jl. Lapangan Tembak	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Setiamanah. anjang Jalan 0,370 km, terdiri dari 0,116 km, masuk kedalam jalan umum dan 0,254 km masuk dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.
19	DPUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2,227,110,000.00	2,490	Jl. Sukimun, Kecamatan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Baros, Panjang Jalan 0,375 km, terdiri dari 0,240 km, masuk kedalam jalan umum dan 0,135 km masuk dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.

b. Lahan yang berada di daerah luar Kota Cimahi (Paku Haji, Kab. Bandung Barat).

Selain itu terdapat tanah seluas 30.750 m² yang tercatat di KIB A sebesar Rp3.228.750.000,- yang kami catat berdasarkan inventarisasi pada saat penyusunan neraca awal Pemerintah Kota Cimahi sebagai lahan aset milik Pemerintah Desa Padasuka yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Padasuka.

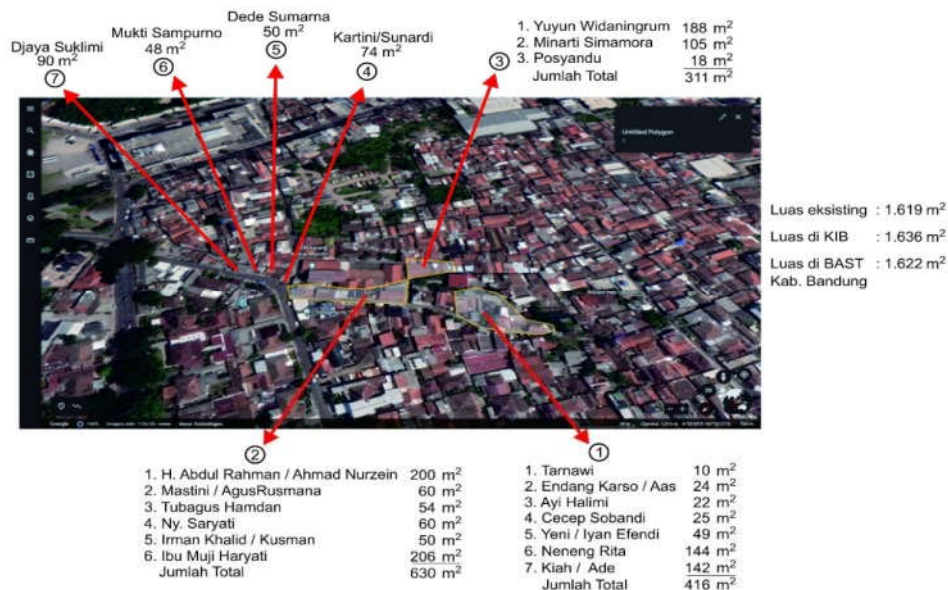
Terdapat lahan milik Desa Padasuka berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/Kep.516-PemDes/1986 tentang Penetapan Tanah Pengganti bekas tanah hak pakai Desa Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Tingkat II Bandung yang dipergunakan oleh Stadion Olah Raga Koni Jawa Barat. Lahan pengganti tersebut merupakan lahan milik Drs. Aliman SA seluas 9.090 M², yang berlokasi di blok Pakuhaji Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, persil 6 D.III Kohir 387 dan lahan milik Nunung seluas 3.564 M², milik Asep Karwita seluas 1.910 M², dan Ariyah seluas 3.910 M² dan seluruh tanah tersebut berada di blok Tegal Kawung Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, persil 94 b. S.IV. Hingga saat ini keberadaan lahan tersebut tidak dicatat dalam Neraca aset tanah milik Pemerintah Kota Cimahi.

Pada hari Rabu Tanggal 20 November 2024 bertempat di BPKAD Kota Cimahi telah dilakukan pertemuan antara BPKAD Prov. Jawa Barat, BPKAD Kota Cimahi, BKAD Kab. Bandung Barat, Inspektorat Daerah Kab. Bandung, Bagian Hukum Setda Kab. Bandung, Bidang Pertanahan Disperkimtan Kab. Bandung, dan Bidang Pengelolaan BMD Kab. Bandung mengenai Pembahasan dan Peninjauan lokasi tanah yang menjadi objek temuan BPK RI Tahun 2023.

Dari hasil peninjauan lapangan, didapat keterangan dari pihak Desa Paku Haji bahwa lahan atas nama Aliman tercatat di Buku C sebagai lahan hak milik dan telah berpindah tangan ke beberapa orang.

c. Lahan di Jalan Kapten Iskak (Adanya penguasaan warga).

Sejak tahun 1970an di atas lahan tersebut telah berdiri puluhan rumah. Tahun 2004 telah terjadi Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanah, Bangunan, Kendaraan Dinas, Perlengkapan Kantor, Dokumen dan Arsip dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kota Cimahi, Nomor 030/331/BIN.PEN.UM dan Nomor 180/06-BA/2004, tanggal 25 Februari 2004 yang meliputi penyerahan Tanah, Bangunan, Kendaraan Dinas, Perlengkapan Kantor, Dokumen dan Arsip. Salah satunya lahan yang diserahterimakan tersebut adalah lahan di Jalan Kapten Iskak dengan luasan 1.622 M2 (peruntukkan sewa). Saat ini di atas tanah tersebut berdiri sebanyak 20 Bangunan/Rumah yang telah dihuni/dimanfaatkan oleh masyarakat.



Secara keseluruhan lahan tersebut terbagi menjadi 7 (tujuh) bidang tanah yang saling terpisah yaitu:

Tabel 4.83 Rincian Lahan di Jalan Kapten Iskak

No.	Nama Warga	Sertipikat	Keterangan
1.	Tarnawi, Endang Karso, Ayi Halimi, Cecep Sobandi, Yeni, Neneng Rita, Kiah Ade	Hak Pakai 1028.000001929.0 Tahun 2024	
2.	H. Abdul Rahman, Mastini, Tubagus Hamdan, Saryati, Irman, Muji	-	Keluarga Ibu Muji bersedia untuk melakukan proses sewa dan berharap bisa melakukan proses ruislag kedepannya.
3.	Yuyun, Minarti, Gedung Posyandu	Hak Pakai 1028.000001930.0 Tahun 2024	
4.	Kartini/Sunardi	-	Proses sertifikasi
5.	Dede Sumarna	-	Proses sertifikasi
6.	Mukti Sampurno	-	Proses sertifikasi
7.	Djaya Suklimi	-	Berada di Lahan TNI AD

Untuk lahan di nomor 4 s.d 7 telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak TNI AD dengan adanya peninjauan lapangan kembali dan dinyatakan bahwa hanya lahan nomor 7 (dimanfaatkan oleh Djaya Suklimi) yang merupakan Lahan TNI. (Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dan Administrasi Lahan Nomor: KU.03.07/BA.223/BPKAD tanggal 23 Juni 2025, ditandatangani pihak BPKAD Kota Cimahi, Denzibang I/III Bdg, Kelurahan dan dari RT RW setempat.

d. Lahan di Citeureup yang dimanfaatkan Padepokan Haur Wulung.

1. Lahan tersebut terletak di Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara dengan sertipikat Nomor 24 Tahun 2013, luasan 4.907 M², Pemegang Hak Pemerintah Kota Cimahi.
2. Penggunaan saat ini oleh:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup seluas ± 1.500 M², untuk TPPSR
 - b. Padepokan Haur Wulung seluas ± 3.400 M², untuk padepokan pengembangan budaya daerah.
3. Penguasaan lahan oleh Padepokan Haur Wulung diawali dari perizinan lisan oleh Kepala Daerah periode tahun 2012-2017.
4. Di tahun 2024 telah dilakukan koordinasi persuasif ke Padepokan dan menghimbau untuk segera melakukan perijinan pemakaian lahan ke Wali Kota, untuk mendapatkan legalitas atas pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Di tahun 2025 telah dilakukan kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Pengembalian Aset Tanah dari Yayasan Haur Wulung Kencana kepada Pemerintah Kota Cimahi pada 5 Januari 2025 di Ruang Rapat Wali Kota Cimahi. Untuk

selanjutnya pihak Yayasan Haur Wulung Kencana bersedia melakukan proses sewa lahan, dan saat ini draft perjanjian sewa sedang dilakukan proses paraf dokumen.

e. Lahan di Cipageran yang dimanfaatkan oleh Yayasan Pambudhi Dharma.

Lahan tersebut terletak di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara dengan sertifikat Nomor 39 Tahun 2014, luasan 17.122 M², Pemegang Hak Pemerintah Kota Cimahi. Penggunaan saat ini oleh:

1. Dinas Lingkungan Hidup seluas ± 5.500 M², untuk TPST Sentiong
2. Sekolah Negeri Pambudi Dharma seluas ± 3.000 M²
3. Yayasan Pambudi Dharma seluas ± 8.500 M²

Adapun riwayat mengenai keberadaan Yayasan Pambudi Dharma tersebut adalah sebagai berikut:

Yayasan Pambudi Dharma adalah Yayasan Sosial yang berdiri tahun 1974 yang beralamat di Jl. Pojok Utara No. 271 /8-c Kotif Cimahi. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan anak cacat dan keterbelakangan mental dengan sasaran masyarakat Cimahi dan Bandung. Dalam rangka pengembangan yayasan tahun 1982 berencana mempeluas pembangunan Yayasan yang semula berlokasi di Pasar Atas dengan luas tanah 82,5m2 diatas tanah milik Depdikbud Cimahi Tengah. Untuk maksud tersebut , yayasan mencoba mencari dana guna pembangunan dan perluasan yayasan. Adapun urutan kronologisnya sebagai berikut:

1. 20 Oktober 1982 Ketua Umum BPK3S Jawa Barat Ny. H. Solihin.G.P menyampaikan permohonan kepada Bupati KDH. Tk.II Kabupaten Bandung untuk dapat memberikan hak penguasaan tanah seluas 10.000 m2 atas nama Yayasan Pambudi Dharma.
2. 26 Mei 1983 Surat Rekomendasi Sekretaris pengendali Operasional Pembangunan (Solihin G.P) Nomor B. 630/SEKBANG /5/1983 Perihal Rekomendasi kepada Walikota Administratif Kota Cimahi.
3. 15 Maret 1984 Surat Gubernur KDH. Tingkat I (A. Kunaefi) Jawa Barat Nomor:593/Sk.510-Pem Des/1984 Tentang Persetujuan Mutusi/Tukar Menukar Bekas Tanah Hak Pakai Desa Setiamana Kecamatan Cimahi Utara Kab. Daerah. TK.II Bandung dengan isi surat meliputi:
 1. Menyetujui Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa Setiamana Kecamatan Cimahi Utara Kab. Daerah Tingkat II Bandung Seluas 15.000 m2 yang terletak di blok warung muncrang Cipageran Letter c Nomor 1 Untuk Bangunan SLB-C
 2. Pembangunan Kantor Kelurahan Setiamana yang sesuai dengan persyaratan oleh Pihak SLB sebagai ganti rugi atas tanah tersebut. (tindak lanjut atas point ini tidak direalisasikan)
 3. Memerintahkan kepada Bupati KDH. Tk. II Bandung untuk mengawasi agar pihak untuk mengawasi agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud segera mengadakan kegiatan pelepasan atas tanah tersebut dihadapan Camat Setempat (tindak lanjut atas point ini tidak direalisasikan)
 4. Pihak-pihak yang menerima pelepasan bekas tanah hak pakai desa Setiamana segera menyelesaikan hak baru atas tanah tersebut kepada pejabat yang berwenang. (tindak lanjut atas point ini tidak direalisasikan)

4. 16 September 1996 Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 872/102.1/Kep/Ot/96 Tentang Memberikan izin kepada Yayasan Pambudi Dharma Jl. Pasar Atas No.3 Kotif Cimahi Untuk Mendirikan SLB Pambudi Dharma di Cimahi Bandung Mulai tahun Pelajaran 1996/1997.
5. 25 Februari 2004 Terjadi Berita Acara Nomor 030/331/Bid, Pem.Um- Nomor 180/06-Ba/2004 Tentang Serah Terima Tanah, Bangunan, Kendaraan Dinas Perlengkapan Kantor dan Dokumen Arsip Pemerintah Kabupaten Bandung Ke Pemerintah Kota Cimahi. Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara tersebut SD. Pambudi Dharma merupakan bagian aset yang diserahkan kepada pemerintah otonom Kota Cimahi dengan luas tanah 21.970 m².
6. 11 November 2014 Telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 00039 NIB 10280304.10084 Kelurahan Cipagaran seluas 17.122 m²
7. Hingga saat ini pihak Yayasan Pambudi Dharma belum melakukan proses pinjam pakai ke Pemerintah Kota Cimahi.

f. Lahan hasil pengadaan di area Cibodas Jalan Nanjung Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi telah melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pengadaan lapangan peruntukkan olahraga sebagai lahan pengganti sebelumnya yaitu Lapangan Krida yang telah beralih fungsi menjadi lahan TechnoPark Kota Cimahi. Lahan tersebut berlokasi di Blok Cibodas RT 04/11, Jalan Nanjung Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan.

Pengadaan tahap pertama di tahun 2018 telah dikuasai lahan seluas 11.143 M² dan keseluruhan lahan telah dilakukan proses sertifikasi. Adapun dalam pengadaan tahap kedua di tahun 2023-2024 telah dilakukan penjualan terhadap 3 pemilik lahan dengan masing-masing luasan 157 M² milik Sri Mulyati, 30 M² milik Wardo dan 2.766 M² milik Sunanto.

Dari ke 3 pemilik lahan tersebut yang dapat diselesaikan proses pembelian hingga balik nama kepemilikan tanah hanya 2 pemilik yaitu tanah milik Sri Mulyati dan tanah Wardo. Adapun tanah milik Sunanto terjadi penolakan karena tidak setuju atas hasil penilaian appraisal tanah yang sebelumnya sudah di sosialisasikan dan disetujui bersama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Kota Cimahi melakukan pengajuan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Lapangan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung atas lahan milik Sunanto seluas 2.766 M² tersebut. Pada tanggal 2 Januari 2024 keluar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait permohonan konsinyasi tersebut dilanjutkan dengan Putusan Berita Acara Sidang Nomor: 3/Pdt.Kons/2023/PN Bib tanggal 22 Februari 2024.

Atas belanja modal tanah yang telah keluar tersebut Pemerintah Kota Cimahi melakukan pencatatan dan penyajian tanah tersebut sebagai aset tetap tanah pada neraca (Bultek Nomor 15 tentang Aset Tetap berbasis Akrua PSAP 07- Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan). Pencatatan tersebut senilai Rp15.865.552.250,00 termasuk didalamnya lahan yang masih belum diterima dokumen legalitas lahan atas nama Sunanto dan uang ganti kerugian masih berada di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Pemerintah Kota Cimahi akan segera melakukan upaya tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan pengamanan lahan tersebut dengan cara persuasif dengan melibatkan

pendampingan dari instansi lain yang terkait.

g. Lahan hasil penyerahan dari pengembang perumahan (Prasarana dan Sarana Umum-PSU)

Sedangkan untuk proses penyerahan dari PSU di tahun 2025 terdapat 9 perumahan yang telah dilakukan proses BAST, Pelepasan hak dan diakui menjadi aset Pemerintah Kota, yaitu meliputi:

Tabel 4.84 Data Lahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Yang Telah Proses BAST dan Pelepasan Hak melalui DPKP

No	KodeBarang	AsalUsul	Luas Tanah (m2)	Address	Nilai (Rp)	Nomor Dan Tanggal BA
1	1.3.1.01.03.0 7.009.2023.0 00001	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	1337	Jalan Budi (Jalan Aruman) RT 009/004 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara (PSU Perumahan Cluster Aruman)	4.512.375.000,00	600/4898/ Sarpras 22/11/2024
2	1.3.1.01.03.0 7.009.2023.0 00001	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	4703	Jalan Ciawitali Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara (PSU Perumahan Alam Asri Residence)	5.394.341.000,00	600/3553/ Sarpras 17/09/2024
3	1.3.1.01.03.0 7.009.2023.0 00001	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	3776	Jalan Rancabentang RW 13 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan (PSU Perumahan Kenari Kebon Kopi Alam Asri)	3.458.816.000,00	600/4897/ Sarpras 22/11/2024
4	1.3.1.01.03.0 7.009.2023.0 00001	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	3125	Jalan Kebon Kelapa RT 001/003 Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah (PSU Perumahan Arcadia Regency)	9.687.500.000,00	600/3172/ Sarpras 20/08/2024
5	1.3.1.01.03.0 7.009.2023.0 00001	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	23730	Jalan Kol. Masturi Km. 3 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara (PSU-Jalan di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran)	6.947.160.000,00	600/4865/ Sarpras 19/11/2024
6	1.3.1.01.03.0 8.009.	Tanah Untuk Bangunan Air Lain-lain	3035	Jalan Kol. Masturi Km. 3 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara (PSU-Danau di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran)	7.138.320.000,00	600/346/ Sarpras 31/01/2024
7	1.3.1.01.03.1 3.003.	Tanah Lapangan Taman (RTH) Komplek Perumahan	1778	Jalan Kol. Masturi Km. 3 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara (PSU-Club House di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran)	3.310.636.000,00	600/346/ Sarpras 31/01/2024
8	1.3.1.01.01.0 6.007.	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lain-lain	605	Jalan Kol. Masturi Km. 3 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara (PSU-Mesjid di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran)	1.126.510.000,00	600/346/ Sarpras 31/01/2024
9	1.3.1.01.03.0 1.025.	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	2488	Jalan Kol. Masturi Km. 3 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara (PSU-Lap. Tennis di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran)	5.851.776.000,00	600/346/ Sarpras 31/01/2024
JUMLAH					47.427.434.000,00	

B. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.85 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	771.969.017.487,51	60.135.266.509,00	22.637.060.936,98	809.467.223.059,53

Transaksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.135.266.509,00 sebagai berikut:

- Belanja Modal Rp42.430.742.024,00
- Reklas Antar KIB Rp1.245.406.148,00
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan Rp145.214.217,00
- Reklas dari Belanja Persediaan Rp10.103.400,00
- Mutasi Antar SKPD Rp13.855.658.470,00
- Reklas dari Aset Lainnya Rp35.000.000,00
- Hibah Rp2.397.997.250,00
- BTT Rp15.145.000,00

Transaksi Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebesar Rp22.637.060,936,98 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reklas Antar KIB Rp36.629.400,00
- Reklas ke Persediaan Rp405.699.012,00
- Mutasi Antar SKPD Rp13.855.658.470,00
- Rusak Berat / Penghapusan Rp8.325.274.054,98
- Koreksi Rp13.800.000,00

C. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.86 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
Gedung dan Bangunan	972.875.826.375,88	88.908.454.331,00	24.748.403.233,76	1.037.035.877.473,12

Transaksi penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp88.908.454.331,00 sebagai berikut:

- Belanja Modal Rp78.392.468.465,00
- Reklas Antar KIB Rp2.220.621.940,00
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan Rp1.420.851.709,00
- Reklas dari belanja Persediaan Rp34.976.000,00

- e) Mutasi Antar SKPD Rp2.738.765.588,00
- f) BTT Rp3.371.446.639,00
- g) Koreksi Rp729.323.990,00

Selain penambahan sesuai transaksi diatas pada Tahun 2025 Dinas pendidikan juga menerima penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.668.324.155,00 melalui program revitalisasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 yang merupakan program strategis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas yang aman, nyaman, dan berkualitas. Sekolah Dasar Negeri yang menerima program revitalisasi adalah:

1	SD Negeri Cibeber Mandiri 1	Rp1.145.678.300,00
2	SD Negeri Leuwigajah 3	Rp657.913.748,00
3	SD Negeri Leuwigajah 5	Rp741.988.314,00
4	SD Negeri Cigugur Tengah Mandiri 1	Rp899.748.659,00
5	SD Negeri Sindangsari	Rp608.735.380,00
6	SD Negeri Sukamaju 2	Rp952.840.854,00
7	SD Negeri Cipageran Mandiri 3	Rp921.279.997,00
8	SD Negeri Citeureup Mandiri 1	Rp861.392.703,00
Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SD		<u>Rp6.789.577.955,00</u>

Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menerima program revitalisasi adalah:

1	SMP Negeri 6	Rp1.228.746.200,00
2	SMP Negeri 9	Rp650.000.000,00
Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SMP		<u>Rp 1.878.746.200,00</u>

Transaksi Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebesar Rp24.748.403.233,76 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Reklas Antar KIB Rp11.250.136.626,00.
- b) Reklas ke Barang dan Jasa Rp185.857.600,00
- c) Reklas ke Pemeliharaan Rp55.052.925,00
- d) Reklas ke Persediaan Rp208.379.939,00
- e) Mutasi Antar SKPD Rp2.738.765.588,00
- f) Reklas ke Aset Lainnya Rp521.189.900,00
- g) Rusak Berat / Penghapusan Rp9.230.230.848,00
- h) Koreksi Rp558.789.807,76

D. Jalan, irigasi & Jaringan

Saldo aset tetap Jalan, irigasi & Jaringan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.87 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	954.743.997.013,49	39.249.495.606,00	1.590.114.263,08	992.403.378.356,41

Transaksi penambahan aset tetap jalan, irigasi & jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp39.249.495.606,00 sebagai berikut;

- Belanja Modal Rp33.239.481.455,00
- Reklas Antar KIB Rp3.848.687.020,00
- Reklas dari Belanja Persediaan Rp124.320.000,00
- Mutasi Antar SKPD Rp 1.107.900.000,00
- BTT Rp929.107.131,00

Transaksi Pengurangan aset tetap jalan, irigasi & jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp1.590.114.263,08 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reklas Antar KIB Rp39.013.902,00
- Reklas ke Persediaan Rp5.400.000,00
- Mutasi Antar SKPD Rp1.107.900.000,00
- Rusak Berat / Penghapusan Rp157.770.000,00
- Koreksi Rp280.030.361,08

E. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.88 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	76.761.220.852,47	6.545.304.180,00	5.619.602.268,15	77.686.922.764,32

Transaksi penambahan aset tetap lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp6.545.304.180,00 sebagai berikut:

- Belanja Modal Rp6.508.674.780,00
- Reklas Antar KIB Rp36.629.400,00

Transaksi Pengurangan aset tetap lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp5.619.602.268,15 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reklas Antar KIB Rp41.534.000,00
- Reklas ke Aset Lainnya Rp143.837.100,00
- Rusak Berat / Penghapusan Rp5.434.231.168,15

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.89 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.266.647.658,00	6.385.644.824,00	5.110.836.725,00	6.541.455.757,00

Transaksi penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp6.385.644.824,00 yang merupakan reklas Antar KIB. Transaksi Pengurangan aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp5.110.836.725,00 terdiri dari reklas Antar KIB sebesar Rp2.320.125.004,00 dan Koreksi sebesar Rp2.790.711.721.

4.3.21. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025 sebesar (Rp1.570.765.325.530,23) Rincian akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada *lampiran 9*.

4.3.22. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.90 Rincian Saldo Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025

Jenis Aset Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	726.821.218,84	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
Aset Tidak Berwujud	14.443.830.909,90	13.468.087.309,90
Akumulasi Amortisasi	(12.954.692.289,56)	(11.874.118.178,18)
Aset Tak Berwujud Netto	1.489.138.620,34	1.593.969.131,72
Aset Lain Lain	102.510.205.697,09	112.352.449.989,37
Jumlah	109.563.649.156,61	118.888.733.252,81

Atas posisi aset lainnya per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Saldo Awal Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.348.345.000,00 merupakan nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m² yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri di

Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah dengan perjanjian Nomor 180/07-Perj/2003 Tanggal 17 Juli 2003.

- b. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.394.158.409,90 merupakan software yang terdiri dari :

Tabel 4.91 Rincian Aset Tidak Berwujud Berupa *Software* Tahun Anggaran 2025

OPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	668.380.800,00	668.380.800,00
Dinas Kesehatan	172.730.000,00	172.730.000,00
RSUD Cibabat	392.194.000,00	392.194.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.215.606.410,00	1.694.416.510,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	577.152.788,00	577.152.788,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.780.000,00	62.780.000,00
Dinas Sosial	198.000.000,00	170.253.360,00
Dinas Tenaga Kerja	539.897.120,00	539.897.120,00
Dinas Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205.146.210,00	150.000.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	71.975.455,00	71.975.455,00
Dinas Lingkungan Hidup	349.472.000,00	349.472.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	384.974.250,00	384.974.250,00
Dinas Perhubungan	404.761.895,00	355.089.395,00
Dinas Komunikasi dan Informatika.	1.067.731.233,00	1.067.731.233,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	819.692.900,00	819.692.900,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	137.150.000,00	137.150.000,00
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	143.837.100,00	
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	731.428.820,00	731.428.820,00
Sekretariat Daerah	265.576.000,00	265.576.000,00
Sekretariat DPRD	833.311.000,00	833.311.000,00
BAPPEDA	309.644.646,90	280.094.646,90
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.277.874.532,00	2.129.273.282,00
BPKAD	657.107.500,00	657.107.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	449.760.500,00	449.760.500,00
Inspektorat	49.700.000,00	49.700.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	71.193.750,00	71.193.750,00
Kecamatan Cimahi Tengah	173.664.500,00	173.664.500,00
Kecamatan Cimahi Selatan	100.595.000,00	100.595.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa	47.492.500,00	47.492.500,00
Jumlah	14.443.830.909,90	13.468.087.309,90

- c. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp12.954.692.289,56) merupakan amortisasi aset tetap tak berwujud dari tahun perolehan hingga tahun 2025. Rincian Akumulasi Amortisasi disajikan pada *lampiran 10*.

- d. Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang disajikan pada **Lampiran 11** sebesar Rp102.510.205.697,09 terdiri dari :

Tabel 4.92 Rincian Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025

OPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	17.372.091.253,68	23.205.976.545,96
Piutang Retribusi Kadaluwarsa	212.739.385,00	212.739.385,00
Piutang Treasury Deposit Facility	-	4.011.219.000,00
Reklas Dari Temuan Aset Tetap	5.856.406.048,00	5.856.406.048,00
Aset Tetap Renovasi	78.483.839.050,41	78.483.839.050,41
Jaminan Rusunawa (DPKP)	585.129.960,00	582.269.960,00
Jumlah	102.510.205.697,09	112.352.449.989,37

4.3.23. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.93 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2025 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	33.600,00	63.280,00	33.600,00	63.280,00
Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	30.646.799,67	0,00	30.646.799,67	0,00
Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.220,00	0,00	855.508.220,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.654.264.926,33	1.317.652.743,93	1.654.264.926,33	1.317.652.743,93
Utang Belanja	1.761.954.671,00	30.775.796.930,96	1.603.737.471,00	30.934.014.130,96
Utang Jangka Pendek Lainnya	24.722.226.707,50	2.683.404.025,00	25.291.815.044,5	2.113.815.688,00
Jumlah	29.024.634.924,50	32.093.512.954,89	29.436.006.061,50	34.365.545.842,89

Atas saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp63.280,00 merupakan Utang PFK BOS SDN Cibeber 2 sebesar Rp19.600 dan SDN Melong Mandiri 6 sebesar Rp43.680 pada Dinas Pendidikan dan telah dibayar tanggal 13 Januari 2026 dan 5 Februari 2026.
- Kewajiban utang Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 sudah dilakukan pelunasan sesuai

Jatuh Tempo Pembayaran 30 September 2025, sehingga Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

- c. Utang Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.317.652.743,93 merupakan sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga atas hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, terdiri dari:

Tabel 4.94 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2025

NO	NO KONTRAK/POLIS	KETERANGAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1	555/5912/BPKAD 303/BTC-CIMAHI/XII/2022	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk	125.275.590,00
2	267/CIM-ASU/2023	Bnak BJB Cabang Cimahi	438.005.100,00
3	600/1262/DPUPR	PT.BINTANG WARNA MANDIRI	8.101.596,15
4	032/2998/DPUPR	HJ. KECIH RATNANINGSIH (DIR.PT. KEMBAR MAS)	5.515.892,00
5	600/1263/DPUPR	PT.KEMBAR MAS	9.709.911,00
6	032/2718/DPUPR	PT. REKSO NASIONAL FOOD	18.661.001,92
7	032/084/DPUPR	PT. HOLI PHARMA	26.686.836,00
8	032/4053/DPUPR	PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	131.328.221,11
9	621/2989/DPUPR	PT. BAJUBANG GASINDO	7.370.366,21
10	621/2956/DPUPR	WAWA HUSEIN	2.973.587,83
11	600/2993/DPUPR	PT. MIRA MEDIKA SEJATI	2.991.636,54
12	032/PERJ.91/BPKAD/2024	BANK BJB	5.000.000,00
13	032/PSM.92/BPKAD/XII/2024	PT. MITRAYASA SARANA INFORMASI	240.000.000,00
14	621/428/DPUPR	PT. KARYA ZIRANG UTAMA	134.859,67
15	621/675/DPUPR	PT. TECHNO MULTI UTAMA	2.767.416,25
16	621/2284/DPUPR	PT. STERIN HEALTHCARE INDONESIA	1.069.703,25
17	593/4978/DPMPPTSP	Bnak BJB Cabang Pembantu MPP Cimahi	31.716.666,67
18	593/4978/DPMPPTSP	Bnak BJB Cabang Pembantu MPP Cimahi	62.654.592,00
19	621/746/DPUPR	PT. GARUDA MAS	962.731,00
20	119/2190/Bapenda	PT. MULTI ADHI PERKASA	114.614.958,33
21	420/919/Disdik	Sewa Kantin Sekolah	82.112.078,00
Jumlah			1.317.652.743,93

- d. Utang Belanja Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.934.014.130,96 merupakan utang belanja pegawai, barang jasa, dan modal selama Tahun 2025. Rincian utang belanja dapat dilihat pada *lampiran 12 dan lampiran 13*.
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.113.815.688,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga, terdiri dari:

Tabel 4.95 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2025

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2025 (Rp)
Utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi)	1.319.924.798,00	0,00	0,00	1.319.924.798,00
Utang RSUD Cibabat atas pembelian barang	22.619.946.179,50	0,00	22.619.946.179,50	0,00
Utang Kompensasi Dampak Negatif	37.745.970,00	469.110.525,00	468.063.765,00	38.792.730,00
Utang Kompensasi Jasa Pelayanan	162.339.800,00	2.119.703.500,00	2.113.325.100,00	168.718.200,00
Jaminan pada UPTD Rusunawa	582.269.960,00	93.340.000,00	90.480.000,00	585.129.960,00
Utang Jangka Pendek Lainnya - Pajak Penghasilan PDJM	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Jumlah	24.722.226.707,50	2.683.404.025,00	25.291.815.044,50	2.113.815.688,00

Rincian utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi), serta utang Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak negatif dapat dilihat pada *lampiran 14 dan Lampiran 15*.

4.3.24. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi, berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.086.072.432,00. Pada tanggal 19 April 2010, plafon pinjaman diubah menjadi Rp12.832.623.298,00 dengan Amandemen Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor AMA-369/SLA-1208/DSMI/2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan berakhir tanggal 20 September 2025. Pemerintah Kota Cimahi Per 31 Desember 2025 sudah melunasi seluruh Kewajiban Utang Jangka Panjangnya sampai pembayaran jatuh tempo 20 September 2025, sehingga saldo Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00.

4.3.25. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.96 Saldo Ekuitas Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas	3.080.525.953.713,17	2.869.411.834.080,60

Ekuitas dijelaskan lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2025. (Rincian Dapat Dilihat pada *Lampiran 19*)

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan-LO dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah, maka dicatat di Neraca sebagai penambah Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan yang telah diterima untuk periode tahun anggaran selanjutnya dicatat di Neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan-LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.688.986.610.196,69 Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi pendapatan yang berpengaruh terhadap neraca.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran beban daerah terdiri dari:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap
- h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- i. Beban Penyisihan Piutang
- j. Beban Penyisihan Dana Bergulir
- k. Beban Lain-lain

Jumlah beban daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.598.704.569.543,73, jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi beban yang berpengaruh terhadap neraca.

Koreksi atas Pengeluaran Beban (penerimaan pengembalian beban) yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran beban dicatat dalam lain-lain pendapatan yang sah.

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp585.372.224.443,39.

4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp338.510.650.448,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.97 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Reklame	3.367.201.700,00	2.060.629.600,00
Pajak Air Tanah	35.770.992.900,00	33.854.979.086,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	76.182.515.128,00	75.190.269.247,00
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	32.724.106.988,00	53.035.564.941,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	95.284.277.582,00	87.954.090.236,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	68.172.205.850,00	-
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	27.009.350.300,00	-
Jumlah	338.510.650.448,00	252.095.533.110,00

Tabel 4.97.1 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Tahun Anggaran 2025

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
PBJT-Restoran	29.251.726.551,00	24.900.543.494,00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.502.558.162,00	981.968.462,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.275.288,00	13.350.288,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	61.434.931.856,00	60.585.864.788,00
PBJT-Hotel	183.425.960,00	165.750.211,00
PBJT-Losmen	120.222.273,00	142.453.511,00
PBJT-Glamping	30.912.055,00	35.971.018,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	904.273.079,00	835.371.444,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	9.125.000,00	30.870.000,00
PBJT-Permainan Ketangkasan	589.294.174,00	251.213.270,00
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	177.828.960,00	10.213.700,00
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana	17.404.170,00	0,00
PBJT-Panti Pijat dan Panti Refleksi	49.300.054,00	520.050,00
Jumlah	95.284.277.582,00	87.954.090.236,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah – LRA menjadi Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 16*.

4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp228.674.474.019,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.98 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	212.751.663.836,00	208.117.625.945,00
Retribusi Jasa Usaha	12.722.739.743,00	12.163.387.650,00
Retribusi Perijinan Tertentu	3.200.070.440,00	3.295.773.287,00
Jumlah	228.674.474.019,00	223.576.786.882,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.99 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Hasil Retribusi Daerah	228.674.474.019,00	223.576.786.882,00
Retribusi Jasa Umum	212.751.663.836,00	208.117.625.945,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	207.892.031.475,00	202.959.484.345,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	24.366.397.776,00	23.226.347.221,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	183.525.633.699,00	179.733.137.124,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.841.887.854,00	3.101.219.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	658.895.000,00	761.736.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.054.076.507,00	1.056.140.100,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	235.230.000,00	185.220.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	69.543.000,00	53.826.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	0,00	0,00
Retribusi Rumah Tangga	69.543.000,00	53.826.000,00
Retribusi Jasa Usaha	12.722.739.743,00	12.163.387.650,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.466.084.450,00	5.747.596.250,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	44.760.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	442.185.193,00	60.472.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.769.710.100,00	6.355.318.900,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.200.070.440,00	3.295.773.287,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	-	-
Retribusi Persetujuan Bangunan	2.672.452.440,00	2.909.579.287,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	527.618.000	386.194.000,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA menjadi Pendapatan Retribusi Daerah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 16*.

4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO periode

1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.481.160.420,00 yaitu:

Tabel 4.100 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Perusahaan Daerah	-	-
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	9.481.160.420,00	10.571.076.808,00
Jumlah	9.481.160.420,00	10.571.076.808,00

4.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.705.939.556,39 yang terdiri dari:

Tabel 4.101 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	521.607.100,00	767.359.700,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.324.847.094,39	1.035.925.739,73
Penerimaan Jasa Giro	3.941.188.299,00	3.771.987.125,00
Pendapatan Bunga Lain-Lain	51.693.316,00	797.851.542,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	962.196.549,00	734.983.425,37
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	6.633.021,00	6.503.022,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	501.481.409,00	60.029.452,00
Pendapatan Denda Pajak	656.833.351,00	2.430.593.098,00
Pendapatan Denda Retribusi	35.521.079,00	30.406.247,00
Pendapatan dari Pengembalian	438.380.158,00	621.716.335,00
Pendapatan Dari BLUD	64.478.190,00	902.157.200,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	734.580,00	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	131.703.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	30.250.000,00	134.332.000,00
Pendapatan BLUD	170.095.410,00	-

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Jumlah	8.705.939.556,39	11.425.547.886,10

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA menjadi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 16*.

4.4.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.031.780.822.084,00.

Tabel 4.102 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	934.895.238.084,00	859.197.077.166,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	15.105.852.000,00	38.445.593.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.779.732.000,00	170.217.127.962,00
Jumlah	1.031.780.822.084,00	1.067.879.798.128,00

4.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat -LO Dana Perimbangan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp934.895.238.084,00 yang terdiri dari:

4.4.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.454.840.300,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.103 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.390.957.400,00	4.861.350.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	62.085.941.500,00	43.976.217.000,00
DBH PPh Pasal 21	11.849.844.400,00	5.184.985.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.128.097.000,00	8.508.543.000,00
Jumlah	89.454.840.300,00	62.531.095.000,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak – LRA menjadi Dana Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan dalam *Lampiran 16*.

4.4.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.704.735.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.104 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.675.778.000,00	3.603.448.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	469.919.000,00	2.808.306.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	31.371.146.000,00	32.117.257.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	1.317.663.000,00	1.235.767.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	53.794.000,00	54.176.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	816.435.000,00	1.073.811.000,00
DBH Sawit	-	1.000.000.000,00
Jumlah	39.704.735.000,00	41.892.765.000,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA menjadi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO dijelaskan dalam **Lampiran 16**.

4.4.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp593.119.320.956,00 yaitu:

Tabel 4.105 Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2025

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	593.119.320.956,00	582.607.386.486,00
Jumlah	593.119.320.956,00	582.607.386.486,00

4.4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp212.616.341.828,00 yaitu:

Tabel 4.106 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun Anggaran 2025

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	39.028.902.927,00	15.775.493.734,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	173.587.438.901,00	156.410.336.946,00
Jumlah	212.616.341.828,00	172.185.830.680,00

4.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu:

Tabel 4.107 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO Tahun Anggaran 2025

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Insentif Fiskal	15.105.852.000,00	38.445.593.000,00
Jumlah	15.105.852.000,00	38.445.593.000,00

4.4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer dari Pemerintah Provinsi - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81.779.732.000,00 yang terdiri dari:

4.4.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Transfer dari Pemerintah Provinsi - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp73.115.972.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.108 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	587.353.740,00	54.417.871.260,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	128.133.150,00	28.449.418.500,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.240.846.453,00	33.581.250.587,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	228.025.900,00	150.985.050,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	31.931.612.757,00	31.071.794.851,00
Transfer Pemerintah Provinsi	73.115.972.000,00	147.671.320.248,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA menjadi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan dalam *Lampiran 16*.

4.4.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Bantuan Keuangan Provinsi - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.663.760.000,00

Tabel 4.109 Bantuan Keuangan Provinsi - LO Tahun Anggaran 2025

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.663.760.000,00	22.545.807.714,00
Jumlah	8.663.760.000,00	22.545.807.714,00

4.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp71.833.563.669,30 terdiri dari:

Tabel 4.110 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun Anggaran 20255

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Hibah	71.833.563.669,30	21.520.894.889,24
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah	71.833.563.669,30	21.520.894.889,24

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Hibah – LRA menjadi Pendapatan Hibah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 16*.

Selain penambahan sesuai transaksi diatas pada Tahun 2025 Dinas pendidikan juga menerima penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.845.577.000,00 melalui program revitalisasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 yang merupakan program strategis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas yang aman, nyaman, dan berkualitas. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang menerima program revitalisasi adalah:

1	Rehab ruang kelas, lab komputer, ruang OSIS, Ruang Administrasi dan Kepala Sekolah SMP Pasundan 2	Rp628.000.000,00
2	Rehabilitasi Ruang Administrasi dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP IT Ulul Azmi	Rp623.577.000,00
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Pasundan 3	Rp554.000.000,00
4	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang UKS SMP PGRI 5	Rp1.040.000.000,00

4.4.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Beban Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp684.946.606.296,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.111 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025

Beban Pegawai	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Gaji Pokok dan Tunjangan	347.644.090.673,00	322.875.220.807,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	274.660.326.982,00	191.427.921.786,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	84.181.807.882,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	40.560.288.878,00	40.717.255.797,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	970.184.163,00	827.584.400
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.034.570.000,00	723.600.000,00
Beban Pegawai BLUD	20.077.145.600,00	60.430.373.525,00
Jumlah	684.946.606.296,00	701.183.764.197,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Pegawai – LRA menjadi Beban Pegawai – LO dijelaskan dalam *Lampiran 17*.

4.4.5 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membiayai persediaan yang telah digunakan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, Beban Persediaan dicatat sesuai dengan pemakaian persediaan yang telah terjadi.

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp264.452.702.134,14 yang terdiri dari :

Tabel 4.112 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025

Beban Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Alat Listrik	2.963.002.731,86	2.684.123.868,92
Alat Tulis Kantor	4.375.959.527,40	4.025.450.267,74
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.772.428.164,04	4.312.526.399,21
Bahan Bakar dan Pelumas	3.368.660.153,00	3.610.036.689,00
Bahan Baku	3.940.000,00	150.014.465,00
Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.298.697.568,21	8.788.607.776,00
Bahan Cetak	13.805.696.952,61	14.860.766.398,47
Bahan Kimia	17.735.776.104,51	16.510.762.653,75
Bahan Komputer	3.358.786.121,19	2.861.208.997,00
Bahan Lainnya	6.171.600.717,17	5.137.994.363,34
Bahan/Bibit Tanaman	1.197.712.183,00	936.853.818,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	133.551.177,00	194.143.574,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	563.893.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.872.630.021,00	12.236.785.200,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.698.613.831,00	2.586.847.052,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.810.200.193,00	34.099.443.924,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	31.395.000,00	44.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	280.145.000,00	437.430.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	844.924.230,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.620.400,00	163.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	392.571.855,00	123.900.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	798.999.145,00	997.358.470,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	88.480.009,00	1.742.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	-	120.765.000,00
Belanja Pakaian Kerja Bengkel	-	11.311.175,00
Belanja Pakaian Olahraga	676.550.975,00	450.848.500,00
Belanja Pakaian Paskibraka	63.065.940,00	246.011.300,00

Beban Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	6.831.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	4.600.000,00	2.800.000,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	750.559.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	192.670.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	62.550.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	162.000.000,00
Belanja Pakaian Teknik	0,00	1.000.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	73.793.000,00
Benda Pos	453.083.000,00	445.148.500,00
Isi Tabung Gas	2.402.699.210,00	2.884.069.186,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	186.084.755,00	132.346.203,00
Kertas dan Cover	3.606.471.072,88	3.138.203.217,00
Komponen Peralatan	1.829.782.776,00	418.422.090,00
Komponen Rambu-Rambu	457.546.540,00	481.948.600,00
Natura	9.321.424.945,22	10.047.487.222,33
Natura dan Pakan Lainnya	392.629.552,20	354.000,00
Obat	65.924.999.463,24	39.144.431.443,95
Obat-obatan Lainnya	569.793.582,85	16.964.737.914,00
Pakan	98.787.960,00	140.649.000,00
Perabot Kantor	5.914.646.671,76	5.264.818.614,07
Perlengkapan Dinas	1.004.706.785,00	661.907.070,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	248.680.000,00	350.021.100,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	43.352.565.622,00	33.292.702.233,94
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	845.630.298,00	0,00
Suku Cadang Alat Angkutan	1.075.000,00	2.732.013,00
Suku Cadang Alat Bengkel	72.995.330,00	89.870.700,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	562.980.112,00	0,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	5.490.000,00	2.800.000,00
Suku Cadang Alat Pemancar	280.000,00	1.300.000,00
Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	622.000,00
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	14.816.028,00	12.877.200,00
Suku Cadang Lainnya	1.086.500,00	366.879.595,00
Suvenir/Cendera Mata	3.345.838.931,00	3.031.159.706,00
Jumlah	264.452.702.134,14	234.284.115.699,72

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Persediaan – LRA menjadi Beban Persediaan – LO dijelaskan dalam *Lampiran 17*.

4.4.6 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa habis pakai diluar persediaan. Biaya

pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Beban Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp420.668.574.510,33 yang terdiri dari :

Tabel 4.113 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2025

No	S O P D	Beban Jasa 2025 (Rp)	Beban Jasa 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	38.340.438.654,50	48.835.209.372,83
2	Dinas Kesehatan	61.941.674.838,14	58.181.236.889,66
3	Rsud Cibabat	94.093.706.814,33	51.360.699.668,33
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.497.242.367,60	5.974.652.246,77
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.316.665.897,86	23.733.618.584,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.769.988.240,99	6.513.547.680,67
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.004.034.721,65	2.463.001.853,34
8	Dinas Sosial	4.160.630.523,75	4.576.888.535,59
9	Dinas Tenaga Kerja	7.070.645.560,65	6.913.097.607,33
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	8.737.945.658,16	8.550.410.247,25
11	Dinas Pangan dan Pertanian	2.701.148.504,67	2.631.088.788,17
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.253.160.786,00	19.682.734.529,33
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.501.704.671,35	1.311.130.263,99
14	Dinas Perhubungan	13.816.400.318,67	14.558.664.816,67
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.128.904.313,43	6.513.875.752,16
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.809.541.702,33	6.800.999.847,29
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	8.565.415.292,09	8.118.686.027,33
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1.943.483.915,84	1.292.421.514,16
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	9.869.076.646,00	11.239.207.336,33
20	Sekretariat Daerah	20.385.765.081,34	17.835.075.730,08
21	Sekretariat DPRD	15.302.893.721,42	10.522.075.458,58
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.520.792.427,34	3.123.535.593,44
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.464.897.242,08	3.041.865.313,34
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.051.413.297,92	2.716.258.883,91

No	S O P D	Beban Jasa 2025 (Rp)	Beban Jasa 2024 (Rp)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.770.970.146,59	2.918.396.611,75
26	Inspektorat Kota	2.049.940.520,33	2.409.477.160,67
27	Kecamatan Cimahi Utara	11.617.738.513,33	14.223.706.171,17
28	Kecamatan Cimahi Tengah	14.775.429.043,23	18.608.129.045,09
29	Kecamatan Cimahi Selatan	14.326.291.655,1600	18.138.105.980,08
30	Kantor Kesatuan Bangsa	3.880.633.433,58	3.228.380.164,92
	JUMLAH	420.668.574.510,33	386.016.177.674,90

Penjelasan transaksi penyesuaian Belanja Jasa – LRA menjadi Beban Jasa – LO dijelaskan dalam **Lampiran 17** sedangkan rincian beban jasa dijelaskan di **Lampiran 18**.

4.4.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap itu sendiri selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.889.198.559,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.114 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025

Beban Pemeliharaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.152.681.411,00	14.262.853.603,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.291.979.958,00	2.971.027.033,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	248.262.275,00	814.410.708,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		13.949.250,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud		56.550.000,00
Beban Pemeliharaan BLUD dan BOS	9.196.274.915,00	8.162.071.558,00
Jumlah	25.889.198.559,00	26.280.862.152,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Belanja Pemeliharaan – LRA menjadi Beban Pemeliharaan – LO dijelaskan dalam **Lampiran 17**

4.4.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, kursus, seminar dan sosialisasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.201.981.129,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.115 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025

Beban Perjalanan Dinas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Perjalanan dinas dalam daerah	3.234.699.000,00	1.091.761.500,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	35.417.513.129,00	54.861.890.505,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.330.309.000,00	1.559.432.000,00
Beban Perjalanan Dinas paket Meeting dalam kota	219.460.000,00	417.504.000,00
Jumlah	40.201.981.129,00	57.930.588.005,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas – LRA menjadi Beban Perjalanan Dinas – LO dijelaskan dalam *Lampiran 17*

4.4.9 Beban Bunga

Beban Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Beban Bunga periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.577.379,33 yang terdiri dari :

Tabel 4.116 Rincian Beban Bunga Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	15.577.379,33	77.378.936,66
Jumlah	15.577.379,33	77.378.936,66

Penjelasan transaksi penyesuaian Belanja Bunga – LRA menjadi Beban Bunga – LO dijelaskan dalam *Lampiran 17*

4.4.10 Beban Subsidi

Beban Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tidak terdapat Realisasi Beban Subsidi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025:

Tabel 4.117 Beban Subsidi Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Subsidi kepada BUMN	-	-
Jumlah	-	-

4.4.11 Beban Hibah

Beban Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk

uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Beban Hibah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.320.566.347,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.118 Beban Hibah Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	49.320.566.347,00	50.548.508.959,00
Jumlah	49.320.566.347,00	50.548.508.959,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Belanja Hibah – LRA menjadi Beban Hibah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 17*

4.4.12 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.714.517.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.119 Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

Beban Bantuan Sosial	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.714.517.000,00	4.676.085.000,00
Jumlah	4.714.517.000,00	4.676.085.000,00

4.4.13 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Perhitungan nilai beban penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi menggunakan metode garis lurus.

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp99.544.243.757,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.120 Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap 2025 (Rp)	Beban Penyusutan Aset Tetap 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	10.335.967.611,36	10.713.866.287,32
2	Dinas Kesehatan	4.393.913.773,30	4.204.724.308,46
3	RSUD Cibabat	11.948.972.851,18	14.772.904.603,60
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.397.010.096,40	24.935.617.845,14
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.332.905.549,36	8.226.141.206,94

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap 2025 (Rp)	Beban Penyusutan Aset Tetap 2024 (Rp)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.340.822.394,00	2.665.072.923,18
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	666.383.229,93	345.948.182,08
8	Dinas Sosial	429.750.772,30	351.846.005,20
9	Dinas Tenaga Kerja	63.412.049,60	60.785.750,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	167.618.199,92	145.430.929,17
11	Dinas Pangan dan Pertanian	684.493.005,02	529.518.648,55
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.429.458.194,88	5.548.468.443,87
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	566.373.575,00	653.845.734,00
14	Dinas Perhubungan	9.267.732.210,97	8.619.722.084,44
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.030.896.709,95	1.084.728.639,53
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.059.337.540,28	8.661.788.024,74
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	949.181.230,46	861.559.227,62
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	201.757.663,98	209.625.358,33
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	3.692.899.683,07	3.675.893.869,60
20	Sekretariat Daerah	2.821.675.829,80	2.635.044.124,72
21	Sekretariat DPRD	1.501.441.405,93	800.122.976,54
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	283.732.612,52	292.124.813,02
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	510.748.500,26	401.411.175,26
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	310.904.103,09	243.047.388,09
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.083.190,00	75.980.600,00
26	Inspektorat Kota	340.901.259,34	294.028.249,67
27	Kecamatan Cimahi Utara	406.669.487,34	461.106.037,51
28	Kecamatan Cimahi Tengah	724.583.551,20	874.560.560,81
29	Kecamatan Cimahi Selatan	516.745.762,55	640.553.790,88
30	Kantor Kesatuan Bangsa	91.871.714,45	85.196.089,70
	JUMLAH	99.544.243.757,44	103.070.663.877,97

4.4.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.080.574.111,38 yang berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terdiri dari :

Tabel 4.121 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	52.547.837,50	52.547.837,50
Dinas Kesehatan	-	-

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2025 (Rp)	2024 (Rp)
RSUD Cibabat	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.112.319,88	168.787.148,59
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	70.329.822,00	70.329.822,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-
BPBD	15.695.000,00	15.695.000,00
Dinas Sosial	39.656.250,00	32.775.000,00
Dinas Tenaga Kerja	88.217.172,19	88.217.172,19
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	36.423.984,00	34.403.340,00
Dinas Pangan dan Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	65.698.000,00	65.698.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.250.000,00	30.250.000,00
Dinas Perhubungan	13.714.709,06	5.186.336,25
Dinas Komunikasi dan Informatika	15.200.387,50	15.200.387,50
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.125.000,00	121.617.225,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	25.625.000,00	25.625.000,00
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	35.959.275,00	-
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	58.250.580,00	94.290.580,00
Sekretariat Daerah	24.655.875,00	24.655.875,00
Sekretariat DPRD	22.522.500,00	22.522.500,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	22.487.500,00	23.776.250,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	119.397.774,25	121.626.434,25
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.830.125,00	45.830.125,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	17.875.000,00	17.875.000,00
Inspektorat Kota	-	-
Kecamatan Cimahi Utara	-	-
Kecamatan Cimahi Tengah	-	6.248.000,00
Kecamatan Cimahi Selatan	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	11.873.125,00
Jumlah	1.080.574.111,38	1.100.030.158,28

4.4.15 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan pengakuan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp7.870.028.320,11 ditentukan dengan penggolongan kualitas pajak. Beban Penyisihan Piutang dibagi menjadi Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi dan Beban Penyisihan Piutang lain-lain.

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penambahan beban sebesar Rp7.706.242.563,98 yang terdiri dari:

Tabel 4.122 Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2025

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2024 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2025 (Rp)
Penyisihan Pajak Reklame	391.320.942,00	387.197.981,50	4.122.960,50
Penyisihan PBBP2	92.076.060.146,88	84.374.396.510,99	7.701.663.635,88
Penyisihan PBJT - Pajak Makanan dan/atau Minuman	1.461.280,50	1.005.312,90	455.967,60
Penyisihan PBJT - Pajak Jasa Perhotelan Hotel	7.364.640,00	7.364.640,00	0,00
Jumlah	92.476.207.009,38	84.769.964.445,39	7.706.242.563,98

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 mengalami penambahan beban sebesar Rp163.785.756,13 yang terdiri dari :

Tabel 4.123 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2025

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2024 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2025 (Rp)
Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	51.898.211,00	0,00
Izin Trayek (IT)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
Laboratorium (DLH)	17.349.762,50	17.055.092,50	294.670,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	46.700.250,00	43.365.993,38	3.334.256,63
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.913.056.394,50	2.862.858.169,50	50.198.225,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	1.419.744.094,00	1.310.732.964,50	109.011.129,50
Retribusi Pelayanan Persampahan	947.475,00		947.475,00
Jumlah	4.454.636.187,00	4.290.850.430,88	163.785.756,13

3. Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penambahan beban sebesar Rp0.00 dan berkurang sebesar Rp0,00
4. Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 mengalami penambahan beban sebesar Rp0.00 dan berkurang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.124 Beban Penyisihan Piutang Tuntutan ganti Rugi Tahun Anggaran 2025

Piutang	Penyisihan Piutang TGR 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang TGR 31 Desember 2024 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang TGR 2025 (Rp)
Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	0,00	00,00

4.4.16 Beban Transfer

Beban Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Beban Transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

4.4.17 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban operasional Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan beban penyisihan.

Tidak terdapat beban lain-lain periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

4.4.18. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin (Rp33.220.999.334,41) terdiri dari :

Tabel 4.125 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025

Surplus/Defisit	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	(6.769.725.032,30)	(441.440.911,00)
Dinas Kesehatan	(7.803.853.611,18)	(944.168.318,00)
RSUD Cibabat	(44.580.000,00)	(10.181.028.566,83)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(6.130.259.640,00)	(292.925.000,00)
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(327.123.571,00)	(1.196.182.500,00)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(340.728.000,00)	
BPBD	-	
Dinas Sosial	(3.318.250,00)	
Dinas Tenaga Kerja	-	(47.952.500,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	(21.277.273,76)	
Dinas Pangan dan Pertanian	(368.973.800,00)	
Dinas Lingkungan Hidup	(4.738.009.107,00)	(4.065.584.728,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(805.127.850,00)	(406.026.000,00)
Dinas Perhubungan	(675.656.815,00)	
Dinas Komunikasi dan Informatika	(23.989.600,00)	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(45.909.200,00)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	-	
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	(1.533.652.000,00)	
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(486.001.684,17)	
Sekretariat Daerah	(574.359.300,00)	(10.153.691.323,00)
Sekretariat DPRD	(21.783.000,00)	

Surplus/Defisit	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-	
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(24.210.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(434.565.000,00)	(291.450.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	
Inspektorat Kota	-	
Kecamatan Cimahi Utara	(8.150.000,00)	
Kecamatan Cimahi Tengah	-	(19.317.000,00)
Kecamatan Cimahi Selatan	(14.620.800,00)	(114.793.500,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.095.245.000,00)	
Jumlah	(33.220.999.334,41)	(28.224.679.546,83)

4.4.19. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Realisasi Beban Luar Biasa pada tahun 2025 sebesar Rp418.718.650,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.126 Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2025

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	418.718.650,00	137.050.642,00
Jumlah	418.718.650,00	137.050.642,00

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp80.114.437.664,00. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp95.221.562.946,00. Selisih kurang dari aktivitas investasi sebesar Rp174.480.522.070,00 Selisih kurang dari aktivitas pendanaan sebesar Rp855.508.220,00 dan selisih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp29.680,00). Apabila penurunan arus kas tahun 2025 sebesar Rp80.114.437.664,00 ditambah dengan saldo awal kas 2025 sebesar Rp154.483.227.518,00 maka saldo kas per 31 Desember 2025 berjumlah Rp74.368.789.854,00

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp74.368.789.854,00 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.007.292.843,00, Kas di BLUD RSUD sebesar Rp4.477.715.264,00, Kas di BLUD Air Minum Rp1.360.602.378,00, Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp3.818.849.081,00 dan Kas Dana BOS Rp92.964.552,00, Kas di BLUD Persampahan sebesar Rp1.211.048.933,00. Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp400.501.323,00.

4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp95.221.562.946,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.582.645.707.779,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp1.487.424.144.833,00.

Tabel 4.127 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.582.645.707.779,00	1.567.333.187.733,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.487.424.144.833,00	1.460.476.875.302,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	95.221.562.946,00	106.856.312.431,00

4.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.582.645.707.779,00 terdiri dari :

Tabel 4.128 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	330.345.321.948,00	243.250.803.117,00
Penerimaan Retribusi Daerah	231.412.239.830,00	236.662.096.668,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.160.420,00	10.571.076.808,00
Penerimaan Lain.lain PAD yang Sah	7.699.811.503,00	9.495.561.574,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	63.861.538.300,00	61.573.212.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.966.305.000,00	42.714.540.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	593.119.320.956,00	582.607.386.486,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	212.616.341.828,00	172.165.830.680,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	15.105.852.000,00	38.445.593.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78.374.055.994,00	147.301.279.686,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	8.663.760.000,00	22.545.807.714,00
Penerimaan Hibah	-	-
Dana BOS	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.582.645.707.779,00	1.567.333.187.733,00

4.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.487.424.144.833,00 terdiri dari:

Tabel 4.129 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembayaran Pegawai	684.943.855.376,00	701.183.655.297,00
Pembayaran Barang	744.190.532.681,00	703.650.171.962,00
Pembayaran Bunga	46.224.179,00	108.364.375,00
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	48.589.784.677,00	50.548.508.959,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.567.372.000,00	4.676.085.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tak Terduga	5.086.375.920,00	310.089.709,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Restribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.487.424.144.833,00	Rp1.460.476.875.302,00

4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp174.480.522.070,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp521.607.100,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp175.002.129.170,00.

Tabel 4.130 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:		
Jumlah Arus Masuk Kas	521.607.100,00	30.767.359.700,00
Jumlah Arus Keluar Kas	175.002.129.170,00	99.380.894.382,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(174.480.522.070,00)	(68.613.534.682,00)

4.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp521.607.100,00

Tabel 4.131 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	-	30.000.000.000,00
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	461.349.100,00	767.359.700,00
Penjualan atas Gedung dan bangunan	60.258.000,00	-

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	521.607.100,00	30.767.359.700,00

4.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk belanja modal selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp175.002.129.170,00 terdiri dari:

Tabel 4.132 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	14.008.020.163,00	11.775.284.331,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	42.430.742.024,00	32.108.170.914,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	78.392.468.465,00	27.366.011.235,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	33.239.481.455,00	23.668.853.422,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.508.674.780,00	3.855.621.190,00
Perolehan Aset Lainnya	422.742.283,00	606.953.290,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	175.002.129.170,00	99.380.894.382,00

4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp855.508.220,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp855.508.220,00.

Tabel 4.133 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)

4.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 4.134 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-

4.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari:

Tabel 4.135 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggarana 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	855.508.220,00	855.508.220,00

4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan. beban dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.680,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp80.703.502.047,18 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp80.703.472.367,18

Tabel 4.136 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris :		
Jumlah Arus Masuk Kas	80.703.502.047,18	101.634.381.878,00
Jumlah Arus Keluar Kas	80.703.472.367,18	101.634.931.678,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	29.680,00	(549.800,00)

4.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK) periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.703.502.047,18 terdiri dari :

Tabel 4.137 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. PPN	37.198.580.628,00	38.258.610.202,00
b. PPh 21	32.785.342.225,00	41.356.224.140,00
c. PPh 22	2.190.128.622,00	3.168.692.556,00
d. PPh 23	1.765.568.275,00	2.321.351.414,00
e. PPh Pasal 4 Ayat (2)	3.945.029.521,00	2.167.744.431,00
f. Iuran Wajib Pegawai 1%	552.181.092,50	3.979.930.418,00
g. Jaminan Kesehatan 4%	-	-
h. Iuran Wajib Pegawai 8%	2.266.671.683,68	10.381.828.717,00
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	80.703.502.047,18	101.634.381.878,00

4.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.703.472.367,18 terdiri dari :

Tabel 4.138 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. PPN	37.198.580.628,00	38.258.610.202,00
b. PPh 21	32.785.342.225,00	41.356.807.540,00
c. PPh 22	2.190.128.622,00	3.168.692.556,00
d. PPh 23	1.765.538.595,00	2.321.317.814,00
e. PPh Pasal 4 Ayat (2)	3.945.029.521,00	2.167.744.431,00
f. Iuran Wajib Pegawai 1%	552.181.092,50	3.979.930.418,00
g. Jaminan Kesehatan 4%	-	-
h. Iuran Wajib Pegawai 8%	2.266.671.683,68	10.381.828.717,00
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	80.703.472.367,18	101.634.931.678,00

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi)
6. Pendapatan Yang Ditangguhkan
7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp3.080.525.953.713,17 atau naik 7,36% dari Ekuitas tahun sebelumnya, yaitu Rp2.869.411.834.080,60.

4.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2025. Nilai Ekuitas Awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2025, yaitu :

	Per 31 Desember 2025 (Rp)
Ekuitas Awal	2.869.411.834.080,60

4.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu :

	1 Jan 2025 – 31 Des 2025 (Rp)
Surplus/Defisit LO	56.642.322.668,55

4.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar.

Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar sampai dengan Tahun 2025 karena perubahan nilai investasi.

	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	(1.250.000,00)

Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.250.000,00 merupakan pengakuan Utang Pajak Penghasilan PD. Jati Mandiri yang terdiri dari PPh Pasal 21 Rp250.000,00 dan PPh Pasal 29 Rp1.000.000,00.

b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2025 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Piutang	(367.712.012,92)

Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp367.712.012,92 merupakan koreksi piutang atas pembayaran BPJS kesehatan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar

(Rp349.212.800,00) dan Pengakuan Biaya dibayar dimuka tahun sebelumnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.499.212,92.

c. Koreksi Nilai Utang

Koreksi Nilai Utang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2025 karena perubahan kebijakan akuntansi

	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Utang	125.798.950,00
Koreksi Nilai Utang sebesar Rp125.798.950,00 merupakan koreksi utang atas belanja modal pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.	

d. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi Persediaan sampai dengan Tahun 2025 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Persediaan	-

e. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi terhadap Nilai Aset Tetap dilakukan karena adanya perpindahan aset tetap antar SKPD satu dengan SKPD lainnya dan adanya penghapusan aset tetap.

	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Aset Tetap	(2.398.622.671,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar (Rp2.398.622.671,00) merupakan Penambahan koreksi Mutasi Aset Tetap yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.985.617.060,00, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebesar Rp2.644.870.600,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.110.773.500,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.126.191.602,00, Kecamatan Cimahi Utara Sebesar Rp640.223.333,00, Kecamatan Cimahi Tengah sebesar Rp733.449.333,00, dan Kecamatan Cimahi Selatan sebesar Rp655.478.334,00 dan Pengurangan koreksi yang berasal dari Dinas Pendidikan sebesar (Rp1.023.236.065,00), Dinas Kesehatan sebesar (Rp208.990.000,00), RSUD Cibabat sebesar (Rp151.640.000,00), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp4.496.831.690,00), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar (Rp209.431.000,00), Dinas Sosial sebesar (Rp43.405.000,00), Dinas Tenaga Kerja sebesar (43.405.000,00), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp197.190.000,00), Dinas Pangan dan Pertanian sebesar (Rp217.480.000,00), Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp215.085.000,00), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar (Rp230.230.000,00), Dinas Perhubungan sebesar (Rp11.119.244.086,00), Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp190.070.000,00), Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp251.100.000,00), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar (Rp445.398.806,00), Dinas Arsip Daerah sebesar (Rp173.900.000,00), Sekretariat Daerah sebesar (Rp337.504.786,00), Sekretariat DPRD sebesar (Rp707.630.000,00), Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah sebesar (Rp250.520.000,00), Badan Kepegawaian, Pengembangan, Sumber Daya Manusia	

Daerah sebesar (Rp217.480.000,00), Inspektorat sebesar (Rp217.480.000,00) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik sebesar (Rp173.900.000,00).

f. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Koreksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2025

	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Aset Lain.lain	0,01

4.6.4. Lain-Lain (Perubahan Basis Akuntansi)

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) terdiri dari penyisihan piutang sebesar Rp493.198.007,59 yang berasal dari pembayaran atas piutang tahun sebelumnya. Penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp7.322.871.186,34. Penyesuaian atas akumulasi penyusutan merupakan penyesuaian atas perhitungan kembali penyusutan aset tetap karena pergantian aplikasi dari SIPD Aset ke aplikasi Grafis.

4.6.5. Koreksi Utang PFK

Tidak terdapat Koreksi utang PFK Per 31 Desember 2025.

4.6.6. Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah

Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp149.297.513.504,00 adalah Keuntungan Akibat Proses Likuidasi Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri dan koreksi nilai kerugian dana bergulir. Keuntungan Investasi Pemerintah Daerah didapat dari penerimaan kembali Tanah Cibereum milik PD Jati Mandiri sebesar Rp183.819.300.000,00, penghapusan sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan Tahun 2025 (Rp34.525.065.318,00) dan koreksi nilai penyertaan dana bergulir Rp3.278.822,00.

4.6.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang diperoleh dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan RK PPKD dikurangi/ditambah dengan koreksi-koreksi yang berasal dari dampak kumulatif, perubahan basis akuntansi dan pendapatan yang ditangguhkan. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025
Ekuitas Akhir	3.080.525.953.713,17

Rincian disajikan di *Lampiran 19*.

BAB V

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)

Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan di-otorisasi untuk terbit. Peristiwa setelah tanggal neraca yang kami catat dalam laporan keuangan ini adalah pengakuan piutang bagi hasil Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 Tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Desember 2025 Kepada Pemda Kab/Kota, dan kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada beberapa SKPD hasil dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

5.2 Profil Entitas

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengandung paradigma baru dalam pemerintahan daerah dimana tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan, keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi geografis suatu wilayah secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Pengembangan Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimilikinya.

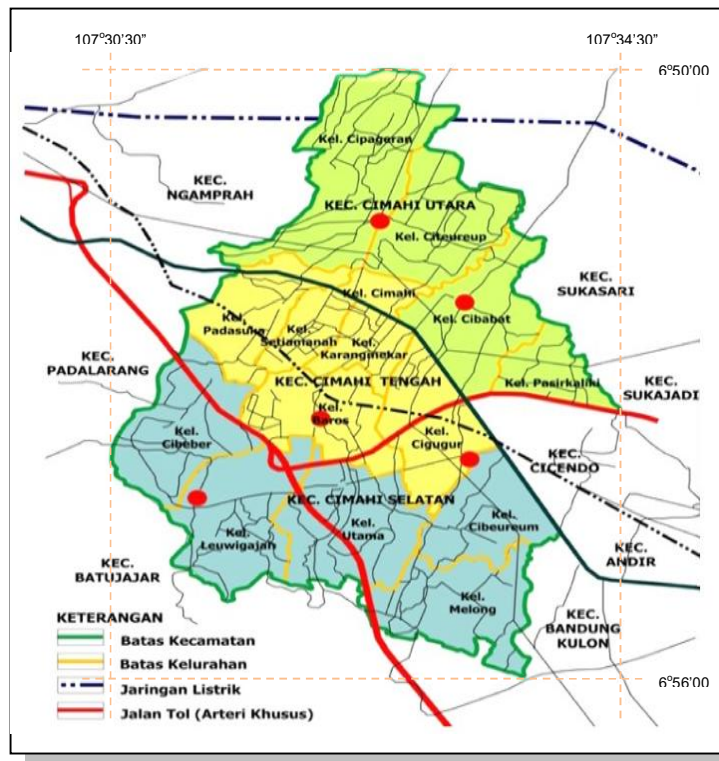
Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta; Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Cimahi adalah 40,25 km² (4.025,73 ha) yang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan, dengan letak wilayah administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada bagian timur dan selatan. Kabupaten Bandung pada bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat pada bagian utara, barat dan selatan.

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara 13,31 km² dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirkaliki 3,23 km², Kelurahan Cibabat 2,87 km², Kelurahan Citeureup 1,27 km², dan Kelurahan Cipageran 5,94 km². Kemudian untuk Kecamatan Cimahi

Tengah memiliki luas wilayah 10,11 dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baros 2,25 km², Kelurahan Cigugur tengah 2,35 km², Kelurahan Karang Mekar 1,31 km², Kelurahan Setiamanah 1,38 km², Kelurahan Padasuka 1,98 km², dan Kelurahan cimahi 0,84 km². Dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki luas wilayah 16,83 km² dibagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Utama 3,13 km². Kelurahan Leuwigajah 2,64 km². Kelurahan Cibeber 3,33 km². Kelurahan Cibeureum 3,93 km² dan Kelurahan Melong 3,8 km².

Gambar 5.1
Peta Administrasi Kota Cimahi



Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang. sebagai berikut :

1. Sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2000 termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
2. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi yaitu 1.446,59 ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan

pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.

3. Fungsi lindung Garis Sempadan Sungai (GSS), jalan tol dan jalur kereta api. Selain menguntungkan Kota Cimahi juga menjadi hambatan dalam pengembangan kota, yang menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

Kendala-kendala tersebut tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan namun kendala tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2025

Pada Tahun 2023 terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dimana PJ. Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan S.Si, M.M. yang diangkat menjadi Penjabat Wali Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5772 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat digantikan oleh Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. yang diangkat menjadi Penjabat Wali Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4111 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah kota Cimahi melakukan perubahan satuan kerja perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:

Tabel 5.1 Daftar SKPD Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	Dinas Kesehatan
4	Rsud Cibabat
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Tenaga Kerja
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
13	Dinas Pangan Dan Pertanian
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Sosial
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
18	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
19	Sekretariat Daerah
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
21	Sekretariat DPRD
22	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
23	Inspektorat
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
25	Kecamatan Cimahi Utara
26	Kecamatan Cimahi Tengah
27	Kecamatan Cimahi Selatan
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
29	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
30	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tipologi dan urusan pemerintahan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
- 6) Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;
- 9) Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi;
- 12) Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
- 13) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
- 16) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; dan
- 17) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan;

e. Badan meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :

- a) Kelurahan Cipageran;
- b) Kelurahan Citeureup;
- c) Kelurahan Cibabat;
- d) Kelurahan Pasirkaliki;

2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Padasuka;
- b) Kelurahan Setiamanah;
- c) Kelurahan Karangmekar;
- d) Kelurahan Baros;
- e) Kelurahan Cimahi;
- f) Kelurahan Cigugur Tengah;

3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Cibeureum;
- b) Kelurahan Cibeber;
- c) Kelurahan Leuwigajah;
- d) Kelurahan Utama;
- e) Kelurahan Melong;

5.4 Hubungan Dengan DPRD, BPK serta Forkopimda

5.4.1 Hubungan dengan DPRD

Hubungan dengan DPRD merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dan di dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Pemerintah serta fungsi DPRD sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD berjalan secara dinamis sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, serta tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan ini terlihat diantaranya dalam penyusunan rencana anggaran (KUA, PPAS, RAPBD dan APBD) maupun dalam pansus-pansus menghasilkan perda. Selain itu, secara berkala ada forum kebersamaan eksekutif-legislatif mendengarkan pencerahan dari narasumber yang relevan (sosial/politik/ekonomi/hukum).

5.4.2 Hubungan dengan BPK

Hubungan dengan BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sampai saat ini telah berjalan dengan baik.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait masih adanya catatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dengan harapan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi pada tahun mendatang tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5.4.3 Hubungan dengan Forkopimda

Hubungan dengan Forkopimda terjalin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing seperti dengan Unsur Pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Harmonisasi yang telah terjalin diwujudkan dalam Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Daerah serta Koordinasi pada setiap event sosial dan kemasyarakatan.

5.5 Pengaruh *Stakeholder* (pemegang kepentingan): DPRD

Pengaruh *stakeholder* DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup kuat, baik dalam proses penganggaran maupun inisiatif penyusunan produk legislatif/perda. Pengaruh DPRD dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

5.6 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan

Dampak lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor:

1. Lingkungan internal;

Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi.

2. Lingkungan eksternal :
 - a. Kenyamanan lingkungan kerja yang belum optimal;
 - b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan laporan keuangan;
 - c. Pendidikan dan latihan yang diberikan terlalu singkat.

5.7 Alamat Kantor

Tabel 5.2 Alamat Kantor SKPD Kota Cimahi

No	Nama	Alamat	Telepon	Faximile	Keterangan
1	Kepala Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654016	6654274 Psw 125	Melalui Sanditel
2	Sekretariat Dewan/DPRD	Jl.Hj.Julaeha Kartasasmita	022- 6633315	6633315	Langsung
3	Inspektorat Kota	Jl. TTUC Jl. Pesantren, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513	022- 6630330	6654274 Psw 125	Langsung
4	Sekretariat Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274	5554274	Langsung
5	BPKAD	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274 Psw 117/132	6654274 Psw 125	Melalui Sanditel
6	Mall Pelayanan Publik	Jl. Aruman, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat	022- 6632601/ 6641454	022- 6641454	Langsung

BAB VI

PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Cimahi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi.



WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Belanja Hibah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025

I Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NOSPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	LS	32.77/02.0/000023/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	13/03/2025	32.77/03.0/000023/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	13/03/2025	32.77/04.0/000020/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/M/3/2025	13/03/2025	Belanja Hibah Polres Cimahi	1.239.150.000,00
2	LS	32.77/02.0/000075/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000077/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000063/LS/8.01.0.0.0.0.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja Hibah Keuangan BNN Kota Cimahi	200.000.000,00
Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat									1.439.150.000,00

II Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

	LS					32.77/07.0/000001/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/PR/11/2025	06/11/2025	Pengembalian belanja Rapid Tes Urine (BNN) dari dana Hibah Bakesbangpol Pemkot Cimahi	(81,00)
1	LS	32.77/02.0/000210/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	32.77/03.0/000215/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	32.77/04.0/000182/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	80% PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG SAT RESKRIM, SAT RESNARKOBA DAN SAT INTELKAM POLRES CIMAHI	269.915.120,00
2	LS	32.77/02.0/000212/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	32.77/03.0/000217/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	32.77/04.0/000183/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	Uang Muka 30% Renovasi Gedung Sat Reskrim, Sat Resnarkoba dan Sat Intelkam Polres Cimahi	1.857.415.050,00
3	LS	32.77/02.0/000211/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	32.77/03.0/000216/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	32.77/04.0/000184/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/P4/9/2025	29/09/2025	80% PERENCANAAN PENYELESAIAN HALAMAN POLSEK CIMAHI TENGAH	79.748.880,00
4	LS	32.77/02.0/000247/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2025	22/10/2025	32.77/03.0/000255/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2025	22/10/2025	32.77/04.0/000217/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/P4/10/2025	24/10/2025	Uang Muka 30% Penyelesaian Halaman Polsek Cimahi Tengah	628.216.800,00
5	LS	32.77/03.0/000282/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	14/11/2025	32.77/03.0/000282/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	14/11/2025	32.77/04.0/000243/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PR/11/2025	17/11/2025	Termin I 30% dikurangi Cicilan Uang Muka 30% Renovasi Gedung Sat Reskrim, Sat Resnarkoba dan Sat Intelkam Polres Cimahi	1.300.190.535,00
6	LS	32.77/03.0/000371/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	19/12/2025	32.77/03.0/000371/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	19/12/2025	32.77/04.0/000323/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	23/12/2025	Termin I 60% Dikurangi Cicilan Uang Muka 30% Penyelesaian Halaman Polsek Cimahi Tengah	944.216.220,00
7	LS	32.77/02.0/000396/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/03.0/000405/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/04.0/000366/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/1/2025	31/12/2025	20% PERENCANAAN PENYELESAIAN HALAMAN POLSEK CIMAHI TENGAH	19.937.220,00
8	LS	32.77/02.0/000404/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/03.0/000415/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/04.0/000364/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/1/2025	31/12/2025	100% PENGAWASAN PENYELESAIAN HALAMAN POLSEK CIMAHI TENGAH	99.648.000,00
9	LS	32.77/02.0/000398/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/03.0/000408/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/04.0/000369/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/1/2025	31/12/2025	90% PENGAWASAN RENOVASI SAT RESKRIM, SAT RESNARKOBA DAN SAT INTELKAM POLRES CIMAHI	335.907.000,00
10	LS	32.77/02.0/000405/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/03.0/000417/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/04.0/000360/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/1/2025	31/12/2025	Termin II 90% dikurangi Cicilan Uang Muka 30% Renovasi Gedung Sat Reskrim, Sat Resnarkoba dan Sat Intelkam Polres Cimahi	2.476.213.425,00
11	LS	32.77/02.0/000397/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/03.0/000407/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	32.77/04.0/000367/LS/1.03.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/1/2025	31/12/2025	Termin II 100% Dikurangi Cicilan UM 30% Penyelesaian Halaman Polsek Cimahi Tengah	631.357.380,00
Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat									8.642.765.549,00

III Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

1	LS	32.77/02.0/000012/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/2/2025	10/02/2025	32.77/03.0/000012/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/2/2025	10/02/2025	32.77/04.0/000010/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/M/2/2025	10/02/2025	Belanja Hibah KONI Kota Cimahi semester 1 Tahun 2025	4.687.500.000,00
2	LS	32.77/02.0/000017/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/2/2025	14/02/2025	32.77/03.0/000017/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/2/2025	14/02/2025	32.77/04.0/000014/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/M/2/2025	14/02/2025	Hibah Uang KORMI Kota Cimahi Semester 1 Tahun 2025	435.000.000,00
3	LS	32.77/02.0/000031/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	10/03/2025	32.77/03.0/000031/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	10/03/2025	32.77/04.0/000025/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/M/3/2025	10/03/2025	Hibah Uang Kwarcab Pramuka Kota Cimahi Semester 1 Tahun 2025	86.069.000,00
4	LS	32.77/02.0/000029/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	10/03/2025	32.77/03.0/000029/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	10/03/2025	32.77/04.0/000024/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/M/3/2025	10/03/2025	Hibah Uang NPCI Kota Cimahi Semester 1 Tahun 2025	250.000.000,00
5	LS	32.77/02.0/000036/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	17/03/2025	32.77/02.0/000036/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	17/03/2025	32.77/04.0/000029/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/M/3/2025	17/03/2025	Hibah Uang DPD KNPI Kota Cimahi Semester 1 Tahun 2025	174.418.000,00
6	LS	32.77/02.0/000090/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025	23/04/2025	32.77/03.0/000092/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025	23/04/2025	32.77/04.0/000082/LS/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/P2/4/2025	23/04/2025	BMS - Belanja Hibah kepada BAZNAS Kota Cimahi Tahun 2025	280.080.000,00
7	LS	32.77/02.0/000077/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	16/05/2025	32.77/03.0/000077/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	16/05/2025	32.77/04.0/000073/LS/1.02.0.0.0.0.00.01.0000/P3/5/2025	16/05/2025	Belanja Hibah untuk PMI Kota Cimahi TA 2025 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (1.02.02.2.02.0038)	350.000.000,00
8	LS	32.77/02.0/000108/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	09/07/2025	32.77/03.0/000112/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	09/07/2025	32.77/04.0/000092/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/P4/7/2025	10/07/2025	Belanja Hibah Uang KORMI Kota Cimahi Semester II	440.000.000,00
9	LS	32.77/02.0/000112/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	22/07/2025	32.77/03.0/000116/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	22/07/2025	32.77/04.0/000099/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/P4/7/2025	23/07/2025	Belanja Hibah Uang KONI Kota Cimahi Semester II Tahun 2025	4.687.500.000,00
10	LS	32.77/02.0/000111/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	22/07/2025	32.77/03.0/000115/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	22/07/2025	32.77/04.0/000098/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/P4/7/2025	23/07/2025	Belanja Hibah Uang NPCI Kota Cimahi Semester II Tahun 2025	250.000.000,00
11	LS	32.77/03.0/000117/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	22/07/2025	32.77/03.0/000117/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	22/07/2025	32.77/04.0/000097/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/P4/7/2025	23/07/2025	Belanja Hibah Uang Kwarcab Pramuka Cimahi Semester II Tahun 2025	163.931.000,00
12	LS	32.77/02.0/000217/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/PR/12/2025	05/12/2025	32.77/03.0/000223/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/PR/12/2025	05/12/2025	32.77/04.0/000197/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/PR/12/2025	09/12/2025	Belanja Hibah Uang KNPI Kota Cimahi Tahap II	175.582.000,00
13	LS					32.77/07.0/000001/LS/1.02.0.0.0.0.00.01.0000/P3/5/2025	31/12/2025	Pengembalian Dana Hibah PMI sebesar Rp7.616.980	(7.616.980,00)
14	LS					32.77/07.0/000002/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/PPR1/12/2025	31/12/2025	Pengembalian Hibah KONI 2025	(80.719.900,00)
15	LS	32.77/02.0/000033/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	12/03/2025	32.77/03.0/000034/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2025	12/03/2025	32.77/04.0/000027/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/M/3/2025	12/03/2025	Belanja Hibah uang kepada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Tahap ke-1 Tahun 2025	100.000.000,00
16	LS	32.77/02.0/000118/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	29/07/2025	32.77/03.0/000122/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P4/7/2025	29/07/2025	32.77/04.0/000104/LS/2.22.3.2.6.2.19.04.0000/P4/7/2025	30/07/2025	Hibah uang kepada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Tahun 2025 tahap ke-2	100.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi									12.091.743.120,00
IV	Belanja Hibah Dana BOS								
1	Sekolah SWASTA - Di Transfer Langsung dari KPPN ke Rekening Penerima								13.657.219.498,00
2	Dana BOP PAUD								6.036.953.500,00
	Dana BOP Kesetaraan								4.381.795.510,00
Belanja Hibah Dana BOS									24.075.968.508,00

V Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1	LS	32.77/02.0/000073/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000075/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000064/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	249.630.000,00
2	LS	32.77/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000069/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	213.450.000,00
3	LS	32.77/02.0/000070/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000065/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	356.985.000,00
4	LS	32.77/02.0/000068/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000070/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000068/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	120.142.500,00
5	LS	32.77/02.0/000069/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000071/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000067/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	245.632.500,00
6	LS	32.77/02.0/000071/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000073/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000066/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	141.930.000,00
7	LS	32.77/02.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/03.0/000076/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	03/07/2025	32.77/04.0/000070/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	04/07/2025	Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik TA 2025	529.680.000,00
8	LS	32.77/02.0/000078/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	10/07/2025	32.77/03.0/000080/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	10/07/2025	32.77/04.0/000074/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	10/07/2025	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2025	200.617.500,00
9	LS	32.77/02.0/000079/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	10/07/2025	32.77/03.0/000081/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	10/07/2025	32.77/04.0/000073/LS/8.01.0.0.0.0.00.01.0000/P4/7/2025	10/07/2025	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2025	282.090.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik									2.340.157.500,00
TOTAL BELANJA HIBAH									48.589.784.677,00

Lampiran 1

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NO SPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	TU	32.77/02.0/000106/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	16/05/2025	32.77/03.0/000110/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	16/05/2025	32.77/04.0/000086/TU/1.01.0.0.0.0.00.01.0000/P3/5/2025	19/05/2025	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	599.040.000,00
2	TU	32.77/02.0/000316/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	26/11/2025	32.77/03.0/000325/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	26/11/2025	32.77/04.0/000251/TU/1.01.0.0.0.0.00.01.0000/PR/11/2025	26/11/2025	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu, Keg Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.945.012.000,00
3	TU	32.77/02.0/000313/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	25/11/2025	32.77/03.0/000322/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	25/11/2025	32.77/04.0/000249/TU/1.01.0.0.0.0.00.01.0000/PR/11/2025	25/11/2025	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Penerima Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran 2025)	1.567.860.000,00
4	TU	32.77/02.0/000335/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	01/12/2025	32.77/03.0/000348/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	01/12/2025	32.77/04.0/000283/TU/1.01.0.0.0.0.00.01.0000/PR/12/2025	02/12/2025	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	455.460.000,00
TOTAL BELANJA BANTUAN SOSIAL									4.567.372.000,00

Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	Piutang Pajak :					
	Piutang pajak daerah					
	1 Pajak Reklame	2025	736.867.635,00	3.367.201.700,00	3.093.664.000,00	1.010.405.335,00
	2 Pajak Air Tanah	2025	1.875.223.242,00	35.770.992.900,00	36.324.630.040,00	1.321.586.102,00
	3 BPHTB	2025	-	32.724.106.988,00	32.724.106.988,00	-
	4 PBBP2	2025	144.379.248.040,00	76.182.515.128,00	67.737.087.188,00	152.824.675.980,00
	5 PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2025	2.922.561,00	31.754.284.713,00	31.754.284.713,00	2.922.561,00
	6 PBJT-Tenaga Listrik	2025	-	61.448.207.144,00	61.448.207.144,00	-
	7 PBJT-Jasa Perhotelan	2025	14.906.880,00	334.560.288,00	334.560.288,00	14.906.880,00
	8 PBJT-Jasa Parkir	2025	-	904.273.079,00	904.273.079,00	-
	9 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2025	-	842.952.358,00	842.952.358,00	-
	10 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2025		68.172.205.850,00	68.172.205.850,00	-
	11 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2025		27.009.350.300,00	27.009.350.300,00	-
Jumlah			147.009.168.358,00	338.510.650.448,00	330.345.321.948,00	155.174.496.858,00

Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2025

Penyisihan Piutang Pajak Reklame 2025

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2012	118.091.438,00							118.091.438,00	118.091.438,00
2013	2.031.250,00							2.031.250,00	2.031.250,00
2014	1.678.422,00							1.678.422,00	1.678.422,00
2015	9.115.625,00							9.115.625,00	9.115.625,00
2016	-							-	
2017	-							-	
2018	-							-	
2019	31.739.200,00							31.739.200,00	31.739.200,00
2020	210.754.300,00					210.754.300,00	105.377.150,00		
2021	129.282.100,00					129.282.100,00	64.641.050,00		
2022	101.033.800,00					101.033.800,00	50.516.900,00		
2023	7.789.300,00			7.789.300,00	778.930,00				
2024	56.384.500,00			56.384.500,00	5.638.450,00				
2025	342.505.400,00	342.505.400,00	1.712.527,00						
Jumlah	1.010.405.335,00	342.505.400,00	1.712.527,00	64.173.800,00	6.417.380,00	441.070.200,00	220.535.100,00	162.655.935,00	162.655.935,00
Jumlah Pokok		1.010.405.335,00							
Jumlah Penyisihan		391.320.942,00							
NRV		619.084.393,00							

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah 2025

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2012	63.977.520,00							63.977.520,00	63.977.520,00
2013	45.403.164,00							45.403.164,00	45.403.164,00
2014	2.911.232,00							2.911.232,00	2.911.232,00
2015								-	
2016								-	
2017								-	
2018	120.217.020,00							120.217.020,00	120.217.020,00
2019	120.487.812,00							120.487.812,00	120.487.812,00
2020	10.631.079,00					10.631.079,00	5.315.539,50		
2021	34.001.550,00					34.001.550,00	17.000.775,00		
2022	28.950.915,00					28.950.915,00	14.475.457,50		
2023	1.514.720,00			1.514.720,00	151.472,00				
2024	29.316.750,00			29.316.750,00	2.931.675,00				
2025	864.174.340,00	864.174.340,00	4.320.871,70						
Jumlah	1.321.586.102,00	864.174.340,00	4.320.871,70	30.831.470,00	3.083.147,00	73.583.544,00	36.791.772,00	352.996.748,00	352.996.748,00
Jumlah Pokok		1.321.586.102,00							
Jumlah Penyisihan		397.192.538,700							
NRV		924.393.563,30							

Penyisihan Piutang PBB 2025

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2013	8.353.000.974,00							8.353.000.974,00	8.353.000.974,00
2014	7.923.488.442,00							7.923.488.442,00	7.923.488.442,00
2015	8.833.768.526,00							8.833.768.526,00	8.833.768.526,00
2016	8.431.122.616,00							8.431.122.616,00	8.431.122.616,00
2017	8.949.520.530,00							8.949.520.530,00	8.949.520.530,00
2018	10.563.321.489,00							10.563.321.489,00	10.563.321.489,00
2019	13.298.043.649,00							13.298.043.649,00	13.298.043.649,00
2020	19.718.564.022,00					19.718.564.022,00	9.859.282.011,00		
2021	20.637.311.007,00					20.637.311.007,00	10.318.655.503,50		
2022	6.774.175.604,00					6.774.175.604,00	3.387.087.802,00		
2023	8.140.252.610,00			8.140.252.610,00	814.025.261,00				
2024	12.512.976.956,00			12.512.976.956,00	1.251.297.695,60				
2025	18.689.129.555,00	18.689.129.555,00	93.445.647,78						
Jumlah	152.824.675.980,00	18.689.129.555,00	93.445.647,78	20.653.229.566,00	2.065.322.956,60	47.130.050.633,00	23.565.025.316,50	66.352.266.226,00	66.352.266.226,00
Jumlah Pokok		152.824.675.980,00							
Jumlah Penyisihan		92.076.060.146,88							
TOTAL		60.748.615.833,13							

6005456712 30.027.283,56

Penyisihan Piutang Pajak PBJT-Makanan dan/atau Minuman 2025

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2021	1.732.500,00					1.732.500,00	866.250,00		
2022	1.190.061,00					1.190.061,00	595.030,50		
2023	-								
2024									
2025									
Jumlah	2.922.561,00	-	-	-	-	2.922.561,00	1.461.280,50	-	-
Jumlah Pokok		2.922.561,00							
Jumlah Penyisihan		1.461.280,50							
NRV		4.383.841,50							

Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan 2024

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2021	14.684.880,00					14.684.880,00	7.342.440,00		
2022	-								
2023	222.000,00			222.000,00	22.200,00				
2024									
2025									
Jumlah	14.906.880,00			222.000,00	22.200,00	14.684.880,00	7.342.440,00	-	-
Jumlah Pokok		14.906.880,00							
Jumlah Penyisihan		7.364.640,000							
NRV		7.542.240,00							

Penyisihan Pajak Reklame	391.320.942,00
Penyisihan Pajak Air Tanah	397.192.538,70
Penyisihan BPHTB	-
Penyisihan PBBP2	92.076.060.146,88
Penyisihan PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.461.280,50
Penyisihan PBJT-Tenaga Listrik	-
Penyisihan PBJT-Jasa Perhotelan	7.364.640,00
Penyisihan PBJT-Jasa Parkir	-
Penyisihan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-
Penyisihan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-
Penyisihan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-
Total Penyisihan	92.873.399.548,08

Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Piutang Tahun 2025	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang 31 Desember 2025
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	621.316.613,00	2.672.452.440,00	3.081.358.896,00	212.410.157,00	80.631.664,61
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00	3.800.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Laboratorium (DLH)	36.675.000,00	989.603.000,00	1.003.914.000,00	22.364.000,00	17.349.762,50
6	Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	83.167.875,00	811.570.600,00	832.876.300,00	61.862.175,00	46.700.250,00
7	Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	3.202.101.132,00	3.664.910.850,00	3.543.152.250,00	3.323.859.732,00	2.913.056.394,50
8	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.090.435.433,00	171.110.129.159,00	173.528.831.204,00	671.733.388,00	128.656.738,00
9	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	2.026.922.000,00	6.769.710.100,00	6.625.713.900,00	2.170.918.200,00	1.419.744.094,00
10	Retribusi Pelayanan Persampahan	-	1.765.711.346,00	1.735.911.346,00	29.800.000,00	947.475,00
	Jumlah	9.117.456.264,00	187.784.087.495,00	190.351.757.896,00	6.549.785.863,00	4.663.924.589,61

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025

A. PIUTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2024	Piutang Retribusi PBG 2024		-	-	-	-	-	Rp 68.718.877,00	Rp 68.718.877,00
2	19/03/2025	IVAN YAKAPUTRA		-			Rp 9.931.855,00	4.965.927,50		
3	28/04/2025	ROIS SUAHARTONI, S.E		-	-	-	Rp 4.382.805,00	2.191.402,50		
4	03/07/2025	TINI SUHARTINI, Dr.		-			Rp 6.984.717,00	3.492.358,50		
5	15/10/2025	RATNA KOMALA		-	2.205.315,00	220.531,50		-		
6	17/11/2025	MOCHAMMAD FAUZAN JULIAN RAZAK		-	4.648.786,00	464.878,60				
7	04/12/2025	SANI NAUFALLINA	1.129.181,00	5.645,91						
8	10/12/2025	DANIEL OUSMAN	21.312.563,00	106.562,82						
9	29/12/2025	JOHAN SURIADIALHIM	51.801.373,00	259.006,87						
10	29/12/2025	TEDI JULIANSAH	1.031.236,00	5.156,18						
11	29/12/2025	FAHMI OKTORIANTO, S.H QQ PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK	22.500.000,00	112.500,00				-		
12	29/12/2025	ARIE CHRISTIAN WIBISONO	6.971.805,00	34.859,03				-		
13	29/12/2025	RESTI ALFIYAH DWI SAPUTRI	2.376.469,00	11.882,35				-		
14	29/12/2025	BUDI WALI RAHAYU	521.035,00	2.605,18				-		
15	29/12/2025	NETI HERAWATI, S.H.	3.990.775,00	19.953,88				-		
16	29/12/2025	DJARKASIH DJIWADIPURA, DRS QQ KOPERASI KONSUMEN PUSKOP KEPOLISIAN	3.903.365,00	19.516,83				-		
		JUMLAH	Rp 115.537.802,00	Rp 577.689,01	Rp 6.854.101,00	Rp 685.410,10	Rp 21.299.377,00	Rp 10.649.688,50	Rp 68.718.877,00	Rp 68.718.877,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI Persetujuan Bangunan Gedung	Rp 212.410.157,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IMB TAHUN 2025	Rp 80.631.664,61							

B. PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2021	Piutang Retribusi IG tahun 2025	-	-	-	-	-	-	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
			-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -
			-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -
		JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Rp 51.898.211,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IG TAHUN 2025	Rp 51.898.211,00							

C. PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2023	Piutang Retribusi IT tahun 2025	-	-	-	-	-	-	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00
8				Rp -						
		JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	Rp 3.800.000,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IT TAHUN 2025	Rp 3.800.000,00							

D. PIUTANG KARTU PENGAWASAN

No	Tahun	Rincian	0 s/d 1 Tahun (Lancar)		> 1 s/d 2Tahun (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 Tahun (Diragukan)		>5 Tahun (Macet)	
			Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	2011	Heru Gunawan	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
2	2011	Iming Vertical	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
3	2011	Yuliani Herwanti	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
4	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
5	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
6	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
7	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
8	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00
9	2011	Menna Ria Sitorus	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
10	2011	Nandang Sumitra	-	-	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN	1.140.000,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KARTU PENGAWASAN 2025	1.140.000,00							

E. PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	2024	Piutang sampai dengan 2024							Rp 16.956.500,00	Rp 16.956.500,00
2	Oktober	PT Logam Bima			Rp 1.552.500,00	Rp 155.250,00				
3	November	CV Karunia Warna Abadi			Rp 750.000,00	Rp 75.000,00				
4	November	PT Logam Bima			Rp 1.552.500,00	Rp 155.250,00				
5	Desember	PT Logam Bima	Rp 1.552.500,00	Rp 7.762,50						
		JUMLAH	Rp 1.552.500,00	Rp 7.762,50	Rp 3.855.000,00	Rp 385.500,00	Rp -	Rp -	Rp 16.956.500,00	Rp 16.956.500,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM	Rp 22.364.000,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI LAB TAHUN 2025	Rp 17.349.762,50							

F. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH (BITC)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	s.d 2024	Piutang BITC sd. 2024				Rp -		Rp -	Rp 42.245.175,00	Rp 42.245.175,00
2	01. Januari	SMARTEK				Rp -	Rp 2.934.000,00	Rp 1.467.000,00		
3	02. Februari	SMARTEK				Rp -	Rp 2.934.000,00	Rp 1.467.000,00		
4	03. Maret	SMARTEK				Rp -	Rp 2.934.000,00	Rp 1.467.000,00		
5	12. Desember	ACDI Lt.4 R.2	Rp 7.410.000,00	Rp 37.050,00						
6	12. Desember	ACDI Lt.4 R.5	Rp 2.205.000,00	Rp 11.025,00						
7	12. Desember	ACDI Lt.4 ws.18	Rp 1.200.000,00	Rp 6.000,00						
JUMLAH			Rp 10.815.000,00	Rp 54.075,00	Rp -	Rp -	Rp 8.802.000,00	Rp 4.401.000,00	Rp 42.245.175,00	Rp 42.245.175,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI (BITC)			Rp 61.862.175,00							
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI BITC TAHUN 2025			Rp 46.700.250,00							

G. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH (RUSUNAWA)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	sd. 2023	Rusunawa Kota Cimahi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.629.507.232,00	Rp 2.629.507.232,00
2	sd. 2024	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	155.640.000,00	Rp 155.640.000,00
3	Januari 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	16.887.500,00	Rp 8.443.750,00		Rp -
4	Februari 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	13.605.000,00	Rp 6.802.500,00		Rp -
5	Maret 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	17.592.500,00	Rp 8.796.250,00		Rp -
6	Apr-25	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	21.135.000,00	Rp 10.567.500,00	-	Rp -
7	Mei 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	16.742.500,00	Rp 8.371.250,00	-	Rp -
8	Juni 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	22.790.000,00	Rp 11.395.000,00	-	Rp -
9	Juli 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	27.712.500,00	Rp 13.856.250,00	-	Rp -
10	Agustus 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	39.345.000,00	Rp 19.672.500,00	-	Rp -
11	Sep-25	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	-	-	47.815.000,00	Rp 23.907.500,00	-	Rp -
12	Oktober 2025	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	64.755.000,00	Rp 6.475.500,00		Rp -	-	Rp -
13	Nov-25	Rusunawa Kota Cimahi	-	-	88.100.000,00	Rp 8.810.000,00		Rp -	-	Rp -
14	Desember 2025	Rusunawa Kota Cimahi	162.232.500,00	Rp 811.162,50		Rp -		Rp -	-	Rp -
Jumlah			Rp 162.232.500,00	Rp 811.162,50	Rp 152.855.000,00	Rp 15.285.500,00	Rp 223.625.000,00	Rp 111.812.500,00	Rp 2.785.147.232,00	Rp 2.785.147.232,00
Jumlah Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2025			Rp 3.323.859.732,00							
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2025			Rp 2.913.056.394,50							

H. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	Sebelum Jatuh Tempo (Lancar)		Tagihan I (Kurang Lancar)		Tagihan II (Diragukan)		Tagihan III (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	Tagihan III	PT Jasa Raharja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 86.908.388,00	Rp 86.908.388,00
2	Tagihan II	RS IMC	-	-	-	-	17.280.000,00	8.640.000,00		-
3	Tagihan II	RS Avisena	-	-	-	-	8.280.000,00	4.140.000,00		-
4	Tagihan I	RS Avisena	-	-	1.800.000,00	Rp 180.000,00	-	-		-
5	Tagihan I	RS Salamun	-	-	29.480.000,00	Rp 2.948.000,00	-	-		-
6	Tagihan I	RS Hermina Pasteur	-	-	30.820.000,00	Rp 3.082.000,00	-	-		-
7	Tagihan I	RS SILOAM PURWAKARTA	-	-	18.760.000,00	Rp 1.876.000,00	-	-		-
8	Tagihan I	RS Hasan Sadikin	-	-	194.635.000,00	Rp 19.463.500,00	-	-		-
9	Sebelum Jatuh Tempo	RS SILOAM PURWAKARTA	360.000,00	1.800,00	-	Rp -	-	-	-	-
10	Sebelum Jatuh Tempo	RS Hasan Sadikin	283.410.000,00	1.417.050,00	-	Rp -	-	-	-	-
Jumlah			Rp 283.770.000,00	Rp 1.418.850,00	Rp 275.495.000,00	Rp 27.549.500,00	Rp 25.560.000,00	Rp 12.780.000,00	Rp 86.908.388,00	Rp 86.908.388,00
Jumlah Piutang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah			Rp 671.733.388,00							
Jumlah Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum			Rp 128.656.738,00							

I. Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31 Desember 2024	<i>Piutang s.d. Desember 2024</i>							1.325.767.800,00	1.325.767.800,00
2	Jan-25	<i>Bulan Januari</i>	-	-	-	-	12.259.400,00	6.129.700,00		-
3	29-02-2025	<i>Bulan Februari</i>	-	-	-	-	11.131.600,00	5.565.800,00		-
4	Mar-25	<i>Bulan Maret</i>	-	-	-	-	12.932.200,00	6.466.100,00		-
5	Apr-25	<i>Bulan April</i>	-	-	-	-	14.103.300,00	7.051.650,00		-
6	Mei-25	<i>Bulan Mei</i>	-	-	-	-	14.831.500,00	7.415.750,00		-
7	Jun-25	<i>Bulan Juni</i>	-	-	-	-	19.039.800,00	9.519.900,00	-	-
8	Jul-25	<i>Bulan Juli</i>	-	-	-	-	18.125.300,00	9.062.650,00	-	-
9	Agu-25	<i>Bulan Agustus</i>	-	-	-	-	23.476.800,00	11.738.400,00	-	-
10	Sep-25	<i>Bulan September</i>	-	-	-	-	31.265.000,00	15.632.500,00	-	-
11	Okt-25	<i>Bulan Oktober</i>	-	-	46.423.400,00	4.642.340,00		-	-	-
12	Nov-25	<i>Bulan November</i>	-	-	79.407.300,00	7.940.730,00		-	-	-
13	Des-25	<i>Bulan Desember</i>	562.154.800,00	2.810.774,00	-	-		-	-	-
		Jumlah	Rp 562.154.800,00	Rp 2.810.774,00	Rp 125.830.700,00	Rp 12.583.070,00	Rp 157.164.900,00	Rp 78.582.450,00	Rp 1.325.767.800,00	Rp 1.325.767.800,00
		Jumlah Piutang Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air	Rp 2.170.918.200,00							
		Jumlah Penyisihan Piutang Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah	Rp 1.419.744.094,00							

J. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31 Desember 2024	<i>Piutang s.d. Desember 2024</i>							-	-
11	Okt-25	<i>Bulan Oktober</i>	-	-	1.000.000,00	100.000,00		-	-	-
12	Nov-25	<i>Bulan November</i>	-	-	7.405.000,00	740.500,00		-	-	-
13	Des-25	<i>Bulan Desember</i>	21.395.000,00	106.975,00	-	-		-	-	-
		Jumlah	Rp 21.395.000,00	Rp 106.975,00	Rp 8.405.000,00	Rp 840.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp 29.800.000,00							
		Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp 947.475,00							

JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PBG	=	Rp	80.631.664,61
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IG	=	Rp	51.898.211,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IT	=	Rp	3.800.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KARTU PENGAWAS	=	Rp	1.140.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LABORATORIUM	=	Rp	17.349.762,50
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN	=	Rp	46.700.250,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	=	Rp	2.913.056.394,50
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	=	Rp	128.656.738,00
JUMLAH PENYISIHAN Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum) 2025	=	Rp	1.419.744.094,00
JUMLAH PENYISIHAN Retribusi Pelayanan Persampahan	=	Rp	947.475,00
Jumlah		Rp	4.663.924.589,61

**Biaya Dibayar Di Muka
Per 31 Desember 2025**

No	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	139.497.375,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.
2	DINAS KESEHATAN	107.444.863,93	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.
3	RSU DAERAH CIBABAT	8.241.756,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	255.375.729,63	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Tanah untuk Jalan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	313.203.465,05	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bagunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya.
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	216.909.583,34	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Tanah Bangunan Instalasi; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja sewa Bangunan Gedung Kantor.
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	134.204.000,01	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
8	DINAS SOSIAL	125.994.583,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
9	DINAS TENAGA KERJA	196.899.583,35	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	111.922.476,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	26.051.640,83	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.646.538.075,01	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	87.929.524,99	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
14	DINAS PERHUBUNGAN	193.442.083,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	373.368.324,91	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	257.655.558,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	236.095.472,91	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
18	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	106.011.933,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	37.401.933,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.
20	SEKRETARIAT DAERAH	372.597.015,83	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III.
21	SEKRETARIAT DPRD	82.883.333,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	15.573.300,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	28.974.934,75	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	228.586.819,17	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	20.367.419,66	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.
26	INSPEKTORAT KOTA	27.192.120,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	24.224.850,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	28.910.303,35	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	25.712.902,09	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	54.860.833,34	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
JUMLAH		6.484.071.795,14	

Catatan:

Biaya di bayar dimuka dihitung secara bulanan

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 1 s.d 15 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan ini

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 16 s.d 31 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan berikutnya

Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2025

No	Penanggung Jawab	Data		SKTJM/SKP	TMT dan JT Terakhir	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Hasil Pemantauan								Bagian Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang	
		Nama	Kasus					Dokumen TP/TGR	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa			
									Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml			Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A KERUGIAN KEUANGAN DAERAH																		
1	Dedy Priyatna	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-2002	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.157-keu/2004	001/SKTJM/TPT GR/2011	15-12-2004 dan 15-12-2006	1	15.042.100,00	1	900.000,00	0	-	0	-	1	14.142.100,00	14.142.100,00	14.142.100,00	
2	Nur Asih Amari	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.159-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	248.165.000,00	1	69.320.000,00	0	116.707.500,00	0		1	62.137.500,00	62.137.500,00	62.137.500,00	
3	Sri Kuncoro	Kekuarangan Volume Pekerjaan	LHP BPK	-	2012	1	17.840.128,80	1	7.840.128,00	0		0		1	10.000.000,80	10.000.000,80	10.000.000,80	
4	Drs. Kosasih	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.155-Keu/2010	Tanpa SKTJM	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	40.537.900,00	1	16.000.000,00	0		0	-	1	24.537.900,00	24.537.900,00	24.537.900,00	
5	Lilis Setiawati (Alm)	Pembayaran gaji melebihi waktu terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun meninggal dunia yang tidak ada tanggungan	LHP BPK	-	2021	1	23.057.489,00	1	1.822.489,00	0		0		1	21.235.000,00	21.235.000,00	21.235.000,00	
6	Dede Lisnawati	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR) Tahun Anggaran 2025	LHP Inspektorat No.700.02/10/Sekre Tgl 29 Januari 2026	SKTJM Tgl 2 Februari 2026	2026	1	400.501.323,00	0	-	0	-	0	-	1	400.501.323,00	400.501.323,00		
JUMLAH A						6	745.143.941	5	95.882.617	0	116.707.500	-	-	6	532.553.824	532.553.824	132.052.501	
B KERUGIAN KEHILANGAN ASET DAERAH																		
1	Setia Kusbaran	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2005	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.201-Keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	49.500.000,00	1	46.133.332,00	0	-	0	-	1	3.366.668,00	3.366.668,00	3.366.668,00	
2	Achmad Gunawan	Kehilangan Kendaraan-2005	Keputusan Walikota Cimahi 900/198-keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	84.800.000,00	1	41.000.000,00	0	-	1	34.800.000,00	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
3	Dedi Dasikin	Kehilangan Kendaraan-2007	Keputusan Walikota Cimahi 900/387-keu/2009	001/SKTJM/TP-TGR/2010	09-12-2009 dan 09-12-2011	1	30.000.000,00	1	3.500.000,00	0	-	0	-	1	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	
JUMLAH B						3	164.300.000,00	3	90.633.332,00	0	-	1	34.800.000,00	3	38.866.668,00	38.866.668,00	38.866.668,00	
JUMLAH (A+B)						9	909.443.940,80	8	186.515.949,00	0	116.707.500,00	1	34.800.000,00	9	571.420.491,80	571.420.491,80	170.919.168,80	

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Alat Listrik	Alat Tulis Kantor	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Cetak	Bahan Kimia	Bahan Komputer	Bahan Lainnya	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benda Pos
1	DINAS PENDIDIKAN	912.000,00	8.006.700,00	9.305.500,00	-	1.188.000,00	714.000,00	-	2.482.000,00	-	-	500.000,00
2	DINAS KESEHATAN	21.817.816,28	99.430.520,40	300.939.776,90	571.500,00	135.000,00	10.235.352,00	60.557.188,00	72.636.486,35	4.677.063.022,07	-	8.050.000,00
3	RSU DAERAH CIBABAT	48.931.116,00	16.609.191,20	42.828.329,17	-	38.757.682,00	152.450.647,90	3.907.300.031,37	-	4.577.085,00	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	631.533.062,00	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	4.212.567,00	-	-	160.766.567,00	7.115.750,00	35.253.267,00	2.494.170,00	-	-	240.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	367.632,00	3.453.935,00	23.160.840,00	-	-	5.175.000,00	-	2.548.000,00	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	388.600,00	-	-	-	197.000,00	-	-	-	-	-
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.967.835,00	4.140.419,00	58.011.827,00	-	244.200,00	10.105.000,00	4.990.560,00	2.728.700,00	-	158.402.689,00	200.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	823.000,00	20.000,00	260.871.000,00	-	232.000,00	20.221.975,05	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	49.500.000,00	-	83.096.096,46	-	-	-
14	DINAS PERHUBUNGAN	1.780.382.631,53	-	-	-	-	128.973.819,39	-	-	-	-	-
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-	-	-	-	45.199.200,00	-	-	-	-	-
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SEKRETARIAT DAERAH	3.159.600,00	-	-	-	-	79.877.700,00	-	-	-	-	-
21	SEKRETARIAT DPRD	7.449.765,00	-	-	-	46.511.210,24	-	-	-	-	-	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	26.880.000,00	-	-	-	-	-
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	4.475.000,00	-	-	-	-	-
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT KOTA	124.000,00	849.594,00	-	-	-	2.052.000,00	-	912.000,00	-	-	700.000,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grand Total	1.867.935.395,81	137.111.526,60	695.117.273,07	571.500,00	879.367.721,24	543.172.444,34	4.008.101.046,37	166.897.452,81	4.681.640.107,07	158.402.689,00	9.690.000,00

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Kertas dan Cover	Natura	Obat	Obat-obatan Lainnya	Pakan	Perabot Kantor	Perlengkapan Dinas	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Suku Cadang Alat Angkutan	Suvenir/Cendera Mata	Total
1	DINAS PENDIDIKAN	4.350.500,00	1.880.000,00	-	-	-	711.000,00	-	-	-	-	-	30.049.700,0000
2	DINAS KESEHATAN	79.758.911,12	987.200,00	5.511.524.444,81	47.488.095,95	-	102.937.859,24	-	-	-	-	9.610.000,00	11.003.743.173,1241
3	RSU DAERAH CIBABAT	23.510.910,00	-	4.519.148.905,89	-	-	-	-	-	-	-	-	8.754.113.898,5300
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	10.275.538.700,00	-	-	10.907.071.762,0000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	849.825,00	75.000,00	48.000,00	-	-	1.664.898,00	4.125.645,00	-	-	-	-	216.845.689,0000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.245.607,00	23.453.843,00	-	-	-	32.500.980,00	-	418.143.972,00	-	-	-	510.049.809,0000
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	246.000,00	-	1.489.800,00	-	-	-	-	157.037.853,06	42.869.763,00	-	-	202.229.016,0600
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.442.420,00	1.102.338,00	-	43.421.295,20	19.135.000,00	3.037.959,00	-	-	-	-	-	311.930.242,2000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.727.160,00	460.000,00	-	-	-	187.509.000,00	-	-	-	21.101.000,00	-	492.965.135,0500
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.652.875,00	-	-	-	-	620.000,00	-	-	-	-	-	146.868.971,4600
14	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.909.356.450,9200
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.199.200,0000
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	20.479.500,00	-	-	-	-	-	20.479.500,0000
20	SEKRETARIAT DAERAH	631.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.560.000,00	206.228.890,0000
21	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.960.975,2400
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.880.000,0000
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.315.000,0000
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.022.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.022.750,0000
26	INSPEKTORAT KOTA	5.068.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.705.854,0000
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total		142.346.808,12	27.958.381,00	10.032.211.150,70	90.909.391,15	19.135.000,00	349.461.196,24	4.125.645,00	575.181.825,06	10.318.408.463,00	21.101.000,00	132.170.000,00	34.861.016.016,58

21.713.008.860,27

34.861.016.016,58

**Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN							
	Saldo Awal (Audited)	62.015.122.872,00	93.420.145.070,36	240.055.645.577,31	599.205.674,00	54.922.012.556,85	837.284.153,00	451.849.415.903,52
	Penambahan :	7.638.523.214,00	4.486.213.807,00	9.645.384.392,00	99.778.892,00	6.235.843.880,00	267.641.046,00	28.373.385.231,00
	Pengurangan :	0,00	1.764.746.450,00	545.674.616,96	0,00	5.475.765.168,15	742.956.065,00	8.529.142.300,11
	Saldo Akhir (Audited)	69.653.646.086,00	96.141.612.427,36	249.155.355.352,35	698.984.566,00	55.682.091.268,70	361.969.134,00	471.693.658.834,41
2	DINAS KESEHATAN							
	Saldo Awal (Audited)	7.870.642.001,00	55.001.178.972,61	54.176.400.154,00	3.165.371.573,00	61.713.000,00	0,00	120.275.305.700,61
	Penambahan :	140.400.000,00	2.059.606.920,00	26.783.560.587,00	298.450.000,00	0,00	508.591.082,00	29.790.608.589,00
	Pengurangan :	0,00	934.132.821,05	4.205.917.049,88	0,00	0,00	0,00	5.140.049.870,93
	Saldo Akhir (Audited)	8.011.042.001,00	56.126.653.071,56	76.754.043.691,12	3.463.821.573,00	61.713.000,00	508.591.082,00	144.925.864.418,68
3	RSUD CIBABAT							
	Saldo Awal (Audited)	28.362.300.000,00	282.836.653.451,24	131.800.977.047,20	7.127.838.639,00	12.025.600,00	88.522.500,00	450.228.317.237,44
	Penambahan :	0,00	10.513.833.020,00	7.999.254.381,00	210.086.100,00	0,00	0,00	18.723.173.501,00
	Pengurangan :	0,00	379.442.247,00	40.800.000,00	0,00	0,00	88.522.500,00	508.764.747,00
	Saldo Akhir (Audited)	28.362.300.000,00	292.971.044.224,24	139.759.431.428,20	7.337.924.739,00	12.025.600,00	0,00	468.442.725.991,44
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Saldo Awal (Audited)	652.862.352.191,60	13.191.273.355,00	80.624.531.363,00	684.884.559.709,74	534.085.000,00	4.199.738.304,00	1.436.296.539.923,34
	Penambahan :	567.438.400,00	386.879.612,00	17.505.736.540,00	12.355.827.947,00	0,00	3.853.310.200,00	34.669.192.699,00
	Pengurangan :	49.550.400,00	643.428.012,00	11.384.658.124,92	269.763.697,18	0,00	4.199.738.304,00	16.547.138.538,10
	Saldo Akhir (Audited)	653.380.240.191,60	12.934.724.955,00	86.745.609.778,08	696.970.623.959,56	534.085.000,00	3.853.310.200,00	1.454.418.594.084,24
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Saldo Awal (Audited)	227.160.587.807,00	15.204.489.688,76	44.224.708.265,00	166.273.778.396,00	15.522.391.815,00	61.482.845,00	468.447.438.816,76
	Penambahan :	52.293.549.499,00	1.219.840.033,00	5.606.991.752,00	14.976.952.326,00	0,00	0,00	74.097.333.610,00
	Pengurangan :	231.428.571,00	407.116.000,00	3.902.775.263,00	25.900.000,00	0,00	0,00	4.567.219.834,00
	Saldo Akhir (Audited)	279.222.708.735,00	16.017.213.721,76	45.928.924.754,00	181.224.830.722,00	15.522.391.815,00	61.482.845,00	537.977.552.592,76
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	19.020.970.048,34	1.930.254.531,00	0,00	97.119.000,00		21.048.343.579,34
	Penambahan :	0,00	3.822.961.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.961.650,00
	Pengurangan :	0,00	494.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.335.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	22.349.596.698,34	1.930.254.531,00	0,00	97.119.000,00	0,00	24.376.970.229,34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	3.289.876.468,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	3.299.676.468,00
	Penambahan :	0,00	1.659.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.297.150,00
	Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	4.949.173.618,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	4.958.973.618,00

**Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	4.440.898.824,15	645.033.000,00	0,00	3.999.380,62	0,00	5.089.931.204,77
	Penambahan :	0,00	236.684.103,00	0,00	18.513.902,00	0,00	8.113.902,00	263.311.907,00
	Pengurangan :	0,00	247.217.273,76	0,00	18.513.902,00	0,00	0,00	265.731.175,76
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	4.430.365.653,39	645.033.000,00	0,00	3.999.380,62	8.113.902,00	5.087.511.936,01
9	DINAS SOSIAL							
	Saldo Awal (Audited)	40.302.500,00	2.482.221.299,54	0,00				2.522.523.799,54
	Penambahan :	0,00	395.612.100,00	2.713.747.355,00	0,00	0,00	0,00	3.109.359.455,00
	Pengurangan :	0,00	220.623.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.623.250,00
	Saldo Akhir (Audited)	40.302.500,00	2.657.210.149,54	2.713.747.355,00	0,00	0,00	0,00	5.411.260.004,54
10	DINAS TENAGA KERJA							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	1.898.671.600,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00	1.904.461.600,00
	Penambahan :	0,00	116.955.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.955.398,00
	Pengurangan :	0,00	217.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.480.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	1.798.146.998,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00	1.803.936.998,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							
	Saldo Awal (Audited)	14.252.840.000,00	5.185.354.968,41	12.683.273.016,10	4.149.277.550,00	9.000.000,00	0,00	36.279.745.534,51
	Penambahan :	0,00	1.121.782.917,00	338.429.086,00	0,00	0,00	0,00	1.460.212.003,00
	Pengurangan :	0,00	298.764.800,00	275.027.500,00	0,00	0,00	0,00	573.792.300,00
	Saldo Akhir (Audited)	14.252.840.000,00	6.008.373.085,41	12.746.674.602,10	4.149.277.550,00	9.000.000,00	0,00	37.166.165.237,51
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Saldo Awal (Audited)	24.729.801.960,00	54.335.007.899,76	12.386.335.204,00	5.609.018.027,00	8.800.000,00	0,00	97.068.963.090,76
	Penambahan :	0,00	5.205.430.796,00	3.818.718.812,00	63.695.500,00	0,00	0,00	9.087.845.108,00
	Pengurangan :	0,00	4.050.888.401,00	107.791.406,00	0,00	0,00	0,00	4.158.679.807,00
	Saldo Akhir (Audited)	24.729.801.960,00	55.489.550.294,76	16.097.262.610,00	5.672.713.527,00	8.800.000,00	0,00	101.998.128.391,76
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	10.199.559.200,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00	0,00	10.475.905.000,00
	Penambahan :	0,00	75.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.185.000,00
	Pengurangan :	0,00	877.587.850,00	0,00	157.770.000,00	0,00	0,00	1.035.357.850,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	9.397.156.350,00	41.036.000,00	28.865.000,00	48.674.800,00	0,00	9.515.732.150,00
14	DINAS PERHUBUNGAN							
	Saldo Awal (Audited)	8.319.000.000,00	43.175.295.055,00	14.101.060.100,00	80.259.503.899,00	3.765.000,00	0,00	145.858.624.054,00
	Penambahan :	0,00	2.908.153.219,00	0,00	10.108.240.939,00	0,00	0,00	13.016.394.158,00
	Pengurangan :	8.319.000.000,00	1.928.108.876,00	0,00	1.118.166.663,90	0,00	0,00	11.365.275.539,90
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	44.155.339.398,00	14.101.060.100,00	89.249.578.174,10	3.765.000,00	0,00	147.509.742.672,10

**Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	10.920.757.751,00	2.203.635.075,00	220.487.300,00	0,00		13.344.880.126,00
	Penambahan :	0,00	961.443.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.443.599,00
	Pengurangan :	0,00	378.052.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.052.100,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	11.504.149.250,00	2.203.635.075,00	220.487.300,00	0,00	0,00	13.928.271.625,00
16	DINAS ARSIP DAERAH							
	Saldo Awal (Audited)	98.000.000,00	2.543.584.729,00	1.533.652.000,00	0,00	1.793.974.006,00	0,00	5.969.210.735,00
	Penambahan :	1.453.831.050,00	187.757.753,00	0,00	0,00	309.460.300,00	0,00	1.951.049.103,00
	Pengurangan :	0,00	174.665.900,00	1.533.652.000,00	0,00	143.837.100,00	0,00	1.852.155.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	1.551.831.050,00	2.556.676.582,00	0,00	0,00	1.959.597.206,00	0,00	6.068.104.838,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							
	Saldo Awal (Audited)	9.272.750.000,00	15.794.507.714,98	163.129.261.878,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	0,00	190.134.631.142,98
	Penambahan :	0,00	339.693.862,00	4.407.235.106,00	0,00	0,00	17.853.418,00	4.764.782.386,00
	Pengurangan :	0,00	704.759.184,17	17.853.418,00	0,00	0,00	0,00	722.612.602,17
	Saldo Akhir (Audited)	9.272.750.000,00	15.429.442.392,81	167.518.643.566,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	17.853.418,00	194.176.800.926,81
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	36.556.893.665,00	89.548.790.443,05	0,00	4.440.000,00	0,00	126.110.124.108,05
	Penambahan :	0,00	259.950.290,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	292.450.290,00
	Pengurangan :	0,00	254.310.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.310.300,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	36.562.533.655,00	89.581.290.443,05	0,00	4.440.000,00	0,00	126.148.264.098,05
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA							
	Saldo Awal (Audited)	35.223.186.450,00	2.459.942.526,00	22.960.173.744,00	258.803.035,00	245.025.000,00	79.619.856,00	61.226.750.611,00
	Penambahan :	0,00	378.562.000,00	3.686.611.050,00	10.050.000,00	0,00	194.473.625,00	4.269.696.675,00
	Pengurangan :	0,00	427.680.000,00	306.472.575,00	0,00	0,00	79.619.856,00	813.772.431,00
	Saldo Akhir (Audited)	35.223.186.450,00	2.410.824.526,00	26.340.312.219,00	268.853.035,00	245.025.000,00	194.473.625,00	64.682.674.855,00
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	4.357.511.768,59	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	4.367.311.768,59
	Penambahan :	0,00	165.775.935,00	118.127.485,00	0,00	0,00	0,00	283.903.420,00
	Pengurangan :	0,00	250.520.000,00	118.127.485,00	0,00	0,00	0,00	368.647.485,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	4.272.767.703,59	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	4.282.567.703,59
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Saldo Awal (Audited)		10.167.759.004,00	0,00	0,00	226.000.000,00	0,00	10.393.759.004,00
	Penambahan :	20.054.000.000,00	5.798.191.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852.191.072,00
	Pengurangan :	0,00	434.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.565.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	20.054.000.000,00	15.531.385.076,00	0,00	0,00	226.000.000,00	0,00	35.811.385.076,00

**Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	6.897.292.777,66	167.033.430,00	0,00	91.863.000,00	0,00	7.156.189.207,66
	Penambahan :	0,00	871.455.000,00	131.226.507,00	1.107.900.000,00	0,00	0,00	2.110.581.507,00
	Pengurangan :	0,00	389.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.820.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	7.378.927.777,66	298.259.937,00	1.107.900.000,00	91.863.000,00	0,00	8.876.950.714,66
23	BKPSDMD							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	2.282.681.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.681.604,00
	Penambahan :	0,00	119.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.269.200,00
	Pengurangan :	0,00	217.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.480.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	2.184.470.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.470.804,00
24	SEKRETARIAT DAERAH							
	Saldo Awal (Audited)	12.500.415.740,00	29.663.648.041,78	57.518.480.573,22	175.060.800,00	500.749.922,00	0,00	100.358.355.077,00
	Penambahan :	183.819.300.000,00	6.626.067.596,00	773.992.244,00	0,00	0,00	0,00	191.219.359.840,00
	Pengurangan :	0,00	3.361.937.172,00	773.992.244,00	0,00	0,00	0,00	4.135.929.416,00
	Saldo Akhir (Audited)	196.319.715.740,00	32.927.778.465,78	57.518.480.573,22	175.060.800,00	500.749.922,00	0,00	287.441.785.501,00
25	SEKRETARIAT DPRD							
	Saldo Awal (Audited)	2.756.775.000,00	18.229.545.661,00	13.013.110.134,00	0,00	2.261.194.720,00	0,00	36.260.625.515,00
	Penambahan :	0,00	3.741.349.277,00	2.526.523.918,00	0,00	0,00	1.535.661.551,00	7.803.534.746,00
	Pengurangan :	0,00	729.413.000,00	1.535.661.551,00	0,00	0,00	0,00	2.265.074.551,00
	Saldo Akhir (Audited)	2.756.775.000,00	21.241.481.938,00	14.003.972.501,00	0,00	2.261.194.720,00	1.535.661.551,00	41.799.085.710,00
26	INSPEKTORAT KOTA							
	Saldo Awal (Audited)	0,00	2.861.914.190,00	4.602.724.916,00	0,00	0,00	0,00	7.464.639.106,00
	Penambahan :	0,00	314.026.980,00	188.221.258,00	0,00	0,00	0,00	502.248.238,00
	Pengurangan :	0,00	217.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.480.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	2.958.461.170,00	4.790.946.174,00	0,00	0,00	0,00	7.749.407.344,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA							
	Saldo Awal (Audited)	10.479.245.000,00	5.814.299.646,11	6.987.914.196,00	49.558.364,00	7.792.489,00	0,00	23.338.809.695,11
	Penambahan :	0,00	1.989.679.322,00	746.703.656,00	0,00	0,00	0,00	2.736.382.978,00
	Pengurangan :	0,00	688.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.050.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	10.479.245.000,00	7.115.928.968,11	7.734.617.852,00	49.558.364,00	7.792.489,00	0,00	25.387.142.673,11
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH							
	Saldo Awal (Audited)	10.039.095.128,00	9.985.583.929,28	11.216.992.919,00	21.263.637,00	3.896.246,00	0,00	31.266.831.859,28
	Penambahan :	0,00	2.199.553.646,00	738.035.789,00	0,00	0,00	0,00	2.937.589.435,00
	Pengurangan :	0,00	929.791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.791.500,00
	Saldo Akhir (Audited)	10.039.095.128,00	11.255.346.075,28	11.955.028.708,00	21.263.637,00	3.896.246,00	0,00	33.274.629.794,28

**Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN							
	Saldo Awal (Audited)	14.529.905.000,00	8.485.673.458,94	7.324.802.810,00	189.574.684,75	9.812.492,00	0,00	30.539.768.445,69
	Penambahan :	0,00	1.924.716.753,00	1.147.454.413,00	0,00	0,00	0,00	3.072.171.166,00
	Pengurangan :	0,00	821.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.020.800,00
	Saldo Akhir (Audited)	14.529.905.000,00	9.589.369.411,94	8.472.257.223,00	189.574.684,75	9.812.492,00	0,00	32.790.918.811,69
30	KESBANGPOLL							
	Saldo Awal (Audited)	2.075.500.000,00	1.265.825.119,00	0,00	0,00	3.446.000,00	0,00	3.344.771.119,00
	Penambahan :	0,00	49.338.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.338.499,00
	Pengurangan :	2.075.500.000,00	193.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.145.000,00
	Saldo Akhir (Audited)	0,00	1.121.518.618,00	0,00	0,00	3.446.000,00	0,00	1.124.964.618,00
		1.377.879.384.841,60	809.467.223.059,53	1.037.035.877.473,12	992.403.378.356,41	77.686.922.764,32	6.541.455.757,00	4.301.014.242.251,98
	Saldo Awal (Audited)	1.122.587.821.649,60	771.969.017.487,51	972.875.826.375,88	954.743.997.013,49	76.761.220.852,47	5.266.647.658,00	3.904.204.531.036,95
	Penambahan :	265.967.042.163,00	60.135.266.509,00	88.908.454.331,00	39.249.495.606,00	6.545.304.180,00	6.385.644.824,00	467.191.207.613,00
	Pengurangan :	10.675.478.971,00	22.637.060.936,98	24.748.403.233,76	1.590.114.263,08	5.619.602.268,15	5.110.836.725,00	70.381.496.397,97
	Saldo Akhir (Audited)	1.377.879.384.841,60	809.467.223.059,53	1.037.035.877.473,12	992.403.378.356,41	77.686.922.764,32	6.541.455.757,00	4.301.014.242.251,98

Rekapitulasi Laporan Aset Tetap BOS Tahun 2025

No. Urut	Nama Sekolah	ASET TETAP			
		Peralatan & Mesin	Aset Tetap lainnya	Gedung dan Bangunan	Jumlah
1	SD NEGERI CIBEBER 1	24.588.000	20.295.000		44.883.000
2	SD NEGERI CIBEBER 2	11.790.000	18.904.600		30.694.600
3	SD NEGERI CIBEBER 3	9.530.000	19.364.400		28.894.400
4	SD NEGERI CIBEBER 4	21.389.200	21.486.300		42.875.500
5	SD NEGERI CIBEBER MANDIRI 1	43.150.000	50.032.700		93.182.700
6	SD NEGERI CIBEBER MANDIRI 2	55.699.000	52.097.000		107.796.000
7	SD NEGERI CIBEUREUM 5	12.930.000	40.496.700		53.426.700
8	SD NEGERI CIBEUREUM 7	-	33.968.800		33.968.800
9	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 1	33.657.000	68.626.500		102.283.500
10	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 2	25.100.000	97.599.700		122.699.700
11	SD NEGERI CIBODAS 1	22.230.000	21.838.000		44.068.000
12	SD NEGERI CIBODAS 2	8.240.000	24.997.000		33.237.000
13	SD NEGERI CIBODAS 3	16.582.200	24.903.300		41.485.500
14	SD NEGERI CIREUNDEU	-	17.321.100		17.321.100
15	SD NEGERI KIHAPIT	46.650.000	32.864.200		79.514.200
16	SD NEGERI LEUWIGAJAH 2	75.034.000	41.287.500		116.321.500
17	SD NEGERI LEUWIGAJAH 3	56.133.000,00	36.524.200		92.657.200
18	SD NEGERI LEUWIGAJAH 5	67.000.000	32.160.300		99.160.300
19	SD NEGERI LEUWIGAJAH 6	45.572.000	45.320.400		90.892.400
20	SD NEGERI LEUWIGAJAH MANDIRI 1	24.390.000	65.172.000		89.562.000
21	SD NEGERI LINGGABUDI	33.894.950	38.411.700		72.306.650
22	SD NEGERI MELONG ASIH 4	19.060.000	20.875.900		39.935.900
23	SD NEGERI MELONG ASIH 5	10.981.700	20.174.800		31.156.500
24	SD NEGERI MELONG ASIH 7	18.400.000	23.364.000		41.764.000
25	SD NEGERI MELONG ASIH 8	25.130.000	24.484.100		49.614.100
26	SD NEGERI MELONG MANDIRI 1	58.370.100	74.071.800		132.441.900
27	SD NEGERI MELONG MANDIRI 2	77.280.000	93.734.600		171.014.600
28	SD NEGERI MELONG MANDIRI 3	26.698.480	35.172.400		61.870.880
29	SD NEGERI MELONG MANDIRI 4	2.635.000	67.742.000		70.377.000
30	SD NEGERI MELONG MANDIRI 5	28.300.000	44.088.400		72.388.400
31	SD NEGERI MELONG MANDIRI 6	41.318.000	55.160.000,00		96.478.000
32	SD NEGERI MELONG MANDIRI 7	27.150.000	37.941.900		65.091.900
33	SD NEGERI RANCABENTANG 3	118.140.000	55.539.000		173.679.000
34	SD NEGERI TUNAS HARAPAN	23.243.000	19.305.000,00		42.548.000
35	SD NEGERI TUNAS MEKAR	9.700.000	20.802.400		30.502.400
36	SD NEGERI UTAMA 3	5.000.000	11.387.000		16.387.000
37	SD NEGERI UTAMA 6	41.681.670	38.610.000		80.291.670
38	SD NEGERI UTAMA 7	3.000.000	13.782.000		16.782.000
39	SD NEGERI UTAMA MANDIRI 1	76.813.000	66.738.300		143.551.300
40	SD NEGERI BAROS MANDIRI 1	18.250.000	50.954.500		69.204.500
41	SD NEGERI BAROS MANDIRI 2	27.724.000	33.679.000		61.403.000
42	SD NEGERI BAROS MANDIRI 3	24.228.350	33.482.200		57.710.550
43	SD NEGERI BAROS MANDIRI 4	10.600.000	52.866.000		63.466.000
44	SD NEGERI BAROS MANDIRI 5	21.510.000	43.396.000		64.906.000
45	SD NEGERI BAROS MANDIRI 6	25.900.000	39.940.300		65.840.300
46	SD NEGERI BAROS MANDIRI 7	14.500.000	28.306.900		42.806.900
47	SD NEGERI BINA HARAPAN	3.700.000	16.242.900		19.942.900
48	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH	28.810.000	32.245.400		61.055.400
49	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 1	48.240.000	73.605.800		121.845.800
50	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 2	36.990.000	61.821.300		98.811.300
51	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 1	34.020.000	95.508.600		129.528.600
52	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 2	73.310.000	77.680.500		150.990.500
53	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 3	45.850.000	32.345.600		78.195.600
54	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 4	22.770.000	32.526.500		55.296.500
55	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 5	37.028.000	64.770.700		101.798.700
56	SD NEGERI CIMINDI 2	4.850.000	14.601.900		19.451.900
57	SD NEGERI CIMINDI 4	15.250.000	15.012.880		30.262.880

No. Urut	Nama Sekolah	ASET TETAP			
		Peralatan & Mesin	Aset Tetap lainnya	Gedung dan Bangunan	Jumlah
58	SD NEGERI CIMINDI 5	10.900.000	13.540.000		24.440.000
59	SD NEGERI HARAPAN 1	3.400.000	19.538.800		22.938.800
60	SD NEGERI HARAPAN 2	-	18.099.800		18.099.800
61	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 1	79.990.000	72.369.000		152.359.000
62	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 2	27.260.000	32.583.300		59.843.300
63	SD NEGERI KARYA BAKTI	9.530.000	17.168.500		26.698.500
64	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 1	51.630.000	46.580.900		98.210.900
65	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 2	42.400.000	45.582.700		87.982.700
66	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 3	59.420.000	50.584.900		110.004.900
67	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 4	16.460.000	52.831.500		69.291.500
68	SD NEGERI SETIAMANAH MANDIRI 1	21.150.000	63.171.300		84.321.300
69	SD NEGERI SINDANGSARI	38.200.000	38.826.200		77.026.200
70	SD NEGERI SUKAMAJU 1	31.650.000	20.728.400		52.378.400
71	SD NEGERI SUKAMAJU 2	10.000.000	19.701.900		29.701.900
72	SD NEGERI SUKANAMPA	42.034.000	47.637.200		89.671.200
73	SD NEGERI CIBABAT 2	14.620.000	20.692.000		35.312.000
74	SD NEGERI CIBABAT 4	28.600.000	21.511.200		50.111.200
75	SD NEGERI CIBABAT 5	46.690.000	34.462.700		81.152.700
76	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 1	105.348.000	68.460.300		173.808.300
77	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 2	24.000.000	54.954.000		78.954.000
78	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 3	24.500.000	74.991.700		99.491.700
79	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 4	6.300.000	42.473.000		48.773.000
80	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 5	46.480.000	84.608.400		131.088.400
81	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 1	119.060.000	161.342.500		280.402.500
82	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 2	41.500.000	73.774.000		115.274.000
83	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 3	43.956.000	43.536.000		87.492.000
84	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 4	21.800.000	28.425.500		50.225.500
85	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 1	136.692.000	79.358.100		216.050.100
86	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 2	79.640.400	61.050.000		140.690.400
87	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 3	58.022.000	67.746.200		125.768.200
88	SD NEGERI PAMBUDI DHARMA	25.691.000	18.946.300		44.637.300
89	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 1	34.530.000	44.780.500		79.310.500
90	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 2	26.600.000	76.780.900		103.380.900
91	SD NEGERI SETIAWARGA	8.880.000	45.589.600		54.469.600
	JUMLAH SD	3.076.924.050	3.988.059.280	-	7.064.983.330
1	SMP NEGERI 1 CIMAHI	69.459.500	185.470.300	-	254.929.800
2	SMP NEGERI 2 CIMAHI	21.320.000	234.900.000	-	256.220.000
3	SMP NEGERI 3 CIMAHI	68.585.000	171.353.500		239.938.500
4	SMP NEGERI 4 CIMAHI	54.453.000	191.116.000		245.569.000
5	SMP NEGERI 5 CIMAHI	50.150.000	200.754.000		250.904.000
6	SMP NEGERI 6 CIMAHI	55.063.000	155.424.000		210.487.000
7	SMP NEGERI 7 CIMAHI	68.100.000	139.789.000		207.889.000
8	SMP NEGERI 8 CIMAHI	33.043.000	171.469.700		204.512.700
9	SMP NEGERI 9 CIMAHI	29.444.000	175.281.400		204.725.400
10	SMP NEGERI 10 CIMAHI	53.650.000	137.220.000		190.870.000
11	SMP NEGERI 11 CIMAHI	43.200.000	60.008.700		103.208.700
12	SMP NEGERI 12 CIMAHI	38.600.000	89.265.500		127.865.500
13	SMP NEGERI 13 CIMAHI	25.800.000	72.089.900		97.889.900
14	SMP NEGERI 14 CIMAHI	13.800.000	63.025.000		76.825.000
15	SMP NEGERI 15 CIMAHI	27.550.000	65.779.000		93.329.000
16	SMP NEGERI 16 CIMAHI	12.408.700	66.851.700		79.260.400
	Jumlah SMP	664.626.200	2.179.797.700	-	2.844.423.900
	Total Jumlah	3.741.550.250	6.167.856.980	-	9.909.407.230

PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2025

NO	SKPD	31 Desember 2024	Beban Penyusutan Tahun 2025	Ekuitas 2025	31 Desember 2025
1	DINAS PENDIDIKAN	137.047.235.533,06	10.335.967.611,36	- 1.242.094.168,97	146.141.108.975,45
2	DINAS KESEHATAN	60.136.518.785,29	4.393.913.773,30	315.441.024,39	64.845.873.582,98
3	RSU DAERAH CIBABAT	300.556.727.195,58	11.948.972.851,18	- 162.328.271,78	312.343.371.774,98
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	526.731.399.353,66	23.397.010.096,40	- 1.329.466.408,20	548.798.943.041,86
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	67.739.708.933,65	9.332.905.549,36	- 182.453.014,27	76.890.161.468,74
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	16.762.343.986,84	1.340.822.394,00	- 209.430.999,99	17.893.735.380,85
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.301.270.876,42	666.383.229,93	- 0,00	2.967.654.106,35
8	DINAS SOSIAL	1.746.465.678,74	429.750.772,30	- 46.723.250,00	2.129.493.201,04
9	DINAS TENAGA KERJA	1.795.687.100,00	63.412.049,60	- 217.480.000,00	1.641.619.149,60
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.291.742.898,32	167.618.199,92	- 218.467.273,76	4.240.893.824,48
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10.300.846.898,72	684.493.005,02	- 296.988.800,01	10.688.351.103,73
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42.751.440.184,98	5.429.458.194,88	- 3.852.293.267,80	44.328.605.112,06
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.985.218.235,00	566.373.575,00	- 964.361.350,00	8.587.230.460,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	83.989.904.306,11	9.267.732.210,97	- 1.126.612.496,64	92.131.024.020,45
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.321.000.503,54	1.030.896.709,95	- 214.059.600,00	11.137.837.613,49
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21.734.843.952,65	8.059.337.540,28	- 251.100.000,01	29.543.081.492,92
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.163.540.727,00	949.181.230,46	- 239.980.000,00	4.872.741.957,46
18	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	2.539.948.845,67	201.757.663,98	- 561.672.480,00	2.180.034.029,65
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	47.893.601.174,24	3.692.899.683,07	- 652.801.865,31	50.933.698.992,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	49.032.794.988,08	2.821.675.829,80	- 1.051.262.286,00	50.803.208.531,88
21	SEKRETARIAT DPRD	21.708.525.965,21	1.501.441.405,93	- 729.413.000,00	22.480.554.371,14
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	3.684.202.902,68	283.732.612,52	- 229.280.000,00	3.738.655.515,20
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	5.580.921.546,32	510.748.500,26	47.189.499,99	6.138.859.546,57
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.621.947.207,54	310.904.103,09	4.714.991.622,00	14.647.842.932,63
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.193.521.954,00	76.083.190,00	- 217.480.000,00	2.052.125.144,00
26	INSPEKTORAT KOTA	2.994.480.496,77	340.901.259,34	- 217.480.000,01	3.117.901.756,10
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	8.008.419.732,35	406.669.487,34	632.073.333,00	9.047.162.552,69
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	12.612.041.393,54	724.583.551,20	733.449.333,01	14.070.074.277,75
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	10.235.647.073,07	516.745.762,55	640.857.534,01	11.393.250.369,63
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	1.082.004.530,10	91.871.714,45	- 193.645.000,00	980.231.244,55
JUMLAH		1.478.543.952.959,13	99.544.243.757,44	- 7.322.871.186,34	1.570.765.325.530,23

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
1	Dinas Pendidikan			668.380.800,00	40.297.950,00	71.715.337,50	81.716.328,13	- 29.168.490,63	52.547.837,50	52.547.837,50	668.380.800,00	52.547.837,50
	Aplikasi Siadik	2022	2029	82.800.000,00		20.700.000,00	20.700.000,00	-	20.700.000,00	20.700.000,00	82.800.000,00	20.700.000,00
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2021	2028	148.521.800,00	21.130.450,00	31.847.837,50	61.016.328,13	(29.168.490,63)	31.847.837,50	31.847.837,50	148.521.800,00	31.847.837,50
	<i>Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>2021</i>		<i>84.521.800,00</i>							-	-
	<i>Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (pengembangan)</i>	<i>2022</i>		<i>64.000.000,00</i>							-	-
	Sistem Penilaian Kinerja Guru	2019	2026	76.670.000,00	19.167.500,00	19.167.500,00	-	-	-	-	76.670.000,00	-
	Aplikasi SIM Pendataan Pendidikan	2016	2023	46.774.000,00		-	-	-	-	-	46.774.000,00	-
	Software Dinas Pendidikan	2015	2022	99.535.000,00		-	-	-	-	-	99.535.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Pembangunan Aplikasi Web Dinas Pendidikan	2017	2024	39.160.000,00		-	-	-	-	-	39.160.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi SIM Absensi Terintegrasi Bagi Guru	2017	2024	49.500.000,00		-	-	-	-	-	49.500.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi BOS	2017	2024	49.820.000,00		-	-	-	-	-	49.820.000,00	-
	Software Cont Off-line Computer (temuan BPK 2017) disdik dan sekolah	2016	2023	75.600.000,00		-	-	-	-	-	75.600.000,00	-
2	Dinas Kesehatan			172.730.000,00	9.492.500,00	9.492.500,00	3.250.000,00	-	-	-	172.730.000,00	-
	SPTJB JAMPRO	2016	2023	20.000.000,00		-		-	-	-	20.000.000,00	-
	Sistem Pelayanan Terintegrasi (SIMPATI)	2017	2024	79.860.000,00		-		-	-	-	79.860.000,00	-
	Software WEB Service Terintegrasi Sijariemas Cimahi	2017	2024	18.700.000,00		-		-	-	-	18.700.000,00	-
	Pengadaan windows original (temuan BPK 2017)	2013	2020	16.200.000,00		-		-	-	-	16.200.000,00	-
	Sistem Informasi SPM	2019	2026	24.970.000,00	6.242.500,00	6.242.500,00		-	-	-	24.970.000,00	-
	Aplikasi Survei Kepuasan masyarakat	2020	2027	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00	-
	Sistem Antrian paket	2020	2027	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-
3	RSUD			392.194.000,00	33.061.000,00	33.061.000,00	-	-	-	-	392.194.000,00	-
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2006	2013	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	-
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2011	2018	8.250.000,00			-	-	-	-	8.250.000,00	-
	Software - BPJS C1 (temuan BPK 2017)	2016	2023	37.950.000,00			-	-	-	-	37.950.000,00	-
	SIMRS (temuan BPK 2017)	2017	2024	13.750.000,00			-	-	-	-	13.750.000,00	-
	License Software Billing	2019	2026	6.294.000,00	1.573.500,00	1.573.500,00		-	-	-	6.294.000,00	-
	Aplikasi SKP	2019	2026	57.200.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00		-	-	-	57.200.000,00	-
	Acronics Server dan Cloud ST	2019	2026	44.825.000,00	11.206.250,00	11.206.250,00		-	-	-	44.825.000,00	-
	Multimedia Informasi	2019	2026	23.925.000,00	5.981.250,00	5.981.250,00		-	-	-	23.925.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			2.215.606.410,00	246.337.775,00	148.175.471,25	182.512.486,88	-	168.787.148,59	267.112.319,88	1.674.660.451,60	267.112.319,88
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2018	2025	711.675.910,00	128.892.775,00	84.810.783,75	84.810.783,75	-	84.810.783,75	84.810.783,75	711.675.910,00	84.810.783,75

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	Induk Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2018		188.100.000,00								
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang	2019		180.070.000,00								
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2020		49.720.000,00								
	Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	2021		97.681.100,00								
	Aset Tidak Berwujud- Pemeliharaan Sistem Informasi penataan Ruang	2022		97.816.530,00								
	Aset Tidak Berwujud- Pengembangan Substansi dalam Sistem Informasi Penataan Ruang	2022		98.288.280,00								
	Aset Tidak Berwujud-Pengembangan Sistem Informasi jalan dan Jembatan (SILAJA)	2022		99.743.000,00		24.935.750,00	24.935.750,00	-	24.935.750,00	24.935.750,00	99.743.000,00	24.935.750,00
	Sistem informasi Monev Bangunan Gedung	2021	2028	334.519.000,00	22.061.250,00	38.428.937,50	72.765.953,13	-	35.502.114,84	41.440.186,13	210.198.441,60	41.440.186,13
	Induk Sistem informasi Monev Bangunan Gedung	2021		88.245.000,00								
	Updating Sistem Informasi Movev Bangunan Gedung	2022		87.532.000,00								
	Updating Sistem Informasi Movev Bangunan Gedung	2024		99.487.600,00								
	Updating Sistem Informasi Movev Bangunan Gedung	2025		59.254.400,00								
	Penyusunan Database Jaringan Jalan Kota Cimahi Berbasis GIS	2018	2025	381.535.000,00	95.383.750,00	-	-	-	-		381.535.000,00	-
	Software Keuangan & Kepegawaian (temuan BPK 2017)	2007	2014	49.940.000,00				-			49.940.000,00	-
	Software LAN (temuan BPK 2017)	2007	2014	82.104.000,00				-			82.104.000,00	-
	SIJAKON (Sistem Informasi Jasa Konstruksi)	2024		94.154.000,00	-	-	-	-	23.538.500,00	23.538.500,00	47.077.000,00	23.538.500,00
	Kajian (Masterplan Kawasan Perkantoran Pemkot Cimahi)	2025		461.935.500,00						92.387.100,00	92.387.100,00	92.387.100,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			577.152.788,00	43.874.875,00	44.001.410,00	87.672.397,00	-	70.329.822,00	70.329.822,00	493.448.576,00	70.329.822,00
	Aplikasi Sistem Informasi Rusunawa	2022	2029	49.588.140,00		12.397.035,00	12.397.035,00		12.397.035,00	12.397.035,00	49.588.140,00	12.397.035,00
	Belanja Peningkatan Aplikasi Billing.	2020	2027	89.650.000,00	22.412.500,00	22.412.500,00	22.412.500,00		-	-	89.650.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Revitalisasi SIM UPT PALD	2019	2026	36.767.500,00	9.191.875,00	9.191.875,00			-	-	36.767.500,00	-
	Sistem Pencatatan Meter Air dan Online Billing	2018	2025	49.082.000,00	12.270.500,00	-			-	-	49.082.000,00	-

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	Sistem Operasi Windows Komputer Rusunawa (temuan BPK 2017)	2017	2024	6.875.000,00					-	-	6.875.000,00	-
	SIM UPT Air Minum	2016	2023	44.027.500,00					-	-	44.027.500,00	-
	SIM Pelanggan Penyedotan Lumpur Tinja	2016	2023	48.730.000,00					-	-	48.730.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Terpadu (SIRUKIMDU)	2023		123.787.200,00			20.701.500,00		25.771.425,00	25.771.425,00	72.244.350,00	25.771.425,00
	Aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Terpadu (SIRUKIMDU)	2023	2030	82.806.000,00								
	Pengembangan Sistem Informasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Kota Cimahi (SIRUKIMDU)	2024	2031	40.981.200,00								
	Jasa Pembuatan Aplikasi SABAKAMALIR	2023	2030	56.401.098,00			14.100.274,50	-	14.100.274,50	14.100.274,50	42.300.823,50	14.100.274,50
	Belanja Sistem Informasi Pemahaman	2023	2030	47.102.850,00			11.775.712,50	-	11.775.712,50	11.775.712,50	35.327.137,50	11.775.712,50
	Aplikasi Mobile Meter Reading	2023	2030	25.141.500,00			6.285.375,00	-	6.285.375,00	6.285.375,00	18.856.125,00	6.285.375,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran			65.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	65.000.000,00	-
	Website www.satpolppdamkar.cimahikota.go.id	2017	2024	45.000.000,00				-	-		45.000.000,00	-
	Upgrade Aplikasi Sistem Papan Informasi	2020	2027	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-		20.000.000,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			62.780.000,00	-	-	15.695.000,00	-	15.695.000,00	15.695.000,00	47.085.000,00	15.695.000,00
	Sistem Informasi Bencana Daerah (SIBEDA)	2023	2031	62.780.000,00			15.695.000,00	-	15.695.000,00	15.695.000,00	47.085.000,00	15.695.000,00
8	Dinas Sosial			198.000.000,00	-	-	25.200.000,00	-	32.775.000,00	39.656.250,00	97.631.250,00	39.656.250,00
	Pengembangan Website SIKS PMKS	2023	2031	25.200.000,00			6.300.000,00		6.300.000,00	6.300.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00
	Website DILAN PPKS	2023		148.800.000,00			18.900.000,00	-	20.475.000,00	27.356.250,00	66.731.250,00	27.356.250,00
	Website DILAN PPKS (induk)	2023	2031	75.600.000,00								
	Pengembangan Aplikasi DILAN PPKS	2024		25.200.000,00								
	Pengembangan Aplikasi DILAN PPKS	2025		48.000.000,00								
	Aplikasi Sistem Pelayanan Dinas Sosial	2024		24.000.000,00				-	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja			539.897.120,00	80.346.750,00	62.120.137,50	60.858.103,13	-	88.217.172,19	88.217.172,19	499.084.085,00	88.217.172,19
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2020	2027	264.031.050,00	43.525.000,00	49.842.137,50	37.381.603,13	-	56.072.404,69	56.072.404,69	264.031.050,00	56.072.404,69

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	<i>Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan</i>	2020		84.550.000,00								-
	<i>Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan</i>	2021		89.550.000,00								-
	<i>Sistem Informasi Ketenagakerjaan</i>	2022		89.931.050,00								-
	Database Ketenagakerjaan Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	2018	2025	98.175.000,00	24.543.750,00			-			98.175.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	2019	2026	49.112.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00		-			49.112.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2023	2030	93.906.000,00			23.476.500,00	-	23.476.500,00	23.476.500,00	70.429.500,00	23.476.500,00
	Aplikasi Pengesahan Pengesahaan Peraturan Perusahaan	2024	2031	34.673.070,00			-	-	8.668.267,50	8.668.267,50	17.336.535,00	8.668.267,50
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			205.146.210,00	-	-	22.008.525,00	-	34.403.340,00	36.423.984,00	125.475.849,00	36.423.984,00
	SIM Database Terpilah Anak	2017	2024	30.000.000,00				-	-		30.000.000,00	-
	software Windows 7 (temuan BPK 2017)	2011	2018	2.640.000,00				-	-		2.640.000,00	-
	Aplikasi SAPEUTING EMAS	2023	2031	88.034.100,00			22.008.525,00	-	22.008.525,00	22.008.525,00	66.025.575,00	22.008.525,00
	Aplikasi Clambi Catin		2029	84.472.110,00	-	-	-	-	12.394.815,00	14.415.459,00	26.810.274,00	14.415.459,00
	<i>Aplikasi Clambi Catin</i>	2024		<i>49.579.260,00</i>			<i>-</i>		<i>12.394.815,00</i>			
	<i>Pengembangan Aplikasi Clambi Catin</i>	2025		<i>34.892.850,00</i>								
11	Dinas Pangan dan Pertanian			71.975.455,00	2.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	66.975.455,00	5.000.000,00
	Aplikasi Pemutakhiran Data Pertanian dan Kehatanan Pangan (Diskopindagtan - 2016)	2016	2023	33.300.455,00					-		33.300.455,00	-
	Aplikasi SIM Puskaswan	2017	2024	10.675.000,00					-		10.675.000,00	-
	Aplikasi SIM Puskaswan	2018	2025	8.000.000,00	2.000.000,00				-		8.000.000,00	-
	Website Dispangtan	2023	2030	20.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)			349.472.000,00	21.670.000,00	65.698.000,00	65.698.000,00	-	65.698.000,00	65.698.000,00	349.472.000,00	65.698.000,00
	SIM Laboratorium	2018	2025	38.830.000,00	9.707.500,00				-	-	38.830.000,00	-
	SIM Dokumen Lingkungan Online	2018	2025	47.850.000,00	11.962.500,00				-	-	47.850.000,00	-
	Aplikasi Retribusi Pelayanan Persampahan	2022	2029	96.570.000,00		24.142.500,00	24.142.500,00	-	24.142.500,00	24.142.500,00	96.570.000,00	24.142.500,00
	Database dan Aplikasi Website RTH Kehati	2022	2029	69.042.000,00		17.260.500,00	17.260.500,00	-	17.260.500,00	17.260.500,00	69.042.000,00	17.260.500,00

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	Pengembangan Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup (Sitangkal)	2022	2029	97.180.000,00		24.295.000,00	24.295.000,00	-	24.295.000,00	24.295.000,00	97.180.000,00	24.295.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			384.974.250,00	54.166.987,50	61.829.487,50	45.663.750,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00	384.974.250,00	30.250.000,00
	Belanja Jasa Aplikasi Website	2020	2027	34.705.000,00	8.676.250,00	8.676.250,00	8.676.250,00	-	-	-	34.705.000,00	-
	Belanja Jasa License Zoom	2020	2027	26.950.000,00	6.737.500,00	6.737.500,00	6.737.500,00	-	-	-	26.950.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi Silima	2019	2026	35.250.000,00	8.812.500,00	8.812.500,00		-	-	-	35.250.000,00	-
	Software	2019	2026	29.412.950,00	7.353.237,50	7.353.237,50		-	-	-	29.412.950,00	-
	Sistem Koneksi (Intervase tahap awal) NIK Pembuatan Digital Arsip	2018	2025	38.600.000,00	9.650.000,00			-	-	-	38.600.000,00	-
	Informasi yang dapat diakses masyarakat melalui web Dinas Kependudukan	2018	2025	26.750.000,00	6.687.500,00			-	-	-	26.750.000,00	-
	Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Intervase Tahap Awal) NIK	2018	2025	25.000.000,00	6.250.000,00			-	-	-	25.000.000,00	-
	Aplikasi Monev Pelayanan Dokumen Kependudukan	2016	2023	22.330.000,00				-	-	-	22.330.000,00	-
	Aplikasi CD Interaktif Profil Disdukcapil	2017	2024	16.750.000,00				-	-	-	16.750.000,00	-
	ESET NOD32 (temuan BPK 2017)	2015	2022	5.000.000,00				-	-	-	5.000.000,00	-
	Kaspersky (temuan BPK 2017)	2009	2016	3.226.300,00				-	-	-	3.226.300,00	-
	Belanja Jasa tenaga Informasi DILANDACITA	2022	2029	121.000.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00	121.000.000,00	30.250.000,00
14	Dinas Perhubungan			404.761.895,00	-	5.186.336,25	5.186.336,25	-	5.186.336,25	13.714.709,06	363.617.767,81	13.714.709,06
	Upgrade Aplikasi BLUE RFID Kemenhub	2022	2029	70.417.845,00		5.186.336,25	5.186.336,25		5.186.336,25	13.714.709,06	29.273.717,81	13.714.709,06
	<i>Upgrade Aplikasi BLUE RFID Kemenhub</i>	2022	2029	20.745.345,00							-	
	<i>Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi</i>	2025	2032	49.672.500,00								
	Aplikasi Untuk Penyempurnaan Software Website Dinas Perhubungan Tahun 2016	2016	2023	19.493.750,00					-	-	19.493.750,00	
	OS Windows	2014	2021	2.700.000,00					-	-	2.700.000,00	
	Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum	2017	2024	49.396.800,00					-	-	49.396.800,00	
	SOFTWARE APLIKASI SISTEM INFORMASI (temuan BPK 2017)	2006	2013	22.000.000,00					-	-	22.000.000,00	
	WINDOWS XP SOFTWARE (temuan BPK 2017)	2006	2013	1.881.000,00					-	-	1.881.000,00	
	sim database angkutan umum (temuan BPK 2017)	2015	2022	41.345.000,00					-	-	41.345.000,00	
	software website dishub (temuan BPK 2017)	2015	2022	100.425.000,00					-	-	100.425.000,00	
	Sistem Informasi PJU (temuan BPK 2017)	2015	2022	48.702.500,00					-	-	48.702.500,00	
	Sistem Reklame (temuan BPK 2017)	2015	2022	48.400.000,00					-	-	48.400.000,00	
15	Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan			1.067.731.233,00	46.622.420,75	9.912.375,00	9.186.637,50	-	15.200.387,50	15.200.387,50	1.046.517.095,50	15.200.387,50

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	Sistem Pengelolaan Administrasi Pelayanan Informasi Publik	2017	2024	38.940.000,00				-	-		38.940.000,00	-
	Aplikasi Cimahi Smart City	2017	2024	586.767.000,00				-	-		586.767.000,00	-
	Revitalisasi Aplikasi Pengaduan Terintegrasi (KAPPDE-2016)	2016	2023	45.795.000,00				-	-		45.795.000,00	-
	Aplikasi Pengaduan Berbasis Android (KAPPDE-2016)	2016	2023	52.886.000,00				-	-		52.886.000,00	-
	Revitalisasi Aplikasi Intervensi Kemiskinan (KAPPDE-2016)	2016	2023	31.240.000,00				-	-		31.240.000,00	-
	Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2019	2026	39.649.500,00	9.912.375,00	9.912.375,00		-	-		39.649.500,00	-
	Piranti Lunak Pengamanan Jaringan Komputer	2018	2025	55.000.000,00	13.750.000,00			-	-		55.000.000,00	-
	Computer mainframe	2018	2025	91.840.183,00	22.960.045,75			-	-		91.840.183,00	-
	Software Operating System Server - (temuan BPK 2017)	2013	2020	9.900.000,00				-	-		9.900.000,00	-
	Software Database Management System - (temuan BPK 2017)	2013	2020	19.250.000,00				-	-		19.250.000,00	-
	Software Development tools - (temuan BPK 2017)	2013	2020	4.950.000,00				-	-		4.950.000,00	-
	perangkat lunak windows Pro SP2 OEM /MS Office 2007 Pro FPP(temuan BPK 2017)	2008	2015	30.712.000,00				-	-		30.712.000,00	-
	Analisis Design Pengembangan Aplikasi	2023	2030	36.746.550,00			9.186.637,50	-	9.186.637,50	9.186.637,50	27.559.912,50	9.186.637,50
	Software Office Suite Online	2024	2031	24.055.000,00				-	6.013.750,00	6.013.750,00	12.027.500,00	6.013.750,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			819.692.900,00	187.163.225,00	162.438.225,00	133.945.475,00	-	121.617.225,00	8.125.000,00	819.692.900,00	8.125.000,00
	Sistem Operasi untuk Server dan Software Monitoring	2022	2029	32.500.000,00		8.125.000,00	8.125.000,00	-	8.125.000,00	8.125.000,00	32.500.000,00	8.125.000,00
	Aplikasi Pendukung MPP	2021	2028	453.968.900,00	113.492.225,00	113.492.225,00	113.492.225,00	-	113.492.225,00		453.968.900,00	-
	Konsultasi Pengembangan Sipinter DPMPTSP	2020	2027	49.313.000,00	12.328.250,00	12.328.250,00	12.328.250,00	-	-		49.313.000,00	-
	Konsultasi Pengembangan Sipinter DPMPTSP	2019	2026	48.224.000,00	12.056.000,00	12.056.000,00		-	-		48.224.000,00	-
	Konsultasi pengembangan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke Sipinter DPMPTSP	2019	2026	34.177.000,00	8.544.250,00	8.544.250,00		-	-		34.177.000,00	-
	Aplikasi Migrasi Data	2019	2026	31.570.000,00	7.892.500,00	7.892.500,00		-	-		31.570.000,00	-
	Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu	2018	2025	47.500.000,00	11.875.000,00			-	-		47.500.000,00	-
	pembuatan konten dashboard pada aplikasi multimedia 2018	2018	2025	39.900.000,00	9.975.000,00			-	-		39.900.000,00	-
	Penyedia jasa penyusunan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke system pelayanan terpadu tahun 2018	2018	2025	44.000.000,00	11.000.000,00			-	-		44.000.000,00	-
	Software Aplikasi Sistem Informasi Arsip - Temuan BPK	2010	2017	14.850.000,00				-	-		14.850.000,00	-
	Mainframe (Temuan BPK 2017)	2011	2018	6.190.000,00				-	-		6.190.000,00	-
	Software DAAS MOD (Temuan BPK 2017)	2012	2019	17.500.000,00				-	-		17.500.000,00	-

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
17	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga			137.150.000,00	8.662.500,00	20.625.000,00	25.625.000,00	-	25.625.000,00	25.625.000,00	132.150.000,00	25.625.000,00
	Aplikasi Pembuatan Web Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi	2018	2025	34.650.000,00	8.662.500,00			-	-	-	34.650.000,00	-
	Sistem Aplikasi Data Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU)	2022	2029	82.500.000,00		20.625.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	20.625.000,00	82.500.000,00	20.625.000,00
	Website Disbudpar	2023	2030	20.000.000,00			5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah			143.837.100,00	-	-	-	-	-	35.959.275,00	35.959.275,00	35.959.275,00
	Software Cimalib	2025	2032	143.837.100,00						35.959.275,00	35.959.275,00	35.959.275,00
19	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			731.428.820,00	118.669.125,00	141.735.975,00	128.561.080,00	-	94.290.580,00	58.250.580,00	707.807.465,00	58.250.580,00
	Aplikasi Sistem Collect-CE	2022	2029	49.633.650,00		12.408.412,50	12.408.412,50	-	12.408.412,50	12.408.412,50	49.633.650,00	12.408.412,50
	Website Pelayanan Kementrologian	2022	2029	88.883.250,00		22.220.812,50	22.220.812,50	-	22.220.812,50	22.220.812,50	88.883.250,00	22.220.812,50
	SIMECI (Aplikasi Metrologi Cimahi)	2021	2028	46.500.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-	11.625.000,00	-	46.500.000,00	-
	Jasa Pembuatan Website Integritas Layanan Teknis (Cerah)	2021	2028	47.850.000,00	11.962.500,00	11.962.500,00	11.962.500,00	-	11.962.500,00	-	47.850.000,00	-
	Aplikasi Pameran Virtual Expo	2021	2028	49.810.000,00	12.452.500,00	12.452.500,00	12.452.500,00	-	12.452.500,00	-	49.810.000,00	-
	Aplikasi Virtual EXPO	2020	2027	60.632.000,00	15.158.000,00	15.158.000,00	15.158.000,00		-	-	60.632.000,00	-
	Aplikasi Pelayanan Metrologi	2020	2027	26.850.000,00	6.712.500,00	6.712.500,00	6.712.500,00		-	-	26.850.000,00	-
	Aplikasi Lapaku	2020	2027	49.600.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00		-	-	49.600.000,00	-
	Aplikasi Kegiatan Pemetaan dan Pendataan UKM (LAPAKU)	2019	2026	49.200.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00			-	-	49.200.000,00	-
	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	2019	2026	48.900.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00			-	-	48.900.000,00	-
	Aplikasi Meteorologi	2019	2026	49.085.000,00	12.271.250,00	12.271.250,00			-	-	49.085.000,00	-
	Aplikasi Meteorologi	2018	2025	46.249.500,00	11.562.375,00				-	-	46.249.500,00	-
	Aplikasi SIM Laporan Kinerja	2017	2024	23.750.000,00					-	-	23.750.000,00	-
	Sistem informasi Metrologi	2023	2030	44.906.160,00			11.226.540,00		11.226.540,00	11.226.540,00	33.679.620,00	11.226.540,00
	Sistem Informasi Pemasaraan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2023	2030	49.579.260,00			12.394.815,00		12.394.815,00	12.394.815,00	37.184.445,00	12.394.815,00
20	Sekretariat Daerah			265.576.000,00	4.496.250,00	-	24.655.875,00	-	24.655.875,00	24.655.875,00	240.920.125,00	24.655.875,00
	Aplikasi SIM Kelurahan	2017	2024	49.060.000,00				-			49.060.000,00	-
	Sistem Informasi Kinerja Instansi Pemerintah (SIKIP)	2017	2024	48.895.000,00				-			48.895.000,00	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi	2016	2023	38.087.500,00				-			38.087.500,00	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi (pengembangan)	2018	2025	17.985.000,00	4.496.250,00			-			17.985.000,00	-
	software Windows (temuan BPK 2017)	2008	2015	12.925.000,00				-			12.925.000,00	-
	Aplikasi Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja	2023	2031	98.623.500,00			24.655.875,00	-	24.655.875,00	24.655.875,00	73.967.625,00	24.655.875,00
21	Sekretariat DPRD			833.311.000,00	36.708.250,00	81.708.250,00	41.897.500,00	-	22.522.500,00	22.522.500,00	810.788.500,00	22.522.500,00
	Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas	2016	2023	144.500.000,00		45.000.000,00			-		144.500.000,00	-
	<i>Induk Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas</i>	2016		<i>99.500.000,00</i>					-			

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	<i>Pengembangan Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas</i>	2022		45.000.000,00					-			
	Aplikasi SIKWAN	2020	2027	77.500.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00		-		77.500.000,00	-
	Aplikasi (SIWANI)	2019	2026	69.333.000,00	17.333.250,00	17.333.250,00			-		69.333.000,00	-
	Sistem Pengendalian Anggaran Belanja	2017	2024	89.000.000,00					-		89.000.000,00	-
	Sistem Informasi Arsip Digital	2017	2024	96.000.000,00					-		96.000.000,00	-
	Software Sistem Manajemen DPRD	2016	2023	195.800.000,00					-		195.800.000,00	-
	SIM Legislatif	2016	2023	59.488.000,00					-		59.488.000,00	-
	Microsoft (temuan BPK 2017)	2011	2018	11.600.000,00					-		11.600.000,00	-
	Website DPRD	2023	2031	90.090.000,00			22.522.500,00		22.522.500,00	22.522.500,00	67.567.500,00	22.522.500,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			309.644.646,90	8.676.250,00	23.676.250,00	23.776.250,00	-	23.776.250,00	22.487.500,00	272.382.146,90	22.487.500,00
	Sistem Pengelolaan Data infrastruktur Lingkungan	2021	2028	34.705.000,00	8.676.250,00	8.676.250,00	8.676.250,00	-	8.676.250,00	-	34.705.000,00	-
	Sistem Perencanaan Sektor Cipta Karya dan Lingkungan Hidup	2017	2024	49.087.500,00				-	-	-	49.087.500,00	-
	microsoft windows server, sqls, ms office(temuan BPK 2017)	2016	2023	120.902.146,90				-	-	-	120.902.146,90	-
	Sistem PIRAMIDA	2022	2029	75.400.000,00		15.000.000,00	15.100.000,00	-	15.100.000,00	15.100.000,00	60.300.000,00	15.100.000,00
	<i>Pengembangan Sistem PIRAMIDA</i>	2022		60.000.000,00								
	<i>Pengembangan Sistem PIRAMIDA</i>	2023		15.400.000,00								
	Video animasi 3D	2025	2032	29.550.000,00						7.387.500,00	7.387.500,00	7.387.500,00
23	Badan Pengelolaan Pendapatan			2.277.874.532,00	235.169.275,00	182.168.775,00	245.514.989,25	-	121.626.434,25	119.397.774,25	2.008.281.547,75	119.397.774,25
	Aplikasi SISMIOP	2016	2023	913.988.295,00	114.372.500,00	85.572.000,00	174.848.745,00	-	24.338.137,50	24.338.137,50	865.312.020,00	24.338.137,50
	<i>Induk Aplikasi SISMIOP/SIM PBB (Dinas Pendapatan-2016)</i>	2016		34.457.500,00								
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah</i>	2017		176.137.500,00								
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah</i>	2018		156.200.000,00								
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah</i>	2019		155.100.000,00								
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2020		96.030.000,00								
	<i>Pengembangan dan Custom Aplikasi SISMIOP</i>	2020		50.160.000,00								
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2022		59.274.000,00								
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2023		89.276.745,00								
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2024		97.352.550,00								
	Pengembangan Sistem BAPENDA	2021	2027	133.552.100,00	33.388.025,00	33.388.025,00	33.388.025,00	-	33.388.025,00	-	133.552.100,00	-

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	Aplikasi e-PAD (Dinas Pendapatan-2016)	2016	2023	34.595.000,00				-			34.595.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi e-PAD	2020	2027	51.810.000,00	12.952.500,00	12.952.500,00	12.952.500,00	-			51.810.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2019	2026	106.150.000,00	26.537.500,00	26.537.500,00		-			106.150.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2023		97.302.877,00			24.325.719,25	-	24.325.719,25	24.325.719,25	72.977.157,75	24.325.719,25
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2018	2025	96.800.000,00	24.200.000,00			-	-	-	96.800.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2017	2024	33.990.000,00				-	-	-	33.990.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2024	2031	62.443.050,00				-	15.610.762,50	15.610.762,50	31.221.525,00	15.610.762,50
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2025	2032	73.707.330,00						18.426.832,50	18.426.832,50	18.426.832,50
	Aplikasi Pelayanan/Pemutakhiran Data PBB Berbasis Web	2019	2026	265.624.080,00	23.718.750,00	23.718.750,00	-	-	23.963.790,00	36.696.322,50	155.535.112,50	36.696.322,50
	Aplikasi Pelayanan/Pemutakhiran Data PBB Berbasis Web	2019	2026	94.875.000,00								
	Pengembangan Aplikasi e-PBB dan e-admPBB	2024	2031	95.855.160,00								
	Pengembangan Aplikasi e-PBB dan e-admPBB	2025	2032	74.893.920,00								
	BPHTB pada Kegiatan Pendapatan Daerah (Dinas Pendapatan-2016)	2016	2023	47.135.000,00				-			47.135.000,00	-
	Sistem Penghapusan Piutang dan NOP Ganda Pajak Bumi dan Bangunan (Dinas Pendapatan-2016)	2016	2023	48.907.500,00				-			48.907.500,00	-
	Software Pendapatan (Dinas Pendapatan-2016)	2012	2019	165.529.300,00				-			165.529.300,00	-
	Software Capaian Kinerja Pegawai (Temuan BPK 2017)	2015	2022	30.300.000,00				-			30.300.000,00	-
	Software Pemeliharaan (Temuan BPK)	2011	2018	23.540.000,00				-			23.540.000,00	-
	Software Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Software Administrasi Sistem, Lap Kegiatan (Temuan BPK 2017)	2011	2018	92.500.000,00				-			92.500.000,00	-
24	BPKAD			657.107.500,00	56.626.750,00	55.913.875,00	90.213.875,00	(7.383.750,00)	45.830.125,00	45.830.125,00	622.807.500,00	45.830.125,00
	Belanja Modal Software Website BPKAD	2022	2029	46.120.500,00		11.530.125,00	11.530.125,00		11.530.125,00	11.530.125,00	46.120.500,00	11.530.125,00
	Aplikasi SIP Persediaan	2020	2027	148.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00		-	-	148.000.000,00	-
	Aplikasi RKBMD	2019	2026	29.535.000,00	7.383.750,00	7.383.750,00	7.383.750,00	(7.383.750,00)	-	-	29.535.000,00	-
	Aplikasi RKBMD	2018	2025	48.972.000,00	12.243.000,00				-	-	48.972.000,00	-
	Aplikasi Smart Accounting Control	2017	2024	48.950.000,00					-	-	48.950.000,00	-
	Aplikasi Integrasi Sistem SIPKD Keuangan dengan SIPKD Persediaan	2016	2023	49.500.000,00					-	-	49.500.000,00	-
	Aplikasi QR code	2016	2023	49.060.000,00					-	-	49.060.000,00	-
	Perangkat Lunak SIPKD Persediaan - (temuan BPK 2017)	2014	2021	99.770.000,00					-	-	99.770.000,00	-
	PERSEGI 2023	2023	2030	44.000.000,00			11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00
	GRAFIS	2023	2030	44.000.000,00			11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
	Sistem SIMPATI Pengamanan Aset Tanah	2023	2030	49.200.000,00			12.300.000,00		12.300.000,00	12.300.000,00	36.900.000,00	12.300.000,00
25	BKPSDMD			449.760.500,00	23.941.500,00	-	-	-	17.875.000,00	17.875.000,00	414.010.500,00	17.875.000,00
	Aplikasi Kinerja	2018	2025	47.784.000,00	11.946.000,00				-		47.784.000,00	-
	Restrukturisasi Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi	2018	2025	119.482.000,00	11.995.500,00	-	-	-	17.875.000,00	17.875.000,00	83.732.000,00	17.875.000,00
	Restrukturisasi Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi	2018	2025	47.982.000,00							-	-
	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMAKCI)	2024		71.500.000,00							-	-
	Aplikasi SKP Online	2017	2024	49.060.000,00					-		49.060.000,00	-
	Aplikasi Pengelolaan TKD	2017	2024	48.812.500,00					-		48.812.500,00	-
	Aplikasi Absensi Pegawai Kegiatan Pembangunan (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	2023	43.285.000,00					-		43.285.000,00	-
	Aplikasi Human Capital Care (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	2023	47.520.000,00					-		47.520.000,00	-
	Software aplikasi kenaikan gaji berkala (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2009	2016	39.567.000,00					-		39.567.000,00	-
	Software Otomatisasi absensi (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2010	2017	43.250.000,00					-		43.250.000,00	-
	MS Office 2007 (temuan BPK 2017)	2012	2019	6.000.000,00					-		6.000.000,00	-
	OS Windows 7 - (temuan BPK 2017)	2013	2020	5.000.000,00					-		5.000.000,00	-
26	Inspektorat			49.700.000,00	12.425.000,00	-	-	-	-	-	49.700.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan	2018	2025	49.700.000,00	12.425.000,00			-	-		49.700.000,00	-
27	Kecamatan Cimahi Utara			71.193.750,00	-	-	-	-	-	-	71.193.750,00	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	2024	49.796.000,00				-	-		49.796.000,00	-
	O.S Window 7, ms office (temuan BPK 2017) Kel. Cibabat	2013	2020	15.897.750,00				-	-		15.897.750,00	-
	Software DAAS(temuan BPK 2017)kel. Cipageran	2015	2022	3.500.000,00				-	-		3.500.000,00	-
	Software Cont Off-line Computer(temuan BPK 2017) kel. Citeureup	2015	2022	2.000.000,00				-	-		2.000.000,00	-
28	Kecamatan Cimahi Tengah			173.664.500,00	31.904.875,00	16.086.125,00	6.248.000,00	-	6.248.000,00	-	173.664.500,00	-
	Website Kelurahan Baros	2021	2028	24.992.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	-	6.248.000,00		24.992.000,00	-
	Pengembangan Aplikasi Website Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2019	2019	2026	39.352.500,00	9.838.125,00	9.838.125,00		-			39.352.500,00	-
	SIM Pelayanan	2018	2025	53.130.000,00	13.282.500,00			-			53.130.000,00	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	2024	39.545.000,00				-			39.545.000,00	-
	Perangkat Lunak SMS Center(temuan BPK 2017) kel. Baros	2015	2022	6.500.000,00				-			6.500.000,00	-
	Aplikasi Sepakat Online Pemeliharaan	2018	2025	10.145.000,00	2.536.250,00			-			10.145.000,00	-
29	Kecamatan Cimahi Selatan			100.595.000,00	9.831.250,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	100.595.000,00	-
	SIM Pelayanan	2018	2025	61.325.000,00	9.831.250,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-		61.325.000,00	-
	Induk SIM Pelayanan	2018		39.325.000,00								
	Pengembangan SIM Pelayanan	2022		22.000.000,00								
	Aplikasi Sepakat Online	2017		39.270.000,00							39.270.000,00	-

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Harga Perolehan	2021	2022	2023	Koreksi 2023	2024	2025	Akumulasi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			47.492.500,00	11.873.125,00	11.873.125,00	11.873.125,00	-	11.873.125,00	-	47.492.500,00	-
	Sistem Informasi Ormas	2021	2028	47.492.500,00	11.873.125,00	11.873.125,00	11.873.125,00	-	11.873.125,00		47.492.500,00	-
	JUMLAH			14.443.830.909,90	1.329.017.633,25	1.223.417.655,00	1.357.958.733,13	- 36.552.240,63	1.100.030.158,28	1.080.574.111,38	12.954.692.289,56	1.080.574.111,38

Rekapitulasi Aset Lain-Lain 2025

NO.	SKPD	Total Saldo Awal Rusak Aset Lain-lain	Total Penambahan Aset Lain-lain	Total Pengurangan Aset Lain-lain	Total Saldo Akhir Aset Lain-lain
1	DINAS PENDIDIKAN	15.544.272.818,01	-	167.635.914,15	15.376.636.903,86
2	DINAS KESEHATAN & PUSKESMAS	4.816.765.244,59	-	3.791.695.078,13	1.025.070.166,46
3	RSUD CIBABAT	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71.869.436.057,51	-	-	71.869.436.057,51
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.278.635.135,12	93.340.000,00	90.480.000,00	1.281.495.135,12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.669.684.790,00	-	340.728.000,00	1.328.956.790,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	19.647.750,00	-	-	19.647.750,00
9	DINAS TENAGA KERJA	167.302.000,00	-	-	167.302.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.403.350,00	-	-	22.403.350,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	497.451.500,00	-	14.437.500,00	483.014.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.730.596.106,60	-	870.943.300,00	859.652.806,60
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	363.020.573,00	-	-	363.020.573,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	2.298.993.364,00	-	625.376.000,00	1.673.617.364,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	348.480.000,10	-	-	348.480.000,10
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	848.817.503,86	-	-	848.817.503,86
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.572.500,00	-	-	39.572.500,00
18	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	423.046.419,00	-	-	423.046.419,00
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	463.740.027,00	-	16.233.000,00	447.507.027,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	2.079.257.518,00	-	6.836.500,00	2.072.421.018,00
21	SEKRETARIAT DPRD	483.941.200,00	-	-	483.941.200,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	260.999.740,91	-	-	260.999.740,91
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	4.509.417.079,93	-	4.011.219.000,00	498.198.079,93
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	395.136.989,00	-	-	395.136.989,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	95.187.000,00	-	-	95.187.000,00
26	INSPEKTORAT KOTA	47.942.000,00	-	-	47.942.000,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	902.654.634,44	-	-	902.654.634,44
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	618.216.850,00	-	-	618.216.850,00
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	461.103.338,30	-	-	461.103.338,30
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	96.728.500,00	-	-	96.728.500,00
JUMLAH		112.352.449.989,37	93.340.000,00	9.935.584.292,28	102.510.205.697,09

Utang Belanja Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Listrik	Air	Telepon	Internet	Utang Sewa Mesin Fotocopy	Utang Pemeliharaan	Utang Belanja Jasa Lainnya	Utang Belanja Persediaan	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Pegawai	Total
1	Dinas Pendidikan	534.561,00		1.066.650,00	-							158.217.200,00	159.818.411,00
2	Dinas Kesehatan	41.947.830,00	1.008.200,00	5.041.172,00	7.409.875,00						729.323.990,00		784.731.067,00
3	RSUD Cibabat	211.110.355,00	6.930.800,00	648.712,00					27.965.393.928,96				28.184.083.795,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.729.915,00	-	97.022,00	337.440,00					730.781.670,00			753.946.047,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	76.744.958,00	-	3.439.130,00	-		3.369.405,00	10.740.000,00				72.002.820,00	166.296.313,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	943.500,00	517.920,00	531.690,00								1.993.110,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.803.094,00	-	73.957,00	-								1.877.051,00
8	Dinas Sosial	-	140.500,00	-	197.250,00								337.750,00
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-	38.686,00	-								38.686,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	185.131,00	96.000,00	146.472,00	-								427.603,00
11	Dinas Pangan Dan Pertanian	8.283.594,00	-	146.636,00	-								8.430.230,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	64.906.519,00	6.190.500,00	2.324.514,00	996.719,00								74.418.252,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	143.347,00	-	41.184,00	-								184.531,00
14	Dinas Perhubungan	497.857.463,00	-	143.586,00	996.800,00								498.997.849,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan												-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.153.738,00		102.047,00									49.255.785,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	2.325.720,00	58.000,00	1.184.650,00	-								3.568.370,00
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah												-
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	61.252.821,00	-	1.290.940,00	-								62.543.761,00
20	Sekretariat Daerah	106.892.589,00	10.488.000,00	4.585.002,00	2.783.060,00								124.748.651,00
21	Sekretariat DPRD	24.957.842,00	-	45.235,00	-								25.003.077,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah												-
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	368.926,00	230.550,00	444.000,00		247.800,00					1.291.276,00
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	44.236,00	-								44.236,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	39.186,00	-								39.186,00
26	Inspektorat Kota	3.710.192,00	-	84.920,00	-								3.795.112,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	4.222.336,00	152.000,00	2.034.399,00	-								6.408.735,00
28	Kecamatan Cimahi Tengah	10.276.083,00	137.300,00	1.778.007,00	2.362.090,00								14.553.480,00
29	Kecamatan Cimahi Selatan	6.696.078,00	96.000,00	351.002,00									7.143.080,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik			38.686,00									38.686,00
Jumlah		1.195.734.166,00	26.240.800,00	25.672.877,00	15.845.474,00	444.000,00	3.369.405,00	10.987.800,00	27.965.393.928,96	730.781.670,00	729.323.990,00	230.220.020,00	30.934.014.130,96

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT CIMAHI
LAPORAN REKAPITULASI UTANG
Per 31 Desember 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2024	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2025	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2025		
					2024	2025	2024	2025	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
1	ALBA UNIVERSAL ABADI	-		-		-	-	-	-
2	ANTAR MITRA SEMBADA	23.020.919		208.360.325	23.020.919	126.599.358	-	81.760.967	81.760.967,00
3	ANUGRAH ARGON MEDIKA	2.769.258.631		7.775.410.524	2.769.258.631	5.070.167.445	-	2.705.243.079	2.705.243.079,47
4	AULIA INDOTAMA LESTARI	-		-		-	-	-	-
5	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1.225.177.731		5.241.327.992	1.225.177.731,10	3.335.514.969	-	1.905.813.023	1.905.813.022,79
6	ABADI NUSA USAHA SEMESTA	-		-		-	-	-	-
7	ADYA ARTHA ABADI	-		502.220.770		487.196.886	-	15.023.884	15.023.884,00
8	ANUGRAH KARYA GEMILANG	-		-		-	-	-	-
9	AMODIA KARYAGUNA SEJAHTERA	-		-		-	-	-	-
10	ANUGRAH BERKAT SARANA	-		272.394.000		39.294.000	-	233.100.000	233.100.000,00
11	ASIA TRAN SINERGI	-		-		-	-	-	-
12	ALIYPZ INTERNASIONAL	-		-		-	-	-	-
13	AFINDO BUANA JAYA	13.444.655		261.358.210	13.444.655	252.855.867	-	8.502.343	8.502.343,00
14	AGUNG WIJAYA EKASENTOSA	21.478.500		172.827.000	21.478.500	172.827.000	-	-	-
15	BINA SAN PRIMA	658.126.395		2.098.009.974	658.126.395	1.348.303.011	-	749.706.963	749.706.962,63
16	BRATACO	-		-		-	-	-	-
17	BIOTEK INTI KORPORINDO	486.524.100		1.953.500.469	486.524.100	952.224.489	-	1.001.275.980	1.001.275.980,11
18	BERKEMBANG SELARAS DAYA	-		-		-	-	-	-
19	BUMIASRI ANGSATANA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
20	BUANA JAYA ALKESINDO	22.921.500		202.594.425	22.921.500	182.725.425	-	19.869.000	19.869.000,00
21	BUANA INTIPRIMA USAHA	62.931.005		60.657.010	62.931.005	53.637.008	-	7.020.002	7.020.002,00
22	BINA BAKTI NIAGAPERKASA	-		17.499.999		17.499.999	-	-	-
23	BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA	-		-		-	-	-	-
24	BISAWI TUMBUH SELARAS	-		183.738.855		183.738.855	-	-	-
25	BIO FARMA	-		-		-	-	-	-
26	BINA ARTHA SEMESTA	39.149.700		349.283.700	39.149.700	291.613.650	-	57.670.050	57.670.050,00
27	CIMEKAR RAYA PERKASA	-		-		-	-	-	-
28	CENTRAL BANDUNG RAYA	-		-		-	-	-	-
29	CIPTA KARUNIA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
30	CIPTA KARYA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
31	CITRA DIAN PRATAMA	-		-		-	-	-	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2024	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2025	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2025		
					2024	2025	2024	2025	TOTAL
		A			D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
32	CORONA CAHAYA SEMESTA	-		-		-	-	-	-
33	COBRA DENTAL INDONESIA	-		4.366.581		-	-	4.366.581	4.366.581,00
34	DAYA MUDA AGUNG	4.846.948		7.548.000	4.846.948	7.076.250	-	471.750	471.750,00
35	DISTRI VERSA BUANA MAS	9.706.353		109.772.140	9.706.353	88.656.388	-	21.115.752	21.115.752,00
36	DEMKA SAKTI	-		-		-	-	-	-
37	DIASTIKA BIOTEKINDO	-		-		-	-	-	-
38	DAMAI SEJAHTERA MEDIKA	-		-		-	-	-	-
39	DIFAS PUTRA GEMILANG	-		-		-	-	-	-
40	DUTA BERKAT ABADI	-		-		-	-	-	-
41	DELVI PRIMATAMA	-		-		-	-	-	-
42	DISPO OPTHA MEDIKA	52.836.000		102.564.000	52.836.000	96.348.000	-	6.216.000	6.216.000,00
43	DEXA ARFINDO PRATAMA	-		-		-	-	-	-
44	DOS NI ROHA	-		-		-	-	-	-
45	EZZY GEMILANG JAYA	-		-		-	-	-	-
46	ELO KARSA UTAMA	-		-		-	-	-	-
47	EDDUMED HEALTH SOLUTIONS			1.196.025.000		652.125.000	-	543.900.000	543.900.000,00
48	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	2.393.129.160		6.105.159.278	2.393.129.160	3.737.475.871,50	-	2.367.683.407	2.367.683.406,91
49	FAJAR ALAM SCIENTIFIC	-		-		-	-	-	-
50	FISMED GLOBAL INDONESIA	1.043.122.500		190.850.625	1.043.122.500	190.850.625	-	-	-
51	FONDA MEDIKA UTAMA	-		34.021.500		32.301.000	-	1.720.500	1.720.500,00
52	FIXA MEDIKA TAMA	-		26.757.937		-	-	26.757.937	26.757.937,00
53	GRIYA BINA SEJAHTERA	-		12.859.598		3.674.171	-	9.185.427	9.185.427,00
54	GRACIA PERSADA ABADI	-		-		-	-	-	-
55	GENETIKA SCIENCE INDONESIA	-		-		-	-	-	-
56	GENTA BUANA ASTADECA	-		-		-	-	-	-
57	GIRI SAKTI UTAMA	-		126.627.400		126.627.400	-	-	-
58	HIKMAH GAS	-		-		-	-	-	-
59	HARMONI PRIMA MEDIKA	-		14.985.000		14.985.000	-	-	-
60	HOLI PHARMA	2.497.879		318.758	2.497.879	318.758	-	-	-
61	INTI MEDIKA SARANA	-		-		-	-	-	-
62	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	-		-		-	-	-	-
63	INDOHADETAMA	-		-		-	-	-	-
64	INDOMED PHARMA	-		917.254.778		430.036.788	-	487.217.990	487.217.989,65
65	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	-		2.877.120		2.877.120	-	-	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2024	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2025	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2025		
					2024	2025	2024	2025	TOTAL
		A			D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
66	INDOPTA KARYA NETRATAMA	-		-		-	-	-	-
67	INDO MARTHA PRIMA	1.917.260		24.409.826	1.917.260	21.022.856	-	3.386.970	3.386.969,90
68	INSAN AFIAT MANDIRI	251.056.471		991.026.191	251.056.471	706.995.827	-	284.030.364	284.030.364,04
69	ISMAR PUTRA SEJAHTERA	2.531.998		-	2.531.998	-	-	-	-
70	ITAMAYA RANORAYA	-		-		-	-	-	-
71	IDS MEDICAL SYSTEM INDONESIA	-		-		-	-	-	-
72	KIMIA PHARMA	425.547.139		2.943.519.939	425.547.139	1.787.434.734	-	1.156.085.205	1.156.085.205,03
73	KOLOSAL PRATAMA	-		-		-	-	-	-
74	KLARA SANTOSA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
75	KINARYA PRIMA HUSADA	-		514.152.000		374.292.000	-	139.860.000	139.860.000,00
76	KASHELARA	-		-		-	-	-	-
77	KURNIA ASTASURYA	-		-		-	-	-	-
78	LAKSANA ABADI MANDIRI	-		-		-	-	-	-
79	LAWSIM ZECHA	8.779.211		13.093.256	8.779.211	13.093.256	-	-	-
80	LYNAS MEDIKAL	-		-		-	-	-	-
81	LITERA MULTI SARANA	-		-		-	-	-	-
82	MENSA BINA SUKSES	72.339.322		526.692.300	72.339.322	411.040.653	-	115.651.647	115.651.647,25
83	MERAPI UTAMA PHARMA	201.524.164		1.636.688.823	201.524.164	1.159.198.199	-	477.490.624	477.490.624,40
84	MILLENNIUM PHARMACON	653.573.838		2.051.305.129	653.573.838	1.145.502.981	-	905.802.149	905.802.148,54
85	MEGAH MEDIKA PHARMA	30.734.790		132.930.825	30.734.790	132.930.825	-	-	-
86	MEDIKA CAHAYA MANDIRI	13.843.676		19.397.571	13.843.676	19.397.571	-	-	-
87	MESAT INDO GLOBAL	-		-		-	-	-	-
88	MUARA SAKTI	-		-		-	-	-	-
89	MEDITECH INDONESIA	-		-		-	-	-	-
90	MEDQUEST JAYA GLOBAL	-		-		-	-	-	-
91	MEDIALI SINERGI	-		37.719.465		37.719.465	-	-	-
92	MARGA NUSANTARA JAYA	-		32.610.155		32.610.155	-	-	-
93	MULYA HUSADA JAYA	-		-		-	-	-	-
94	MEDITRANS	-		687.510.208		425.382.460	-	262.127.749	262.127.748,60
95	MULTIDAYA MEDIKA	-		315.528.437		124.943.879	-	190.584.558	190.584.558,00
96	MOYA MULTI SARANA	-		158.730.000		96.214.800	-	62.515.200	62.515.200,00
97	MEDISON JAYA RAYA	-		-		-	-	-	-
98	MUNGGARAN	-		-		-	-	-	-
99	NUSA KARISMA RAYA	760.949.609		620.419.621	760.949.609	572.281.418	-	48.138.203	48.138.203,30
100	NUSA PRATAMA MANDIRI	-		-		-	-	-	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2024	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2025	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2025		
					2024	2025	2024	2025	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
101	NUSA ASIA MEDIKA	-		-		-	-	-	-
102	NASZA BERDIKARI	-		-		-	-	-	-
103	NAHL MEDICA UTAMA	7.326.000		17.094.000	7.326.000	14.652.000	-	2.442.000	2.442.000,00
104	NUSA SANTOSA MANDIRI	-		159.063.000		64.935.000	-	94.128.000	94.128.000,00
105	NUANSA JAYA GROUP	-		-		-	-	-	-
106	NEYKA SHARY PRATAMA	1.509.173.226		2.415.836.983	1.509.173.226	1.275.786.945	-	1.140.050.038	1.140.050.038,24
107	OSADHA GRAHA SEJAHTERA	-		-		-	-	-	-
108	ORIZA MEDIKA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
109	PRIMA ANUGRAH MANDIRI	10.309.984		31.928.138	10.309.984	26.382.051	-	5.546.087	5.546.087,00
110	PMI KOTA BANDUNG	-		-		-	-	-	-
111	PRIMA ALKESINDO NUSANTARA	-		-		-	-	-	-
112	PARIT PADANG	2.900.695.580		6.380.571.574	2.900.695.580	2.944.114.560,42	-	3.436.457.013	3.436.457.013,15
113	PRIMA HEALTH CARE	13.054.447		20.874.997	13.054.447	17.424.998	-	3.449.999	3.449.998,99
114	PUTRA DAFARA LESTARINDO	-		-		-	-	-	-
115	PUTRA SEDIA USAHA	-		-		-	-	-	-
116	PERUSAHAAN PERDAGANGAN IND	125.473.056		33.362.160	125.473.056	33.362.160	-	-	-
117	PRABU MANDIRI JAYA	-		-		-	-	-	-
118	PENTA VALENT	534.297.846		900.739.883	534.297.846	718.827.537	-	181.912.346	181.912.345,64
119	RAJAWALI MEDIKA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
120	REVAS UTAMA MEDIKA	-		1.863.782.407		906.135.931	-	957.646.476	957.646.476,37
121	REKAMILENIUMINDO SELARAS	-		159.136.890		131.832.477	-	27.304.412	27.304.412,19
122	RONTHKARD	27.984.487		60.618.487	27.984.487	60.618.487	-	-	-
123	RAJAWALI NUSINDO	-		24.914.463		24.914.463	-	-	-
124	SURYA PRIMA PERKASA	-		-		-	-	-	-
125	SURGIKA ALKESINDO	19.988.047		782.576.833	19.988.047	615.344.233	-	167.232.600	167.232.600,00
126	SAPTA SARI TAMA	16.303.327		62.063.715	16.303.327	36.049.448	-	26.014.267	26.014.267,45
127	SENTRA ASIA GEMILANG	288.220.713		890.653.455	288.220.713	667.253.523	-	223.399.932	223.399.932,00
128	SUMARSANA/SUMAR SARANA GLOBAL	58.954.320		70.596.000	58.954.320	52.947.000	-	17.649.000	17.649.000,00
129	SABA INDOMEDIKA	-		-		-	-	-	-
130	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	-		11.279.213		11.279.213	-	-	-
131	SINAR PANCA MEDIKA	124.993.812		174.483.893	124.993.812	158.283.894	-	16.199.999	16.199.999,00
132	SOMETECH INDONESIA	58.320.000		91.679.985	58.320.000	74.879.997	-	16.799.988	16.799.988,00
133	SUMIFIN CITRA ABADI	-		-		-	-	-	-
134	SINAR RODA UTAMA	-		333.000		333.000	-	-	-
135	SYAHARANI	118.297.149		29.800.000	118.297.149,00	29.800.000	-	-	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2024	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2025	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2025		
					2024	2025	2024	2025	TOTAL
		A			D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
136	SURIS WAHANACIPTA	-		291.028.680		291.028.680	-	-	-
137	SETIA GUNA MEDIKA	-		-		-	-	-	-
138	TUNAS BANGUN PRAKARSA	52.718.340		275.700.690	52.718.340	254.208.870	-	21.491.820	21.491.820,00
139	TEMPO	59.600.000		-	59.600.000	-	-	-	-
140	TRANSMEDIC INDONESIA	309.497.364		550.164.257	309.497.364	236.465.775	-	313.698.482	313.698.482,41
141	TAWADA HEALTHCARE	-		436.607.400		201.576.000	-	235.031.400	235.031.400,00
142	TRIPUTRA TECHNOMEDIKA BAHARI	75.058.200		225.174.600	75.058.200	200.155.200	-	25.019.400	25.019.400,00
143	TRITUNGGA SAHABAT SEJATI	-		74.530.033		74.530.033	-	-	-
144	TRIMITRA INTERNUSA MEDIKA	-		-		-	-	-	-
145	TANAYA PUTRA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
146	TRI SAPTA JAYA	66.016.871,12		128.410.485	66.016.871	128.410.485	-	-	-
147	TRANS BLOOD INDONESIA	-		-		-	-	-	-
148	TIARA KENCANA	1.380.000		131.371.052	1.380.000	40.265.296	-	91.105.756	91.105.756,10
149	TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA	-		-		-	-	-	-
150	TERANG JAYA DENTAL SUPPLY	20.102.100		68.955.606	20.102.100	51.751.609	-	17.203.997	17.203.997,28
151	TIGARAKSA SATRIA	-		-		-	-	-	-
152	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS	-		-		-	-	-	-
153	UNITED DICO CITAS	91.052.587		210.527.394	91.052.587	210.527.394	-	-	-
154	USAHA MEDIKA MANDIRI	-		-		-	-	-	-
155	VERSACON MEDICAL	-		-		-	-	-	-
156	VIOLET INDONESIA PERSADA	-		-		-	-	-	-
157	WIKATON MITRA TAMA	-		938.446.166		544.517.156	-	393.929.010	393.929.010,00
158	WEY DETANA HOSPINDO	-		-		-	-	-	-
159	WEGO MEDIKA INDONESIA	-		-		-	-	-	-
160	WORKCKHARDT PHARMA INDO	-		-		-	-	-	-
161	YABEZ KARYA MANDIRI	38.539.200		90.154.200	38.539.200,00	73.637.400	-	16.516.800	16.516.800,00
162	zain reychi eternal			4.000.000		4.000.000	-	-	-
	Total Farmasi (A)	17.778.326.111	-	56.463.364.354	17.778.326.111	35.133.842.226	-	21.329.522.127	21.329.522.127,44
	Lab Klinik								
1	AULIA INDOTAMA LESTARI					-	-	-	-
2	ANUGRAH ARGON MEDIKA (LAB KLINIK)	63.999.997,60	(51.199.998)	118.036.512	12.800.000	39.345.504	-	78.691.008	78.691.008,00
3	BUMIASRI ANGSAATANA MANDIRI (LAB KLINIK)	50.151.377,00		356.107.868	50.151.377	236.273.490	-	119.834.378	119.834.378,00
4	DIASTIKA BIOTEKINDO (LAB KLINIK)	2.886.000,00		154.620.079	2.886.000	117.745.879	-	36.874.200	36.874.200,00
5	EZZY GEMILANG JAYA (LAB KLINIK)	67.754.400,00		422.432.700	67.754.400,00	204.650.700	-	217.782.000	217.782.000,00
6	FAJAR ALAM SCIENTIFIC (LAB KLINIK)	20.795.293,99		119.759.598	20.795.293,99	76.674.158	-	43.085.440	43.085.440,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2024	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2025	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2025		
					2024	2025	2024	2025	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
7	GENTA BUANA ASTADECA (LAB KLINIK)	260.187.330,00		802.569.849	260.187.330	460.331.430	-	342.238.419	342.238.419,00
8	LAKSANA ABADI MANDIRI (LAB KLINIK)	458.764.665,00		1.469.396.355	458.764.665	957.639.735	-	511.756.620	511.756.620,00
9	INDOHADETAMA (LAB KLINIK/UTDRS)	359.006.456,00		2.036.214.957	359.006.456	1.413.814.540	-	622.400.417	622.400.417,00
10	SABA INDOMEDIKA (LAB KLINIK UTDRS)	8.875.560,00		41.898.785	8.875.560	35.049.808	-	6.848.977	6.848.977,00
11	NUSAMED MEGA HASTOSA			4.717.500		4.717.500	-	-	-
	Gas Medis			-		-	-	-	-
12	FRISANSHA ANUGRAH ALKESINDO (Sterilisasi)	17.316.000,00		-	17.316.000	-	-	-	-
13	HIKMAH GAS (GAS MEDIS)	993.448.890,00		2.238.699.060	993.448.890	864.251.106	-	1.374.447.954	1.374.447.954,00
	Lab PA			-		-	-	-	-
14	BIOZATIX INDONESIA (LAB PA)	4.323.450,00	(4.323.450)	84.580.668		16.317.333	-	68.263.335	68.263.335,00
15	NUSA KARISMA (LAB PA)	-		-		-	-	-	-
16	NEYKA SHARY PRATAMA (LAB PA)	220.956.266,00	(9.990.000)	198.635.436	210.966.266	80.832.411	-	117.803.025	117.803.025,00
	Radiologi			-		-	-	-	-
17	SURYA ANDRA MEDIKALINDO			379.810.024		188.046.015	-	191.764.010	191.764.009,64
18	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS (RADIOLOGI)	92.164.010,00		-	92.164.010	-	-	-	-
19	TRIPUTRA TECHNO MEDIKA			27.028.498		27.028.498	-	-	-
20	RAJAWALI MEDIKA MANDIRI (RADIOLOGI)	97.427.731,00		194.996.734	97.427.731	146.631.005	-	48.365.729	48.365.729,00
	UTDRS			-		-	-	-	-
22	TRANS BLOOD INDONESIA (UTDRS)	531.070.144,00		1.616.415.300	531.070.144	941.779.500	-	674.635.800	674.635.800,00
23	PMI KOTA BANDUNG (UTDRS)	25.680.000,00		192.070.000	25.680.000	151.230.000	-	40.840.000	40.840.000,00
24	MEDQUEST JAYA GLOBAL (UTDRS)	-		130.441.995		81.945.996	-	48.495.999	48.495.999,08
25	TANAYA PUTRA MANDIRI (LAB PA)	30.743.670,00		42.072.357	30.743.670	42.072.357	-	-	-
26	ITAMAYA RANORAYA (UTDRS)	320.721.886,80		640.000.000	320.721.887	320.000.000	-	320.000.000	319.999.999,80
	CSSD			-		-	-	-	-
27	CITRA DIAN PRATAMA (CSSD)	-		490.000.030		277.150.016	-	212.850.014	212.850.014,00
28	HOSPI NIAGA UTAMA (CSSD)	-		-		-	-	-	-
29	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA (CSSD)	114.885.212,00		491.827.835	114.885.212	355.953.358	-	135.874.477	135.874.477,00
30	INTERGASTRA (CSSD)	109.201.800,00		443.778.000	109.201.800,00	245.734.020	-	198.043.980	198.043.980,00
31	MILLENINIM PHARMACON INDONESIA (CSSD)	-		-		-	-	-	-
32	MUNGGARAN (CSSD)	57.997.500,00		223.789.875	57.997.500	164.578.035	-	59.211.840	59.211.840,00
33	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING (CSSD/HD)	41.460.679,47		96.530.088	41.460.679	52.898.208	-	43.631.880	43.631.880,00
34	TUNAS BANGUN PRAKARSA (CSSD)	52.197.750,00		213.730.944	52.197.750	132.778.644	-	80.952.300	80.952.300,00
	HEMODIALISA			-		-	-	-	-
35	SINAR RODA UTAMA (HD)	839.604.000,00		5.200.572.000	839.604.000	4.159.392.000	-	1.041.180.000	1.041.180.000,00
	Total Penunjang (B)	4.841.620.068,86	(65.513.448,08)	18.430.733.047,30	4.776.106.621	11.794.861.246	-	6.635.871.802	6.635.871.801,52
	TOTAL SELURUH (A+B)	22.619.946.179,50	(65.513.448,08)	74.894.097.401,12	22.554.432.731,42	46.928.703.472,16	-	27.965.393.928,96	27.965.393.928,96

**Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2025**

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
1	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PKA-15A/PWS/DISTAKOT/2005	8.400.000,00	7.560.000,00	840.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Padasuka
2	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PKA-13/PWS/DISTAKOT/2005	16.200.000,00	14.580.000,00	1.620.000,00	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Cimindi
3	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PKA-15/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Utara
4	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	601/13.E/SP/PWS.P2RDPMA-PSPK/DISTAKOT/2005	12.150.000,00	10.935.000,00	1.215.000,00	Pengawasan Peningkatan 3 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
5	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	04/KKP/PKA-15B/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
6	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	04/KKP/PKA-04/PWS/DISTAKOT/2005	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung
7	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	01A/SP/PWS 01/ABT/DISTAKOT/2005	17.500.000,00	15.750.000,00	1.750.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung ABT
8	2005	Dinas Tata Kota	PT. RESTU IBU	621/39/HARLA/BM/DISTAKOT/2005	88.027.000,00	87.486.000,00	541.000,00	Pengadaan Aspal Untuk Pemeliharaan Jalan Berkala
8			Sub Total I		165.677.000,00	157.371.000,00	8.306.000,00	
9	2006	Dinas Tata Kota	CV. DIANA JULI	621/81/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	46.346.000,00	44.028.700,00	2.317.300,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Gorong-gorong Crossing Jl. Padasuka
10	2006	Dinas Tata Kota	CV. SANDRILLA PUTRA	621/126/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	48.871.000,00	46.427.450,00	2.443.550,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Saluran samping jalan cipageran
11	2006	Dinas Tata Kota	CV. HANDAYANI PRIMA	621/RPBRJ/BM-DISTAKOT/2006	27.785.000,00	15.885.000,00	11.900.000,00	peningkatan jalan lingk ar utara pengadaan alat-alat kantor (laptor)
3			Sub Total II		123.002.000,00	106.341.150,00	16.660.850,00	
12	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI SACITA	621/47/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	191.290.000,00	181.725.500,00	9.564.500,00	Pemeliharaan Jalan sindang sari cibaligo
13	2007	Dinas Tata Kota	CV. KUSDINAR	621/51/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	192.650.000,00	183.017.500,00	9.632.500,00	pemeliharaan jalan cibogo lamping dan cireundeu
14	2007	Dinas Tata Kota	CV. MITRA UTAMA	621/167/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	99.490.000,00	98.992.550,00	497.450,00	pemeliharaan jalan pabrik aci
15	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI MANUNGGA KARYA	621/113/JKS-PRASKOT/2007	48.800.000,00	46.360.000,00	2.440.000,00	perbaikan jalan curug cileungsi kel. Leuwigajah
4			Sub Total III		532.230.000,00	510.095.550,00	22.134.450,00	
16	2008	Sekretariat Daerah	CV. DIMAR	04/PPK/SP/R-SETDA/XII/2008	97.181.000,00	92.321.950,00	4.859.050,00	pemeliharaan tailling tanga
17	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ENDORA SAKTI	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-10/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
18	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. PRATAMA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-11/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
19	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. KARYA TIGA PUTRA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-01/PPBPK/2008	19.213.975,00		19.213.975,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
20	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ROSFER INDAH	027/49/DUK/2008	540.903.000,00	513.857.850,00	27.045.150,00	pengadaan jaringan komputer (tower LAN) kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK
21	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TRI USAHA MANDIRI	510.2/673/DLH/V/2007	49.821.000,00	47.329.950,00	2.491.050,00	keermur/TPT area unloading
22	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. CIPTA JAYA KENCANA	510.2/908/DLH/VI/2007	49.515.000,00	47.039.250,00	2.475.750,00	pengecoran area unloading TPK
23	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. A & B TERANG ABADI	510.2/1377/DLH/VIII/2007	34.539.000,00	32.812.050,00	1.726.950,00	pekerjaan konstruksi jaringan air bersih
24	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TIGA SAUDARA	510.2/1569/DLH/IX/2007	556.239.000,00	556.238.999,00	1,00	pembangunan tahap II laboratorium seluas 200 m2
25	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. MEGA	510.2/2228.C/DLH/IX/2008	83.185.000,00	79.025.750,00	4.159.250,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. Pasirkaliki (luncuran GRLK prov. 2007)
26	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. PERKASA UTAMA	510.2/2228.A/DLH/XI/2008	86.599.000,00	82.269.050,00	4.329.950,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. cimahi (luncuran GRLK prov. 2007)
27	2008	Dinas Tata Kota	CV. INTAN	631/36/PU/PRASKOT/2008	99.850.000,00	94.857.500,00	4.992.500,00	pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang perbaikan jembatan di RW .08 Kel. Karang Mekar
28	2008	Dinas Tata Kota	CV. SEPTIANA	621.5/25/Pm.L/PRASKOT/2008	87.391.000,00	83.021.450,00	4.369.550,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 21 kel. Melong
29	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA TIGA PUTRA	621.5/04-SP/PL.5-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	43.313.000,00	41.147.350,00	2.165.650,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 20 Kel. Padasuka

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
30	2008	Dinas Tata Kota	CV. BRATA JAYA	621.5/46/m.L/PRASKOT/2008	84.310.000,00	80.094.500,00	4.215.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 05 kel. Cigugur tengah
31	2008	Dinas Tata Kota	CV. MAHARANI	621.5/04-SP/PL.10-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	49.500.000,00	47.025.000,00	2.475.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Leuwigajah
32	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.14-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	42.890.000,00	40.745.500,00	2.144.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Padasuka
33	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.17-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi normalisasi saluran RW. 08 kel. Melong dan RW 10 kel. Cibeureum
34	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.18-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	33.850.000,00	32.157.500,00	1.692.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 30 dan perbatasan RW 05 kel. Melong
35	2008	Dinas Tata Kota	CV. DIMAR	621.5/25/PL/ABT-PRASKOT/2008	49.000.000,00	46.550.000,00	2.450.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan gorong-gorong di kel. Cigugur tengah
36	2008	Dinas Tata Kota	CV. UTAMA	621.5/04-SP/PL.28-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	14.315.000,00	13.599.250,00	715.750,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi pembangunan drainase RW. 17 siliwangi jl. Kebon rumput III RW 17 Kel. Baros
37	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.5/27/PL/ABT-PRASKOT/2008	9.625.000,00	9.143.750,00	481.250,00	pengadaan konstruksi pintu air perbaikan pintu air jorolot di kel. Leuwigajah
38	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.3/28/PL/ABT-PRASKOT/2008	19.500.000,00	18.525.000,00	975.000,00	pengadaan konstruksi jalan pemasangan paving block di RT 01, 04 RW 03 kel. Padasuka
39	2008	Dinas Tata Kota	CV. MEGA	621.3/04-SP/PL.21-FPPS/PRASKOT-DTK/2008	47.690.000,00	45.305.500,00	2.384.500,00	pengadaan konstruksi jalan pembangunan jalan lingkungan pontren al-mushadah KH encep toha cilember jl. Cilember cimahi
40	2008	Dinas Tata Kota	CV. SURYA SAMUDRA	691/04-SP/PL.11-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	44.138.000,00	41.931.100,00	2.206.900,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum instalasi air bersih di kel. Cibeureum, 2 lokasi
41	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA MANDIRI	691/04-SP/PL.13-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.640.000,00	23.408.000,00	1.232.000,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minumpembangunan sarana air bersih RW 08 kel. Cibeureum
42	2008	Dinas Tata Kota	CV. HARAVAN JAYA	691.27/37/Pm.L/PRASKOT/2008	97.348.000,00	92.480.600,00	4.867.400,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/07 kel. Cibeureum
43	2008	Dinas Tata Kota	CV. TRIJAYA	691/04-SP/PL.15-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	49.491.000,00	47.016.450,00	2.474.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/04 dan RT 04/08 kel. Cigugur tengah
44	2008	Dinas Tata Kota	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	621.3/04-SP/PL.17-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.611.000,00	23.380.450,00	1.230.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum pembangunan jalan dan selokan air kotor di wilayah RT 05/07 jl. Pesantren kel. Cibabat
45	2008	Dinas Tata Kota	CV. SINAR SADULUR PUTRA	621/SPKK-22/BM-PRASKOT/2008	146.776.000,00	139.437.200,00	7.338.800,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Jayadikrama
46	2008	Dinas Tata Kota	CV. REZEKI	621/SPKK-40/BM-PRASKOT/2008	99.355.000,00	94.387.250,00	4.967.750,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Kalasan
31	Sub Total IV				2.653.125.775,00	2.502.348.199,00	150.777.576,00	
47	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. WIDYA PRATAMA	510.2/3183/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	253.363.000,00	246.514.598,00	6.848.402,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi leuwiteureup
48	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PUTRA JAYA	510.2/3137/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	208.467.000,00	205.047.000,00	3.420.000,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi jorolot
49	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KENCANA ABADI PERKASA	510.2/4106.B/DPLK/IX/2009	47.658.000,00	45.275.100,00	2.382.900,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran pakuhaji di cijanggal (paket2)
50	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TRIJAYA	04/KPA-DPLK-06-M/SP/XI/2009	92.900.000,00	88.255.000,00	4.645.000,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi di leuwiliang (paket3)
51	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. REZITAMA	510.2/2346.C/DPLK/VII/2009	264.621.000,00	264.620.950,00	50,00	pengerukan sungai cikendal
52	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KAHURIPAN	510.2/3850/DPLK/X/2009	258.500.000,00	245.575.000,00	12.925.000,00	penyediaan sarana air bersih (sumur artesis) di kel. Cigugur tengah
53	2009	kantor lingkungan hidup	CV. DOHARDO	03/KPA/KLH-03/SP/IX/2009	119.611.000,00	113.630.450,00	5.980.550,00	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
54	2009	Dinas Kesehatan	CV. KARYA CIPTA ARTHA	03/KPA-Dinkes.01.M/SP/XI/2009	181.588.000,00	172.508.600,00	9.079.400,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan)
55	2009	Dinas Kesehatan	CV. SENTRAL AGUNG PRAKASA	04/KPA-Dinkes-01.M/SP/XI/2009	88.112.000,00	83.706.400,00	4.405.600,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan2)
56	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	04/KPA-Dinkes-07.M/SP/XI/2009	73.687.000,00	70.002.650,00	3.684.350,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan)
57	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	03/KPA/SPK/Pusk. CTRP.II/XI/2009	37.460.000,00	35.587.000,00	1.873.000,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan2)
58	2009	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA PRATAMA	04/KPA/Dinkes.14.L/SP/XI/2009	501.160.000,00	476.102.000,00	25.058.000,00	pembangunan puskesmas pembantu melong
59	2009	Dinas Kesehatan	CV. HENDOKI BHAKTI	04/KPA-Dinkes-05-M/SP/XI/2009	75.248.000,00	71.485.600,00	3.762.400,00	penataan puskesmas dan gudang obat padasuka
60	2009	Dinas Kesehatan	CV. MEGA	04/KPA-Dinkes-02.M/SP/XI/2009	93.425.000,00	88.753.750,00	4.671.250,00	penataan puskesmas cimahi tengah
61	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA-Dinkes-04.M/SP/XI/2009	61.150.000,00	58.092.501,00	3.057.499,00	penataan puskesmas cigugur tengah
62	2009	Dinas Kesehatan	CV. GINANJAR	04/KPA/SPK/PSRKLK/Dinkes/2009	30.520.000,00	28.994.000,00	1.526.000,00	penataan puskesmas pasirikaliki
63	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA-Dinkes-03.M/SP/XI/2009	87.126.000,00	82.769.700,00	4.356.300,00	penataan puskesmas gedung obat ciawitali
64	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	03/KPA-DPU-45.L/SP/VII/2009	463.694.000,00	440.510.200,00	23.183.800,00	penataan halaman pasar atas baru kota cimahi

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
65	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABU RIZAL	03/KPA/SPK/Kel.Cigugur/PU/2009	49.984.000,00	47.484.800,00	2.499.200,00	penyempurnaan kantor kelurahan cigugur tengah
66	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	03/KPA/SPK/UKS/PU/2009	49.989.000,00	47.489.550,00	2.499.450,00	penataan sekolah untuk lomba UKS
67	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BAGJA WALUYA	03/KPA/SP/DP/PU-64-L/IX/2009	129.375.000,00	122.906.250,00	6.468.750,00	pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di dalam site sekitar rusun
68	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	621/SPKK-24/BM-DPU/2009	192.057.000,00	182.454.150,00	9.602.850,00	pemeliharaan berkala jalan industri II
69	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/SPKK-274/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.936.000,00	42.689.200,00	2.246.800,00	jalan margaluyu
70	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-281/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.106.000,00	41.900.700,00	2.205.300,00	persimpangan jalan pesantren amir machmud
71	2009	Dinas Pendidikan	CV. JAYA MAKMUR	07/DISDIK-07-M/SPK/XI/2009	58.295.000,00	55.380.250,00	2.914.750,00	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMKN 1 cimahi
25 Sub Total V					3.507.032.000,00	3.357.735.399,00	149.296.601,00	
72	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KARYA TRISTA ASRI	510.2/4718/DPLK/XI/2010	446.920.000,00	424.574.000,00	22.346.000,00	pembuatan septik tank komunal/biogas/mck plus 4 di kel. Padasuka
73	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDRILLA PUTRA	510.2/4432/DPLK/XI/2010	49.600.000,00	47.120.000,00	2.480.000,00	pembuatan mck/septik tank/SPAL/IPAL 4 RW 22 kel. Citeureup
74	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TIGA PUTRI	510.2/4337/DPLK/XI/2010	89.494.000,00	85.019.300,00	4.474.700,00	rehabilitasi/normalisasi/kirmir/DPT kel. Cibabat (RW 17)
75	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. DILAGGA	510.2/5337/DPLK/XI/2010	73.860.000,00	70.167.000,00	3.693.000,00	penataan taman median jl. Mintaredja (tahap I)
76	2010	Dinas Perhubungan	CV. INSUN MEDAL LESTARI	555/SPKK-01/LU/DISHUB/X/2010	196.080.000,00	186.276.000,00	9.804.000,00	pengadaan marka jalan
77	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GELAR SARANA	027/DP/ABT.03-M/SP/X/2010	98.370.000,00	93.451.500,00	4.918.500,00	penyempurnaan pasar atas baru kota cimahi
78	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	027/DP/ABT.PG.05-PL/SPK/XI/2010	49.730.000,00	47.243.500,00	2.486.500,00	penataan sarana penunjang olah raga di kota cimahi
79	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	027/DP/ABT.PG.03-PL/SPK/XI/2010	98.450.000,00	93.527.500,00	4.922.500,00	penyekatan gedung C3
80	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	027/DP/ABT.PG.04-PL/SP/XI/2010	99.050.000,00	94.097.500,00	4.952.500,00	penataan sarana penunjang bandung cimahi junction (BJC)
81	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-22/L/BM-DPU/2010	221.010.000,00	209.959.500,00	11.050.500,00	pembuatan saluran dan trotoar jl. HMS mintaredja
82	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/SPKK-30/pml/BM-DPU/2010	94.254.000,00	89.541.300,00	4.712.700,00	penggantian plat beton jl. Amir machmud
83	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-01/pml/BM-DPU/2010	98.770.000,00	93.831.500,00	4.938.500,00	overlay jl. Kihapit
84	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	621/SPKK-05/pml/BM-DPU/2010	97.290.000,00	92.425.500,00	4.864.500,00	pelebaran beton jl. Sekolahan, cimahi tengah
85	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-11/PML/BM-DPU/2010	96.307.000,00	91.491.650,00	4.815.350,00	overlay jl. Usman dhomiri
86	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SENTRAL AGUNG PERKASA	621/SPKK-19/PML/BM-DPU/2010	93.560.000,00	88.882.000,00	4.678.000,00	overlay jl. Sisingamangaraja, cimahi tengah
87	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-24/PML/BM-DPU/2010	91.261.000,00	86.697.950,00	4.563.050,00	overlay jl. Contong
88	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SWASTIKA MEGA UTAMA	621/SPKK-41/PML/BM-DPU/2010	85.380.000,00	81.111.000,00	4.269.000,00	rehabilitasi jalan baros-dustira-sriwijaya-gandawijaya
89	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-47/PML/BM-DPU/2010	74.295.000,00	70.580.250,00	3.714.750,00	jl. Stadion
90	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-27/PML/BM-DPU/2010	74.393.000,00	70.673.350,00	3.719.650,00	overlay jl. Kebon rumput
91	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-203/pml/BM-DPU/2010	49.680.000,00	47.196.000,00	2.484.000,00	kelurahan karang mekar
92	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-303/pml/BM-DPU/2010	49.747.000,00	47.259.650,00	2.487.350,00	kelurahan setiamanah
93	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TEKAD MULYA	621/SPKK-197/pml/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	kelurahan baros
94	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-159/RPJ/BM-DPU/2010	49.679.000,00	47.195.050,00	2.483.950,00	kelurahan cigugur tengah
95	2010	Dinas Pekerjaan Umum	(prayitno basuki)	621/SPKK-177/RPJ/BM-DPU/2010	49.448.000,00	46.975.600,00	2.472.400,00	kelurahan utama
96	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-182/RPJ/BM-DPU/2010	49.516.000,00	47.040.200,00	2.475.800,00	kelurahan cibeureum
97	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI SACITA	621/SPKK-335/RPJ/BM-DPU/2010	49.496.000,00	47.021.200,00	2.474.800,00	pelebaran beton jl. Dustira, cimahi tengah
98	2010	Dinas Pekerjaan Umum	PT. HEMBI GEMILANG	621/SPKK-65/pml/BM-DPU/2010	69.450.000,00	65.977.500,00	3.472.500,00	pemagaran jl. Sriwijaya
99	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MANDIRI JAYA SETIA	621/SPKK-18/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.637.000,00	47.155.150,00	2.481.850,00	jl. Padasuka
100	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-45/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.596.000,00	47.116.200,00	2.479.800,00	jl. Gatot subroto dalam (TEPBK TNI)
101	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARANG NUNGGAL	621/SPKK-57/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.772.000,00	47.283.400,00	2.488.600,00	jl. Baros pasar RW 01 kel. Leuwigajah
102	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-03/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.799.000,00	46.359.050,00	2.439.950,00	jl. Encep kartawirya
103	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INTAN	621/SPKK-32/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.643.000,00	47.160.850,00	2.482.150,00	jl. Sriwijaya (lanjutan)
104	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-111/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.480.000,00	47.006.000,00	2.474.000,00	jl. Mukodar cibeureum
105	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-54/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.814.000,00	47.323.300,00	2.490.700,00	jl. Terusan Jenderal sudirman
106	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-93/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.451.000,00	46.978.450,00	2.472.550,00	jl. Kalasan II
107	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	621/SPKK-105/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.548.000,00	47.070.600,00	2.477.400,00	jl. Sadarmanah
108	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ADHITAMA SARANA	621/SPKK-102/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.391.000,00	46.921.450,00	2.469.550,00	jl. Padat karya

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
109	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/SPKK-96/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	Jl. Bakti I citeureum
110	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA CITRA UTAMA	621/SPKK-48/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.622.000,00	47.140.900,00	2.481.100,00	Jl. Sriwijaya 1
111	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUNCAK JAYA ABADI	621/SPKK-51/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.640.000,00	47.158.000,00	2.482.000,00	Jl. Sriwijaya 3
112	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. AKAR MANDIRI	621/SPKK-21/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.330.000,00	46.863.500,00	2.466.500,00	pengecatan marka jalan gandawijaya
113	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	621/SPKK-144/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.147.000,00	45.739.650,00	2.407.350,00	drainase jalan melong
114	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SUKONINDO	621/SPKK-66/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.115.000,00	46.659.250,00	2.455.750,00	drainase bapa ampi
115	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SEJAHTERA	621/SPKK-108/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	Jl. Singosari
116	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-72/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	45.883.800,00	43.589.610,00	2.294.190,00	pembuatan dan pengecatan median
117	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRA JAYA	621/SPKK-39/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.654.000,00	47.171.300,00	2.482.700,00	Jl. Taman raden saleh kel. Baros
118	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	621/SPKK-63/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.674.000,00	47.190.300,00	2.483.700,00	Jl. Muhammad yamin
119	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-30/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	47.063.000,00	44.709.850,00	2.353.150,00	Jl. Pemasangan median
120	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/SPKK-66/PmL-ABT/BM-DPU/2010	59.150.000,00	56.192.500,00	2.957.500,00	kelurahan citeureup
121	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621/SPKK-192/RPJ/BM-DPU/2010	48.006.000,00	45.605.700,00	2.400.300,00	ruas jalan puri cipageran
122	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA RAYA	621/SPKK-60/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	Jl. Lingkungan RW 08 Kel. Setiamanah
123	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. INTAN	510.2/5653.A/DPLK/XII/2010	29.719.000,00	28.233.050,00	1.485.950,00	kelurahan cigugur tengah
124	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. GURAT EMAS	510.2/5651.A/DPLK/XII/2010	49.465.000,00	46.991.750,00	2.473.250,00	bumi prima RW 22 kel. Cibabat
125	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SINAR TERANG	510.2/5660.A/DPLK/XII/2010	49.461.000,00	46.987.950,00	2.473.050,00	sungai citaman RW 16 kel. Cibabat
126	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. CIBAJA	510.2/5662.A/DPLK/XII/2010	49.387.000,00	46.917.650,00	2.469.350,00	pemakaman umum RW kel. Cibabat
127	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDHI BUANA	510.2/5652.A/DPLK/XII/2010	49.507.000,00	47.031.650,00	2.475.350,00	kel. Karangmekar RW 08 dan 06
128	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PERKASA UTAMA	510.2/5656.A/DPLK/XII/2010	49.466.000,00	46.992.700,00	2.473.300,00	sungai citaman RW 08 kel. Cibabat
129	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. MEGA	510.2/5654.A/DPLK/XII/2010	49.763.000,00	47.274.850,00	2.488.150,00	kel. Cigugur tengah RW 06
130	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SANTIKA PUTRA USAHA	027/Disdik-71-PL/SPK/X/2010	89.465.000,00	84.991.750,00	4.473.250,00	pembangunan ruang kelas baru SMPN 8
131	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TRIJAYA	027/Disdik-74-PL/SPK/X/2010	79.399.000,00	75.429.050,00	3.969.950,00	Rehab sedang SMPN 10
132	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SUKAHARJA	027/Disdik-76-PL/SPK/X/2010	79.500.000,00	75.525.000,00	3.975.000,00	Rehab sedang SMPN 9
133	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TEAM BANGUN PERKASA	027/Disdik-77-PL/SPK/X/2010	79.463.000,00	75.489.850,00	3.973.150,00	Rehab Berat SMPN 2
134	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGAH JAYA	027/Disdik-134-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	Rehab sedang SMPN 3
135	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-100-PL/SPK/X/2010	79.414.000,00	75.443.300,00	3.970.700,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMPN 5
136	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-101-PL/SPK/X/2010	79.562.000,00	75.583.900,00	3.978.100,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMP Muhammadiyah
137	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. KARANG NUNGGAL	027/Disdik-105-PL/SPK/X/2010	79.631.000,00	75.649.450,00	3.981.550,00	Rehab sedang 2 kelas SMPN 5
138	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SATRIA KARYA	027/Disdik-89-PL/SPK/X/2010	79.398.000,00	75.428.100,00	3.969.900,00	rehab berat 1 unit SDN utama mandiri 1
139	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TIGA PUTERI	027/Disdik-123-PL/SPK/X/2010	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	rehab sedang 1 unit SDN citeureup mandiri 1
140	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	027/Disdik-128-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	rehab sedang 1 unit SDN utama mandiri 1
141	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. PERKASA UTAMA	027/Disdik-119-PL/SPK/X/2010	79.320.000,00	75.354.000,00	3.966.000,00	rehab sedang 2 unit SMA Pasundan 2 cimahi
142	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGA	027/Disdik-116-PL/SPK/X/2010	79.406.000,00	75.435.700,00	3.970.300,00	rehab berat 1 unit SMAN 6
143	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SINAR TERANG	027/Disdik-132-PL/SPK/X/2010	39.100.000,00	37.145.000,00	1.955.000,00	rehab sedang 1 unit SMK Moh Toha
144	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. CIPTA JAYA KENCANA	027/Disdik-109-PL/SPK/X/2010	89.451.000,00	84.978.450,00	4.472.550,00	ruang kelas baru 1 unit SDN padasuka mandiri 3
73			Sub Total VI		5.211.437.800,00	4.950.865.910,00	260.571.890,00	
145	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DRANARIN ABADI	03/PPK-KIMRUM/SPK/PSR2M/X/2011 03 Oktober 2011	97.960.000,00	93.062.000,00	4.898.000,00	Pembuatan Sumur Resapan Rusunawa Melong
146	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPU-75-L/X/2011 03 Nopember 2011	147.900.000,00	140.505.000,00	7.395.000,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi RW 13 Kelurahan Utama (DBP)
147	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/DPU-04-L/III/2011 11 Agustus 2011	166.065.000,00	157.761.750,00	8.303.250,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 10 (DBP)

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
148	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MELATI	KPA/SP/DPU-05-LV/III/2011 11 Agustus 2011	167.736.000,00	159.349.200,00	8.386.800,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 16 (DBP)
149	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPU-54-L/IX/2011 05 September 2011	162.795.000,00	154.655.250,00	8.139.750,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margajaya Kel. Citeureup RW 2 (DBP)
150	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	KPA/SP/DPU-55-L/IX/2011 24 Agustus 2011	163.023.000,00	154.871.850,00	8.151.150,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margaluyu Kel. Cimahi RW 2 (DBP)
151	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV EKA SAPTA	03/PPK- KIMRUM/SPK/NS.CKC/XI/2011 01 Nopember 2011	76.985.000,00	73.135.750,00	3.849.250,00	Rehabilitasi Saluran Cikendal Kel. Cipageran
152	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	17/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.407.000,00	94.436.650,00	4.970.350,00	Jl. CIBOGO LAMPING (APBD KOTA CIMAHI)
153	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	48/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.857.000,00	90.114.150,00	4.742.850,00	Jl. KEBON KOPI (DBP JAWA BARAT)
154	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	43/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.019.000,00	90.268.050,00	4.750.950,00	Jl. GANIRAH (DBP JAWA BARAT)
155	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	KPA/SP/DPU-30-LV/III/2011 11 Agustus 2011	190.030.000,00	180.528.500,00	9.501.500,00	PEMBANGUNAN SALURAN DI JALAN MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
156	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	46/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.854.000,00	90.111.300,00	4.742.700,00	PERBAIKAN JALAN KEBON KOPI III KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
157	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	53/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.039.000,00	90.287.050,00	4.751.950,00	PERBAIKAN JALAN MELONG III KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
158	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	44/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.788.000,00	90.048.600,00	4.739.400,00	PERBAIKAN JALAN SADARMANAH KEL. CIBEKER KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
159	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	55/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.657.000,00	89.924.150,00	4.732.850,00	PERBAIKAN Jl. HMS MINTAREDJA IV KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
160	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	47/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.649.000,00	89.916.550,00	4.732.450,00	PERBAIKAN Jl. KEBON KOPI IV KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
161	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	54/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.800.000,00	90.060.000,00	4.740.000,00	PERBAIKAN Jl. MELONG IV KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
162	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	45/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.168.000,00	90.409.600,00	4.758.400,00	PERBAIKAN Jl. SADARMANAH I KEL. CIBEKER CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
163	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	KPA/SP/DPU-25-LV/III/2011 04 Agustus 2011	197.903.000,00	188.007.850,00	9.895.150,00	Jl. SETASION (APBD KOTA CIMAHI)
164	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	KPA/SP/DPU-23-LV/III/2011 04 Agustus 2011	278.701.000,00	264.765.950,00	13.935.050,00	Jl. URIP SUMOHARDJO (APBD KOTA CIMAHI)
165	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	83/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.293.000,00	88.628.350,00	4.664.650,00	Jl. DJULAEHA (DBP JAWA BARAT)
166	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	86/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.238.000,00	88.576.100,00	4.661.900,00	Jl. SRIWIJAYA (DBP JAWA BARAT)
167	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	KPA/SP/DPU-37-LV/III/2011 05 Agustus 2011	148.124.000,00	140.717.800,00	7.406.200,00	Jl. CIAWITALI (APBD KOTA CIMAHI)
168	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GUDITA	69/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.090.000,00	89.385.500,00	4.704.500,00	Jl. SANGKURIANG (DBP JAWA BARAT)
169	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZA PRATAMA	56/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.952.000,00	89.254.400,00	4.697.600,00	Jl. CIHANJUANG (DBP JAWA BARAT)
170	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	57/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.941.000,00	89.243.950,00	4.697.050,00	Jl. PESANTREN (DBP JAWA BARAT)
171	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	72/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.065.000,00	89.361.750,00	4.703.250,00	Jl. CIAWITALI (DBP JAWA BARAT)
172	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	74/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.102.000,00	89.396.900,00	4.705.100,00	PERBAIKAN Jl. ENCEP KARTAWIRYA III KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
173	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	76/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.979.000,00	89.280.050,00	4.698.950,00	PERBAIKAN Jl. SANGKURIANG III KEL. PADASUKA KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)
174	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	60/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.170.000,00	89.461.500,00	4.708.500,00	PERBAIKAN Jl. CIHANJUANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
175	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	61/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.045.000,00	89.342.750,00	4.702.250,00	PERBAIKAN Jl. PESANTREN III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
176	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	62/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.180.000,00	89.471.000,00	4.709.000,00	PERBAIKAN Jl. DEMANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
177	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRI MANDIRI	68/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN Jl. MARGALUYU III KEL. CIMAHI KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)
178	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	75/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.911.000,00	89.215.450,00	4.695.550,00	PERBAIKAN Jl. ENCEP KARTAWIRYA IV KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
179	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	63/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN JI. CIHANJUANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
180	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RINJANI	64/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.987.000,00	89.287.650,00	4.699.350,00	PERBAIKAN JI. PESANTREN IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
181	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	65/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.084.000,00	89.379.800,00	4.704.200,00	PERBAIKAN JI. DEMANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
182	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	78/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.981.000,00	89.281.950,00	4.699.050,00	PERBAIKAN JI. RANCABALI KEL. PASIRKALIKI KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
183	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA KONSTRUKSI	12/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.829.000,00	94.837.550,00	4.991.450,00	Jalan Lingkungan kebon Jeruk (APBD Kota Cimahi)
184	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/16/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.635.000,00	47.153.250,00	2.481.750,00	JALING PASIRKALIKI
185	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	621/17/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.853.000,00	47.360.350,00	2.492.650,00	JALING CIPAGERAN RW. 05
186	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. MADYA KARYA	510.2/4260/DKP/X/2011	296.698.000,00	281.863.100,00	14.834.900,00	Pembuatan Sumur Artesis Cibeureum
187	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. WIDYA TEKNIK	510.2/4261/DKP/X/2011	292.697.000,00	278.062.150,00	14.634.850,00	Pembuatan Sumur Artesis Leuwigajah
188	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Permata	027/Disdikpora- 25 -L/SPK/X/2011	113.759.000,00	108.071.050,00	5.687.950,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustk SMP PGRI 3
189	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV TRIJAYA	027/Disdikpora-27-L/SPK/X/2011	227.335.000,00	215.968.250,00	11.366.750,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehab Ruang Kelas SDN Cimahi Mandiri 5
190	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/Disdikpora-15-X/2011	106.254.000,00	100.941.300,00	5.312.700,00	Pembangunan ruang kelas lanjutan, rehab, mushola, WC
191	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Mutiara Teknik	027/disdikpora-114-PL/SPK/2011	24.878.000,00	23.634.100,00	1.243.900,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustakaan SMP Darussurur
47	Sub Total VII				5.608.436.000,00	5.328.014.200,00	280.421.800,00	
192	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. DILAGGA	027/ Disdikpora/112-PL/SPK/X/2012	14.813.000,00	14.072.350,00	740.650,00	Pemagaran SDN Cibeureum Mandiri 1
193	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. LEMBANG ABADI	027/ Disdikpora/115-PL/SPK/X/2012	15.657.000,00	14.874.150,00	782.850,00	Pemagaran SDN Melong Mandiri 2
194	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. Bina Kontruksi	027/ Disdikpora-025 -L/SPK/IX/2012	244.954.000,00	232.706.300,00	12.247.700,00	Pembuatan Ruang Kelas Baru, Penyelesaian Ruang Kelas, Pemasangan Trails dan Pekerjaan MCK Lanjutan
195	2012	Dinas Kesehatan	CV. FIMOS KARYA	36/SPK/PMB.PKM.CIMSEL(LANJUTA N)/KPA/DINKES-PL/VII/2012	49.242.000,00	46.779.900,00	2.462.100,00	Pembangunan Puskesmas Cimahi Selatan (Lanjutan)
196	2012	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA JAYA KENCANA	05/PPK/Pojok Laktasi PKM Melong/SPK/Yanmed/Dinkes/VII/2012	49.725.000,00	47.238.750,00	2.486.250,00	Pembangunan Rehab untuk Pojok Laktasi
197	2012	Dinas Kesehatan	CV. NAGA MAS JAYA	02/PPK/Sp.Pem.Pustu Cimenteng_Lanjutan/DINKES/VIII/2012	507.687.000,00	497.467.260,00	10.219.740,00	Pembangunan Puskesmas Pembantu Cimenteng Sehat (Lanjutan)
198	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	52/SPK/Rumdin Medis/KPA/DINKES/X/2012	217.652.000,00	201.343.336,00	16.308.664,00	Pembangunan Rumah Dinas Medis
199	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	54/SPK/Rumdin Paramedis/KPA/DINKES/X/2012	265.557.000,00	191.216.973,00	74.340.027,00	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
200	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/23/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	269.681.000,00	256.196.950,00	13.484.050,00	Jl. PADAT KARYA
201	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/03/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.202.000,00	187.341.900,00	9.860.100,00	Jl. IBU GANIRAH -WARUNG CONTONG
202	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/05/SPK/RPJ/DPU-BM/II/2012 TANGGAL, 27 FEBRUARI 2012	99.154.000,00	94.196.300,00	4.957.700,00	SALURAN JI. IBU GANIRAH
203	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/27/SP/RPJ-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 09 OKTOBER 2012	99.187.000,00	94.227.650,00	4.959.350,00	JL. CISEUPAN
204	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	621/15/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	570.084.000,00	541.579.800,00	28.504.200,00	Jl. DAENG M. ARDIWINATA

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
205	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/01/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.556.000,00	187.678.200,00	9.877.800,00	Jl. MARTASIK
206	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/26/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.208.000,00	94.247.600,00	4.960.400,00	Jl. RANCABALI
207	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/29/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.341.000,00	94.373.950,00	4.967.050,00	Jl. KAMARUNG PAMOYANAN
208	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/02/SP/RPJ-L-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 05 OKTOBER 2012	542.258.000,00	515.145.100,00	27.112.900,00	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. SANGKURIANG
209	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/16/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.411.000,00	94.440.450,00	4.970.550,00	JALING PADASUKA (RW. 15)
210	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/07/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.334.000,00	93.417.300,00	4.916.700,00	JALING MELONG (RW. 29)
211	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/28/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.540.000,00	94.563.000,00	4.977.000,00	JALING GUNUNG BATU DALAM
212	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/69/SPK/RPJ/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 24 AGUSTUS 2012	99.379.000,00	94.410.050,00	4.968.950,00	JALING KARANG ANYAR CIGUGUR
213	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/72/SPK/RPJ/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 01 OKTOBER 2012	99.213.000,00	94.252.350,00	4.960.650,00	JALAN KEL. CIBEBER
214	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/34/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2012 TANGGAL, 01 JUNI 2012	98.700.000,00	93.765.000,00	4.935.000,00	JALING UTAMA (RW 16)
215	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	621/18/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.126.000,00	94.169.700,00	4.956.300,00	JALING KARANG MEKAR (PANDAY)
216	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PRIMA JAYA	621/56/SPK/RPJ/DPU-BM/VII/2012 TANGGAL, 10 JULI 2012	99.302.000,00	94.336.900,00	4.965.100,00	JALING RW. 20 CIPAGERAN
217	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/08/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.203.000,00	93.292.850,00	4.910.150,00	JALING KELURAHAN
218	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABDI JAYA	621/04/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.762.000,00	47.273.900,00	2.488.100,00	JALING NATA ENDAH KEL. CIBABAT
219	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INDRA NUGRAHA	621/17/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	JALING KEL. CIBEBER
220	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/06/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	99.121.000,00	94.164.950,00	4.956.050,00	JALAN GATOT SUBROTO
221	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ESA KARYA	621/24/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	JALAN DAYANG SUMBI
222	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NOVETA SAMUEL	02/PPK/SP-PKSPP/DPU/X/21012	294.524.000,00	279.797.800,00	14.726.200,00	Pembangunan Lanjutan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
223	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	03/PPK-KIMRUM/SPK/PMA/IV/2012	99.518.000,00	94.542.100,00	4.975.900,00	Penyempurnaan Mesjid Agung
224	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	02/PPK/SP-RLKCBT/DPU/X/21012	369.682.000,00	351.197.900,00	18.484.100,00	Rehabilitasi Lanjutan Kantor Kelurahan Cibabat
225	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/KNP-PDSK/VI/2012	29.581.000,00	28.101.950,00	1.479.050,00	Pemasangan Kanopi Kantor Kelurahan Padasuka
226	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. FAJAR FIRDAUS	02/PPK-KIMRUM/SPK/TPT/MLNG/VI/21012	99.201.000,00	94.240.950,00	4.960.050,00	Perbaikan TPT di RW. 22 Kel. Melong
227	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-LWGV/2012	87.559.000,00	83.181.050,00	4.377.950,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Leuwigajah
228	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-CBBT/VI/2012	87.477.000,00	83.173.450,00	4.303.550,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Cibabat
229	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	02/PPK/SP-RJILT/DPU/X/21012	140.789.000,00	133.749.550,00	7.039.450,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwiteureup
230	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	03/PPK-KIMRUM/SPK/NSC-LWGV/21012	99.495.000,00	94.520.250,00	4.974.750,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Kel. Leuwigajah
231	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NS.CBBR/VIII/2012 ADDM.: 076/01/PPK.KIMRUM/ADD/NS.CBBR/VII/2012	98.922.000,00	93.975.900,00	4.946.100,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Cibeber

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
232	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NSS.CTMN/VII/2012	99.470.000,00	94.496.500,00	4.973.500,00	Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Sungai Citaman
233	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KHARISMA JAYA MANDIRI	02/PPK/SP-PLKB/DPU/X/21012	482.012.000,00	457.911.400,00	24.100.600,00	Penataan Lapangan Krida Bakti (DBP)
234	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TIGA SAUDARA	02/PPK/SP/DPU-59-L/XI/2012	397.991.000,00	378.091.450,00	19.899.550,00	Penataan Lingkungan Kawasan Rusun Leuwigajah
235	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/ART-LWG/VII/2012	49.413.000,00	46.942.350,00	2.470.650,00	Penyempurnaan Artesis RW. 16 Kelurahan Leuwigajah
236	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	03/PPK-KIMRUM/SPK/PGR-RLVI/2012	99.481.000,00	94.506.950,00	4.974.050,00	Pemasangan Pagar Bagian Depan Rusunawa Leuwigajah
237	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIJAYA KUSUMAH	03/PPK-KIMRUM/FAN-PIPA/XI/2012	49.492.000,00	47.017.400,00	2.474.600,00	Pemasangan Pipa Distribusi dan Kelengkapannya Rusunawa Leuwigajah
238	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV KURNIA PRIMA JAYA	510.2/3965/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	198.974.000,00	189.025.300,00	9.948.700,00	Penataan Taman Median Jalan Mintaredja (Tahap II)
239	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV INSUN MEDAL LESTARI	510.2/2366.A/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	148.261.000,00	140.847.950,00	7.413.050,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota (Padasuka)
48			Sub Total VIII		7.610.046.000,00	7.178.290.369,00	431.755.631,00	
			JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		25.410.986.575,00	24.091.061.777,00	1.319.924.798,00	

Pemerintah Kota Cimahi
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	PEMBAYARAN UTANG TAHUN 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
1	Saldo Utang Retensi	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00
	Total	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
Rincian UTANG KJP dan KDN
Per 31 Desember 2025

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO
KDN	37.745.970	469.110.525	468.063.765	38.792.730
KJP	162.339.800	2.119.703.500	2.113.325.100	168.718.200
	200.085.770	2.588.814.025	2.581.388.865	207.510.930

UTANG KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF (KDN)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
17 Januari 2025	KDN Desember 2024		24.350.970	(24.350.970)
17 Januari 2025	KDN Arus Balik Desember 2024		13.395.000	(37.745.970)
				(37.745.970)
03 Februari 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Desember 2024 - 32.77/04.0/000013/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/M/2/2025	37.745.970		-
05 Maret 2025	KDN TPA Januari 2025		22.926.540	(22.926.540)
05 Maret 2025	KDN Arus Balik Januari 2025		13.155.000	(36.081.540)
12 Maret 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Januari 2025- 32.77/04.0/000035/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/M/3/2025	36.081.540		-
18 Maret 2025	KDN Februari 2025		21.698.460	(21.698.460)
18 Maret 2025	KDN Arus Balik Februari 2025		12.450.000	(34.148.460)
25 Maret 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Februari 2025 - 32.77/04.0/000047/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P1/3/2025	34.148.460		-
25 April 2025	KDN Maret 2025		22.580.250	(22.580.250)
25 April 2025	KDN Arus Balik Maret 2025		12.945.000	(35.525.250)
29 Mei 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Maret 2025- 32.77/04.0/000083/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P3/5/2025	35.525.250		-
23 Mei 2025	KDN April 2025		22.244.415	(22.244.415)
23 Mei 2025	KDN Arus Balik April 2025		12.645.000	(34.889.415)
13 Juni 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan April 2025- 32.77/04.0/000083/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P3/5/2025	34.889.415		-
30 Juni 2025	KDN Mei 2025		24.439.725	(24.439.725)
30 Juni 2025	KDN Arus Balik Mei 2025		13.800.000	(38.239.725)
15 Juli 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Mei 2025- 32.77/04.0/000130/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/7/2025	38.239.725		-
25 Juli 2025	KDN Juni 2025		25.189.605	(25.189.605)
25 Juli 2025	KDN Arus Balik Juni 2025		11.850.000	(37.039.605)
22 Agustus 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Juni 2025- 32.77/04.0/000152/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/8/2025	37.039.605		-
22 Agustus 2025	KDN Juli 2025		37.142.535	(37.142.535)
13 Agustus 2025	KDN Arus Balik Juli 2025		14.145.000	(51.287.535)
11 September 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Juli 2025- 32.77/04.0/000170/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/9/2025	51.287.535		-
02 Oktober 2025	KDN Agustus 2025		29.695.380	(29.695.380)
02 Oktober 2025	KDN Arus Balik Agustus 2025		12.165.000	(41.860.380)
16 Oktober 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Agustus 2025- 32.77/04.0/000194/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/10/2025	41.860.380		-
30 Oktober 2025	KDN September 2025		29.709.615	(29.709.615)
30 Oktober 2025	KDN Arus Balik September 2025		11.700.000	(41.409.615)

19 November 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan September 2025-32.77/04.0/000213/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/PR/11/2025	41.409.615		-
05 Desember 2025	KDN Oktober 2025		31.786.320	(31.786.320)
05 Desember 2025	KDN Arus Balik Oktober 2025		11.490.000	(43.276.320)
23 Desember 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Oktober 2025-32.77/04.0/000247/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	43.276.320		-
22 Desember 2025	KDN November 2025		25.234.950	(25.234.950)
22 Desember 2025	KDN Arus Balik November 2025		11.325.000	(36.559.950)
29 Desember 2025	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan November 2025-32.77/04.0/000252/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	36.559.950		-
22 Januari 2026	KDN Desember 2025		25.307.730	(25.307.730)
22 Januari 2026	KDN Arus Balik Desember 2025		13.485.000	(38.792.730)
				(38.792.730)
				(38.792.730)

UTANG KOMPENSASI JASA PELAYANAN (KJP)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
17 Januari 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2024		162.339.800	(162.339.800)
03 Februari 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Desember 2024-32.77/04.0/000012/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/M/2/2025	162.339.800		-
05 Maret 2025	Kompensasi Jasa Pelayan (KJP) Januari 2025		152.843.600	(152.843.600)
12 Maret 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Januari 2025-32.77/04.0/000036/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/M/3/2025	152.843.600		-
18 Maret 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) bulan Februari 2025		144.656.400	(144.656.400)
24 Maret 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Februari 2025-32.77/04.0/000046/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P1/3/2025	144.656.400		-
25 April 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Maret 2025		150.535.000	(150.535.000)
29 Mei 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Maret 2025-32.77/04.0/000082/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P3/5/2025	150.535.000		-
23 Mei 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan April 2025		148.296.100	(148.296.100)
13/16/2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan April 2025-32.77/04.0/000104/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/6/2025	148.296.100		-
30 Juni 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Mei 2025		162.931.500	(162.931.500)
15 Juli 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Mei 2025-32.77/04.0/000129/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/7/2025	162.931.500		-
25 Juli 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juni 2025		167.930.700	(167.930.700)
22 Agustus 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Juni 2025-32.77/04.0/000151/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/8/2025	167.930.700		-
22 Agustus 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juli 2025		247.616.900	(247.616.900)
11 September 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Juli 2025-32.77/04.0/000169/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/9/2025	247.616.900		-
02 Oktober 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Agustus 2025		197.969.200	(197.969.200)

16 Oktober 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Agustus 2025-32.77/04.0/000195/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/P4/10/2025	197.969.200		-
30 Oktober 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan September 2025		198.064.100	(198.064.100)
19 November 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan September 2025-32.77/04.0/000214/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/PR/11/2025	198.064.100		-
05 Desember 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Oktober 2025		211.908.800	(211.908.800)
24 Desember 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Oktober 2025-32.77/04.0/000248/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	211.908.800		-
22 Desember 2025	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan November 2025		168.233.000	(168.233.000)
29 Desember 2025	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan November 2025-32.77/04.0/000253/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	168.233.000		-
22 Januari 2026	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2025		168.718.200	(168.718.200)
				(168.718.200)

**Penjelasan Mutasi Penyesuaian Pendapatan LRA - Pendapatan LO
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025**

A	Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah LO	
	Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun Berjalan	330.345.321.948,00
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak Hotel	(334.560.288,00)
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak Resto	(31.754.284.713,00)
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak Reklame	(3.093.664.000,00)
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak Hiburan	
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak Parkir	
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak Pajak Air Tanah	(36.324.630.040,00)
	PembayaranPiutang 2025 - Pajak PBB	(67.737.087.188,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan Pajak Tahun 2025	147.409.554.729,00
	Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun Berjalan	338.510.650.448,00
B	Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah LO	
	Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun Berjalan	231.412.239.830,00
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /PBG	(3.081.358.896,00)
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Laboratorium (DLH)	(1.003.914.000,00)
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC) dan Pertokoan	(832.876.300,00)
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	(3.543.152.250,00)
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Izin Trayek (Dishub)	
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(173.528.831.204,00)
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	(6.625.713.900,00)
	Pembayaran Piutang 2023s/d2024 - Pelayanan Persampahan	(1.735.911.346,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan 2024 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /PBG	2.672.452.440,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2024 - Laboratorium (DLH)	989.603.000,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2024 - Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	811.570.600,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2024 - Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	3.664.910.850,00
	Penambahan Piutang 2023s/d2024 - Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	171.110.129.159,00
	Penambahan Piutang 2023s/d2024 - Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)	6.769.710.100,00
	Penambahan Piutang 2023s/d2024 - Pelayanan Persampahan	1.765.711.346,00
	Pendapatan Reklas dari Pendapatan retribusi ke Lain2 PAD yg SAH BLUD Air Minum -DPKP	(170.095.410,00)
	Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun Berjalan	228.674.474.019,00
C	Penjelasan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	
	Pendapatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Tahun Berjalan	9.481.160.420,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO Tahun Berjalan	9.481.160.420,00
D	Penjelasan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LRA Tahun Berjalan	8.221.418.603,00
	Pembayaran Piutang 2023 - Kontribusi Cimahi Mall	
	Pembayaran Piutang 2023 - Bunga TDF	
	Pembayaran Piutang 2023 - BLUD Air Minum	
	Pembayaran Piutang 2023 - RSUD	
	Pembayaran Piutang 2023 - Dinas Kesehatan	
	Penambahan Piutang Ketetapan Lainnya Tahun 2024	
	Pendapatan dimuka Pengakuan	1.572.152.848,32
	Pendapatan dimuka Ketetapan	- 1.235.540.665,93
	Pendapatan Reklas dari Pendapatan retribusi ke Lain2 PAD yg SAH BLUD Air Minum -DPKP	170.095.410,00
	Pelunasan TGR	- 22.186.639,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO Tahun Berjalan	8.705.939.556,39

E	Penjelasan Dana Bagi Hasil Pajak LO	
	Dana Bagi Hasil Pajak LRA Tahun Berjalan	63.861.538.300,00
	Pengakuan PBB Tahun 2025	- 1.102.530.000,00
	Pengakuan PPh 21 Tahun 2025	- 4.033.769.000,00
	Pelunasan PPh 25 dan Pasal 29 tahun 2025	- 423.005.000,00
	Pelunasan DBHCHT Tahun 2025	- 239.655.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar PBB Tahun 2025	1.904.694.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar PPh 21 tahun 2025	21.903.970.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar PPh 25/29 Tahun 2025	5.394.481.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar Cukai Tahun 2025	2.189.116.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak LO Tahun Berjalan	89.454.840.300,00
F	Penjelasan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA Tahun Berjalan	31.966.305.000,00
	Pelunasan SDA Minyak Bumi 2025	- 109.429.000,00
	Pelunasan Gas Alam 2025	- 782.863.000,00
	Pelunasan Panas Bumi 2025	- 6.672.219.000,00
	Pelunasan Minerba 2025	- 433.810.000,00
	Pelunasan Kehutanan 2025	- 11.843.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar SDA Minyak Bumi 2025	2.219.990.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar Gas Alam 2025	-
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar Panas Bumi 2025	12.805.142.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar Minerba 2025	704.349.000,00
	Pengakuan Piutang Kurang Bayar Kehutanan 2025	19.113.000,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO Tahun Berjalan	39.704.735.000,00
G	Penjelasan Pendapatan DAU LO	
	Pendapatan Pendapatan DAU LRA Tahun Berjalan	593.119.320.956,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DAU LO Tahun Berjalan	593.119.320.956,00
H	Penjelasan Pendapatan DAK LO	
	Pendapatan Pendapatan DAK LRA Tahun Berjalan	212.616.341.828,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DAK LO Tahun Berjalan	212.616.341.828,00
I	Penjelasan Pendapatan DID LO	
	Pendapatan Pendapatan DID LRA Tahun Berjalan	15.105.852.000,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DID LO Tahun Berjalan	15.105.852.000,00
J	Penjelasan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA Tahun Berjalan	78.374.055.994,00
	Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor 2024	- 2.680.613.490,00
	Pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2024	- 2.474.810.100,00
	Pelunasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2024	- 2.738.740,00
	Pelunasan Pajak Air Permukaan 2024	- 22.772.299,00
	Pelunasan Pajak Rokok 2024	- 804.748.481,00
	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 2025	587.353.740,00
	Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2025	128.133.150,00
	Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2025	1.264.208,00
	Pendapatan Pajak Air Permukaan 2025	10.848.018,00
	Pendapatan Pajak Rokok 2025	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO Tahun Berjalan	73.115.972.000,00
K	Penjelasan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LO	
	Pendapatan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LRA Tahun Berjalan	8.663.760.000,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LO Tahun Berjalan	8.663.760.000,00
L	Penjelasan Pendapatan Hibah LO	
	Pendapatan Hibah LRA Tahun Berjalan	-
	Dinkes	8.100.903.705,30
	RSUD	1.567.032.684,00
	DPKP	47.427.434.000,00
	BPBD	1.789.765.985,00
	DP3KB	210.885.295,00
	SETDA	680.000.000,00
	BPKAD	11.735.000.000,00
	DISPANGTAN	322.542.000,00
	Pendapatan Hibah LO Tahun Berjalan	71.833.563.669,30

**Penjelasan Mutasi Penyesuaian Belanja - Beban
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024**

A	Penjelasan Beban Pegawai	
	Belanja Pegawai LRA Tahun Berjalan	684.943.855.376,00
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD Air Minum	2.750.920,00
	Beban Pegawai LO Tahun Berjalan	684.946.606.296,00
B	Penjelasan Beban Persediaan	
	Belanja Barang LRA Tahun Berjalan	145.071.021.986,00
	<i>Belanja Persediaan dari BLUD</i>	85.650.416.311,00
	<i>Belanja Persediaan dari BOS</i>	24.723.798.376,00
	<i>Belanja BOK - Terdapat di LRA</i>	(2.215.143.167,00)
	<i>BTT yang menjadi Persediaan</i>	204.813.500,00
	<i>Belanja Persediaan Dari Utang</i>	
	<i>Persediaan dari Pendapatan Hibah</i>	10.132.731.533,30
	<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan mesin ke Persediaan</i>	619.478.951,00
	<i>Reklasifikasi dari Belanja Jasa-Perjalanan Dinas</i>	951.936,00
	<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin</i>	(134.423.400,00)
	<i>Reklasifikasi ke belanja Jasa</i>	(2.700.000,00)
	<i>Koreksi Persediaan</i>	3.412.768.349,46
	<i>Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca 2025)</i>	(34.888.099.141,58)
	<i>Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca)</i>	31.884.978.888,97
	<i>Koreksi Persediaan DLH</i>	(3.897.000,00)
	<i>Koreksi Persediaan Disdukcapil</i>	(3.995.875,00)
	<i>Koreksi Persediaan RSUD</i>	886,00
	Beban Persediaan LO Tahun Berjalan	264.452.702.134,14
C	Penjelasan Beban Jasa	
	Belanja Jasa LRA Tahun Berjalan	275.195.540.880,00
	<i>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	<i>23.801.514.853,00</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	40.066.478.756,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa BLUD</i>	197.422.239.293,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa BOK</i>	330.662.219,00
	<i>Belanja Persediaan dari BOS</i>	(15.600.803.356,00)
	<i>Belanja Persediaan dari BLUD</i>	(83.435.273.144,00)
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BOS</i>	(1.175.724.642,00)
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BLUD</i>	(8.387.649.122,00)
	<i>Belanja Perjalanan Dinas dari BOS</i>	(4.170.391.298,00)
	<i>Belanja Perjalanan Dinas dari BLUD</i>	(688.736.564,00)
	<i>Reklas Ke Belanja Modal</i>	(125.798.950,00)
	<i>Reklas dari Belanja Modal</i>	185.857.600,00
	<i>Reklas Ke Persediaan</i>	2.700.000,00
	<i>Reklas dari Persediaan</i>	(951.936,00)
	<i>Biaya Dibayar Dimuka 2024</i>	3.671.482.424,39
	<i>Biaya Dibayar Dimuka 2025</i>	(6.484.071.795,14)
	<i>Utang Belanja 2024</i>	(1.408.686.621,00)
	<i>Utang belanja 2025</i>	1.274.677.317,00
	<i>Utang Lainnya 2024</i>	(2.581.388.865,00)
	<i>Utang Lainnya 2025</i>	3.319.595.695,00
	<i>Aset Tidak Berwujud dari beban jasa</i>	(97.672.500)
	<i>Aset Tidak Berwujud Ke beban jasa</i>	174.698.183,00
	<i>Koreksi Pencatatan Hibah</i>	(730.781.670,00)
	<i>Koreksi Pencatatan Jurnal Utang Disbudparpora</i>	125.798.950,00
	<i>Koreksi Pencatatan Jurnal Persediaan Setwan</i>	951.936,00
	<i>Koreksi Biaya Dibayar Dimuka dan Pembayaran Utang dari Belanja Pemeliharaan pada DPKP</i>	(15.693.132,92)
	Beban Jasa LRA Tahun Berjalan	420.668.574.510,33

D	Penjelasan Beban Pemeliharaan	
	Belanja Pemeliharaan LRA Tahun Berjalan	17.836.274.471,00
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BOS</i>	1.175.724.642,00
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BLUD</i>	8.391.018.527,00
	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Ke Aset Tetap	(1.195.597.672,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Pemeliharaan	55.052.925,00
	Koreksi Pembayaran Utang-Beban Jasa dari Belanja Pemeliharaan pada DPKP	(2.806.080,00)
	Reklas Beban Pemeliharaan BOS ke Gedung dan Bangunan	(370.468.254,00)
	Beban Pemeliharaan LO Tahun Berjalan	25.889.198.559,00
E	Penjelasan Beban Perjalanan Dinas	
	Belanja Perjalanan Dinas LRA Tahun Berjalan	35.343.805.203,00
	Belanja Perjalanan Dinas dari BOS	4.170.391.298,00
	Belanja Perjalanan Dinas dari BLUD	688.736.564,00
	Reklas Ke Persediaan (Setwan)	(951.936,00)
	Beban Perjalanan Dinas LO Tahun Berjalan	40.201.981.129,00
F	Penjelasan Beban Bunga	
	Belanja Bunga LRA Tahun Berjalan	46.224.179,00
	Reklas Pembayaran Bagian Lancar Utang Bunga 2025 dari beban bunga	(30.646.799,67)
	Beban Bunga LO Tahun Berjalan	15.577.379,33
G	Penjelasan Beban Hibah	
	Belanja Hibah LRA Tahun Berjalan	48.589.784.677,00
	Beban hibah (Pengakuan Utang hibah Polres)	730.781.670,00
	Beban Hibah LO Tahun Berjalan	49.320.566.347,00
H	Penjelasan Beban Bantuan Soisal	
	Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun Berjalan	4.567.372.000,00
	Bansos dari BTT	147.145.000,00
	Beban Bantuan Sosial LO Tahun Berjalan	4.714.517.000,00
I	Penjelasan Beban Luar Biasa	
	Belanja BTT LRA Tahun Berjalan	5.086.375.920,00
	Reklas ke Beban Persediaan	- 204.813.500,00
	Reklas ke Aset tetap peralatan dan mesin	- 4.315.698.770,00
	Reklas ke Bansos	- 147.145.000,00
	Beban Luar Biasa LO Tahun Berjalan	418.718.650,00

Rincian Beban Jasa
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

8.1.02.	Beban Jasa-LO	420.668.574.510,33
8.1.02.02	Beban Jasa	377.412.685.978,33
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	262.538.038.510,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	515.103.662,00
8.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	225.991.615,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.719.460.891,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	852.650.000,00
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	22.320.000,00
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	274.296.000,00
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	316.200.000,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-
8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	-
8.1.02.02.01.0010	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.500.000,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.100.000,00
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	493.650.000,00
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	12.789.179.700,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	68.700.230.559,00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	662.884.911,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.599.657.115,00
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	560.000,00
8.1.02.02.01.0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	528.735.000,00
8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	465.560.000,00
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	5.613.661.222,00
8.1.02.02.01.0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.379.460.000,00
8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.000.000,00
8.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	167.560.000,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.665.606.363,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	9.213.759.948,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	749.025.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.854.783.706,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	6.682.947.477,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	14.563.636.081,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	13.118.424.452,00
8.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka	-
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	2.303.354.596,00
8.1.02.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	10.800.000,00
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	169.290.000,00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	340.101.350,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	607.100.000,00
8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias	5.000.000,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	423.165.931,00
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	114.079.000,00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.934.500,00
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	517.615.000,00
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	572.766.200,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	132.000.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	6.314.359.785,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	5.115.579.998,00
8.1.02.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	83.312.500,00
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	536.611.377,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.445.989.250,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.564.193.767,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	276.408.342,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	287.885.083,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	16.801.385.292,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	755.874.450,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.696.942.756,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	218.057.827,00
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya	37.325.300,00
8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	-
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	595.982.567,00
8.1.02.02.01.0070	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan	69.427.288,00
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	6.257.062.100,00
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	110.682.050,00
8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	10.120.000,00
8.1.02.02.01.0079	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	18.518.500,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	13.532.665.000,00

Rincian Beban Jasa
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

8.1.02.	Beban Jasa-LO	420.668.574.510,33
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	146.880.000,00
8.1.02.02.01.0083	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	6.380.000,00
8.1.02.02.01.0084	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	5.940.000,00
8.1.02.02.01.0085	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	6.160.000,00
8.1.02.02.01.0086	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	146.285.000,00
8.1.02.02.01.0088	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	65.340.000,00
8.1.02.02.01.0090	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	25.519.999,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	52.082.201.445,52
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	40.214.115.500,00
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	5.143.945.600,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.912.510.779,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	343.926.021,32
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	369.647.787,68
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	2.018.855.757,52
8.1.02.02.02.0009	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	79.200.000,00
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	388.668.555,55
8.1.02.02.03.0017	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	6.600.000,00
8.1.02.02.03.0023	Beban Sewa Tanah untuk Jalan	340.280.592,60
8.1.02.02.03.0025	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	26.704.750,00
8.1.02.02.03.0026	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	9.567.212,95
8.1.02.02.03.0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya	5.516.000,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	12.724.197.456,00
8.1.02.02.04.0010	Beban Sewa Alat Pengangkat	-
8.1.02.02.04.0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-
8.1.02.02.04.0022	Beban Sewa Electric Generating Set	-
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.342.800.000,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.655.797.200,00
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	166.292.500,00
8.1.02.02.04.0039	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-
8.1.02.02.04.0082	Beban Sewa Alat Ukur Universal	96.825.300,00
8.1.02.02.04.0096	Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	39.000.000,00
8.1.02.02.04.0102	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	-
8.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	- 2.892.499,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.412.767.665,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	854.218.000,00
8.1.02.02.04.0120	Beban Sewa Alat Pembersih	-
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	197.179.290,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	938.210.000,00
8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	-
8.1.02.02.04.0202	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-
8.1.02.02.04.0308	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	-
8.1.02.02.04.0309	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	-
8.1.02.02.04.0315	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	-
8.1.02.02.04.0316	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	-
8.1.02.02.04.0317	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	-
8.1.02.02.04.0318	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	-
8.1.02.02.04.0404	Beban Sewa Komputer Jaringan	24.000.000,00
8.1.02.02.04.0406	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	-
8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	-
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.255.721.333,36
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.926.110.416,70
8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang	2.439.059.999,99
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.431.894.250,00
8.1.02.02.05.0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	555.978.000,00
8.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.442.000,00
8.1.02.02.05.0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	37.500.000,00
8.1.02.02.05.0018	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	43.820.000,00
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-
8.1.02.02.05.0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	-
8.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman	-
8.1.02.02.05.0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	802.916.666,67
8.1.02.02.05.0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	-

Rincian Beban Jasa
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

8.1.02.	Beban Jasa-LO	420.668.574.510,33
8.1.02.02.06	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.111.895,40
8.1.02.02.06.0007	Beban Sewa Jalan Kereta Api	19.111.895,40
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	421.040.000,00
8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	29.900.000,00
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	391.140.000,00
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	2.737.299.536,58
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	7.046.808,00
8.1.02.02.08.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	2.730.252.728,58
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.065.174.037,00
8.1.02.02.09.0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	267.442.997,00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.350.373,00
8.1.02.02.09.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	4.158.375,00
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	74.266.551,00
8.1.02.02.09.0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	-
8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	966.624.907,00
8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.521.538.900,00
8.1.02.02.09.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	619.830.680,00
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	564.521.580,00
8.1.02.02.09.0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	-
8.1.02.02.09.0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	91.259.445,00
8.1.02.02.09.0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	915.409.841,00
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	97.588.699,00
8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	60.276.264,00
8.1.02.02.09.0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	39.264.030,00
8.1.02.02.09.0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	117.075.723,00
8.1.02.02.09.0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-
8.1.02.02.09.0026	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	-
8.1.02.02.09.0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	798.460.070,00
8.1.02.02.09.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	877.105.602,00
8.1.02.02.09.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	-
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.951.413.403,00
8.1.02.02.10.0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	139.769.535,00
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-
8.1.02.02.10.0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	341.924.450,00
8.1.02.02.10.0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	-
8.1.02.02.10.0008	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	10.190.000,00
8.1.02.02.10.0009	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	97.470.210,00
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	236.506.675,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.767.283.906,00
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	448.308.909,00
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.860.459.718,00
8.1.02.02.10.0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	49.500.000,00
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	135.537.500,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	13.800.000,00
8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	85.212.500,00
8.1.02.02.12.0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	36.525.000,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.094.282.306,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	8.392.525.306,00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	12.060.835.000,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	158.660.000,00
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	482.262.000,00
8.1.02.02.15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-
8.1.02.02.15.0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	-
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.805.666.853,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.242.654.497,00

Rincian Beban Jasa
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

8.1.02.	Beban Jasa-LO	420.668.574.510,33
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.285.068.500,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.314.650.000,00
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	39.650.000,00
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.143.831.360,00
8.1.02.05.01.0008	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	8.915.545.670,00
8.1.02.05.01.0009	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	2.012.343.642,00
8.1.02.05.01.0010	Beban Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	293.600.000,00
8.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.093.725.325,00
8.1.02.05.01.0012	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	2.144.240.000,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	563.012.356,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	162.099.356,00
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	400.913.000,00
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	19.119.559.460,00
8.1.02.89.01	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.119.559.460,00
8.1.02.89.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	18.230.422.460,00
8.1.02.89.01.0002	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	889.137.000,00
8.1.02.90	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	330.662.219,00
8.1.02.90.01	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	330.662.219,00
8.1.02.90.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	330.662.219,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	-

Rincian Perhitungan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2025

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PPKD/RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIaan	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUNGKAN	KOREKSI UTANG PKF	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
Dinas Pendidikan	(109.911.594.312,53)	(390.173.516.867,66)	240.282.374.385,00	-	-		-	(1.023.236.065,00)	-	-	-	1.242.094.168,97	-	-	-	-	(259.583.878.691,22)
Dinas Kesehatan	66.845.414.629,20	(131.239.157.973,71)	146.123.724.225,00	-	(349.212.800,00)		-	(208.990.000,00)	-	-	1.746.064,00	(315.441.024,39)	-	-	-	-	80.858.083.120,09
RSUD Cibabat	150.205.087.106,60	(74.312.761.453,18)	65.604.182.428,00	-	-		-	(151.640.000,00)	-	-	191.221.636,50	162.328.271,78	-	-	-	-	141.698.417.989,70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	997.825.883.210,70	(65.194.430.414,88)	62.647.168.671,00	-	-	(20.479.500,00)	(4.496.831.690,00)	0,01	-	-	-	1.329.466.408,20	-	-	-	-	992.090.776.685,02
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	404.232.663.033,06	(23.800.659.204,72)	80.572.719.807,00	-	(18.499.212,92)	-	-	3.985.617.060,00	-	-	-	182.453.014,27	-	-	-	-	465.154.294.496,69
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.021.106.833,83	(26.812.377.415,99)	28.818.378.694,00	-	-		-	(209.431.000,00)	-	-	-	209.430.999,99	-	-	-	-	8.027.108.111,83
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.501.061.958,24	(6.003.331.280,58)	7.151.660.592,00	-	-		-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	2.649.391.269,66
Dinas Sosial	999.910.497,88	(15.620.119.615,05)	17.997.186.004,00	147.145.000,00	-	-	-	(43.405.000,00)	-	-	-	46.723.250,00	-	-	-	-	3.527.440.136,83
Dinas Tenaga Kerja	588.919.056,19	(12.559.231.683,44)	12.537.606.408,00	-	-	-	-	(217.480.000,00)	-	-	-	217.480.000,00	-	-	-	-	567.293.780,75
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.116.599.941,34	(17.687.890.200,84)	17.812.428.698,00	-	-	-	-	(197.190.000,00)	-	-	-	218.467.273,76	-	-	-	-	1.262.415.712,26
Dinas Pangan Dan Pertanian	27.250.933.814,29	(16.818.069.160,49)	16.783.006.333,00	-	-	-	-	(217.480.000,00)	-	-	-	296.988.800,01	-	-	-	-	27.295.379.786,81
Dinas Lingkungan Hidup	56.726.740.753,89	(51.454.583.434,83)	53.517.486.723,00	-	-	204.813.500,00	-	(215.085.000,00)	-	-	-	3.852.293.267,80	-	-	-	-	62.631.665.809,86
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.283.914.741,34	(10.934.491.633,89)	9.442.581.771,00	-	-		-	(230.230.000,00)	-	-	-	964.361.350,00	-	-	-	-	1.526.136.228,45
Dinas Perhubungan	64.721.873.718,09	(37.593.074.262,73)	41.571.379.626,00	-	-		-	(11.119.244.086,00)	-	-	-	1.126.612.496,64	-	-	-	-	58.707.547.491,99
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.701.032.200,90	(17.040.844.225,88)	16.849.318.899,00	-	-	-	-	(190.070.000,00)	-	-	-	214.059.600,00	-	-	-	-	3.533.496.474,02
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	105.574.791.148,92	(21.248.304.956,61)	13.204.643.332,00	-	-	-	-	(251.100.000,00)	-	-	263.048.850,39	251.100.000,01	-	-	-	-	97.794.178.374,71
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaaan Dan Olahraga	57.157.692.072,00	(28.689.632.372,55)	31.698.592.657,00	-	-	125.798.950,00	-	(445.398.806,00)	-	-	-	239.980.000,00	-	-	-	-	60.087.032.500,45
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	3.995.967.497,50	(8.750.297.556,82)	8.936.763.765,00	-	-	-	-	(173.900.000,00)	-	-	-	561.672.480,00	-	-	-	-	4.570.206.185,68
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	142.792.793.502,37	(25.079.427.007,87)	22.693.211.454,00	-	-	20.479.500,00	2.644.870.600,00	-	-	-	-	652.801.865,31	-	-	-	-	143.724.729.913,81
Sekretariat Daerah	54.157.224.228,09	(71.937.072.057,14)	72.436.521.446,00	-	-	-	-	(337.504.786,00)	-	-	-	1.051.262.286,00	-	-	-	183.819.300.000,00	239.189.731.116,95
Sekretariat DPRD	15.100.226.176,54	(95.608.192.033,11)	100.423.019.127,00	-	-	-	-	(707.630.000,00)	-	-	-	729.413.000,00	-	-	-	-	19.936.836.270,43
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	981.870.057,16	(17.037.826.207,86)	16.934.943.880,00	-	-	-	-	(250.520.000,00)	-	-	-	229.280.000,00	-	-	-	-	857.747.729,30
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	95.254.903.886,48	531.688.921.225,82	(502.671.100.996,00)	-	-	-	-	1.110.773.500,00	-	-	37.181.456,70	(47.189.499,99)	-	-	-	-	125.373.489.573,01
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	520.135.998.190,88	826.862.547.260,66	(644.767.999.409,00)	(148.395.000,00)	-	-	(204.813.500,00)	9.126.191.602,00	-	-	-	(4.714.991.622,00)	-	-	-	(34.521.786.496,00)	671.766.751.026,54
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	242.761.073,25	(12.189.987.815,59)	12.235.860.386,00	-	-	-	-	(217.480.000,00)	-	-	-	217.480.000,00	-	-	-	-	288.633.643,66
Inspektorat Kota	4.543.481.208,56	(14.280.072.888,67)	14.449.142.130,00	-	-	-	-	(217.480.000,00)	-	-	-	217.480.000,01	-	-	-	-	4.712.550.449,90
Kecamatan Cimahi Utara	16.244.042.768,53	(25.956.034.856,67)	26.964.292.958,00	-	-	-	-	640.223.333,00	-	-	-	(632.073.333,00)	-	-	-	-	17.260.450.869,86
Kecamatan Cimahi Tengah	19.281.634.549,32	(34.743.286.604,43)	35.298.781.245,00	-	-	-	-	733.449.333,00	-	-	-	(733.449.333,01)	-	-	-	-	19.837.129.189,88
Kecamatan Cimahi Selatan	20.767.096.329,17	(31.183.559.317,71)	32.279.183.791,00	-	-	-	-	655.478.334,00	-	-	-	(640.857.534,01)	-	-	-	-	21.877.341.602,45
Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	17.586.423.789,82	(17.960.913.315,03)	651.028.546,00	-	-	-	-	(173.900.000,00)	-	-	-	193.645.000,00	-	-	-	-	296.284.020,79
PPKD	121.485.380.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.485.380.419,00
Jurnal Eliminasi			(58.478.087.576,00)														(58.478.087.576,00)
SALDO 2025	2.869.411.834.080,60	56.642.322.668,55	-	(1.250.000,00)	(367.712.012,92)	125.798.950,00	-	(2.398.622.671,00)	0,01	-	493.198.007,59	7.322.871.186,34	-	-	-	149.297.513.504,00	3.080.525.953.713,17

LAPORAN KEUANGAN SKPD

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-			
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	281.597.849.606,00	269.904.407.055,00	95,85	251.309.219.137,00
	Belanja Barang	75.888.358.521,00	74.541.726.721,00	98,23	74.483.981.395,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi				-
	Belanja Bantuan Keuangan				-
	Belanja Hibah	24.269.071.616,00	24.075.968.508,00	99,20	25.055.043.123,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.727.312.000,00	4.567.372.000,00	96,62	4.676.085.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	386.482.591.743,00	373.089.474.284,00	96,53	355.524.328.655,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	9.650.000.000,00	7.638.523.214,00	79,16	44.639.227,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.423.921.619,00	4.245.109.475,00	95,96	8.820.147.706,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	9.556.646.805,00	9.274.916.138,00	97,05	8.267.284.160,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.105.000,00	69.808.760,00	98,18	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.371.443.190,00	6.199.214.480,00	97,30	3.521.913.890,00
	Belanja Aset Lainnya		-	-	
	Jumlah Belanja Modal	30.073.116.614,00	27.427.572.067,00	91,20	20.653.984.983,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	416.555.708.357,00	400.517.046.351,00	96,15	376.178.313.638,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	416.555.708.357,00	400.517.046.351,00	96,15	376.178.313.638,00
	SURPLUS / DEFISIT	(416.555.708.357,00)	(400.517.046.351,00)	96,15	(376.178.313.638,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(416.555.708.357,00)	(400.517.046.351,00)	96,15	(376.178.313.638,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	(523.499.214.773,00)	(440.324.365.259,00)
	Kas Lainnya	(77.059.759.172,00)	33.600,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	139.497.375,00	127.788.762,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	30.049.700,00	46.552.850,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	(600.389.426.870,00)	(440.149.990.046,50)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	69.653.646.086,00	62.015.122.872,00
	Peralatan dan Mesin	96.141.612.427,36	93.420.145.070,36
	Gedung dan Bangunan	249.155.355.352,35	240.055.645.577,31
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	698.984.566,00	599.205.674,00
	Aset Tetap Lainnya	55.682.091.268,70	54.922.012.556,85
	Konstruksi dalam Pengerjaan	361.969.134,00	837.284.153,00
	Akumulasi Penyusutan	(146.141.108.975,45)	(137.047.235.533,06)
	Jumlah Aset Tetap	325.552.549.858,96	314.802.180.370,46
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	36.243.106,96	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	668.380.800,00	668.380.800,00
	Akumulasi Amortisasi	(668.380.800,00)	(615.832.962,50)
	Aset Lain-Lain	15.376.636.903,86	15.544.272.818,01
	Jumlah Aset Lainnya	15.412.880.010,83	15.596.820.655,52
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	(259.423.997.000,22)	(109.750.989.020,53)

	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	63.280,00	33.600,00
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	159.818.411,00	160.571.692,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	159.881.691,00	160.605.292,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	159.881.691,00	160.605.292,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	(259.583.878.691,22)	(109.911.594.312,53)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	(259.423.997.000,22)	(109.750.989.020,53)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 269.904.407.055,00	Rp 251.309.219.137,00	Rp 18.595.187.918,00	7,40
	Beban Persediaan	Rp 30.295.582.248,00	Rp 19.986.462.697,00	Rp 10.309.119.551,00	51,58
	Beban Jasa	Rp 38.340.438.654,50	Rp 48.835.209.372,83	Rp (10.494.770.718,33)	(21,49)
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.318.869.643,00	Rp 1.555.448.495,00	Rp (236.578.852,00)	(15,21)
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 4.512.638.278,00	Rp 4.522.193.991,00	Rp (9.555.713,00)	(0,21)
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 24.075.968.508,00	Rp 25.055.043.123,00	Rp (979.074.615,00)	(3,91)
	Beban Bantuan Sosial	Rp 4.567.372.000,00	Rp 4.676.085.000,00	Rp (108.713.000,00)	(2,32)
	Beban Penyusutan	Rp 10.335.967.611,36	Rp 10.713.866.287,32	Rp (377.898.675,96)	(3,53)
	Beban Amortisasi	Rp 52.547.837,50	Rp 52.547.837,50	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 383.403.791.835,36	Rp 366.706.075.940,65	Rp 16.697.715.894,71	4,55
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (383.403.791.835,36)	Rp (366.706.075.940,65)	Rp (16.697.715.894,71)	4,55
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (6.769.725.032,30)	Rp (441.440.911,00)	Rp (6.328.284.121,30)	1.433,55
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (6.769.725.032,30)	Rp (441.440.911,00)	Rp (6.328.284.121,30)	1.433,55
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (390.173.516.867,66)	Rp (367.147.516.851,65)	Rp (23.026.000.016,01)	6,27
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -	Rp -	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (390.173.516.867,66)	Rp (367.147.516.851,65)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENDIDIKAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	(109.911.594.312,53)	(35.706.580.578,95)
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(390.173.516.867,66)	(367.147.516.851,65)
3	RK PPKD/RK SKPD	240.282.374.385,00	292.910.153.028,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	(15.532.585,63)
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	27.725.908,00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.023.236.065,00)	(40.302.500,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	77.662,93
	-Akumulasi Penyusutan	1.242.094.168,97	31.213.114,15
	-Akumulasi Amortisasi	-	29.168.490,63
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	(259.583.878.691,22)	(109.911.594.312,53)

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	24.100.000.000,00	24.366.397.776,00	101,10	23.226.347.221,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	64.478.190,00	-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	24.100.000.000,00	24.430.875.966,00	101,37	23.226.347.221,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	24.100.000.000,00	24.430.875.966,00	101,37	23.226.347.221,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	62.569.927.948,00	61.821.287.120,00	98,80	62.334.761.746,00
	Belanja Barang	92.078.322.941,00	84.857.357.546,00	92,16	80.588.159.879,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	350.000.000,00	342.383.020,00	97,82	350.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	154.998.250.889,00	147.021.027.686,00	94,85	143.272.921.625,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.576.451.723,00	2.038.366.920,00	79,12	3.743.437.360,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	28.117.190.575,00	26.054.236.597,00	92,66	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	300.158.300,00	298.450.000,00	99,43	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	30.993.800.598,00	28.391.053.517,00	91,60	3.743.437.360,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	185.992.051.487,00	175.412.081.203,00	94,31	147.016.358.985,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	185.992.051.487,00	175.412.081.203,00	94,31	147.016.358.985,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(161.892.051.487,00)	(150.981.205.237,00)	93,26	(123.790.011.764,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(161.892.051.487,00)	(150.981.205.237,00)	93,26	(123.790.011.764,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	2.760.000.469,00	2.897.676.095,00
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Dana BOK	(13.709.849.587,00)	(8.990.044.201,00)
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	107.444.863,93	90.247.872,07
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	349.212.800,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	(1.746.064,00)
	Persediaan	11.003.743.173,12	7.594.504.280,22
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	161.338.919,05	1.939.850.782,29
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	8.011.042.001,00	7.870.642.001,00
	Peralatan dan Mesin	56.126.653.071,56	55.001.178.972,61
	Gedung dan Bangunan	76.754.043.691,12	54.176.400.154,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.463.821.573,00	3.165.371.573,00
	Aset Tetap Lainnya	61.713.000,00	61.713.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	508.591.082,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(64.845.873.582,98)	(60.136.518.785,29)
	Jumlah Aset Tetap	80.079.990.835,70	60.138.786.915,32
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	376.414.265,88	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	172.730.000,00	172.730.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(172.730.000,00)	(172.730.000,00)
	Aset Lain-Lain	1.025.070.166,46	4.816.765.244,59
	Jumlah Aset Lainnya	1.401.484.432,34	4.816.765.244,59
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	81.642.814.187,09	66.895.402.942,20

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	784.731.067,00	49.988.313,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	784.731.067,00	49.988.313,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	784.731.067,00	49.988.313,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	80.858.083.120,09	66.845.414.629,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	81.642.814.187,09	66.895.402.942,20

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KESEHATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 24.366.397.776	Rp 23.226.347.221,00	Rp 1.140.050.555,00	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 64.478.190	Rp 1.174.707.200,00	Rp (1.110.229.010,00)	-94,51
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 24.430.875.966,00	Rp 24.401.054.421,00	Rp 29.821.545,00	-94,51
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 8.100.903.705	Rp 8.360.073.049,00	Rp (259.169.343,70)	-3,10
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 8.100.903.705,30	Rp 8.360.073.049,00	Rp (259.169.343,70)	-3,1
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 32.531.779.671,30	Rp 32.761.127.470,00	Rp (229.347.798,70)	-0,7
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 61.821.287.120	Rp 62.334.761.746,00	Rp (513.474.626,00)	-0,82
	Beban Persediaan	Rp 22.492.959.027	Rp 22.207.443.211,50	Rp 285.515.815,89	1,29
	Beban Jasa	Rp 61.941.674.838	Rp 58.181.236.889,66	Rp 3.760.437.948,48	6,46
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.685.795.991	Rp 946.316.813,00	Rp 739.479.178,00	78,14
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 3.289.070.264	Rp 1.958.336.007,00	Rp 1.330.734.257,00	67,95
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 342.383.020	Rp 350.000.000,00	Rp (7.616.980,00)	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 4.393.913.773	Rp 4.204.724.308,46	Rp 189.189.464,84	4,50
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 1.746.064,00	Rp (1.746.064,00)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 155.967.084.033,83	Rp 150.184.565.039,62	Rp 5.782.518.994,21	3,85
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (123.435.304.362,53)	Rp (117.423.437.569,62)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (7.803.853.611)	Rp (944.168.318,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (7.803.853.611,18)	Rp (944.168.318,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (131.239.157.973,71)	Rp (118.367.605.887,62)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (131.239.157.973,71)	Rp (118.367.605.887,62)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KESEHATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	66.845.414.629,20	66.449.760.867,39
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(131.239.157.973,71)	(118.367.605.887,62)
3	RK PPKD/RK SKPD	146.123.724.225,00	118.779.798.297,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(349.212.800,00)	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(208.990.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	1.746.064,00	-
	-Akumulasi Penyusutan	(315.441.024,39)	(16.538.647,57)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	80.858.083.120,09	66.845.414.629,20

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - CIBABAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38	193.588.973.806,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	-	193.588.973.806,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	170.000.000.000,00	185.944.335.744,00	109,38	193.588.973.806,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	64.547.518.271,00	62.467.208.445,00	96,78	102.079.387.996,00
	Belanja Barang	159.143.764.176,00	178.487.363.288,00	112,15	130.092.363.622,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	223.691.282.447,00	240.954.571.733,00	107,72	232.171.751.618,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	11.559.596.000,00	10.348.973.020,00	89,53	3.948.507.177,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	9.031.700.000,00	7.910.731.881,00	87,59	1.591.811.174,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	170.000.000,00	169.286.100,00	99,58	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	20.761.296.000,00	18.428.991.001,00	88,77	5.540.318.351,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	244.452.578.447,00	259.383.562.734,00	106,11	237.712.069.969,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	244.452.578.447,00	259.383.562.734,00	106,11	237.712.069.969,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(74.452.578.447,00)	(73.439.226.990,00)	98,64	(44.123.096.163,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	12.312.759.826,00	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	12.312.759.826,00	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	12.312.759.826,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(62.139.818.621,00)	(73.439.226.990,00)	118,18	(44.123.096.163,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA RSU CIBABAT
Per 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	4.477.715.264,00	12.312.759.826,00
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	671.733.388,00	3.090.435.433,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(128.656.738,00)	(319.878.374,50)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	8.241.756,67	8.044.190,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	(0,00)	(0,00)
	Persediaan	8.754.113.898,53	8.259.028.088,74
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	13.783.147.569,20	23.350.389.163,24
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	28.362.300.000,00	28.362.300.000,00
	Peralatan dan Mesin	292.971.044.224,24	282.836.653.451,24
	Gedung dan Bangunan	139.759.431.428,20	131.800.977.047,20
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.337.924.739,00	7.127.838.639,00
	Aset Tetap Lainnya	12.025.600,00	12.025.600,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	88.522.500,00
	Akumulasi Penyusutan	(312.343.371.774,98)	(300.556.727.195,58)
	Jumlah Aset Tetap	156.099.354.216,46	149.671.590.041,86
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	392.194.000,00	392.194.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(392.194.000,00)	(392.194.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	169.882.501.785,66	173.021.979.205,10

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	28.184.083.795,96	196.945.919,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	22.619.946.179,50
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	28.184.083.795,96	22.816.892.098,50
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	28.184.083.795,96	22.816.892.098,50
III	EKUITAS		
	EKUITAS	141.698.417.989,70	150.205.087.106,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	169.882.501.785,66	173.021.979.205,10

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL RSU CIBABAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 183.525.633,699	Rp 179.733.137,124		-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 183.525.633,699	Rp 179.733.137,124	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 1.567.032,684	Rp 2.354.923.877,24	Rp (787.891.193,24)	-33,46
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.567.032,684,00	Rp 2.354.923.877,24	Rp (787.891.193,24)	-33,46
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 185.092.666,383,00	Rp 182.088.061.001,24	Rp 3.004.605,381,76	1,65
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 62.467.208,445	Rp 102.079.387.996,00	Rp (39.612.179.551,00)	-38,81
	Beban Persediaan	Rp 84.153.923,345	Rp 75.084.564.610,81	Rp 9.069.358.733,85	12,08
	Beban Jasa	Rp 94.093.706,814	Rp 51.360.699.668,33	Rp 42.733.007.146,00	83,20
	Beban Pemeliharaan	Rp 6.613.162,981	Rp 6.516.501.608,00	Rp 96.661.373,00	1,48
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 83.873.400	Rp 189.045.744,00	Rp (105.172.344,00)	
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 11.948.972,851	Rp 14.772.904.603,60	Rp (2.823.931.752,42)	-19,12
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 115.535.983,63	Rp (115.535.983,63)	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 259.360.847,836,18	Rp 250.118.640.214,38	Rp 9.242.207,621,80	3,70
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (74.268.181.453,18)	Rp (68.030.579.213,14)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (44.580.000)	Rp (10.181.028.566,83)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (44.580.000,00)	Rp (10.181.028.566,83)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (74.312.761.453,18)	Rp (78.211.607.779,97)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (74.312.761.453,18)	Rp (78.211.607.779,97)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS RSU CIBABAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	150.205.087.106,60	175.308.910.925,70
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(74.312.761.453,18)	(78.211.607.779,97)
3	RK PPKD/RK SKPD	65.604.182.428,00	53.142.227.864,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(151.640.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	191.221.636,50	-
	-Akumulasi Penyusutan	162.328.271,78	(34.443.903,14)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	141.698.417.989,70	150.205.087.106,60

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.170.737.752,00	7.673.353.985,00	93,91	7.484.367.350,00
	Belanja Barang	20.263.997.934,00	18.402.356.610,00	90,81	16.257.774.495,00
	Belanja Bunga			-	
	Belanja Subsidi			-	
	Belanja Bantuan Keuangan			-	
	Belanja Hibah	9.499.902.000,00	8.642.765.630,00	90,98	
	Belanja Bantuan Sosial			-	
	Jumlah Belanja Operasi	37.934.637.686,00	34.718.476.225,00	91,52	23.742.141.845,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	50.000.000,00	49.550.400,00	99,10	10.345.958.259,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	256.043.000,00	250.544.600,00	97,85	1.353.400.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	16.536.198.714,00	15.373.637.100,00	92,97	3.749.190.500,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.484.715.066,00	12.174.158.173,00	90,28	9.945.517.670,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	
	Belanja Aset Lainnya	82.000.000,00	80.802.173,00	98,54	130.514.000,00
	Jumlah Belanja Modal	30.408.956.780,00	27.928.692.446,00	91,84	25.524.580.429,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	68.343.594.466,00	62.647.168.671,00	91,67	49.266.722.274,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	68.343.594.466,00	62.647.168.671,00	91,67	49.266.722.274,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(68.343.594.466,00)	(62.647.168.671,00)	91,67	(49.266.722.274,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(68.343.594.466,00)	(62.647.168.671,00)	91,67	(49.266.722.274,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	255.375.729,63	580.375.522,23
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	10.907.071.762,00	12.183.078.700,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	11.162.447.491,63	12.763.454.222,23
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	653.380.240.191,60	652.862.352.191,60
	Peralatan dan Mesin	12.934.724.955,00	13.191.273.355,00
	Gedung dan Bangunan	86.745.609.778,08	80.624.531.363,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	696.970.623.959,56	684.884.559.709,74
	Aset Tetap Lainnya	534.085.000,00	534.085.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.853.310.200,00	4.199.738.304,00
	Akumulasi Penyusutan	(548.798.943.041,86)	(526.731.399.353,66)
	Jumlah Aset Tetap	905.619.651.042,38	909.565.140.569,68
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	303.897.182,10	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	2.215.606.410,00	1.694.416.510,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.674.660.451,60)	(1.407.548.131,72)
	Aset Lain-Lain	71.869.436.057,51	71.869.436.057,50
	Jumlah Aset Lainnya	76.062.624.198,01	75.504.649.435,78
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	992.844.722.732,02	997.833.244.227,70

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	753.946.047,00	7.361.017,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	753.946.047,00	7.361.017,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	753.946.047,00	7.361.017,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	992.090.776.685,02	997.825.883.210,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	992.844.722.732,02	997.833.244.227,70

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	-	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.673.353.985	Rp 7.484.367.350,00	Rp 188.986.635,00	2,53
	Beban Persediaan	Rp 12.152.422.947	Rp 5.250.129.426,00	Rp 6.902.293.521,00	131,47
	Beban Jasa	Rp 5.497.242.368	Rp 5.974.652.246,77	Rp (477.409.879,17)	-7,99
	Beban Pemeliharaan	Rp 566.831.320	Rp 477.614.764,00	Rp 89.216.556,00	18,68
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 136.650.439	Rp 303.208.383,00	Rp (166.557.944,00)	-54,93
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 9.373.547.300	Rp -	Rp 9.373.547.300,00	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 23.397.010.096	Rp 24.935.617.845,14	Rp (1.538.607.748,74)	-6,17
	Beban Amortisasi	Rp 267.112.320	Rp 168.787.148,59	Rp 98.325.171,29	58,25
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 59.064.170.774,88	Rp 44.594.377.163,50	Rp 14.469.793.611,38	32,45
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (59.064.170.774,88)	Rp (44.594.377.163,50)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (6.130.259.640)	Rp (292.925.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (6.130.259.640,00)	Rp (292.925.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (65.194.430.414,88)	Rp (44.887.302.163,50)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (65.194.430.414,88)	Rp (44.887.302.163,50)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	997.825.883.210,70	995.214.726.148,22
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(65.194.430.414,88)	(44.887.302.163,50)
3	RK PPKD/RK SKPD	62.647.168.671,00	49.266.722.274,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(20.479.500,00)	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(4.496.831.690,00)	(765.218.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	0,01	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.329.466.408,20	(1.003.045.048,02)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	992.090.776.685,02	997.825.883.210,70

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah	9.781.960.000,00	10.643.734.560,00	108,81	9.943.223.850,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	30.056.805,00	-	25.000.200,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	9.781.960.000,00	10.673.791.365,00	109,12	9.968.224.050,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	9.781.960.000,00	10.673.791.365,00	109,12	9.968.224.050,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	14.290.440.411,00	13.086.171.781,00	91,57	11.419.265.670,00
	Belanja Barang	63.827.320.817,00	59.115.986.973,00	92,62	53.244.654.013,00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	78.117.761.228,00	72.202.158.754,00	92,43	64.663.919.683,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	9.432.594.750,00	4.866.115.499,00	51,59	61.482.845,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.134.938.950,00	1.027.980.033,00	90,58	536.162.708,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.326.117.600,00	2.235.545.113,00	96,11	5.682.052.668,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.847.186.000,00	10.386.512.081,00	95,75	8.456.526.395,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	40.981.200,00
	Jumlah Belanja Modal	23.740.837.300,00	18.516.152.726,00	77,99	14.777.205.816,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	101.858.598.528,00	90.718.311.480,00	89,06	79.441.125.499,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	101.858.598.528,00	90.718.311.480,00	89,06	79.441.125.499,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(92.076.638.528,00)	(80.044.520.115,00)	86,93	(69.472.901.449,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(92.076.638.528,00)	(80.044.520.115,00)	86,93	(69.472.901.449,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	1.360.602.378,00	1.232.904.009,00
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	5.494.777.932,00	5.229.023.132,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.332.800.488,50)	(4.173.591.134,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	313.203.465,05	280.752.915,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	400.501.323,00	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	216.845.689,00	250.685.112,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.453.130.298,55	2.819.774.034,83
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	279.222.708.735,00	227.160.587.807,00
	Peralatan dan Mesin	16.017.213.721,76	15.204.489.688,76
	Gedung dan Bangunan	45.928.924.754,00	44.224.708.265,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	181.224.830.722,00	166.273.778.396,00
	Aset Tetap Lainnya	15.522.391.815,00	15.522.391.815,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	61.482.845,00	61.482.845,00
	Akumulasi Penyusutan	(76.890.161.468,74)	(67.739.708.933,65)
	Jumlah Aset Tetap	461.087.391.124,02	400.707.729.883,11
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	577.152.788,00	577.152.788,00
	Akumulasi Amortisasi	(493.448.576,00)	(423.118.754,00)
	Aset Lain-Lain	1.281.495.135,12	1.278.635.135,12
	Jumlah Aset Lainnya	1.365.199.347,12	1.432.669.169,12
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	465.905.720.769,69	404.960.173.087,06

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	166.296.313,00	145.240.094,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	585.129.960,00	582.269.960,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	751.426.273,00	727.510.054,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	751.426.273,00	727.510.054,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	465.154.294.496,69	404.232.663.033,06
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	465.905.720.769,69	404.960.173.087,06

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 10.739.393.950,00	Rp 10.292.213.200,00	Rp 447.180.750,00	4,34
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 200.152.215,00	Rp 25.000.200,00	Rp 175.152.015,00	700,60
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 10.939.546.165,00	Rp 10.317.213.400,00	Rp 622.332.765,00	6,03
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 47.427.434.000,00	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 47.427.434.000,00	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 58.366.980.165,00	Rp 10.317.213.400,00	Rp 48.049.766.765,00	465,72
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 13.088.922.701,00	Rp 11.419.374.570,00	Rp 1.669.548.131,00	14,62
	Beban Persediaan	Rp 33.229.274.359,00	Rp 26.612.779.374,00	Rp 6.616.494.985,00	24,86
	Beban Jasa	Rp 23.316.665.897,86	Rp 23.733.618.584,67	Rp (416.952.686,81)	-1,76
	Beban Pemeliharaan	Rp 2.046.632.356,00	Rp 2.068.044.664,00	Rp (21.412.308,00)	-1,04
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 596.575.759,00	Rp 794.676.256,00	Rp (198.100.497,00)	-24,93
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 9.332.905.549,36	Rp 8.226.141.206,94	Rp 1.106.764.342,42	13,45
	Beban Amortisasi	Rp 70.329.822,00	Rp 70.329.822,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 159.209.354,50	Rp 283.390.419,00	Rp (124.181.064,50)	-43,82
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 81.840.515.798,72	Rp 73.208.354.896,61	Rp 8.632.160.902,11	11,79
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (23.473.535.633,72)	Rp (62.891.141.496,61)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (327.123.571,00)	Rp (1.196.182.500,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (327.123.571,00)	Rp (1.196.182.500,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (23.800.659.204,72)	Rp (64.087.323.996,61)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (23.800.659.204,72)	Rp (64.087.323.996,61)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	404.232.663.033,06	399.181.623.525,05
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(23.800.659.204,72)	(64.087.323.996,61)
3	RK PPKD/RK SKPD	80.572.719.807,00	69.156.883.921,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(18.499.212,92)	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
8	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
9	KOREKSI NILAI ASET TETAP	3.985.617.060,00	-
10	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
11	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	182.453.014,27	(18.520.416,38)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
12	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
13	KOREKSI UTANG PFK	-	-
14	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
15	EKUITAS AKHIR	465.154.294.496,69	404.232.663.033,06

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	16.749.751.506,00	16.255.463.091,00	97,05	15.415.133.685,00
	Belanja Barang	9.996.617.444,00	9.023.197.953,00	90,26	12.715.655.030,00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	26.746.368.950,00	25.278.661.044,00	94,51	28.130.788.715,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah			-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.818.592.000,00	3.539.717.650,00	92,70	709.882.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	195.546.127,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	
	Belanja Aset Lainnya			-	
	Jumlah Belanja Modal	3.818.592.000,00	3.539.717.650,00	92,70	905.428.127,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	30.564.960.950,00	28.818.378.694,00	94,29	29.036.216.842,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	30.564.960.950,00	28.818.378.694,00	94,29	29.036.216.842,00
	SURPLUS / DEFISIT	(30.564.960.950,00)	(28.818.378.694,00)	94,29	(29.036.216.842,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(30.564.960.950,00)	(28.818.378.694,00)	94,29	(29.036.216.842,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	216.909.583,34	66.467.803,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	216.909.583,34	66.467.803,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	22.349.596.698,34	19.020.970.048,34
	Gedung dan Bangunan	1.930.254.531,00	1.930.254.531,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	97.119.000,00	97.119.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(17.893.735.380,85)	(16.762.343.986,84)
	Jumlah Aset Tetap	6.483.234.848,49	4.285.999.592,50
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	65.000.000,00	65.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(65.000.000,00)	(65.000.000,00)
	Aset Lain-Lain	1.328.956.790,00	1.669.684.790,00
	Jumlah Aset Lainnya	1.328.956.790,00	1.669.684.790,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	8.029.101.221,83	6.022.152.185,83

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.993.110,00	1.045.352,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.993.110,00	1.045.352,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.993.110,00	1.045.352,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	8.027.108.111,83	6.021.106.833,83
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.029.101.221,83	6.022.152.185,83

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 16.255.463.091,00	Rp 15.415.133.685,00	Rp 840.329.406,00	5,45
	Beban Persediaan	Rp 2.047.881.999,00	Rp 5.106.846.000,00	Rp (3.058.964.001,00)	-59,90
	Beban Jasa	Rp 5.769.988.240,99	Rp 6.513.547.680,67	Rp (743.559.439,68)	-11,42
	Beban Pemeliharaan	Rp 744.208.893,00	Rp 539.109.048,00	Rp 205.099.845,00	38,04
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 313.284.798,00	Rp 545.146.513,00	Rp (231.861.715,00)	-42,53
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 1.340.822.394,00	Rp 2.665.072.923,18	Rp (1.324.250.529,18)	-49,69
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 26.471.649.415,99	Rp 30.784.855.849,85	Rp (4.313.206.433,86)	-14,01
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (26.471.649.415,99)	Rp (30.784.855.849,85)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (340.728.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (340.728.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (26.812.377.415,99)	Rp (30.784.855.849,85)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (26.812.377.415,99)	Rp (30.784.855.849,85)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	6.021.106.833,83	7.868.836.744,83
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(26.812.377.415,99)	(30.784.855.849,85)
3	RK PPKD/RK SKPD	28.818.378.694,00	29.036.216.842,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	7.743.500,00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(209.431.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	(82.185.000,00)
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	209.430.999,99	(24.649.403,14)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	8.027.108.111,83	6.021.106.833,83

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	3.310.129.092,00	2.974.243.778,00	89,85	2.824.686.566,00
	Belanja Barang	4.066.558.200,00	3.913.574.914,00	96,24	4.348.038.191,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	7.376.687.292,00	6.887.818.692,00	93,37	7.172.724.757,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	267.357.000,00	263.841.900,00	98,69	203.341.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	267.357.000,00	263.841.900,00	98,69	203.341.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	7.644.044.292,00	7.151.660.592,00	93,56	7.376.065.757,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.644.044.292,00	7.151.660.592,00	93,56	7.376.065.757,00
	SURPLUS / DEFISIT	(7.644.044.292,00)	(7.151.660.592,00)	93,56	(7.376.065.757,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(7.644.044.292,00)	(7.151.660.592,00)	93,56	(7.376.065.757,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PER 31 DSEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	134.204.000,01	84.243.381,66
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	510.049.809,00	390.185.809,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	644.253.809,01	474.429.190,66
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.949.173.618,00	3.289.876.468,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.967.654.106,35)	(2.301.270.876,42)
	Jumlah Aset Tetap	1.991.319.511,65	998.405.591,58
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	62.780.000,00	62.780.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(47.085.000,00)	(31.390.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	15.695.000,00	31.390.000,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	2.651.268.320,66	1.504.224.782,24

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.877.051	3.162.824,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.877.051,00	3.162.824,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.877.051,00	3.162.824,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.649.391.270	1.501.061.958,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.651.268.320,66	1.504.224.782,24

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 1.789.765.985	Rp 303.365.520,00	Rp 1.486.400.465,00	489,97
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.789.765.985,00	Rp 303.365.520,00	Rp 1.486.400.465,00	489,97
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.789.765.985,00	Rp 303.365.520,00	Rp 1.486.400.465,00	489,97
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 2.974.243.778	Rp 2.824.686.566,00	Rp 149.557.212,00	5,29
	Beban Persediaan	Rp 1.755.897.231	Rp 1.608.122.473,00	Rp 147.774.758,00	9,19
	Beban Jasa	Rp 2.004.034.722	Rp 2.463.001.853,34	Rp (458.967.131,69)	-18,63
	Beban Pemeliharaan	Rp 247.697.185	Rp 219.968.861,00	Rp 27.728.324,00	12,61
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 129.146.120	Rp 199.155.426,00	Rp (70.009.306,00)	-35,15
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 666.383.230	Rp 345.948.182,08	Rp 320.435.047,85	92,63
	Beban Amortisasi	Rp 15.695.000	Rp 15.695.000,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 7.793.097.265,58	Rp 7.676.578.361,42	Rp 116.518.904,16	1,52
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (6.003.331.280,58)	Rp (7.373.212.841,42)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (6.003.331.280,58)	Rp (7.373.212.841,42)		-
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (6.003.331.280,58)	Rp (7.373.212.841,42)		-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	1.501.061.958,24	1.498.209.042,66
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(6.003.331.280,58)	(7.373.212.841,42)
3	RK PPKD/RK SKPD	7.151.660.592,00	7.376.065.757,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	0,00	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	2.649.391.269,66	1.501.061.958,24

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.676.083.258,00	5.275.483.813,00	92,94	4.873.268.629,00
	Belanja Barang	10.668.437.348,00	9.791.972.736,00	91,78	10.350.571.090,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	50.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	16.344.520.606,00	15.067.456.549,00	92,19	15.273.839.719,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	228.845.000,00	215.982.100,00	94,38	233.014.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.758.246.089,00	2.713.747.355,00	98,39	255.534.026,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.000.000,00	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	3.039.091.089,00	2.929.729.455,00	96,40	488.548.026,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	19.383.611.695,00	17.997.186.004,00	92,85	15.762.387.745,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	19.383.611.695,00	17.997.186.004,00	92,85	15.762.387.745,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(19.383.611.695,00)	(17.997.186.004,00)	92,85	(15.762.387.745,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(19.383.611.695,00)	(17.997.186.004,00)	92,85	(15.762.387.745,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS SOSIAL
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	125.994.583,33	112.370.827,08
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	125.994.583,33	112.370.827,08
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	40.302.500,00	40.302.500,00
	Peralatan dan Mesin	2.657.210.149,54	2.482.221.299,54
	Gedung dan Bangunan	2.713.747.355,00	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.129.493.201,04)	(1.746.465.678,74)
	Jumlah Aset Tetap	3.281.766.803,50	776.058.120,80
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	198.000.000,00	150.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(97.631.250,00)	(57.975.000,00)
	Aset Lain-Lain	19.647.750,00	19.647.750,00
	Jumlah Aset Lainnya	120.016.500,00	111.672.750,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	3.527.777.886,83	1.000.101.697,88

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	337.750,00	191.200,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	337.750,00	191.200,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	337.750,00	191.200,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	3.527.440.136,83	999.910.497,88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.527.777.886,83	1.000.101.697,88

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS SOSIAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -			
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -			
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -			
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -			
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -			
	Dana Alokasi Umum	Rp -			
	Dana Alokasi Khusus	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -			
	Dana Penyesuaian	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -			
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -			
	Pendapatan Lainnya	Rp -			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.275.483.813	Rp 4.873.268.629,00	Rp 402.215.184,00	8,25
	Beban Persediaan	Rp 5.244.322.507	Rp 5.275.386.028,00	Rp (31.063.521,00)	-0,59
	Beban Jasa	Rp 4.160.630.524	Rp 4.576.888.535,59	Rp (416.258.011,84)	-9,09
	Beban Pemeliharaan	Rp 123.097.500	Rp 89.860.000,00	Rp 33.237.500,00	36,99
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 196.714.999	Rp 280.389.466,00	Rp (83.674.467,00)	-29,84
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp (50.000.000,00)	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp 147.145.000	Rp -	Rp 147.145.000,00	22,14
	Beban Penyusutan	Rp 429.750.772	Rp 351.846.005,20	Rp 77.904.767,10	
	Beban Amortisasi	Rp 39.656.250	Rp 32.775.000,00	Rp 6.881.250,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 15.616.801.365,05	Rp 15.530.413.663,79	Rp 86.387.701,26	0,56
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (15.616.801.365,05)	Rp (15.530.413.663,79)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (3.318.250)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (3.318.250,00)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (15.620.119.615,05)	Rp (15.530.413.663,79)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (15.620.119.615,05)	Rp (15.530.413.663,79)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS SOSIAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	999.910.497,88	727.633.916,67
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(15.620.119.615,05)	(15.530.413.663,79)
3	RK PPKD/RK SKPD	17.997.186.004,00	15.762.387.745,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	147.145.000,00	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(43.405.000,00)	40.302.500,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	46.723.250,00	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	3.527.440.136,83	999.910.497,88

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS TENAGA KERJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	600.000.000,00	527.618.000,00	87,94	386.194.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	200.440,00	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	600.000.000,00	527.818.440,00	87,97	386.194.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	527.818.440,00	87,97	386.194.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.989.365.373,00	4.605.333.853,00	92,30	4.682.093.213,00
	Belanja Barang	9.858.307.892,00	8.343.135.597,00	84,63	8.687.950.675,00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	14.847.673.265,00	12.948.469.450,00	87,21	13.370.043.888,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	117.003.000,00	116.955.398,00	99,96	35.200.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	34.673.070,00
	Jumlah Belanja Modal	117.003.000,00	116.955.398,00	99,96	69.873.070,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga				
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	14.964.676.265,00	13.065.424.848,00	87,31	13.439.916.958,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	14.964.676.265,00	13.065.424.848,00	87,31	13.439.916.958,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(14.364.676.265,00)	(12.537.606.408,00)	87,28	(13.053.722.958,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(14.364.676.265,00)	(12.537.606.408,00)	87,28	(13.053.722.958,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS TENAGA KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	196.899.583,35	183.851.035,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	196.899.583,35	183.851.035,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	1.798.146.998,00	1.898.671.600,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	5.790.000,00	5.790.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.641.619.149,60)	(1.795.687.100,00)
	Jumlah Aset Tetap	162.317.848,40	108.774.500,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	539.897.120,00	539.897.120,00
	Akumulasi Amortisasi	(499.084.085,00)	(410.866.912,81)
	Aset Lain-Lain	167.302.000,00	167.302.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	208.115.035,00	296.332.207,19
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	567.332.466,75	588.957.742,19

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	38.686,00	38.686,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	38.686,00	38.686,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.686,00	38.686,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	567.293.780,75	588.919.056,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	567.332.466,75	588.957.742,19

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS TENAGA KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 527.618.000,00	Rp 386.194.000,00	Rp 141.424.000,00	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 200.440,00	Rp -	Rp 200.440,00	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 527.818.440,00	Rp 386.194.000,00	Rp 141.624.440,00	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 527.818.440,00	Rp 386.194.000,00	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.605.333.853,00	Rp 4.682.093.213,00	Rp (76.759.360,00)	-1,64
	Beban Persediaan	Rp 974.781.786,00	Rp 935.919.386,00	Rp 38.862.400,00	4,15
	Beban Jasa	Rp 7.070.645.560,65	Rp 6.913.097.607,33	Rp 157.547.953,32	2,28
	Beban Pemeliharaan	Rp 98.909.800,00	Rp 128.107.400,00	Rp (29.197.600,00)	-22,79
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 185.749.902,00	Rp 696.459.000,00	Rp (510.709.098,00)	-73,33
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 63.412.049,60	Rp 60.785.750,00	Rp 2.626.299,60	4,32
	Beban Amortisasi	Rp 88.217.172,19	Rp 88.217.172,19	Rp 0,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 13.087.050.123,44	Rp 13.504.679.528,52	Rp (417.629.405,08)	-3,09
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.559.231.683,44)	Rp (13.118.485.528,52)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (47.952.500,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (47.952.500,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.559.231.683,44)	Rp (13.166.438.028,52)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.559.231.683,44)	Rp (13.166.438.028,52)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS TENAGA KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	588.919.056,19	653.681.626,71
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.559.231.683,44)	(13.166.438.028,52)
3	RK PPKD/RK SKPD	12.537.606.408,00	13.053.722.958,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(217.480.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	217.480.000,00	47.952.500,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	567.293.780,75	588.919.056,19

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.794.064.813,00	5.264.112.657,00	90,85	6.043.329.592,00
	Belanja Barang	13.237.577.925,00	12.268.625.186,00	92,68	12.247.605.843,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	19.031.642.738,00	17.532.737.843,00	92,12	18.290.935.435,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	255.676.000,00	226.284.103,00	88,50	5.200.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.510.000,00	18.513.902,00	64,94	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	34.950.000,00	34.892.850,00	99,84	49.579.260,00
	Jumlah Belanja Modal	319.136.000,00	279.690.855,00	87,64	54.779.260,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	19.350.778.738,00	17.812.428.698,00	92,05	18.345.714.695,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	19.350.778.738,00	17.812.428.698,00	92,05	18.345.714.695,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(19.350.778.738,00)	(17.812.428.698,00)	92,05	(18.345.714.695,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO				
		-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(19.350.778.738,00)	(17.812.428.698,00)	92,05	(18.345.714.695,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	111.922.476,67	96.462.840,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	202.229.016,06	118.714.768,06
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	314.151.492,73	215.177.608,89
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.430.365.653,39	4.440.898.824,15
	Gedung dan Bangunan	645.033.000,00	645.033.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.999.380,62	3.999.380,62
	Konstruksi dalam Pengerjaan	8.113.902,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(4.240.893.824,48)	(4.291.742.898,32)
	Jumlah Aset Tetap	846.618.111,53	798.188.306,44
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	205.146.210,00	170.253.360,00
	Akumulasi Amortisasi	(125.475.849,00)	(89.051.865,00)
	Aset Lain-Lain	22.403.350,00	22.403.350,00
	Jumlah Aset Lainnya	102.073.711,00	103.604.845,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	1.262.843.315,26	1.116.970.760,34

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	427.603,00	370.819,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	427.603,00	370.819,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	427.603,00	370.819,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.262.415.712,26	1.116.599.941,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.262.843.315,26	1.116.970.760,34

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 210.885.295	Rp 122.560.120,00	Rp 88.325.175,00	72,07
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 210.885.295,00	Rp 122.560.120,00	Rp 88.325.175,00	72,07
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 210.885.295,00	Rp 122.560.120,00	Rp 88.325.175,00	72,07
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.264.112.657	Rp 6.043.329.592,00	Rp (779.216.935,00)	-12,89
	Beban Persediaan	Rp 2.908.680.486	Rp 2.937.540.610,94	Rp (28.860.124,94)	-0,98
	Beban Jasa	Rp 8.737.945.658	Rp 8.550.410.247,25	Rp 187.535.410,91	2,19
	Beban Pemeliharaan	Rp 219.524.999	Rp 196.827.500,00	Rp 22.697.499,00	11,53
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 543.192.238	Rp 727.677.134,00	Rp (184.484.896,00)	-25,35
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 167.618.200	Rp 145.430.929,17	Rp 22.187.270,75	15,26
	Beban Amortisasi	Rp 36.423.984	Rp 34.403.340,00	Rp 2.020.644,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 17.877.498.222,08	Rp 18.635.619.353,36	Rp (758.121.131,28)	-4,07
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (17.666.612.927,08)	Rp (18.513.059.233,36)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (21.277.274)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (21.277.273,76)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (17.687.890.200,84)	Rp (18.513.059.233,36)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (17.687.890.200,84)	Rp (18.513.059.233,36)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	1.116.599.941,34	1.283.944.479,70
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(17.687.890.200,84)	(18.513.059.233,36)
3	RK PPKD/RK SKPD	17.812.428.698,00	18.345.714.695,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(197.190.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	218.467.273,76	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	1.262.415.712,26	1.116.599.941,34

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	387.215.000,00	442.185.193,00	114,20	422.332.500,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	900,00	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	387.215.000,00	442.186.093,00	114,20	422.332.500,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	387.215.000,00	442.186.093,00	114,20	422.332.500,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.623.170.274,00	8.320.549.676,00	96,49	8.764.832.975,00
	Belanja Barang	8.930.072.680,00	7.987.174.235,00	89,44	8.359.146.130,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	17.553.242.954,00	16.307.723.911,00	92,90	17.123.979.105,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	653.011.700,00	619.026.700,00	94,80	262.100.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	265.850.000,00	263.441.815,00	99,09	246.411.122,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
	Jumlah Belanja Modal	953.861.700,00	917.468.515,00	96,18	508.511.122,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	18.507.104.654,00	17.225.192.426,00	93,07	17.632.490.227,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER	-	-	-	-
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer				
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	18.507.104.654,00	17.225.192.426,00	93,07	17.632.490.227,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(18.119.889.654,00)	(16.783.006.333,00)	92,62	(17.210.157.727,00)
	PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(18.119.889.654,00)	(16.783.006.333,00)	92,62	(17.210.157.727,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	26.051.640,83	15.876.952,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	311.930.242,20	754.407.054,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	337.981.883,03	770.284.006,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	14.252.840.000,00	14.252.840.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.008.373.085,41	5.185.354.968,41
	Gedung dan Bangunan	12.746.674.602,10	12.683.273.016,10
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.149.277.550,00	4.149.277.550,00
	Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(10.688.351.103,73)	(10.300.846.898,72)
	Jumlah Aset Tetap	26.477.814.133,78	25.978.898.635,79
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	71.975.455,00	71.975.455,00
	Akumulasi Amortisasi	(66.975.455,00)	(61.975.455,00)
	Aset Lain-Lain	483.014.000,00	497.451.500,00
	Jumlah Aset Lainnya	488.014.000,00	507.451.500,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	27.303.810.016,81	27.256.634.142,29

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	8.430.230,00	5.700.328,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.430.230,00	5.700.328,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.430.230,00	5.700.328,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	27.295.379.786,81	27.250.933.814,29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	27.303.810.016,81	27.256.634.142,29

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 442.185.193,00	Rp 422.332.500,00	Rp 19.852.693,00	4,70
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 900,00	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 442.186.093,00	Rp 422.332.500,00	Rp 19.853.593,00	4,70
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 322.542.000,00	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 322.542.000,00	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 764.728.093,00	Rp 422.332.500,00	Rp 342.395.593,00	81,07
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.320.549.676,00	Rp 8.764.832.975,00	Rp (444.283.299,00)	-5,07
	Beban Persediaan	Rp 4.918.124.067,80	Rp 5.136.541.910,00	Rp (218.417.842,20)	-4,25
	Beban Jasa	Rp 2.701.148.504,67	Rp 2.631.088.788,17	Rp 70.059.716,50	2,66
	Beban Pemeliharaan	Rp 358.649.730,00	Rp 205.882.924,00	Rp 152.766.806,00	74,20
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 225.858.470,00	Rp 475.950.943,00	Rp (250.092.473,00)	-52,55
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 684.493.005,02	Rp 529.518.648,55	Rp 154.974.356,47	29,27
	Beban Amortisasi	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 17.213.823.453,49	Rp 17.748.816.188,72	Rp (534.992.735,23)	-3,01
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (16.449.095.360,49)	Rp (17.326.483.688,72)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (368.973.800,00)	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (368.973.800,00)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (16.818.069.160,49)	Rp (17.326.483.688,72)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (16.818.069.160,49)	Rp (17.326.483.688,72)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	27.250.933.814,29	27.443.070.318,87
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(16.818.069.160,49)	(17.326.483.688,72)
3	RK PPKD/RK SKPD	16.783.006.333,00	17.210.157.727,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(217.480.000,00)	(23.700.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	296.988.800,01	(52.110.542,86)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	27.295.379.786,81	27.250.933.814,29

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	4.050.090.000,00	3.816.001.854,00	94,22	4.015.361.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	212.215,00	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.050.090.000,00	3.816.214.069,00	94,23	4.015.361.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	4.050.090.000,00	3.816.214.069,00	94,23	4.015.361.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	15.337.490.721,00	14.261.568.682,00	92,99	13.742.195.715,00
	Belanja Barang	38.808.288.169,00	32.882.593.069,00	84,73	31.395.620.691,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	54.145.778.890,00	47.144.161.751,00	87,07	45.137.816.406,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.442.126.000,00	5.190.285.796,00	95,37	4.352.340.869,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	4.385.000.000,00	3.783.742.812,00	86,29	176.072.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.816.660,00	4.461.500,00	92,63	171.283.236,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	9.931.942.660,00	8.978.490.108,00	90,40	4.699.696.105,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	64.077.721.550,00	56.122.651.859,00	87,59	49.837.512.511,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	64.077.721.550,00	56.122.651.859,00	87,59	49.837.512.511,00
	SURPLUS / DEFISIT	(60.027.631.550,00)	(52.306.437.790,00)	87,14	(45.822.151.511,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(60.027.631.550,00)	(52.306.437.790,00)	87,14	(45.822.151.511,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	1.211.048.933,00	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	52.164.000,00	36.675.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(18.297.237,50)	(17.055.092,50)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	2.646.538.075,01	419.402.400,01
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	492.965.135,05	402.213.086,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	4.384.418.905,56	841.235.393,51
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	24.729.801.960,00	24.729.801.960,00
	Peralatan dan Mesin	55.489.550.294,76	54.335.007.899,76
	Gedung dan Bangunan	16.097.262.610,00	12.386.335.204,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.672.713.527,00	5.609.018.027,00
	Aset Tetap Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(44.328.605.112,06)	(42.751.440.184,98)
	Jumlah Aset Tetap	57.669.523.279,70	54.317.522.905,78
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	349.472.000,00	349.472.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(349.472.000,00)	(283.774.000,00)
	Aset Lain-Lain	859.652.806,60	1.730.596.106,60
	Jumlah Aset Lainnya	859.652.806,60	1.796.294.106,60
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	62.913.594.991,86	56.955.052.405,89

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	74.418.252,00	28.225.882,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	207.510.930,00	200.085.770,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	281.929.182,00	228.311.652,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	281.929.182,00	228.311.652,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	62.631.665.809,86	56.726.740.753,89
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	62.913.594.991,86	56.955.052.405,89

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	-	-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 3.831.490.854	Rp 4.024.298.500,00	Rp (192.807.646,00)	-4,79
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 212.215	-	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 3.831.703.069,00	Rp 4.024.298.500,00	Rp (192.595.431,00)	-4,79
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 3.831.703.069,00	Rp 4.024.298.500,00	Rp (192.595.431,00)	-4,79
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 14.261.568.682	Rp 13.742.195.715,00	Rp 519.372.967,00	3,78
	Beban Persediaan	Rp 7.061.869.895	Rp 6.934.135.629,00	Rp 127.734.265,95	1,84
	Beban Jasa	Rp 19.253.160.786	Rp 19.682.734.529,33	Rp (429.573.743,33)	-2,18
	Beban Pemeliharaan	Rp 4.013.701.791	Rp 4.249.746.245,00	Rp (236.044.454,00)	-5,55
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 461.577.903	Rp 425.398.390,00	Rp 36.179.513,00	8,50
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 5.429.458.195	Rp 5.548.468.443,87	Rp (119.010.248,99)	-2,14
	Beban Amortisasi	Rp 65.698.000	Rp 65.698.000,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 1.242.145	Rp 306.272,50	Rp 935.872,50	305,57
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 50.548.277.396,83	Rp 50.648.683.224,70	Rp (100.405.827,87)	-0,20
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (46.716.574.327,83)	Rp (46.624.384.724,70)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	-	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	-	
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	-	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	-	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (4.738.009.107)	Rp (4.065.584.728,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (4.738.009.107,00)	Rp (4.065.584.728,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (51.454.583.434,83)	Rp (50.689.969.452,70)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	-	
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	-	
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (51.454.583.434,83)	Rp (50.689.969.452,70)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	56.726.740.753,89	54.561.143.996,17
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(51.454.583.434,83)	(50.689.969.452,70)
3	RK PPKD/RK SKPD	53.517.486.723,00	45.822.151.511,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	204.813.500,00	11.514.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(215.085.000,00)	2.991.556.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	3.852.293.267,80	4.030.344.699,42
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	62.631.665.809,86	56.726.740.753,89

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.625.936.696,00	6.064.724.314,00	91,53	6.504.092.885,00
	Belanja Barang	3.606.918.829,00	3.302.672.457,00	91,56	3.628.780.505,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	10.232.855.525,00	9.367.396.771,00	91,54	10.132.873.390,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	80.174.000,00	75.185.000,00	93,78	805.480.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	80.174.000,00	75.185.000,00	93,78	805.480.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	10.313.029.525,00	9.442.581.771,00	91,56	10.938.353.390,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.313.029.525,00	9.442.581.771,00	91,56	10.938.353.390,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(10.313.029.525,00)	(9.442.581.771,00)	91,56	(10.938.353.390,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(10.313.029.525,00)	(9.442.581.771,00)	91,56	(10.938.353.390,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	87.929.524,99	86.291.283,34
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	146.868.971,46	313.929.500,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	234.798.496,45	400.220.783,34
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	9.397.156.350,00	10.199.559.200,00
	Gedung dan Bangunan	41.036.000,00	41.036.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.865.000,00	186.635.000,00
	Aset Tetap Lainnya	48.674.800,00	48.674.800,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(8.587.230.460,00)	(8.985.218.235,00)
	Jumlah Aset Tetap	928.501.690,00	1.490.686.765,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	384.974.250,00	384.974.250,00
	Akumulasi Amortisasi	(384.974.250,00)	(354.724.250,00)
	Aset Lain-Lain	363.020.573,00	363.020.573,00
	Jumlah Aset Lainnya	363.020.573,00	393.270.573,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	1.526.320.759,45	2.284.178.121,34

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	184.531,00	263.380,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	184.531,00	263.380,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	184.531,00	263.380,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.526.136.228,45	2.283.914.741,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.526.320.759,45	2.284.178.121,34

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.064.724.314	Rp 6.504.092.885,00	Rp (439.368.571,00)	-6,76
	Beban Persediaan	Rp 1.631.126.700	Rp 1.514.617.180,00	Rp 116.509.519,54	7,69
	Beban Jasa	Rp 1.501.704.671	Rp 1.311.130.263,99	Rp 190.574.407,36	14,54
	Beban Pemeliharaan	Rp 180.380.700	Rp 388.368.494,00	Rp (207.987.794,00)	-53,55
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 154.803.824	Rp 293.245.853,00	Rp (138.442.029,00)	-47,21
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 566.373.575	Rp 653.845.734,00	Rp (87.472.159,00)	-13,38
	Beban Amortisasi	Rp 30.250.000	Rp 30.250.000,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.129.363.783,89	Rp 10.695.550.409,99	Rp (566.186.626,10)	-5,29
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.129.363.783,89)	Rp (10.695.550.409,99)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (805.127.850)	Rp (406.026.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (805.127.850,00)	Rp (406.026.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (10.934.491.633,89)	Rp (11.101.576.409,99)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (10.934.491.633,89)	Rp (11.101.576.409,99)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	2.283.914.741,34	2.041.111.761,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(10.934.491.633,89)	(11.101.576.409,99)
3	RK PPKD/RK SKPD	9.442.581.771,00	10.938.353.390,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(230.230.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	964.361.350,00	406.026.000,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	1.526.136.228,45	2.283.914.741,34

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	750.000.000,00	658.895.000,00	87,85	762.636.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	1.920,00	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	750.000.000,00	658.896.920,00	87,85	762.636.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	750.000.000,00	658.896.920,00	87,85	762.636.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.435.991.716,00	9.895.697.434,00	94,82	9.368.562.005,00
	Belanja Barang	22.219.476.739,00	19.489.544.954,00	87,71	19.413.191.290,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	32.655.468.455,00	29.385.242.388,00	89,99	28.781.753.295,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.035.270.000,00	2.736.793.219,00	67,82	2.072.439.040,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	0,00	-	197.997.474,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.822.756.500,00	10.108.240.939,00	85,50	4.836.723.086,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	15.858.026.500,00	12.845.034.158,00	81,00	7.107.159.600,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	48.513.494.955,00	42.230.276.546,00	87,05	35.888.912.895,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	48.513.494.955,00	42.230.276.546,00	87,05	35.888.912.895,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(47.763.494.955,00)	(41.571.379.626,00)	87,04	(35.126.276.895,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO				
		-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(47.763.494.955,00)	(41.571.379.626,00)	87,04	(35.126.276.895,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	3.800.000,00	3.800.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.800.000,00)	(3.800.000,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	193.442.083,33	177.562.500,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	14.148.000,00	14.148.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(14.148.000,00)	(14.148.000,00)
	Persediaan	1.909.356.450,92	1.122.227.990,95
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	2.102.798.534,25	1.299.790.490,95
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	8.319.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	44.155.339.398,00	43.175.295.055,00
	Gedung dan Bangunan	14.101.060.100,00	14.101.060.100,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	89.249.578.174,10	80.259.503.899,00
	Aset Tetap Lainnya	3.765.000,00	3.765.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(92.131.024.020,45)	(83.989.904.306,11)
	Jumlah Aset Tetap	55.378.718.651,65	61.868.719.747,89
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	10.266.663,90	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	404.761.895,00	355.089.395,00
	Akumulasi Amortisasi	(363.617.767,81)	(349.903.058,75)
	Aset Lain-Lain	1.673.617.364,00	2.298.993.364,00
	Jumlah Aset Lainnya	1.725.028.155,09	2.304.179.700,25
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	59.206.545.340,99	65.472.689.939,09

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	498.997.849,00	750.816.221,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	498.997.849,00	750.816.221,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	498.997.849,00	750.816.221,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	58.707.547.491,99	64.721.873.718,09
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	59.206.545.340,99	65.472.689.939,09

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 658.895.000	Rp 761.736.000,00	Rp (102.841.000,00)	-13,50
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 1.920	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 658.896.920,00	Rp 761.736.000,00	Rp (102.839.080,00)	-13,50
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 658.896.920,00	Rp 761.736.000,00	Rp (102.839.080,00)	-13,5006
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.895.697.434	Rp 9.368.562.005,00	Rp 527.135.429,00	5,63
	Beban Persediaan	Rp 3.487.854.423	Rp 3.140.843.019,47	Rp 347.011.403,56	11,05
	Beban Jasa	Rp 13.816.400.319	Rp 14.558.664.816,67	Rp (742.264.498,00)	-5,10
	Beban Pemeliharaan	Rp 837.646.962	Rp 1.341.712.172,00	Rp (504.065.210,00)	-37,57
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 257.268.310	Rp 291.699.335,00	Rp (34.431.025,00)	-11,80
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 9.267.732.211	Rp 8.619.722.084,44	Rp 648.010.126,53	7,52
	Beban Amortisasi	Rp 13.714.709	Rp 5.186.336,25	Rp 8.528.372,81	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 295.500,00	Rp (295.500,00)	-100,00
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 37.576.314.367,73	Rp 37.326.685.268,83	Rp 249.629.098,90	0,67
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (36.917.417.447,73)	Rp (36.564.949.268,83)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (675.656.815)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (675.656.815,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (37.593.074.262,73)	Rp (36.564.949.268,83)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (37.593.074.262,73)	Rp (36.564.949.268,83)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	64.721.873.718,09	66.219.750.291,14
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(37.593.074.262,73)	(36.564.949.268,83)
3	RK PPKD/RK SKPD	41.571.379.626,00	35.126.276.895,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(50,40)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(11.119.244.086,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.126.612.496,64	(59.204.148,82)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	58.707.547.491,99	64.721.873.718,09

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.712.020.114,00	6.531.794.579,00	97,31	6.031.281.998,00
	Belanja Barang	9.867.728.850,00	9.503.589.721,00	96,31	8.456.020.111,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	16.579.748.964,00	16.035.384.300,00	96,72	14.487.302.109,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	810.131.000,00	798.283.599,00	98,54	585.868.154,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	324.325.453,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	16.000.000,00	15.651.000,00	97,82	24.055.000,00
	Jumlah Belanja Modal	826.131.000,00	813.934.599,00	98,52	934.248.607,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	17.405.879.964,00	16.849.318.899,00	96,80	15.421.550.716,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.405.879.964,00	16.849.318.899,00	96,80	15.421.550.716,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(17.405.879.964,00)	(16.849.318.899,00)	96,80	(15.421.550.716,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(17.405.879.964,00)	(16.849.318.899,00)	96,80	(15.421.550.716,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	373.368.324,91	292.258.053,34
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	373.368.324,91	292.258.053,34
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	11.504.149.250,00	10.920.757.751,00
	Gedung dan Bangunan	2.203.635.075,00	2.203.635.075,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220.487.300,00	220.487.300,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(11.137.837.613,49)	(10.321.000.503,54)
	Jumlah Aset Tetap	2.790.434.011,51	3.023.879.622,46
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.067.731.233,00	1.067.731.233,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.046.517.095,50)	(1.031.316.708,00)
	Aset Lain-Lain	348.480.000,10	348.480.000,10
	Jumlah Aset Lainnya	369.694.137,60	384.894.525,10
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	3.533.496.474,02	3.701.032.200,90

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	3.533.496.474,02	3.701.032.200,90
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.533.496.474,02	3.701.032.200,90

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -			
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -			
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	- -
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -			
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -			
	Dana Alokasi Umum	Rp -			
	Dana Alokasi Khusus	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -			
	Dana Penyesuaian	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -			
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -			
	Pendapatan Lainnya	Rp -			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	- -
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.531.794.579,00	Rp 6.031.281.998,00	Rp 500.512.581,00	8,30
	Beban Persediaan	Rp 635.216.836,00	Rp 645.534.652,00	Rp (10.317.816,00)	-1,60
	Beban Jasa	Rp 8.128.904.313,43	Rp 6.513.875.752,16	Rp 1.615.028.561,27	24,79
	Beban Pemeliharaan	Rp 250.522.030,00	Rp 273.110.000,00	Rp (22.587.970,00)	-8,27
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 424.319.770,00	Rp 758.602.726,00	Rp (334.282.956,00)	-44,07
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 1.030.896.709,95	Rp 1.084.728.639,53	Rp (53.831.929,58)	-4,96
	Beban Amortisasi	Rp 15.200.387,50	Rp 15.200.387,50	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 17.016.854.625,88	Rp 15.322.334.155,19	Rp 1.694.520.470,69	11,06
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (17.016.854.625,88)	Rp (15.322.334.155,19)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (23.989.600,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (23.989.600,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (17.040.844.225,88)	Rp (15.322.334.155,19)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (17.040.844.225,88)	Rp (15.322.334.155,19)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	3.701.032.200,90	3.717.177.977,36
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(17.040.844.225,88)	(15.322.334.155,19)
3	RK PPKD/RK SKPD	16.849.318.899,00	15.421.550.716,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(190.070.000,00)	765.218.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	214.059.600,00	(880.580.337,27)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	3.533.496.474,02	3.701.032.200,90

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	3.081.358.896,00	123,25	2.510.273.591,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	1.323.359,00	-	1.847.498,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.500.000.000,00	3.082.682.255,00	123,31	2.512.121.089,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000.000,00	3.082.682.255,00	123,31	2.512.121.089,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.518.626.030,00	6.035.268.275,00	92,58	6.021.011.377,00
	Belanja Barang	10.470.504.809,00	9.959.607.022,00	95,12	9.163.047.337,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	16.989.130.839,00	15.994.875.297,00	94,15	15.184.058.714,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	270.694.000,00	259.950.290,00	96,03	408.737.200,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	33.800.000,00	32.500.000,00	96,15	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	97.000.000,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	304.494.000,00	292.450.290,00	96,04	505.737.200,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	17.293.624.839,00	16.287.325.587,00	94,18	15.689.795.914,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.293.624.839,00	16.287.325.587,00	94,18	15.689.795.914,00
	SURPLUS / DEFISIT	(14.793.624.839,00)	(13.204.643.332,00)	89,26	(13.177.674.825,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(14.793.624.839,00)	(13.204.643.332,00)	89,26	(13.177.674.825,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	265.448.368,00	674.354.824,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(133.669.875,61)	(396.718.726,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	257.655.558,33	124.317.316,66
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	389.434.050,72	401.953.414,66
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	36.562.533.655,00	36.556.893.665,00
	Gedung dan Bangunan	89.581.290.443,05	89.548.790.443,05
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	4.440.000,00	4.440.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(29.543.081.492,92)	(21.734.843.952,65)
	Jumlah Aset Tetap	96.605.182.605,13	104.375.280.155,40
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	819.692.900,00	819.692.900,00
	Akumulasi Amortisasi	(819.692.900,00)	(811.567.900,00)
	Aset Lain-Lain	848.817.503,86	848.817.503,86
	Jumlah Aset Lainnya	848.817.503,86	856.942.503,86
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	97.843.434.159,71	105.634.176.073,92

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	49.255.785,00	59.384.925,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	49.255.785,00	59.384.925,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	49.255.785,00	59.384.925,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	97.794.178.374,71	105.574.791.148,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	97.843.434.159,71	105.634.176.073,92

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.672.452,440	Rp 2.909.579,287	Rp (237.126.847)	-8,15
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 1.323.359	Rp 1.847.498	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.673.775.799	Rp 2.911.426.785	Rp (237.650.986)	-8,16
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.673.775.799	Rp 2.911.426.785	Rp (237.650.986)	-8,16
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.035.268,275	Rp 6.021.011,377,00	Rp 14.256.898,00	0,24
	Beban Persediaan	Rp 1.478.229,521	Rp 1.477.844,065,00	Rp 385.456,00	0,03
	Beban Jasa	Rp 6.809.541,702	Rp 6.800.999,847,29	Rp 8.541.855,04	0,13
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.302.162,642	Rp 691.211,980,00	Rp 610.950.662,00	88,39
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 229.416,075	Rp 388.834,755,00	Rp (159.418.680,00)	-41,00
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 8.059.337,540	Rp 8.661.788,024,74	Rp (602.450.484,46)	-6,96
	Beban Amortisasi	Rp 8.125,000	Rp 121.617,225,00	Rp (113.492.225,00)	-93,32
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 279.494,975,50	Rp (279.494,975,50)	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 23.922.080.755,61	Rp 24.442.802.249,53	Rp (520.721.493,92)	-2,13
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (21.248.304.956,61)	Rp (21.531.375.464,53)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (45.909,200,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (45.909,200,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (21.248.304.956,61)	Rp (21.577.284.664,53)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (21.248.304.956,61)	Rp (21.577.284.664,53)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	105.574.791.148,92	113.928.491.788,43
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(21.248.304.956,61)	(21.577.284.664,53)
3	RK PPKD/RK SKPD	13.204.643.332,00	13.177.674.825,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(251.100.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	263.048.850,39	-
	-Akumulasi Penyusutan	251.100.000,01	45.909.200,02
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	97.794.178.374,71	105.574.791.148,92

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.769.312.868,00	4.278.783.974,00	89,71	4.801.714.677,00
	Belanja Barang	13.017.338.450,00	12.049.205.533,00	92,56	12.369.570.234,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	11.550.000.000,00	11.469.280.100,00	99,30	5.650.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	29.336.651.318,00	27.797.269.607,00	94,75	22.821.284.911,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	0,00	0,00	-	257.204.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	219.321.800,00	204.662.000,00	93,32	45.740.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	3.847.560.000,00	3.686.611.050,00	95,82	3.226.001.637,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.128.000,00	10.050.000,00	99,23	258.803.035,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	4.077.009.800,00	3.901.323.050,00	95,69	3.787.748.672,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	33.413.661.118,00	31.698.592.657,00	94,87	26.609.033.583,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	33.413.661.118,00	31.698.592.657,00	94,87	26.609.033.583,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(33.413.661.118,00)	(31.698.592.657,00)	94,87	(26.609.033.583,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(33.413.661.118,00)	(31.698.592.657,00)	94,87	(26.609.033.583,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	236.095.472,91	153.688.550,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	236.095.472,91	153.688.550,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	35.223.186.450,00	35.223.186.450,00
	Peralatan dan Mesin	2.410.824.526,00	2.459.942.526,00
	Gedung dan Bangunan	26.340.312.219,00	22.960.173.744,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	268.853.035,00	258.803.035,00
	Aset Tetap Lainnya	245.025.000,00	245.025.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	194.473.625,00	79.619.856,00
	Akumulasi Penyusutan	(4.872.741.957,46)	(4.163.540.727,00)
	Jumlah Aset Tetap	59.809.932.897,54	57.063.209.884,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	137.150.000,00	137.150.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(132.150.000,00)	(106.525.000,00)
	Aset Lain-Lain	39.572.500,00	39.572.500,00
	Jumlah Aset Lainnya	44.572.500,00	70.197.500,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	60.090.600.870,45	57.287.095.934,00

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	3.568.370,00	129.403.862,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.568.370,00	129.403.862,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.568.370,00	129.403.862,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	60.087.032.500,45	57.157.692.072,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	60.090.600.870,45	57.287.095.934,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -			
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -			
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -			
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -			
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -			
	Dana Alokasi Umum	Rp -			
	Dana Alokasi Khusus	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -			
	Dana Penyesuaian	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -			
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -			
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -			
	Pendapatan Lainnya	Rp -			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.278.783.974	Rp 4.801.714.677,00	Rp (522.930.703,00)	-10,89
	Beban Persediaan	Rp 2.622.835.418	Rp 2.488.161.929,00	Rp 134.673.489,00	5,41
	Beban Jasa	Rp 8.565.415.292	Rp 8.118.686.027,33	Rp 446.729.264,76	5,50
	Beban Pemeliharaan	Rp 155.387.500	Rp 922.209.199,00	Rp (766.821.699,00)	-83,15
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 623.123.858	Rp 845.950.779,00	Rp (222.826.921,00)	-26,34
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 11.469.280.100	Rp 5.650.000.000,00	Rp 5.819.280.100,00	103,00
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 949.181.230	Rp 861.559.227,62	Rp 87.622.002,84	10,17
	Beban Amortisasi	Rp 25.625.000	Rp 25.625.000,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 28.689.632.372,55	Rp 23.713.906.838,95	Rp 4.975.725.533,60	20,98
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (28.689.632.372,55)	Rp (23.713.906.838,95)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (28.689.632.372,55)	Rp (23.713.906.838,95)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (28.689.632.372,55)	Rp (23.713.906.838,95)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	57.157.692.072,00	54.103.975.247,94
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(28.689.632.372,55)	(23.713.906.838,95)
3	RK PPKD/RK SKPD	31.698.592.657,00	26.609.033.583,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	125.798.950,00	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(445.398.806,00)	247.797.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	239.980.000,00	(89.206.919,99)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	60.087.032.500,45	57.157.692.072,00

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.600.907.953,00	4.175.577.274,00	90,76	4.372.132.945,00
	Belanja Barang	3.088.364.920,00	2.810.137.388,00	90,99	2.343.348.255,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	7.689.272.873,00	6.985.714.662,00	90,85	6.715.481.200,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	7.721.400.000,00	1.453.831.050,00	18,83	
	Belanja Peralatan dan Mesin	209.277.000,00	187.757.753,00	89,72	220.750.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan			-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	320.750.000,00	309.460.300,00	96,48	236.707.300,00
	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	8.251.427.000,00	1.951.049.103,00	23,64	457.457.300,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	15.940.699.873,00	8.936.763.765,00	56,06	7.172.938.500,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	15.940.699.873,00	8.936.763.765,00	56,06	7.172.938.500,00
	SURPLUS / DEFISIT	(15.940.699.873,00)	(8.936.763.765,00)	56,06	(7.172.938.500,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(15.940.699.873,00)	(8.936.763.765,00)	56,06	(7.172.938.500,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	106.011.933,33	84.260.189,17
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	45.199.200,00	59.399.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	151.211.133,33	143.659.189,17
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	1.551.831.050,00	98.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.556.676.582,00	2.543.584.729,00
	Gedung dan Bangunan	-	1.533.652.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	1.959.597.206,00	1.793.974.006,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.180.034.029,65)	(2.539.948.845,67)
	Jumlah Aset Tetap	3.888.070.808,35	3.429.261.889,33
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	143.837.100,00	-
	Akumulasi Amortisasi	(35.959.275,00)	-
	Aset Lain-Lain	423.046.419,00	423.046.419,00
	Jumlah Aset Lainnya	530.924.244,00	423.046.419,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	4.570.206.185,68	3.995.967.497,50

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	4.570.206.185,68	3.995.967.497,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.570.206.185,68	3.995.967.497,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.175.577.274	Rp 4.372.132.945,00	Rp (196.555.671,00)	-4,50
	Beban Persediaan	Rp 678.273.558	Rp 649.822.085,00	Rp 28.451.473,00	4,38
	Beban Jasa	Rp 1.943.483.916	Rp 1.292.421.514,16	Rp 651.062.401,68	50,38
	Beban Pemeliharaan	Rp 93.540.000	Rp 51.906.500,00	Rp 41.633.500,00	80,21
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 88.053.870	Rp 259.667.120,00	Rp (171.613.250,00)	-66,09
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 201.757.664	Rp 209.625.358,33	Rp (7.867.694,35)	-3,75
	Beban Amortisasi	Rp 35.959.275	Rp -	Rp 35.959.275,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 7.216.645.556,82	Rp 6.835.575.522,49	Rp 381.070.034,33	5,57
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (7.216.645.556,82)	Rp (6.835.575.522,49)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (1.533.652.000)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (1.533.652.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (8.750.297.556,82)	Rp (6.835.575.522,49)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (8.750.297.556,82)	Rp (6.835.575.522,49)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	3.995.967.497,50	3.708.997.377,14
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.750.297.556,82)	(6.835.575.522,49)
3	RK PPKD/RK SKPD	8.936.763.765,00	7.172.938.500,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(173.900.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	561.672.480,00	(50.392.857,15)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	4.570.206.185,68	3.995.967.497,50

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.914.825.285,00	1.931.712.807,00	100,88	1.806.754.700,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	3.725.440,00	-	3.558.549,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.914.825.285,00	1.935.438.247,00	101,08	1.810.313.249,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.914.825.285,00	1.935.438.247,00	101,08	1.810.313.249,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.092.542.206,84	9.622.645.860,00	95,34	8.916.677.714,00
	Belanja Barang	14.620.814.775,16	13.805.162.520,00	94,42	15.654.841.810,00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	24.713.356.982,00	23.427.808.380,00	94,80	24.571.519.524,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	228.140.000,00	203.358.850,00	89,14	640.557.500,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	995.712.982,00	949.230.771,00	95,33	506.832.577,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	50.000.000,00	48.251.700,00	96,50	
	Jumlah Belanja Modal	1.273.852.982,00	1.200.841.321,00	94,27	1.147.390.077,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	25.987.209.964,00	24.628.649.701,00	94,77	25.718.909.601,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	25.987.209.964,00	24.628.649.701,00	94,77	25.718.909.601,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(24.072.384.679,00)	(22.693.211.454,00)	94,27	(23.908.596.352,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(24.072.384.679,00)	(22.693.211.454,00)	94,27	(23.908.596.352,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	61.862.175,00	83.167.875,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(46.700.250,00)	(43.365.993,38)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	37.401.933,00	26.841.650,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	183.509.525,00	183.509.525,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(183.509.525,00)	(183.509.525,00)
	Persediaan	20.479.500,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	73.043.358,00	66.643.531,63
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	9.272.750.000,00	9.272.750.000,00
	Peralatan dan Mesin	15.429.442.392,81	15.794.507.714,98
	Gedung dan Bangunan	167.518.643.566,00	163.129.261.878,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.574.060.725,00	1.574.060.725,00
	Aset Tetap Lainnya	364.050.825,00	364.050.825,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	17.853.418,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(50.933.698.992,00)	(47.893.601.174,24)
	Jumlah Aset Tetap	143.243.101.934,81	142.241.029.968,74
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	731.428.820,00	731.428.820,00
	Akumulasi Amortisasi	(707.807.465,00)	(649.556.885,00)
	Aset Lain-Lain	447.507.027,00	463.740.027,00
	Jumlah Aset Lainnya	471.128.382,00	545.611.962,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	143.787.273.674,81	142.853.285.462,37

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	62.543.761,00	60.491.960,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	62.543.761,00	60.491.960,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	62.543.761,00	60.491.960,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	143.724.729.913,81	142.792.793.502,37
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	143.787.273.674,81	142.853.285.462,37

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.910.407.107,00	Rp 1.820.949.050,00	Rp 89.458.057,00	4,91
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 3.725.440,00	Rp 3.558.549,00	Rp 166.891,00	4,49
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.914.132.547	Rp 1.824.507.599	Rp 89.624.948	4,91
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.914.132.547	Rp 1.824.507.599	Rp 89.624.948	4,91
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.622.645.860,00	Rp 8.916.677.714,00	Rp 705.968.146,00	7,92
	Beban Persediaan	Rp 2.199.650.030,00	Rp 2.098.527.615,00	Rp 101.122.415,00	4,82
	Beban Jasa	Rp 9.869.076.646,00	Rp 11.239.207.336,33	Rp (1.370.130.690,33)	-12,19
	Beban Pemeliharaan	Rp 832.645.815,00	Rp 915.620.455,00	Rp (82.974.640,00)	-9,06
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 229.055.000,00	Rp 402.814.335,00	Rp (173.759.335,00)	-43,14
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 3.692.899.683,07	Rp 3.675.893.869,60	Rp 17.005.813,47	0,46
	Beban Amortisasi	Rp 58.250.580,00	Rp 94.290.580,00	Rp (36.040.000,00)	-38,22
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 3.334.256,63	Rp -	Rp 3.334.256,63	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 26.507.557.870,70	Rp 27.343.031.904,93	Rp (835.474.034,23)	-3,06
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (24.593.425.323,70)	Rp (25.518.524.305,93)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (486.001.684,17)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (486.001.684,17)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (25.079.427.007,87)	Rp (25.518.524.305,93)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (25.079.427.007,87)	Rp (25.518.524.305,93)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	142.792.793.502,37	144.412.048.511,52
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(25.079.427.007,87)	(25.518.524.305,93)
3	RK PPKD/RK SKPD	22.693.211.454,00	23.908.596.152,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	20.479.500,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	2.644.870.600,00	(49.248.200,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	3.094.931,63
	-Akumulasi Penyusutan	652.801.865,31	36.826.413,15
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	143.724.729.913,81	142.792.793.502,37

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	32.395.070.209,00	30.131.453.193,00	93,01	30.099.704.787,00
	Belanja Barang	43.356.790.355,00	38.471.828.318,00	88,73	35.315.226.563,00
	Belanja Bunga			-	
	Belanja Subsidi			-	
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah	280.080.000,00	280.080.000,00	100,00	200.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial			-	
	Jumlah Belanja Operasi	76.031.940.564,00	68.883.361.511,00	90,60	65.614.931.350,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah			-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.978.162.000,00	2.779.167.691,00	69,86	293.327.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.086.502.500,00	773.992.244,00	71,24	1.610.924.609,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya			-	
	Jumlah Belanja Modal	5.064.664.500,00	3.553.159.935,00	70,16	1.904.251.609,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	81.096.605.064,00	72.436.521.446,00	89,32	67.519.182.959,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	81.096.605.064,00	72.436.521.446,00	89,32	67.519.182.959,00
	SURPLUS / DEFISIT	(81.096.605.064,00)	(72.436.521.446,00)	89,32	(67.519.182.959,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(81.096.605.064,00)	(72.436.521.446,00)	89,32	(67.519.182.959,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	372.597.015,83	452.080.251,17
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	206.228.890,00	362.252.400,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	578.825.905,83	814.332.651,17
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	196.319.715.740,00	12.500.415.740,00
	Peralatan dan Mesin	32.927.778.465,78	29.663.648.041,78
	Gedung dan Bangunan	57.518.480.573,22	57.518.480.573,22
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.060.800,00	175.060.800,00
	Aset Tetap Lainnya	500.749.922,00	500.749.922,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(50.803.208.531,88)	(49.032.794.988,08)
	Jumlah Aset Tetap	236.638.576.969,12	51.325.560.088,92
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	265.576.000,00	265.576.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(240.920.125,00)	(216.264.250,00)
	Aset Lain-Lain	2.072.421.018,00	2.079.257.518,00
	Jumlah Aset Lainnya	2.097.076.893,00	2.128.569.268,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	239.314.479.767,95	54.268.462.008,09

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	124.748.651,00	111.237.780,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	124.748.651,00	111.237.780,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	124.748.651,00	111.237.780,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	239.189.731.116,95	54.157.224.228,09
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	239.314.479.767,95	54.268.462.008,09

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 680.000.000,00	Rp 9.994.080.000,00		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 680.000.000,00	Rp 9.994.080.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 680.000.000,00	Rp 9.994.080.000,00		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 30.131.453.193,00	Rp 30.099.704.787,00	Rp 31.748.406,00	0,11
	Beban Persediaan	Rp 14.184.117.061,00	Rp 11.627.869.835,00	Rp 2.556.247.226,00	21,98
	Beban Jasa	Rp 20.385.765.081,34	Rp 17.835.075.730,08	Rp 2.550.689.351,26	14,30
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.246.903.973,00	Rp 1.139.929.824,00	Rp 106.974.149,00	9,38
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 2.968.061.744,00	Rp 4.749.449.440,00	Rp (1.781.387.696,00)	-37,51
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 280.080.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 80.080.000,00	40,04
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 2.821.675.829,80	Rp 2.635.044.124,72	Rp 186.631.705,08	7,08
	Beban Amortisasi	Rp 24.655.875,00	Rp 24.655.875,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 72.042.712.757,14	Rp 68.311.729.615,80	Rp 3.730.983.141,34	5,46
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (71.362.712.757,14)	Rp (58.317.649.615,80)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (574.359.300,00)	Rp (10.153.691.323,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (574.359.300,00)	Rp (10.153.691.323,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (71.937.072.057,14)	Rp (68.471.340.938,80)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (71.937.072.057,14)	Rp (68.471.340.938,80)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	54.157.224.228,09	50.403.887.181,15
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(71.937.072.057,14)	(68.471.340.938,80)
3	RK PPKD/RK SKPD	72.436.521.446,00	67.519.182.959,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(337.504.786,00)	(827.306.615,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	(98.318.600,00)
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.051.262.286,00	5.631.120.241,74
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	183.819.300.000,00	-
14	EKUITAS AKHIR	239.189.731.116,95	54.157.224.228,09

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	51.747.472.675,00	47.764.466.960,00	92,30	47.335.039.372,00
	Belanja Barang	52.651.185.756,00	46.390.678.972,00	88,11	51.579.677.175,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	104.398.658.431,00	94.155.145.932,00	90,19	98.914.716.547,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.964.530.348,00	3.741.349.277,00	94,37	8.250.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	3.287.145.000,00	2.526.523.918,00	76,86	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	7.251.675.348,00	6.267.873.195,00	86,43	8.250.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	111.650.333.779,00	100.423.019.127,00	89,94	98.922.966.547,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	111.650.333.779,00	100.423.019.127,00	89,94	98.922.966.547,00
	SURPLUS / DEFISIT	(111.650.333.779,00)	(100.423.019.127,00)	89,94	(98.922.966.547,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(111.650.333.779,00)	(100.423.019.127,00)	89,94	(98.922.966.547,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	82.883.333,33	41.702.433,75
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	53.960.975,24	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	136.844.308,57	41.702.433,75
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.756.775.000,00	2.756.775.000,00
	Peralatan dan Mesin	21.241.481.938,00	18.229.545.661,00
	Gedung dan Bangunan	14.003.972.501,00	13.013.110.134,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	2.261.194.720,00	2.261.194.720,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.535.661.551,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(22.480.554.371,14)	(21.708.525.965,21)
	Jumlah Aset Tetap	19.318.531.338,86	14.552.099.549,79
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	833.311.000,00	833.311.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(810.788.500,00)	(788.266.000,00)
	Aset Lain-Lain	483.941.200,00	483.941.200,00
	Jumlah Aset Lainnya	506.463.700,00	528.986.200,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	19.961.839.347,43	15.122.788.183,54

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	25.003.077,00	22.562.007,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	25.003.077,00	22.562.007,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.003.077,00	22.562.007,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	19.936.836.270,43	15.100.226.176,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.961.839.347,43	15.122.788.183,54

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DPRD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 47.764.466.960,00	Rp 47.335.039.372,00	Rp 429.427.588,00	0,91
	Beban Persediaan	Rp 9.925.931.012,76	Rp 8.001.613.100,00	Rp 1.924.317.912,76	24,05
	Beban Jasa	Rp 15.302.893.721,42	Rp 10.522.075.458,58	Rp 4.780.818.262,84	45,44
	Beban Pemeliharaan	Rp 158.098.518,00	Rp 713.042.283,00	Rp (554.943.765,00)	-77,83
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 20.911.054.915,00	Rp 32.344.071.152,00	Rp (11.433.016.237,00)	-35,35
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 1.501.441.405,93	Rp 800.122.976,54	Rp 701.318.429,39	87,65
	Beban Amortisasi	Rp 22.522.500,00	Rp 22.522.500,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 95.586.409.033,11	Rp 99.738.486.842,12	Rp (4.152.077.809,01)	-4,16
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (95.586.409.033,11)	Rp (99.738.486.842,12)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (21.783.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (21.783.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (95.608.192.033,11)	Rp (99.738.486.842,12)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (95.608.192.033,11)	Rp (99.738.486.842,12)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DPRD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	15.100.226.176,54	15.588.974.471,65
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(95.608.192.033,11)	(99.738.486.842,12)
3	RK PPKD/RK SKPD	100.423.019.127,00	98.922.966.547,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(707.630.000,00)	562.275.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	729.413.000,00	(235.502.999,99)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	19.936.836.270,43	15.100.226.176,54

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.674.933.333,00	10.576.444.576,00	99,08	10.636.013.351,00
	Belanja Barang	6.481.753.359,00	6.163.173.369,00	95,08	6.384.044.442,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	17.156.686.692,00	16.739.617.945,00	97,57	17.020.057.793,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	48.180.000,00	47.648.450,00	98,90	302.918.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	152.541.650,00	118.127.485,00	77,44	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	30.000.000,00	29.550.000,00	98,50	-
	Jumlah Belanja Modal	230.721.650,00	195.325.935,00	84,66	302.918.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	17.387.408.342,00	16.934.943.880,00	97,40	17.322.975.793,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.387.408.342,00	16.934.943.880,00	97,40	17.322.975.793,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(17.387.408.342,00)	(16.934.943.880,00)	97,40	(17.322.975.793,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(17.387.408.342,00)	(16.934.943.880,00)	97,40	(17.322.975.793,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	15.573.300,00	3.061.450,34
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	4.500.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	15.573.300,00	7.561.450,34
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.272.767.703,59	4.357.511.768,59
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(3.738.655.515,20)	(3.684.202.902,68)
	Jumlah Aset Tetap	543.912.188,39	683.108.865,91
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	309.644.646,90	280.094.646,90
	Akumulasi Amortisasi	(272.382.146,90)	(249.894.646,90)
	Aset Lain-Lain	260.999.740,91	260.999.740,91
	Jumlah Aset Lainnya	298.262.240,91	291.199.740,91
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	857.747.729,30	981.870.057,16

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	857.747.729,30	981.870.057,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	857.747.729,30	981.870.057,16

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	DID	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.576.444.576	Rp 10.636.013.351,00	Rp (59.568.775,00)	-0,56
	Beban Persediaan	Rp 2.105.654.840	Rp 2.180.692.100,00	Rp (75.037.260,00)	-3,44
	Beban Jasa	Rp 3.520.792.427	Rp 3.123.535.593,44	Rp 397.256.833,90	12,72
	Beban Pemeliharaan	Rp 130.544.022	Rp 144.691.283,00	Rp (14.147.261,00)	-9,78
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 398.170.230	Rp 929.738.823,00	Rp (531.568.593,00)	-57,17
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 283.732.613	Rp 292.124.813,02	Rp (8.392.200,50)	-2,87
	Beban Amortisasi	Rp 22.487.500	Rp 23.776.250,00	Rp (1.288.750,00)	-5,42
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 17.037.826.207,86	Rp 17.330.572.213,46	Rp (292.746.005,60)	-1,69
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (17.037.826.207,86)	Rp (17.330.572.213,46)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (17.037.826.207,86)	Rp (17.330.572.213,46)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (17.037.826.207,86)	Rp (17.330.572.213,46)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	981.870.057,16	1.007.766.477,62
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(17.037.826.207,86)	(17.330.572.213,46)
3	RK PPKD/RK SKPD	16.934.943.880,00	17.322.975.793,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(250.520.000,00)	(18.300.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	229.280.000,00	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	857.747.729,30	981.870.057,16

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	328.135.093.659,00	330.345.321.948,00	100,67	243.250.803.117,00
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.160.420,00	9.481.160.420,00	100,00	10.571.076.808,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26.691.656.600,00	8.121.419.334,00	30,43	10.232.501.953,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	364.307.910.679,00	347.947.901.702,00	95,51	264.054.381.878,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	69.209.701.900,00	63.861.538.300,00	92,27	61.573.212.000,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.966.305.000,00	31.966.305.000,00	100,00	42.714.540.000,00
	Dana Alokasi Umum			-	
	Dana Alokasi Khusus			-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	101.176.006.900,00	95.827.843.300,00	94,71	104.287.752.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.410.726.300,00	78.374.055.994,00	97,47	147.301.279.686,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Bantuan Keuangan Provinsi				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	80.410.726.300,00	78.374.055.994,00	97,47	147.301.279.686,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	181.586.733.200,00	174.201.899.294,00	95,93	251.589.031.686,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-			
	Dana Darurat				
	Dana BOS				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	545.894.643.879,00	522.149.800.996,00	95,65	515.643.413.564,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	13.872.954.736,00	13.542.728.847,00	97,62	11.424.646.668,00
	Belanja Barang	5.750.930.646,00	5.147.636.386,00	89,51	4.598.501.626,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	19.623.885.382,00	18.690.365.233,00	95,24	16.023.148.294,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah			-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	561.485.320,00	478.761.500,00	85,27	1.102.789.200,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	134.146.895,00	131.226.507,00	97,82	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya	180.000.000,00	178.594.560,00	99,22	255.650.760,00
	Jumlah Belanja Modal	875.632.215,00	788.582.567,00	90,06	1.358.439.960,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	20.499.517.597,00	19.478.947.800,00	95,02	17.381.588.254,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	20.499.517.597,00	19.478.947.800,00	95,02	17.381.588.254,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	525.395.126.282,00	502.670.853.196,00	95,67	498.261.825.310,00
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	525.395.126.282,00	502.670.853.196,00	95,67	498.261.825.310,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	155.174.496.858,00	147.009.168.358,00
	Penyisihan Piutang	(92.873.399.548,08)	(85.182.151.801,79)
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	60.102.000.000,00	22.759.049.000,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	727.599.116,00	5.985.683.110,00
	Belanja Dibayar Dimuka	28.974.934,75	13.635.445,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	170.919.168,80	193.105.807,80
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(170.919.168,80)	(193.105.807,80)
	Piutang Lainnya	26.480.000,00	26.480.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(26.480.000,00)	(26.480.000,00)
	Persediaan	26.880.000,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	123.186.551.360,68	90.585.384.112,04
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	7.378.927.777,66	6.897.292.777,66
	Gedung dan Bangunan	298.259.937,00	167.033.430,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.107.900.000,00	-
	Aset Tetap Lainnya	91.863.000,00	91.863.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(6.138.859.546,57)	(5.580.921.546,32)
	Jumlah Aset Tetap	2.738.091.168,09	1.575.267.661,34
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	2.277.874.532,00	2.129.273.282,00
	Akumulasi Amortisasi	(2.008.281.547,75)	(1.888.883.773,50)
	Aset Lain-Lain	498.198.079,93	4.509.417.079,93
	Jumlah Aset Lainnya	767.791.064,18	4.749.806.588,43
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	126.692.433.592,95	96.910.458.361,81

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.317.652.743,93	1.654.264.926,33
	Utang Belanja	1.291.276,00	1.289.549,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.318.944.019,93	1.655.554.475,33
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.318.944.019,93	1.655.554.475,33
III	EKUITAS		
	EKUITAS	125.373.489.573,01	95.254.903.886,48
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	126.692.433.592,95	96.910.458.361,81

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 338.510.650.448,00	Rp 252.095.533.110,00	Rp 86.415.117.338,00	34,28
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.481.160.420,00	Rp 10.571.076.808,00	Rp (1.089.916.388,00)	-10,31
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 8.435.844.877,39	Rp 10.220.421.365,10	Rp (1.784.576.487,71)	-17,46
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 356.427.655.745,39	Rp 272.887.031.283,10	Rp 83.540.624.462,29	30,61
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 89.454.840.300,00	Rp 62.531.095.000,00	Rp 26.923.745.300,00	43,06
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 39.704.735.000,00	Rp 41.892.765.000,00	Rp (2.188.030.000,00)	-5,22
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 129.159.575.300,00	Rp 104.423.860.000,00	Rp 24.735.715.300,00	23,69
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 73.115.972.000,00	Rp 147.671.320.248,00	Rp (74.555.348.248,00)	-50,49
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 73.115.972.000,00	Rp 147.671.320.248,00	Rp (74.555.348.248,00)	-50,49
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 202.275.547.300,00	Rp 252.095.180.248,00	Rp (49.819.632.948,00)	-19,76
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 370.350.000,00	Rp (370.350.000,00)	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 370.350.000,00	Rp (370.350.000,00)	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 558.703.203.045,40	Rp 525.352.561.531,10	Rp 33.350.641.514,29	6,35
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 13.542.728.847,00	Rp 11.424.646.668,00	Rp 2.118.082.179,00	18,54
	Beban Persediaan	Rp 1.125.370.364,00	Rp 918.625.428,00	Rp 206.744.936,00	22,51
	Beban Jasa	Rp 3.464.897.242,08	Rp 3.041.865.313,34	Rp 423.031.928,74	13,91
	Beban Pemeliharaan	Rp 357.487.500,00	Rp 180.477.250,00	Rp 177.010.250,00	98,08
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 187.409.028,00	Rp 458.212.786,00	Rp (270.803.758,00)	-59,10
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 510.748.500,26	Rp 401.411.175,26	Rp 109.337.325,00	27,24
	Beban Amortisasi	Rp 119.397.774,25	Rp 121.626.434,25	Rp (2.228.660,00)	-1,83
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 7.706.242.563,98	Rp 13.797.301.421,16	Rp (6.091.058.857,17)	-44,15
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 27.014.281.819,57	Rp 30.344.166.476,01	Rp (3.329.884.656,43)	-10,97
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 531.688.921.225,82	Rp 495.008.395.055,10		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (24.210.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (24.210.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 531.688.921.225,82	Rp 494.984.185.055,10		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 531.688.921.225,82	Rp 494.984.185.055,10		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	95.254.903.886,48	98.536.213.219,75
2	SURPLUS/DEFISIT LO	531.688.921.225,82	494.984.185.055,10
3	RK PPKD/RK SKPD	(502.671.100.996,00)	(498.261.825.310,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	1.110.773.500,00	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	37.181.456,70	(27.879.078,37)
	-Akumulasi Penyusutan	(47.189.499,99)	24.210.000,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	125.373.489.573,01	95.254.903.886,48

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				13.074,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-		13.074,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum	602.154.996.358,00	593.119.320.956,00	98,50	582.607.386.486,00
	Dana Alokasi Khusus	224.333.797.000,00	212.616.341.828,00	94,78	172.165.830.680,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	826.488.793.358,00	805.735.662.784,00	97,49	754.773.217.166,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	15.105.852.000,00	15.105.852.000,00	100,00	38.445.593.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Bantuan Keuangan Provinsi	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14	22.545.807.714,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	8.738.760.000,00	8.663.760.000,00	99,14	22.545.807.714,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	850.333.405.358,00	829.505.274.784,00	97,55	815.764.617.880,00
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana BOS				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	850.333.405.358,00	829.505.274.784,00	97,55	815.764.630.954,00
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.642.185.592,94	7.207.461.573,00	74,75	7.828.472.338,00
	Belanja Barang	6.799.371.050,00	6.130.333.772,00	90,16	5.741.620.662,00
	Belanja Bunga	99.249.400,00	46.224.179,00	46,57	108.364.375,00
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	16.540.806.042,94	13.384.019.524,00	80,92	13.678.457.375,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	721.602.000,00	675.300.700,00	93,58	135.829.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan			-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	721.602.000,00	675.300.700,00	93,58	135.829.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78	310.089.709,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	10.644.452.302,00	5.086.375.920,00	47,78	310.089.709,00
	JUMLAH BELANJA	27.906.860.344,94	19.145.696.144,00	68,61	14.124.376.084,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	27.906.860.344,94	19.145.696.144,00	68,61	14.124.376.084,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	822.426.545.013,06	810.359.578.640,00	98,53	801.640.254.870,00
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	142.170.434.092,94	154.483.193.918,00	108,66	117.095.924.389,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.000.000.000,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	142.170.434.092,94	154.483.193.918,00	108,66	147.095.924.389,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan			-	
	Pembentukan Dana Cadangan			-	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga				
	Jumlah Pengeluaran	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	PEMBIAYAAN NETO	139.740.625.092,94	153.627.685.698,00	109,94	146.240.416.169,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	962.167.170.106,00	963.987.264.338,00	100,19	947.880.671.039,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	523.592.179.325,00	440.520.158.421,00
	Kas Dana BOK	14.768.698.199,00	10.164.470.544,00
	Kas Lainnya	77.059.822.452,00	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	228.586.819,17	41.202.067,09
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	8.315.000,00	10.025.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	615.657.601.795,17	450.735.856.032,09
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	59.766.043,00	56.487.221,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	59.766.043,00	56.487.221,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.777.623.090,00	70.302.688.408,00
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	35.777.623.090,00	70.302.688.408,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	35.837.389.133,00	70.359.175.629,00
3	ASET TETAP		
	Tanah	20.054.000.000,00	-
	Peralatan dan Mesin	15.531.385.076,00	10.167.759.004,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	226.000.000,00	226.000.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(14.647.842.932,63)	(9.621.947.207,54)
	Jumlah Aset Tetap	21.163.542.143,37	771.811.796,46
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	657.107.500,00	657.107.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(622.807.500,00)	(576.977.375,00)
	Aset Lain-Lain	395.136.989,00	395.136.989,00
	Jumlah Aset Lainnya	429.436.989,00	475.267.114,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	673.087.970.060,54	552.342.110.571,55

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	30.646.799,67
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	44.236,00	32.563,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.321.174.798,00	1.319.924.798,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.321.219.034,00	2.206.112.380,67
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	(0,00)
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	(0,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.321.219.034,00	2.206.112.380,67
III	EKUITAS		
	EKUITAS	671.766.751.026,54	520.135.998.190,88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	673.087.970.060,54	522.342.110.571,55

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp 13.074	Rp (13.074)	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp 13.074	Rp (13.074)	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp 593.119.320.956	Rp 582.607.386.486	Rp 10.511.934.470	1,80
	Dana Alokasi Khusus	Rp 212.616.341.828	Rp 172.165.830.680	Rp 40.450.511.148	23,50
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 805.735.662.784	Rp 754.773.217.166	Rp 50.962.445.618	6,75
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp 15.105.852.000	Rp 38.445.593.000	Rp (23.339.741.000)	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp 15.105.852.000	Rp 38.445.593.000	Rp (23.339.741.000)	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp 8.663.760.000	Rp 22.545.807.714	Rp (13.882.047.714)	-61,57
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 8.663.760.000	Rp 22.545.807.714	Rp (13.882.047.714)	-61,57
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 829.505.274.784	Rp 815.764.617.880	Rp 13.740.656.904	1,68
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 11.735.000.000	Rp 15.542.323	Rp 11.719.457.677	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 11.735.000.000	Rp 15.542.323	Rp 11.719.457.677	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 841.240.274.784	Rp 815.780.173.277	Rp 25.460.101.507	3,12
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.207.461.573	Rp 7.828.472.338,00	Rp (621.010.765,00)	-7,93
	Beban Persediaan	Rp 1.400.922.303	Rp 1.841.633.825,00	Rp (440.711.522,00)	-23,93
	Beban Jasa	Rp 4.051.413.298	Rp 2.716.258.883,91	Rp 1.335.154.414,01	49,15
	Beban Pemeliharaan	Rp 159.374.100	Rp 153.165.050,00	Rp 6.209.050,00	4,05
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 332.960.992	Rp 1.174.433.393,00	Rp (841.472.401,00)	-71,65
	Beban Bunga	Rp 15.577.379	Rp 77.378.936,66	Rp (61.801.557,33)	-79,87
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 310.904.103	Rp 243.047.388,09	Rp 67.856.715,00	27,92
	Beban Amortisasi	Rp 45.830.125	Rp 45.830.125,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 13.524.443.873,34	Rp 14.080.219.939,65	Rp (555.776.066,32)	-3,95
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 827.715.830.910,66	Rp 801.699.953.337,35		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (434.565.000)	Rp (291.450.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (434.565.000,00)	Rp (291.450.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 827.281.265.910,66	Rp 801.408.503.337,35		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp 418.718.650	Rp 137.050.642,00		
	POS LUAR BIASA	Rp (418.718.650,00)	Rp (137.050.642,00)		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 826.862.547.260,66	Rp 801.271.452.695,35		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	520.135.998.190,88	464.164.227.209,83
2	SURPLUS/DEFISIT LO	826.862.547.260,66	801.271.452.695,35
3	RK PPKD/RK SKPD	(644.767.999.409,00)	(715.486.152.034,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	(148.395.000,00)	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	(1,30)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(204.813.500,00)	(46.983.408,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	9.126.191.602,00	97.079.550,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(4.714.991.622,00)	128.401.800,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	7.383.750,00
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	(34.521.786.496,00)	588.629,00
14	EKUITAS AKHIR	671.766.751.026,54	520.135.998.190,88

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.507.284.522,00	6.148.994.401,00	94,49	6.213.706.980,00
	Belanja Barang	6.586.185.415,00	5.967.596.785,00	90,61	5.117.360.463,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.093.469.937,00	12.116.591.186,00	92,54	11.331.067.443,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	130.590.000,00	119.269.200,00	91,33	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	71.500.000,00
	Jumlah Belanja Modal	130.590.000,00	119.269.200,00	91,33	71.500.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.224.059.937,00	12.235.860.386,00	92,53	11.402.567.443,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.224.059.937,00	12.235.860.386,00	92,53	11.402.567.443,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(13.224.059.937,00)	(12.235.860.386,00)	92,53	(11.402.567.443,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(13.224.059.937,00)	(12.235.860.386,00)	92,53	(11.402.567.443,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	20.367.419,66	4.837.571,25
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	5.022.750,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	25.390.169,66	4.837.571,25
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.184.470.804,00	2.282.681.604,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.052.125.144,00)	(2.193.521.954,00)
	Jumlah Aset Tetap	132.345.660,00	89.159.650,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	449.760.500,00	449.760.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(414.010.500,00)	(396.135.500,00)
	Aset Lain-Lain	95.187.000,00	95.187.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	130.937.000,00	148.812.000,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	288.672.829,66	242.809.221,25

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	39.186,00	48.148,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39.186,00	48.148,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.186,00	48.148,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	288.633.643,66	242.761.073,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	288.672.829,66	242.809.221,25

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.148.994.401	Rp 6.213.706.980,00	Rp (64.712.579,00)	-1,04
	Beban Persediaan	Rp 1.664.545.254	Rp 1.291.985.600,00	Rp 372.559.654,00	28,84
	Beban Jasa	Rp 3.770.970.147	Rp 2.918.396.611,75	Rp 852.573.534,84	29,21
	Beban Pemeliharaan	Rp 103.240.000	Rp 119.291.000,00	Rp (16.051.000,00)	-13,46
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 408.279.824	Rp 786.582.142,00	Rp (378.302.318,00)	-48,09
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 76.083.190	Rp 75.980.600,00	Rp 102.590,00	0,14
	Beban Amortisasi	Rp 17.875.000	Rp 17.875.000,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.189.987.815,59	Rp 11.423.817.933,75	Rp 766.169.881,84	6,71
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.189.987.815,59)	Rp (11.423.817.933,75)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.189.987.815,59)	Rp (11.423.817.933,75)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.189.987.815,59)	Rp (11.423.817.933,75)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	242.761.073,25	264.031.564,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.189.987.815,59)	(11.423.817.933,75)
3	RK PPKD/RK SKPD	12.235.860.386,00	11.402.567.443,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(217.480.000,00)	(113.800.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	217.480.000,00	113.780.000,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	288.633.643,66	242.761.073,25

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
INSPEKTORAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.551.139.801,00	10.126.390.664,00	95,97	9.428.917.420,00
	Belanja Barang	5.081.323.400,00	3.880.608.428,00	76,37	4.775.595.669,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	15.632.463.201,00	14.006.999.092,00	89,60	14.204.513.089,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	333.119.000,00	314.026.980,00	94,27	185.070.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	128.760.000,00	128.116.058,00	99,50	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	461.879.000,00	442.143.038,00	95,73	185.070.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	16.094.342.201,00	14.449.142.130,00	89,78	14.389.583.089,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	16.094.342.201,00	14.449.142.130,00	89,78	14.389.583.089,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(16.094.342.201,00)	(14.449.142.130,00)	89,78	(14.389.583.089,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(16.094.342.201,00)	(14.449.142.130,00)	89,78	(14.389.583.089,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA INSPEKTORAT KOTA
PER 31 DESEMBER 2025

(Uraian Kupon)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	27.192.120,00	14.996.863,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	9.705.854,00	13.275.250,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	36.897.974,00	28.272.113,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.958.461.170,00	2.861.914.190,00
	Gedung dan Bangunan	4.790.946.174,00	4.602.724.916,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(3.117.901.756,10)	(2.994.480.496,77)
	Jumlah Aset Tetap	4.631.505.587,90	4.470.158.609,23
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	49.700.000,00	49.700.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(49.700.000,00)	(49.700.000,00)
	Aset Lain-Lain	47.942.000,00	47.942.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	47.942.000,00	47.942.000,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	4.716.345.561,90	4.546.372.722,56

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	3.795.112,00	2.891.514,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.795.112,00	2.891.514,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.795.112,00	2.891.514,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	4.712.550.449,90	4.543.481.208,56
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.716.345.561,90	4.546.372.722,56

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.126.390.664,00	Rp 9.428.917.420,00	Rp 697.473.244,00	7,40
	Beban Persediaan	Rp 543.143.328,00	Rp 480.649.631,00	Rp 62.493.697,00	13,00
	Beban Jasa	Rp 2.049.940.520,33	Rp 2.409.477.160,67	Rp (359.536.640,34)	-14,92
	Beban Pemeliharaan	Rp 79.494.862,00	Rp 84.486.488,00	Rp (4.991.626,00)	-5,91
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.140.202.255,00	Rp 1.728.242.028,00	Rp (588.039.773,00)	-34,03
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 340.901.259,34	Rp 294.028.249,67	Rp 46.873.009,67	15,94
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 14.280.072.888,67	Rp 14.425.800.977,34	Rp (145.728.088,67)	-1,01
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (14.280.072.888,67)	Rp (14.425.800.977,34)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (14.280.072.888,67)	Rp (14.425.800.977,34)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (14.280.072.888,67)	Rp (14.425.800.977,34)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT KOTA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	4.543.481.208,56	4.579.699.096,89
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(14.280.072.888,67)	(14.425.800.977,34)
3	RK PPKD/RK SKPD	14.449.142.130,00	14.389.583.089,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(217.480.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	217.480.000,01	0,01
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	4.712.550.449,90	4.543.481.208,56

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.552.754.337,00	10.314.746.171,00	97,74	10.068.749.315,00
	Belanja Barang	15.738.111.400,00	15.233.287.142,00	96,79	19.545.143.938,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	26.290.865.737,00	25.548.033.313,00	97,17	29.613.893.253,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	676.894.000,00	669.555.989,00	98,92	188.850.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	753.808.750,00	746.703.656,00	99,06	448.796.696,00
	Belanja Jalan, Iriqasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.430.702.750,00	1.416.259.645,00	98,99	637.646.696,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	27.721.568.487,00	26.964.292.958,00	97,27	30.251.539.949,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	27.721.568.487,00	26.964.292.958,00	97,27	30.251.539.949,00
	SURPLUS / DEFISIT	(27.721.568.487,00)	(26.964.292.958,00)	97,27	(30.251.539.949,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(27.721.568.487,00)	(26.964.292.958,00)	97,27	(30.251.539.949,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI UTARA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	24.224.850,00	17.131.278,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	24.224.850,00	17.131.278,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	10.479.245.000,00	10.479.245.000,00
	Peralatan dan Mesin	7.115.928.968,11	5.814.299.646,11
	Gedung dan Bangunan	7.734.617.852,00	6.987.914.196,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.558.364,00	49.558.364,00
	Aset Tetap Lainnya	7.792.489,00	7.792.489,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.047.162.552,69)	(8.008.419.732,35)
	Jumlah Aset Tetap	16.339.980.120,42	15.330.389.962,76
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	71.193.750,00	71.193.750,00
	Akumulasi Amortisasi	(71.193.750,00)	(71.193.750,00)
	Aset Lain-Lain	902.654.634,44	902.654.634,44
	Jumlah Aset Lainnya	902.654.634,44	902.654.634,44
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	17.266.859.604,86	16.250.175.875,53

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	6.408.735,00	6.133.107,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.408.735,00	6.133.107,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.408.735,00	6.133.107,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	17.260.450.869,86	16.244.042.768,53
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	17.266.859.604,86	16.250.175.875,53

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.314.746.171,00	Rp 10.068.749.315,00	Rp 245.996.856,00	2,44
	Beban Persediaan	Rp 2.936.735.839,00	Rp 4.756.708.366,00	Rp (1.819.972.527,00)	-38,26
	Beban Jasa	Rp 11.617.738.513,33	Rp 14.223.706.171,17	Rp (2.605.967.657,84)	-18,32
	Beban Pemeliharaan	Rp 416.807.740,00	Rp 435.271.542,00	Rp (18.463.802,00)	-4,24
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 255.187.106,00	Rp 126.127.000,00	Rp 129.060.106,00	102,33
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 406.669.487,34	Rp 461.106.037,51	Rp (54.436.550,17)	-11,81
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 25.947.884.856,67	Rp 30.071.668.431,68	Rp (4.123.783.575,01)	-13,71
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (25.947.884.856,67)	Rp (30.071.668.431,68)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (8.150.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (8.150.000,00)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (25.956.034.856,67)	Rp (30.071.668.431,68)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (25.956.034.856,67)	Rp (30.071.668.431,68)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	16.244.042.768,53	16.196.067.560,32
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(25.956.034.856,67)	(30.071.668.431,68)
3	RK PPKD/RK SKPD	26.964.292.958,00	30.251.539.949,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	640.223.333,00	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(632.073.333,00)	(131.896.309,11)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	17.260.450.869,86	16.244.042.768,53

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	13.689.880.743,00	13.392.265.992,00	97,83	13.443.852.566,00
	Belanja Barang	21.234.339.860,00	20.624.052.551,00	97,13	26.607.400.146,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	34.924.220.603,00	34.016.318.543,00	97,40	40.051.252.712,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	583.702.000,00	544.426.913,00	93,27	397.020.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	751.896.250,00	738.035.789,00	98,16	467.907.338,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.335.598.250,00	1.282.462.702,00	96,02	864.927.338,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	36.259.818.853,00	35.298.781.245,00	97,35	40.916.180.050,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	36.259.818.853,00	35.298.781.245,00	97,35	40.916.180.050,00
	SURPLUS / DEFISIT	(36.259.818.853,00)	(35.298.781.245,00)	97,35	(40.916.180.050,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(36.259.818.853,00)	(35.298.781.245,00)	97,35	(40.916.180.050,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI TENGAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	28.910.303,35	21.656.159,58
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	28.910.303,35	21.656.159,58
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	10.039.095.128,00	10.039.095.128,00
	Peralatan dan Mesin	11.255.346.075,28	9.985.583.929,28
	Gedung dan Bangunan	11.955.028.708,00	11.216.992.919,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.263.637,00	21.263.637,00
	Aset Tetap Lainnya	3.896.246,00	3.896.246,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(14.070.074.277,75)	(12.612.041.393,54)
	Jumlah Aset Tetap	19.204.555.516,53	18.654.790.465,74
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	173.664.500,00	173.664.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(173.664.500,00)	(173.664.500,00)
	Aset Lain-Lain	618.216.850,00	618.216.850,00
	Jumlah Aset Lainnya	618.216.850,00	618.216.850,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	19.851.682.669,88	19.294.663.475,32

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	14.553.480,00	13.028.926,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14.553.480,00	13.028.926,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.553.480,00	13.028.926,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	19.837.129.189,88	19.281.634.549,32
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.851.682.669,88	19.294.663.475,32

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 13.392.265.992,00	Rp 13.443.852.566,00	Rp (51.586.574,00)	-0,38
	Beban Persediaan	Rp 4.906.332.540,00	Rp 7.196.414.586,00	Rp (2.290.082.046,00)	-31,82
	Beban Jasa	Rp 14.775.429.043,23	Rp 18.608.129.045,09	Rp (3.832.700.001,86)	-20,60
	Beban Pemeliharaan	Rp 718.863.000,00	Rp 677.785.000,00	Rp 41.078.000,00	6,06
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 225.812.478,00	Rp 123.078.592,00	Rp 102.733.886,00	83,47
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 724.583.551,20	Rp 874.560.560,81	Rp (149.977.009,61)	-17,15
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 6.248.000,00	Rp (6.248.000,00)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 34.743.286.604,43	Rp 40.930.068.349,90	Rp (6.186.781.745,47)	-15,12
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (34.743.286.604,43)	Rp (40.930.068.349,90)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (19.317.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (19.317.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (34.743.286.604,43)	Rp (40.949.385.349,90)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (34.743.286.604,43)	Rp (40.949.385.349,90)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	19.281.634.549,32	19.266.264.953,65
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(34.743.286.604,43)	(40.949.385.349,90)
3	RK PPKD/RK SKPD	35.298.781.245,00	40.916.180.050,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	733.449.333,00	26.068.350,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(733.449.333,01)	22.506.545,57
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	19.837.129.189,88	19.281.634.549,32

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.310.027.672,00	12.032.389.009,00	97,74	12.237.507.202,00
	Belanja Barang	19.365.895.759,00	18.832.554.187,00	97,25	23.849.553.074,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	31.675.923.431,00	30.864.943.196,00	97,44	36.087.060.276,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	1.066.000.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	499.468.000,00	462.838.419,00	92,67	401.713.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	984.198.750,00	951.402.176,00	96,67	419.323.674,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.483.666.750,00	1.414.240.595,00	95,32	1.887.036.674,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	33.159.590.181,00	32.279.183.791,00	97,34	37.974.096.950,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-		-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	33.159.590.181,00	32.279.183.791,00	97,34	37.974.096.950,00
	SURPLUS / DEFISIT	(33.159.590.181,00)	(32.279.183.791,00)	97,34	(37.974.096.950,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(33.159.590.181,00)	(32.279.183.791,00)	97,34	(37.974.096.950,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	25.712.902,09	7.361.535,25
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	25.712.902,09	7.361.535,25
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	14.529.905.000,00	14.529.905.000,00
	Peralatan dan Mesin	9.589.369.411,94	8.485.673.458,94
	Gedung dan Bangunan	8.472.257.223,00	7.324.802.810,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	189.574.684,75	189.574.684,75
	Aset Tetap Lainnya	9.812.492,00	9.812.492,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(11.393.250.369,63)	(10.235.647.073,07)
	Jumlah Aset Tetap	21.397.668.442,06	20.304.121.372,62
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	100.595.000,00	100.595.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(100.595.000,00)	(100.595.000,00)
	Aset Lain-Lain	461.103.338,30	461.103.338,30
	Jumlah Aset Lainnya	461.103.338,30	461.103.338,30
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	21.884.484.682,45	20.772.586.246,17

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	7.143.080,00	5.489.917,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.143.080,00	5.489.917,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.143.080,00	5.489.917,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	21.877.341.602,45	20.767.096.329,17
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21.884.484.682,45	20.772.586.246,17

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 12.032.389.009,00	Rp 12.237.507.202,00	Rp (205.118.193,00)	-1,68
	Beban Persediaan	Rp 3.364.183.085,00	Rp 5.039.871.991,00	Rp (1.675.688.906,00)	-33,25
	Beban Jasa	Rp 14.326.291.655,16	Rp 18.138.105.980,08	Rp (3.811.814.324,92)	-21,02
	Beban Pemeliharaan	Rp 734.521.006,00	Rp 576.173.750,00	Rp 158.347.256,00	27,48
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 194.808.000,00	Rp 160.240.897,00	Rp 34.567.103,00	21,57
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 516.745.762,55	Rp 640.553.790,88	Rp (123.808.028,33)	-19,33
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 31.168.938.517,71	Rp 36.792.453.610,96	Rp (5.623.515.093,25)	-15,28
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (31.168.938.517,71)	Rp (36.792.453.610,96)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (14.620.800,00)	Rp (114.793.500,06)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (14.620.800,00)	Rp (114.793.500,06)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (31.183.559.317,71)	Rp (36.907.247.111,02)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (31.183.559.317,71)	Rp (36.907.247.111,02)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	20.767.096.329,17	19.627.647.238,63
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(31.183.559.317,71)	(36.907.247.111,02)
3	RK PPKD/RK SKPD	32.279.183.791,00	37.974.096.950,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	655.478.334,00	39.578.915,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(640.857.534,01)	33.020.336,56
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	21.877.341.602,45	20.767.096.329,17

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.474.530.038,00	5.192.838.344,00	94,85	5.479.029.423,00
	Belanja Barang	7.497.892.450,00	6.813.798.348,00	90,88	6.335.727.608,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	3.779.307.500,00	3.779.307.419,00	100,00	19.243.465.836,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	16.751.729.988,00	15.785.944.111,00	94,23	31.058.222.867,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	50.660.000,00	49.338.499,00	97,39	110.100.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	50.660.000,00	49.338.499,00	97,39	110.100.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	16.802.389.988,00	15.835.282.610,00	94,24	31.168.322.867,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	16.802.389.988,00	15.835.282.610,00	94,24	31.168.322.867,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(16.802.389.988,00)	(15.835.282.610,00)	94,24	(31.168.322.867,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SilPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(16.802.389.988,00)	(15.835.282.610,00)	94,24	(31.168.322.867,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	15.184.254.064,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	54.860.833,34	42.713.322,92
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	54.860.833,34	15.226.967.386,92
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	2.075.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.121.518.618,00	1.265.825.119,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.446.000,00	3.446.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(980.231.244,55)	(1.082.004.530,10)
	Jumlah Aset Tetap	144.733.373,45	2.262.766.588,90
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	47.492.500,00	47.492.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(47.492.500,00)	(47.492.500,00)
	Aset Lain-Lain	96.728.500,00	96.728.500,00
	Jumlah Aset Lainnya	96.728.500,00	96.728.500,00
6	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
	Jumlah Properti investasi	-	-
	JUMLAH ASET	296.322.706,79	17.586.462.475,82

No.	Uraian	2025	2024
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	38.686,00	38.686,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	38.686,00	38.686,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.686,00	38.686,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	296.284.020,79	17.586.423.789,82
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	296.322.706,79	17.586.462.475,82

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.192.838.344,00	Rp 5.479.029.423,00	Rp (286.191.079,00)	-5,22
	Beban Persediaan	Rp 2.326.860.124,00	Rp 1.856.829.336,00	Rp 470.030.788,00	25,31
	Beban Jasa	Rp 3.880.633.433,58	Rp 3.228.380.164,92	Rp 652.253.268,66	20,20
	Beban Pemeliharaan	Rp 94.496.000,00	Rp 278.981.560,00	Rp (184.485.560,00)	-66,13
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 499.661.280,00	Rp 991.959.596,00	Rp (492.298.316,00)	-49,63
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 3.779.307.419,00	Rp 19.243.465.836,00	Rp (15.464.158.417,00)	-80,36
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 91.871.714,45	Rp 85.196.089,70	Rp 6.675.624,75	7,84
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 11.873.125,00	Rp (11.873.125,00)	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 15.865.668.315,03	Rp 31.175.715.130,62	Rp (15.310.046.815,59)	-49,11
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (15.865.668.315,03)	Rp (31.175.715.130,62)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (2.095.245.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (2.095.245.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (17.960.913.315,03)	Rp (31.175.715.130,62)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (17.960.913.315,03)	Rp (31.175.715.130,62)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2024	17.586.423.789,82	2.409.561.989,44
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(17.960.913.315,03)	(31.175.715.130,62)
3	RK PPKD/RK SKPD	651.028.546,00	46.352.576.931,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(173.900.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	193.645.000,00	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	296.284.020,79	17.586.423.789,82

